

Positive Impact to Sustainability

Dampak Positif untuk Mengelola Keberlanjutan

2022

Sustainability Report
Laporan Keberlanjutan



PENJELASAN TEMA SR IFG 2022

THEME EXPLANATION FOR IFG SUSTAINABILITY REPORT 2022



DAMPAK POSITIF UNTUK MENGELOLA KEBERLANJUTAN

POSITIVE IMPACT TO MAINTAIN SUSTAINABILITY

Tahun 2022 merupakan tahun kedua bagi PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) atau Indonesia Financial Group (IFG) sebagai Holding BUMN Asuransi, Penjaminan dan Investasi, berkiprah. Dalam rentang waktu tersebut, IFG menghadapi banyak tantangan, baik secara internal maupun eksternal. Secara internal, IFG masih dalam proses melengkapi infrastruktur perusahaan. Beberapa aspek di antaranya adalah struktur organisasi dan sumber daya manusia, sistem teknologi informasi, serta perangkat pengelolaan anggota holding, seperti kebijakan dan prosedur. Di sisi lain, di saat IFG harus mengatasi tantangan internalnya sebagai holding, IFG juga harus menghadapi tantangan yang dihadapi oleh anggota holding yang perlu untuk diatasi di tahun 2022.

Kondisi faktual yang sangat menantang tersebut membuat IFG mengerahkan semua daya dan upaya agar tantangan internal dan eksternal mendapatkan solusi terbaik. Di antara upaya yang dilakukan adalah IFG secara aktif memberikan pedoman strategis, berbagai arahan, dan konsultasi bisnis kepada anggota holding. Selain berperan aktif dan memiliki program kerja yang bersifat implementatif di anggota holding, seperti pendampingan dan monitoring atas implementasi tersebut, IFG juga melanjutkan perbaikan fundamental dan memasuki tahap untuk menciptakan bisnis yang berkelanjutan serta meningkatkan daya saing dengan mengembangkan kapabilitas baru di luar penugasan dari Pemerintah.

Segenap upaya yang dilakukan IFG di sepanjang tahun 2022 membawa dampak positif dengan keberhasilan Perusahaan membukukan kinerja yang optimal. Pencapaian IFG dalam mengelola keberlanjutan menjadi dasar yang kukuh bagi IFG dan anggota holding untuk menjalankan bisnis yang berkesinambungan di bidang asuransi, penjaminan dan investasi.**

The year 2022 is the second year for PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) or Indonesia Financial Group (IFG) as the Holding SOE of Insurance, Guarantee and Investment. During this period, IFG faced many challenges, both internally and externally. Internally, IFG was still in the process of completing the company's infrastructure. Those aspects include organizational structure and human resources, information technology systems, as well as holding member management tools, such as policies and procedures. On the other hand, while IFG has to overcome its internal challenges as a holding, it also has to deal with challenges faced by its holding members that need to be addressed in 2022.

These very challenging factual conditions make IFG exert all its power and efforts so that internal and external challenges get the best solution. Among the efforts made is that IFG actively provides strategic guidance, various directions, and business consultations to holding members. In addition to playing an active role and having work programs that are implementable in the holding members, such as assistance and monitoring of the implementation, IFG also continues fundamental improvements and enters the stage of creating a sustainable business and increasing competitiveness by developing new capabilities outside the assignment from the Government.

All the efforts made by IFG throughout 2022 had a positive impact with the Company's success in obtaining optimal performance. IFG's achievement in managing sustainability is a solid foundation for IFG and its holding members to run a sustainable business in insurance, guarantee and investment.**

DAFTAR ISI

TABLLE OF CONTENTS

2	Penjelasan Tema SR IFG 2022 Theme Explanation for IFG Sustainability Report 2022
3	Dampak Positif untuk Mengelola Keberlanjutan Positive Impact to Maintain Sustainability
6	PENJELASAN STRATEGI KEBERLANJUTAN DESCRIPTION OF SUSTAINABILITY STRATEGIES
8	Kinerja Aspek Ekonomi Economic Aspect Performance
9	Kinerja Aspek Lingkungan Environmental Aspect Performance
9	Kinerja Aspek Sosial Social Aspect Performance
10	PENJELASAN DIREKSI EXPLANATION OF THE BOARD OF DIRECTORS
15	TENTANG LAPORAN KEBERLANJUTAN ABOUT SUSTAINABILITY REPORT
21	PROFIL PERUSAHAAN COMPANY PROFILE
22	Sekilas Indonesia Financial Group (IFG) Indonesia Financial Group (IFG) at a Glance
49	Penghargaan dan Sertifikasi Awards and Certifications
28	Jejak Langkah Milestones
30	Visi, Misi, dan Budaya Perusahaan Vision, Mission, and Corporate Culture
34	Bidang Usaha, Produk dan Jasa Line of Business, Products and Services
35	Produk dan Layanan Products and Services
37	Wilayah dan Jaringan Operasi Operation Area and Network
38	Struktur Organisasi Organizational Structure
40	Struktur Grup Group Structure
40	Alamat Kantor Pusat dan Entitas Anak Address of Head Office and Subsidiaries
42	Informasi tentang Karyawan Information about Employees
44	Skala Perusahaan Compan Scale
45	Hubungan Industrial Industrial Relations
46	Rantai Pasokan Supply Chain
48	Perubahan Signifikan pada Perusahaan Significant Changes in the Company
49	Keanggotaan Asosiasi Association Membership

50	TATA KELOLA KEBERLANJUTAN SUSTAINABILITY GOVERNANCE
52	Prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) Principles of Good Corporate Governance (GCG)
53	Struktur Tata Kelola Structure of Governance
54	Penanggung Jawab Penerapan Keuangan Berkelanjutan Responsible for Sustainable Finance Implementation
54	Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) General Meeting of Shareholders (GMS)
57	Dewan Komisaris Board of Commissioners
61	Direksi Board of Directors
65	Pengembangan Kompetensi Penerapan Keuangan Berkelanjutan Competency Development in Sustainable Finance Implementation
65	Penilaian Risiko Atas Penerapan Keuangan Berkelanjutan Risk Assessment of Sustainable Finance Implementation
70	Pengelolaan Hubungan dengan Pemangku Kepentingan Relationship Management with Stakeholders
73	Permasalahan dalam Penerapan Keuangan Berkelanjutan Issues in Implementing Sustainable Financ
74	KINERJA KEBERLANJUTAN SUSTAINABLE PERFORMANCE
75	KINERJA EKONOMI KEBERLANJUTAN SUSTAINABLE ECONOMIC PERFORMANCE
103	KINERJA LINGKUNGAN KEBERLANJUTAN SUSTAINABLE ENVIRONMENTAL PERFORMANCE
111	KINERJA SOSIAL KEBERLANJUTAN SUSTAINABLE SOCIAL PERFORMANCE
138	VERIFIKASI TERTULIS DARI PIHAK INDEPENDEN WRITTEN VERIFICATION FROM INDEPENDENT PARTIES
138	LEMBAR UMPAN BALIK FEEDBACK SHEET
139	TANGGAPAN TERHADAP UMPAN BALIK LAPORAN TAHUN SEBELUMNYA RESPONSE TO PREVIOUS YEAR REPORT FEEDBACK
140	VERIFIKASI TERTULIS DARI PIHAK INDEPENDEN WRITTEN VERIFICATION FROM INDEPENDENT PARTIES





PENJELASAN STRATEGI KEBERLANJUTAN [OJK A.1]

DESCRIPTION OF SUSTAINABILITY STRATEGIES [OJK A.1]

Indonesia Financial Group (IFG) sebagai Holding BUMN Asuransi dan Penjaminan memperoleh mandat untuk memperkuat transformasi industri asuransi yang mencakup aspek keuangan, manajemen risiko, investasi & manajemen produk, dan aspek aktuaris. Menanggapi mandat tersebut, Perusahaan beraspirasi untuk menjadi "benteng" (fortress) bagi pasar asuransi Indonesia. Dalam hal ini, IFG berencana mengembalikan kepercayaan konsumen Indonesia terhadap industri asuransi nasional. Hal ini bertujuan untuk mengasosiasikan brand IFG sebagai mitra asuransi yang dapat dipercaya.

Perusahaan meyakini hubungan antara 'brand' dan 'nama' yang kuat akan menarik konsumen untuk membeli produk tidak hanya dengan mengenal nama. Untuk mencapai aspirasi tersebut, IFG telah menetapkan empat aspirasi sebagai strategi keberlanjutan perusahaan yaitu:

1. Membentuk "fortress brand" (brand yang kokoh) guna membangun kepercayaan masyarakat;
2. Memimpin dan meningkatkan pertumbuhan pasar asuransi kerugian dan properti (property & casualty/("P&C")) dengan berfokus pada ekspansi top-line organik;
3. Menjadi champion untuk asuransi jiwa dalam negeri; dan
4. Menerapkan praktik terbaik industri melalui beberapa konsolidasi di pasar non-captive dan terfragmentasi.

Indonesia Financial Group (IFG) as an Insurance and Guarantee SOE Holding has been mandated to strengthen the transformation of the insurance industry covering financial, risk management, investment & product management, and actuarial aspects. In response to the mandate, the Company aspires to become a "fortress" for the Indonesian insurance market. In this regard, IFG plans to restore Indonesian consumers' confidence in the national insurance industry. It aims to associate the IFG brand as a trustworthy insurance partner.

The Company believes that the relationship between a strong 'brand' and 'name' will attract consumers to buy products not just by name recognition. To achieve this aspiration, IFG has set four aspirations as the company's sustainability strategies, namely:

1. Establishing a "fortress brand" to build public trust;
2. Leading and enhancing the growth of property & casualty ("P&C") market by focusing on organic top-line expansion;
3. Becoming a champion for domestic life insurance; and
4. Implementing industry best practices through multiple consolidations in non-captive and fragmented markets





Deskripsi Description	Satuan Unit	2022	2021	2020
Kuantitas produk/jasa yang dijual Quantity of Product/Services sold	Kategori produk/ layanan jasa Category of Product/ Services	4 Produk Reksa Dana Pendanaan Ultra Mikro Pendanaan PMVD Pendanaan PMVJP 7 Layanan: Perasuransian dan Penjaminan Jasa Perantara Perdagangan Efek bersifat ekuitas (saham) Jasa Perantara Pedagangan Efek bersifat Utang dan Sukuk (EBUS) Penjamin Emisi Efek Penasihat Keuangan Manajemen Aset Investasi dan Manajemen Properti	4 Produk Reksa Dana Pendanaan Ultra Mikro Pendanaan PMVD Pendanaan PMVJP 7 Layanan: Perasuransian dan Penjaminan Jasa Perantara Perdagangan Efek bersifat ekuitas (saham) Jasa Perantara Pedagangan Efek bersifat Utang dan Sukuk (EBUS) Penjamin Emisi Efek Penasihat Keuangan Manajemen Aset Investasi dan Manajemen Properti	4 Produk Reksa Dana Pendanaan Ultra Mikro Pendanaan PMVD Pendanaan PMVJP 7 Layanan: Perasuransian dan Penjaminan Jasa Perantara Perdagangan Efek bersifat ekuitas (saham) Jasa Perantara Pedagangan Efek bersifat Utang dan Sukuk (EBUS) Penjamin Emisi Efek Penasihat Keuangan Manajemen Aset Investasi dan Manajemen Properti
Jumlah Pendapatan Underwriting Total Underwriting Income	Juta Rupiah IDR Million	27.651.864	23.681.774	18.783.051
Laba Tahun Berjalan Profit for the Year	Juta Rupiah IDR Million	3.279.450	3.439.505	2.202.807
Produk ramah lingkungan Environmentally Friendly Products	Unit produk Product Unit	-	-	-
Pelibatan pemasok lokal dalam proses bisnis Involvement of local suppliers in the business process	Perusahaan/ Mitra Company/ partners	207 (100%)	117 (100%)	60 (100%)

KINERJA ASPEK LINGKUNGAN [OJK B.2] ENVIRONMENTAL ASPECT PERFORMANCE [OJK B.2]

Uraian Description	Satuan Unit	2022	2021	2020
Penggunaan listrik Electricity Usage	kWh	43.881	27.979	11.005
	Gigajoule	157,92	100,72	39,62
Penggunaan BBM Fuel Usage	Kiloliter Kilolitre	24,45	13,46	10,34
	Gigajoule	982,79	541,14	415,64
Penggunaan air Water Consumption	Meter kubik Cubic meter	N/A	N/A	N/A
Penggunaan kertas Paper Usage	Rim Ream(s)	315	300,27	435

KINERJA ASPEK SOSIAL [OJK 3] SOCIAL ASPECT PERFORMANCE [OJK 3]

Uraian Description	Satuan Unit	2022	2021	2020
Total pegawai tetap dan kontrak Total of Permanent and Contract Employees	Orang People	242	179	77
Jumlah karyawan wanita Number of female employees	Orang People	109	76	36
Dana TJSN BUMN (d.h. PKBL) SOE TJSN funds (formerly known PKBL)	Juta Rupiah IDR Million	8.940	3.100	1.209
Kinerja K3 Fatalitas Fatality OHS Performance	Kasus Case(s)	Nihil None	Nihil None	Nihil None



PENJELASAN DIREKSI [OJK D-1]

EXPLANATION OF THE BOARD OF DIRECTORS [OJK D-1]



Pemegang saham dan pemangku kepentingan yang terhormat,

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan yang Maha Esa karena atas kehendak-Nya, PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) atau Indonesia Financial Group (IFG) sebagai Holding BUMN Asuransi dan Penjaminan dapat melalui tahun 2022 dengan membukukan kinerja positif. Pencapaian tersebut tak lepas dari dampak positif atas keberhasilan pemerintah menangani pandemi COVID-19 berkepanjangan, sekaligus berhasil mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, bahkan pencapaiannya lebih tinggi dibandingkan sebelum pandemi. Menurut Badan Pusat Statistik, ekonomi Indonesia pada tahun 2022 tumbuh 5,31%, naik dibanding tahun 2021, yang tercatat sebesar 3,69% (year on year/y-on-y). Sebagai pembanding, pertumbuhan ekonomi sebelum pandemi tercatat 5,02% pada tahun 2019; 5,17% tahun 2018, dan 5,07% pada tahun 2017.

Pertumbuhan ekonomi tahun 2022 terjadi di semua lapangan usaha atau sektor, termasuk sektor Jasa Keuangan dan Asuransi, yaitu tumbuh sebesar 1,93%, lebih tinggi dibanding tahun 2021 yang mencapai 1,56%. Pertumbuhan sektor asuransi tersebut dikukuhkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan indikator bertumbuhnya akumulasi premi asuransi umum dan reasuransi sebesar 14,06% y-o-y selama periode Januari-November 2022, yang mencapai Rp106,91 triliun. Pada periode yang sama, akumulasi pendapatan sektor asuransi tercatat sebesar Rp280,24 triliun atau tumbuh sebesar 0,44% dibandingkan tahun sebelumnya .

Selain faktor eksternal di atas, keberhasilan IFG juga tak lepas dari faktor internal, yaitu ketepatan dalam merumuskan kebijakan strategis guna mewujudkan target dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2022. Terlebih lagi, segenap insan Perusahaan berkomitmen untuk memberikan kontribusi terbaik agar target-target yang ditetapkan Perusahaan tercapai.

Dengan mengucap syukur, melalui laporan keberlanjutan inilah, kami menyampaikan pencapaian tersebut. Selaras dengan prinsip keberlanjutan, yaitu keselarasan antara aspek ekonomi, sosial dan lingkungan, maka dalam laporan ini, kami juga menyampaikan berbagai pencapaian kinerja aspek sosial dan lingkungan. Penyampaikan ketiga aspek tersebut sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik atau POJK Keuangan Berkelanjutan sebagai rujukan penulisan laporan ini.

Kebijakan untuk Merespons Tantangan dalam Pemenuhan Strategi Keberlanjutan

Keberadaan IFG yang semakin kukuh dengan pencapaian kinerja yang optimal merupakan cerminan atas implementasi budaya-nilai-nilai keberlanjutan Perusahaan, yaitu Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif (AKHLAK). Bagi Perusahaan, budaya AKHLAK merupakan pedoman perilaku setiap karyawan untuk menjadi insan-insan yang bertanggung jawab dan kinerja individu IFG.

Berdasarkan budaya-nilai-nilai tersebut, seluruh insan IFG berkomitmen untuk mewujudkan kinerja terbaik dengan senantiasa

Dear Honorable Shareholders and Stakeholders,

Praises and gratitude to the God Almighty, because with His blessings, PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) or Indonesia Financial Group (IFG) as the Holding Company for Insurance and Guarantee SOEs can go through 2022 by recording a positive performance. This achievement is inseparable from the positive impact of the government's success in handling the prolonged COVID-19 pandemic, while at the same time maintaining sustainable economic growth, which was even higher than before the pandemic. According to Statistics Indonesia, the Indonesian economy in 2022 grew by 5.31%, an increase from 2021, which was recorded at 3.69% (year on year/y-on-y). For comparison, economic growth before the pandemic was recorded at 5.02% in 2019; 5.17% in 2018, and 5.07% in 2017.

Economic growth in 2022 occurred in all business fields or sectors, including the Financial Services and Insurance sector, which grew by 1.93%, higher than in 2021 which reached 1.56%. The growth of the insurance sector was confirmed by the Financial Services Authority (OJK) with an indicator of the growth of general insurance and reinsurance premium accumulation by 14.06% y-o-y during the January-November 2022 period, which reached IDR 106.91 trillion. In the same period, the accumulated revenue of the insurance sector was recorded at IDR 280.24 trillion or grew by 0.44% compared to the previous year.

In addition to the external factors above, IFG's success is also inseparable from internal factors, namely the accuracy in formulating strategic policies to realize the targets in the Company's Work Plan and Budget (RKAP) in 2022. Moreover, all of the Company's people are committed to making the best contribution so that the targets set by the Company are achieved.

With great appreciation, we would like to share these accomplishments with you through this sustainability report. In line with the sustainability principle—which encourages harmony between economic, social, and environmental aspects—we also highlight a number of performance achievements in the social and environmental aspects in this report. The submission of these three aspects is in accordance with the Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 51/POJK.03/2017 on the Implementation of Sustainable Finance for Financial Services Institutions, Issuers and Public Companies or POJK Sustainable Finance as a reference for writing this report

Policies to Respond to Challenges in Fulfilling Sustainability Strategies

IFG's increasingly strong existence with optimal performance achievement is a reflection to the implementation of the Company's sustainability culture/values, namely Amanah (Trustworthy), Kompeten (Competent), Harmonis (Harmonious), Loyal (Loyal), Adaptif (Adaptive), and Kolaboratif (Collaborative) (AKHLAK). For the Company, the culture of AKHLAK is a guideline for the behavior of every employee. to become responsible individuals and guideline for IFG's individual performance.

Based on this culture/values, all personnels in IFG are committed to delivering the best performance by adhering to the Company's



berpedoman pada Kode Etik Perusahaan (Code of Conduct) sebagai aturan main dalam berinteraksi dengan segenap pemangku kepentingan. Untuk memastikan bahwa IFG menjalankan usaha sesuai dengan budaya-nilai-nilai serta Kode Etik, maka Perusahaan secara berkesinambungan melakukan sosialisasi melalui berbagai kegiatan dan media, baik kepada pemangku kepentingan internal maupun eksternal.

Bagi IFG, kegiatan sosialisasi budaya-nilai-nilai keberlanjutan, terkhusus kepada pemangku kepentingan eksternal, sekaligus menjadi sarana untuk menyerap berbagai isu atau topik yang berkembang di tengah masyarakat. Dalam hal ini, walaupun Holding dan Anak Perusahaan telah berupaya semaksimal mungkin agar keberadaannya membawa manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat, namun potensi permasalahan sosial tetaplah ada.

Sebagai antisipasi atas potensi tersebut, Perusahaan membuka diri untuk melibatkan para pemangku kepentingan, termasuk pelibatan dalam berbagai program pemberdayaan masyarakat. Selain melalui Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil atau Program Pendanaan UMK, pelibatan juga dilakukan Perusahaan melalui Program Bantuan dan/atau Kegiatan lainnya. Program ini antara lain dilaksanakan dalam bentuk bantuan pembangunan infrastruktur seperti renovasi gedung sekolah, pemberian laptop, lemari buku, peralatan sekolah dan sebagainya.

Pelibatan pemangku kepentingan di atas dilakukan IFG melalui pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara (TJSN BUMN), sekaligus ditautkan dengan upaya pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs). Pelaksanaan TJSN didasarkan pada empat pilar, yaitu Pilar Sosial, Lingkungan, Ekonomi, serta Hukum dan Tata Kelola. TPB/SDGs terdiri dari 17 tujuan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030. Pada tahun pelaporan, program TJSN yang dilaksanakan IFG telah berkontribusi terhadap 17 tujuan TPB/SDGs. .

Selaras dengan upaya mengoptimalkan pelaksanaan TJSN, insan IFG juga terus terpacu untuk memaksimalkan kinerja Perusahaan. Pada tahun pelaporan, pencapaian aspek ekonomi cukup baik, meski terjadi sedikit penurunan laba tahun berjalan dibanding tahun sebelumnya. Adapun pada aspek lingkungan. Perusahaan tetap melanjutkan program efisiensi penggunaan listrik, bahan bakar minyak dan air. Jika pun terjadi kenaikan penggunaan, hal itu selaras dengan normalnya kembali operasional kantor pasca-pandemi COVID-19. Sedangkan pada aspek sosial, IFG menyelenggarakan berbagai program TJSN untuk memberdayakan masyarakat, seperti pengelolaan sampah, memberikan pelatihan/pendidikan kewirausahaan dan lain-lain.

Sebagai Holding dengan 11 Anak Perusahaan, IFG menghadapi berbagai tantangan selama tahun pelaporan, seperti penyelesaian pengalihan aset dan liabilitas Jiwasraya ke IFG Life, tantangan terkait bisnis capital market serta investasi, dan sebagainya. Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, Perusahaan telah menetapkan solusi terbaik sehingga tantangan tersebut seminimal mungkin berdampak terhadap pencapaian target yang telah ditetapkan.

Code of Conduct as the ground rules for all interaction with stakeholders. To ensure that IFG conducts business in accordance with the culture/values and Code of Conduct, the Company continuously carries out socialization through various activities and media, both to internal and external stakeholders.

For IFG, the socialization of sustainability culture/values, especially to external stakeholders, is also a means to absorb various issues or topics that are developing in the community. In this case, social issues could still occur even though the Holding and its Subsidiaries have taken all necessary steps to ensure that their presence helps the community to the greatest extent possible.

In anticipating this potential issue, the Company opens itself to involve stakeholders, including involvement in various community empowerment programs. In addition to the Micro and Small Business Funding Program or MSE Funding Program, the Company also engages through other Assistance and/or Activity Programs. This program, among others, is implemented in the form of infrastructure development assistance such as renovating school buildings, providing laptops, bookshelves, school equipment and so on.

The Social and Environmental Responsibility Program of State-Owned Enterprises (TJSN BUMN) is how IFG implements the aforementioned stakeholder involvement. It is also connected to the efforts being made to achieve the Sustainable Development Goals (SDGs). The implementation of TJSN is based on four pillars, namely the Social, Environmental, Economic, as well as Law and Governance Pillars. The SDGs consist of 17 goals to achieve sustainable development by 2030. In this reporting year, the TJSN program implemented by IFG has contributed to the 17 goals of SDGs.

In line with efforts to optimize the implementation of TJSN, every personnel in IFG also continues to be motivated to maximize the Company's performance. In the reporting year, the achievement of the economic aspect was fairly good, despite a slight decrease in profit for the year compared to the previous year. As for the environmental aspect, the Company continues the efficiency program in the use of electricity, fuel oil and water. Even with a spike in usage, this is consistent with business operations returning to normal following the COVID-19 post-pandemic. As for the social aspect, IFG organized various TJSN programs to empower the community, such as waste management, providing entrepreneurship training/education and others.

As a Holding with 11 Subsidiaries, IFG faced various challenges during the reporting year, such as the completion of the transfer of Jiwasraya's assets and liabilities to IFG Life, challenges related to the capital market business and investment, and so on. To overcome these challenges, the Company has established the best solutions so that these challenges have minimal impact on the achievement of predetermined targets

Penerapan Keuangan Berkelanjutan

Sesuai dengan statusnya sebagai Holding BUMN Asuransi dan Penjaminan, IFG tidak termasuk sebagai Lembaga Jasa Keuangan, Emiten maupun Perusahaan Publik yang terkena kewajiban untuk menjalankan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik. Dalam statusnya sebagai Holding pula, maka IFG tidak berhubungan secara langsung dengan nasabah/konsumen. Namun demikian, sebagai entitas bisnis, IFG tetap menyelenggarakan berbagai kegiatan yang terkait dengan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan.

Selama tahun 2022, insan IFG telah berupaya semaksimal mungkin untuk meraih target-target yang ditetapkan Perusahaan dengan hasil sebagai berikut :

- Aspek ekonomi:

IFG meraih pendapatan underwriting bersih sebesar Rp27.652 miliar atau 121,52% dari target sebesar Rp22.756 miliar. Pencapaian ini 116,76% dari tahun sebelumnya, yang tercatat sebesar Rp23.682 miliar; beban underwriting bersih sebesar Rp20.835 miliar atau 138% dari target sebesar Rp15.096. Pencapaian ini 118,62% dibanding tahun 2021 yang tercatat sebesar Rp 17.564 miliar; hasil underwriting bersih sebesar Rp6.817 miliar atau 88,99% dari target Rp7.660 miliar. Pencapaian ini 111,44% dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp6.117 miliar. Dengan kinerja seperti itu, maka laba (rugi) bersih tahun berjalan sebesar Rp3.279 miliar atau 110,18% dari target sebesar Rp 2.976 miliar. Pencapaian ini 95,90% dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp3.419.

- Aspek sosial:

Perusahaan telah merealisasikan dana penyelenggaraan program TJSN sebesar Rp8.939.981.805 atau mencapai 105,65% jika dibandingkan dengan RKA tahun 2022. Total dana TJSN tersebut 288,39% jika dibandingkan tahun 2021. Sejalan dengan itu, IFG telah melakukan 83 program pendidikan dan pelatihan yang diikuti oleh 1.084 karyawan. Total jam pelatihan pada tahun 2022 adalah 1.989 jam, naik dibandingkan tahun 2021 yang mencapai 1.016 jam. Berkaitan dengan tempat kerja yang layak dan aman, Perusahaan berhasil mencatatkan kinerja K3 yang baik dengan tidak adanya kasus fatalitas, atau sama dengan pencapaian tahun sebelumnya.

- Aspek lingkungan:

Komitmen Perusahaan terhadap lingkungan diwujudkan melalui efisiensi penggunaan listrik, bahan bakar minyak (BBM), dan kertas. Walau demikian, pada tahun 2022, penggunaan listrik, BBM, dan kertas mengalami kenaikan. Hal itu sejalan dengan mulai normalnya kegiatan perkantoran pasca-keberhasilan penanganan pandemi COVID-19. Penggunaan energi listrik tahun 2022 tercatat sebesar 157,92 Gigajoule (GJ), naik 56,79% dibanding tahun sebelumnya, yang mencapai 100,72 GJ; sedangkan penggunaan BBM tercatat sebesar 982,79 GJ, naik 81,61% dibanding tahun 2021 yaitu sebesar 541,14 GJ. Adapun penggunaan kertas sebanyak 315 ream, naik 4,91% dibandingkan tahun 2021, yang mencapai 300,27 ream.

The Implementation of Sustainable Finance

In accordance with its status as an Insurance and Guarantee SOE Holding, IFG is not included as a Financial Services Institution, Issuer or Public Companies that is subject to the obligation to implement the Financial Services Authority (OJK) No. 51/POJK.03/2017 on the Implementation of Sustainable Finance for Financial Services Institutions, Issuers and Public Companies. In its status as a Holding, IFG does not deal directly with customers/consumers. However, as a business entity, IFG still organizes various activities related to economic, social and environmental aspects.

During 2022, every personnel in IFG has made every effort to achieve the targets set by the Company with the following results:

- Economic aspect:

IFG achieved net underwriting income of IDR 27,652 billion or 121.52% of the target of IDR 22,756 billion. This achievement is 116.76% from the previous year, which was recorded at IDR 23,682 billion; net underwriting expenses amounted to IDR 20,835 billion or 138% of the target of IDR 15,096. This achievement was 118.62% compared to 2021, which was recorded at IDR 17,564 billion; net underwriting income amounted to IDR 6,817 billion or 88.99% of the target of IDR 7,660 billion. This achievement is 111.44% from the previous year which reached IDR 6,117 billion. With such performance, the net profit (loss) for the year amounted to IDR 3,279 billion or 110.18% of the target of IDR 2,976 billion. This achievement is 95.90% from the previous year which reached IDR 3,419

- Social Aspect:

The Company has realized funds for the implementation of the TJSN program of IDR 8,939,981,805 or reached 105.65% when compared to the Work Plan and Budget in 2022. The total TJSN funds are 288.39% when compared to 2021. Accordingly, IFG has conducted 83 education and training programs attended by 1,084 employees. Total training hours in 2022 were 1,989 hours, an increase from 1,016 hours in 2021. In terms of a proper and safe workplace, the Company managed to record a good OHS performance with no fatality cases, or the same as the previous year's achievement.

- Environmental aspects:

The Company's commitment to the environment is actualized through the efficient use of electricity, fuel oil (BBM), and paper. However, in 2022, the use of electricity, fuel oil, and paper increased. This is corresponding to office operations returning to normal following the successful handling of COVID-19 pandemic. Electricity use in 2022 was recorded at 157.92 Gigajoules (GJ), an increase of 56.79% compared to the previous year, which reached 100.72 GJ; meanwhile, fuel use was recorded at 982.79 GJ, an increase of 81.61% compared to 2021, which amounted to 541.14 GJ. The use of paper was 315 reams, an increase of 4.91% compared to 2021, which reached 300.27 reams.



Kinerja optimal IFG pada tahun 2022 menorehkan prestasi berupa penghargaan dari pihak eksternal yaitu Most Popular Financial CEO's Awards dari The Economics; Silver Winner untuk Manajemen Pra Krisis dalam kategori BUMN Non Tbk, Bronze Winner untuk Departemen Komunikasi Kategori BUMN non Tbk serta Kategori Terpopuler di Media Cetak 2021 Kategori BUMN non Tbk dari PR Indonesia Awards; Special Awards of Outstanding Performance dari iNews Maker Awards; Inclusive Digital Communication Strategy for Indonesia's Sustainable Future dari IDEAS,serta Penghargaan Implementasi AKHLAK Klaster Jasa Asuransi dan Dana Pensiun dan BUMN Kolaboratif dari Accelerated Culture Transformation (ACT) International Consulting

Strategi Pencapaian Target

IFG menyadari dalam upaya mewujudkan target-target yang telah ditetapkan perusahaan niscaya menghadapi berbagai risiko dan tantangan yang berpotensi menghambat pencapaian target-target tersebut. Untuk mitigasi sekaligus meminimalkan dampak atas risiko dan tantangan yang dihadapi tersebut, Perusahaan terus menguatkan penerapan manajemen risiko yang komprehensif. Langkah ini sekaligus meningkatkan persentase keberhasilan IFG dalam mencapai seluruh target yang telah ditetapkan.

Seiring dengan berjalannya waktu, IFG mengidentifikasi beberapa isu fundamental yang menjadi perhatian dan tantangan baru yang perlu ditangani, di antaranya isu kesehatan perusahaan pada anggota holding yang memerlukan upaya penyehatan keuangan dan kinerja asuransi kredit yang berdampak pada kinerja beberapa anggota holding. Dalam hal ini, Perusahaan menyadari bahwa untuk mempertahankan keberlanjutan dan kesehatan bisnis, masih ada banyak perbaikan lain yang perlu dilakukan oleh IFG dan anggota holding, seperti pengembangan kapabilitas bisnis di luar penugasan Pemerintah karena terdapat concentration risk akibat ketergantungan bisnis pada penugasan Pemerintah. Selain itu, IFG juga masih perlu melakukan penguatan aspek manajemen risiko, integrasi data antara IFG dan anggota holding, serta perbaikan proses bisnis pada anggota holding.

Tidak hanya tantangan internal, IFG juga harus menghadapi tantangan eksternal terkait kondisi pengawasan di industri asuransi dan kerangka manajemen risiko asuransi yang belum matang. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh kondisi di antaranya, pengawasan industri asuransi yang belum memiliki tim pengawas secara khusus, seperti industri perbankan, pemeriksaan belum dilakukan secara berkala, belum terdapat kerangka manajemen risiko khusus asuransi, serta belum adanya lembaga penjamin khusus industri asuransi. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa pengawasan dan kerangka kerja manajemen risiko yang ada saat ini belum cukup sensitif terhadap risiko yang mendukung penguatan sektor industri asuransi.

Selanjutnya, sesuai dengan strategi perusahaan di dalam RJPP IFG 2020-2024, Perusahaan menetapkan strategi pencapaian target dengan fokus menciptakan bisnis yang berkelanjutan, meningkatkan daya saing dengan mengembangkan kapabilitas baru di luar penugasan dari Pemerintah, menciptakan nilai tambah bagi nasabah/masyarakat, serta mendorong sinergi antar anggota holding dan ekosistem BUMN, tanpa mengesampingkan beberapa isu yang masih harus segera diselesaikan dan melanjutkan proses perbaikan fundamental.

IFG's optimal performance in 2022 resulted in achievements in the form of awards from external parties, namely the Most Popular Financial CEO's Awards from The Economics; Silver Winner for Pre-Crisis Management in the Non Tbk SOEs category, Bronze Winner for the Communication Department in the Non Tbk SOEs category and the Most Popular Category in Print Media 2021 in the Non Tbk SOEs category from PR Indonesia Awards; Special Awards of Outstanding Performance from iNews Maker Awards; Inclusive Digital Communication Strategy for Indonesia's Sustainable Future from IDEAS, and AKHLAK Implementation Award for Insurance and Pension Fund Services Cluster and Collaborative SOE from Accelerated Culture Transformation (ACT) International Consulting.

Target Achievement Strategy

IFG is aware that in an effort to achieve the targets set by the company, it undoubtedly has to face various risks and challenges that have the potential to hinder the achievement of these targets. To mitigate and minimize the impact of these risks and challenges, the Company continues to strengthen the implementation of comprehensive risk management. This step also increases the percentage of IFG's success in achieving all targets set.

Over time, IFG identified several fundamental issues of concern and new challenges that need to be addressed, including corporate health issues in holding members that require financial restructuring efforts and credit insurance performance that has an impact on the performance of several holding members. In this case, the Company understands that in order to maintain the sustainability and health of its business, IFG and holding members still have a great deal of improvements to work on, such as, building business capabilities outside of government assignments is necessary to mitigate concentration risk resulting from the business's dependency on government assignments. Likewise, IFG also still needs to strengthen risk management aspects, data integration between IFG and holding members, and business process improvements at holding members.

Not only internal challenges, IFG must also face external challenges related to supervisory conditions in the insurance industry and an underdeveloped insurance risk management framework. This is motivated by conditions including, supervision of the insurance industry that does not yet have a special supervisory team, for instance, the banking industry, the lack of periodic examination, nor insurance-specific risk management framework, as well as the absence of an insurance industry-specific guarantor institution. These conditions indicate that the current supervision and risk management framework are not sensitive enough to the risks that support the strengthening of the insurance industry sector.

Furthermore, in accordance with the company's strategy in the IFG 2020-2024 RJPP (The Company's Long-Term Plan), the Company sets a strategy to achieve targets with a focus on creating a sustainable business, increasing competitiveness by developing new capabilities outside of assignments from the Government, creating added value for customers/the community, and building synergy between holding members and the SOEs ecosystem – all without putting off a number of unresolved issues and continuing the process of fundamental improvement.

Kami bersyukur, melewati tahun 2022 yang penuh tantangan, akhirnya IFG bersama dengan anggota holding berhasil mewujudkan target-target yang telah ditetapkan dalam RKAP Tahun 2022, sebagaimana disampaikan pada pencapaian aspek ekonomi di atas, sekaligus merealisasikan skor KPI secara konsolidasian di atas target RKAP tahun 2022, yaitu sebesar 104,63 (Audited). Selanjutnya, IFG juga berhasil mencapai target RKAP Tahun 2022 berdasarkan laporan keuangan konsolidasian yang telah di audit, figur keuangan serta key ratio keuangan.

Lebih dari itu, sebagai agen pembangunan, IFG juga berhasil menjalankan penugasan Pemerintah dengan target yang terus meningkat di tahun 2022. IFG telah melakukan peningkatan penjaminan KUR dan PEN, penyaluran Asuransi Tani Padi, penyaluran Asuransi Ternak Sapi, dan efisiensi pembayaran santunan Asuransi Sosial. IFG sebagai holding juga berperan aktif untuk memastikan penggunaan dana Penyertaan Modal Negara ("PMN") tepat sasaran serta dilakukan pengelolaan sesuai dengan tata kelola yang baik.

Prospek dan Peluang

Pada tahun 2022, Indonesia berhasil mengendalikan pandemi COVID-19, bahkan mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,31%. Tak sekadar membanggakan, pencapaian tersebut sekaligus merupakan pondasi yang kukuh untuk meraih pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan pada tahun 2023. Meski demikian, kewaspadaan dan kehati-hatian tetap perlu dipegang karena tahun 2023 diprediksi perekonomian Indonesia akan melemah. International Monetary Fund (IMF) misalnya, memperkirakan ekonomi Indonesia akan tumbuh di kisaran 4,8% pada tahun 2023, turun dibandingkan pencapaian tahun 2022 sebesar 5,31%.

Prediksi melambatnya perekonomian Indonesia tak lepas dari sejumlah risiko yang membayangi perekonomian global, seperti belum pulihnya Tiongkok dari dampak pandemi COVID-19 dan efek perang Rusia-Ukraina. Menyikapi prediksi tersebut, Presiden Joko Widodo dan sejumlah menteri telah mengungkapkan kesiapannya dan optimis perekonomi Indonesia akan tetap kuat dan bertumbuh positif.

Bagi IFG, optimisme pemerintah tersebut merupakan landasan yang kuat untuk menyusun target-target yang lebih tinggi dalam RKAP Tahun 2023, baik berkaitan dengan pendapatan underwriting bersih, hasil underwriting bersih maupu laba (rugi) bersih tahun berjalan. Ditopang komitmen seluruh insan IFG untuk memberikan kontribusi maksimal, Perusahaan optimis dapat mewujudkan target-target tersebut.

We are grateful that through the challenging year of 2022, IFG together with the holding members finally succeeded in realizing the targets set in the 2022 RKAP (Work Plan and Budget), as stated in the achievement of the economic aspects above, as well as realizing the consolidated KPI score above the 2022 RKAP target, which is 104.63 (Audited). Furthermore, IFG also managed to achieve the 2022 RKAP target based on audited consolidated financial statements, financial figures and financial key ratios.

Moreover, as a development agent, IFG has also successfully conducted Government assignments with increasing targets in 2022. IFG has increased KUR and PEN guarantees, distribution of Rice Farmer Insurance, distribution of Cattle Insurance, and efficiency of Social Insurance compensation payments. IFG as a holding also plays an active role in ensuring that the use of State Equity Participation ("PMN") funds is well targeted and managed in accordance with good governance.

Prospects and Opportunities

In 2022, Indonesia successfully controlled the COVID-19 pandemic, and even recorded an economic growth of 5.31%. This achievement is not only something to be proud of, but also a solid foundation for achieving sustainable economic growth in 2023. Nevertheless, since it is anticipated that the Indonesian economy will weaken in 2023, vigilance and precaution are still required. The International Monetary Fund (IMF), for example, predicts that Indonesia's economy will grow at around 4.8% in 2023, a decrease from 5.31% in 2022.

The prediction of a slowdown in the Indonesian economy is in response to a number of risks looming over the global economy, such as China not recovering from the impact of the COVID-19 pandemic and the effects of the Russia-Ukraine war. In response to these predictions, President Joko Widodo and several ministers have expressed that they are ready and optimistic that the Indonesian economy will remain strong and grow positively.

For IFG, the government's optimism is a strong foundation to set higher targets in the 2023 RKAP, both with regard to net underwriting revenue, net underwriting income and net profit (loss) for the year. Supported by the commitment of all personnels in IFG to make maximum contributions, the Company is confident that it will be able to meet these targets.



Penutup

Kami menyadari bahwa pencapaian terbaik IFG pada tahun 2022 merupakan hasil kerja keras dan kerja bersama, termasuk dukungan dan kontribusi dari para pemangku kepentingan yang sangat beragam. Untuk itu, kami mengucapkan terima kasih kepada Dewan Komisaris yang telah melakukan pengawasan dan memberikan arahan sehingga Direksi dapat menjalankan tugas dengan baik. Ungkapan yang sama kami sampaikan kepada Pemegang Saham yang telah memberikan kepercayaan kepada kami untuk mengelola IFG selama tahun pelaporan.

Kepada seluruh karyawan sebagai garda terdepan pelayanan, kami juga menyampaikan terima kasih atas kerja keras, dedikasi dan loyalitas yang diberikan selama ini. Apresiasi juga kami sampaikan kepada para pemasok/mitra, nasabah/pelanggan, pemerintah pusat/daerah, regulator, maupun masyarakat yang senantiasa mendukung keberadaan IFG.

Bagi kami, dukungan tersebut merupakan modal penting dan tak tergantikan untuk mewujudkan usaha yang berkelanjutan. Untuk itu, kami berharap agar dukungan tersebut tetap diberikan sehingga IFG mampu mewujudkan visinya "Menjadi Perusahaan grup Keuangan Perasuransian dan Penjaminan yang terdepan, terpercaya, dan terintegrasi dalam memberikan layanan jasa dan produk yang terkemuka dan handal."

Closing

We acknowledge that IFG's best achievements in 2022 are the result of hard work and joint work, including the support and contributions of a very diverse range of stakeholders. Thus, we would like to express our gratitude to the Board of Commissioners for supervising and leading the Board of Directors so that they can effectively do their duties. We would also like to extend our gratitude to our shareholders who have given us the trust to manage IFG during the reporting year.

To all employees as the frontline of service, we would like to convey our sincere appreciation for the hard work, dedication and loyalty given so far. Our appreciation also goes to our suppliers/partners, customers, central/regional governments, regulators, and the public who continue to support IFG's existence.

For us, such support is an important and irreplaceable asset to deliver a sustainable business. Therefore, we hope that this support will continue to be provided so that IFG is able to realize its vision "To become a leading, trusted, and integrated Insurance and Guarantee Financial Group Company in providing leading and reliable services and products."

Jakarta, Tahun Buku 2022
Atas Nama Direksi
PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)
Jakarta, 2022 Fiscal Year
on behalf of the Board of Directors
PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)

Robertus Billitea

Direktur Utama
President Director





TENTANG LAPORAN KEBERLANJUTAN

ABOUT SUSTAINABILITY REPORT

Indonesia Financial Group (IFG) berkomitmen untuk meningkatkan kualitas transparansi dalam menjalankan aspek keberlanjutan. Langkah nyata yang dilakukan antara lain menerbitkan laporan keberlanjutan setiap tahun bersama dengan laporan tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik atau POJK Keuangan/Kegiatan Berkelanjutan. Laporan ini merupakan laporan ketiga sejak POJK Keuangan Berkelanjutan diberlakukan per 1 Januari 2020 –setelah mendapatkan relaksasi implementasi satu tahun akibat pandemi COVID-19.

Selain POJK No.51/POJK.03/2017, penerbitan laporan ini juga merupakan implementasi dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomer 16/SEOJK.04/2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik, yang di dalamnya mengatur format Laporan Keberlanjutan. Secara khusus, pedoman teknis penyusunan Laporan Keberlanjutan untuk emiten dan perusahaan publik disampaikan dalam Lampiran II, POJK No.51/POJK.03/2017. IFG berharap penerbitan laporan bisa menjadi media terpercaya bagi segenap pemangku kepentingan terkait kinerja keberlanjutan perusahaan.

Laporan ini memuat kinerja ekonomi, keuangan, sosial, dan lingkungan hidup IFG dalam menjalankan bisnis berkelanjutan beserta dampak yang ditimbukannya, termasuk dampak positif, selama periode 1 Januari-31 Desember 2022. Selain merupakan implementasi atas tata kelola perusahaan yang baik, penerbitan laporan ini sekaligus menjadi bukti kontribusi Perusahaan dalam mendukung penerapan keuangan berkelanjutan serta pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/TPB atau Sustainable Development Goals/SDGs di Indonesia.

Penerbitan laporan ini mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik (POJK Keuangan Berkelanjutan). Walau sebagai holding IFG tidak termasuk dalam kategori perusahaan yang dikenai kewajiban untuk menerapkan POJK Keuangan Berkelanjutan tersebut, namun peraturan tersebut dijadikan sebagai rujukan karena Perusahaan mengapresiasi keberadaan regulasi penyusunan laporan keberlanjutan yang berlaku secara nasional itu.

Perusahaan secara konsisten menerbitkan laporan keberlanjutan karena meyakini adanya berbagai manfaat secara internal dan eksternal atas penerbitan laporan tersebut. Manfaat secara internal antara lain mempertajam visi dan strategi dalam aspek keberlanjutan, memperkuat sistem manajemen terkait manajemen keberlanjutan, meningkatkan kualitas transparansi atas upaya perusahaan dalam menjalankan aspek keberlanjutan, mempermudah dalam melakukan analisis kelemahan dan kekuatan perusahaan, serta meningkatkan motivasi pekerja yang peduli terhadap lingkungan dan masyarakat. Adapun manfaat eksternal antara lain meningkatkan citra dan

Indonesia Financial Group (IFG) is committed to improving the quality of transparency in carrying out sustainability aspects. Concrete steps taken include publishing a sustainability report every year along with the annual report as stipulated in the Financial Services Authority Regulation (POJK) No.51/POJK.03/2017 concerning the Implementation of Sustainable Finance for Financial Services Institutions, Issuers, and Public Companies or POJK Finance/Sustainable Activities. This is the third report since POJK Sustainable Finance came into effect on January 1, 2020 - after receiving a one-year implementation relaxation due to the COVID-19 pandemic.

In addition to POJK No.51/POJK.03/2017, the issuance of this report is also an implementation of the Circular Letter of the Financial Services Authority Number 16/SEOJK.04/2021 concerning the Form and Content of the Annual Report of Issuers or Public Companies, which regulates the format of the Sustainability Report. In particular, technical guidelines for the preparation of Sustainability Reports for issuers and public companies are presented in Appendix II, POJK No.51/POJK.03/2017. IFG hopes that the publication of the report can be a trusted media for all stakeholders regarding the company's sustainability performance.

This report contains IFG's economic, financial, social and environmental performance in running a sustainable business along with its impacts, including positive impacts, during the period January 1- December 31, 2022. Apart from being an implementation of good corporate governance, the issuance of this report is also proof of the Company's contribution in supporting the implementation of sustainable finance and the achievement of Sustainable Development Goals (SDGs) in Indonesia.

The issuance of this report refers to the Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 51/POJK.03/2017 on the Implementation of Sustainable Finance for Financial Services Institutions, Issuers and Public Companies (POJK Sustainable Finance). Even though as holding, IFG is not included in the category of companies required to implement the POJK on Sustainable Finance, however, this regulation is used as a reference since the Company appreciates the existence of regulations for preparing Sustainability Reports that apply nationally.

The Company consistently publishes sustainability reports because it believes that there are various internal and external benefits to the issuance of these reports. Internal benefits include sharpening the vision and strategy in sustainability aspects, strengthening management systems related to sustainability management, improving the quality of transparency of the company's efforts in carrying out sustainability aspects, making it easier to analyze the company's weaknesses and strengths, and increasing the motivation of workers who care about the environment and the community. The external benefits include improving the company's image and

reputasi perusahaan serta kepercayaan publik, serta memudahkan, meningkatkan hubungan dengan pemangku kepentingan.

Selaras dengan komitmen untuk menghemat penggunaan kertas, Perusahaan mencetak laporan ini secara terbatas. Untuk itu, pemangku kepentingan yang ingin membaca dan menelaah laporan ini bisa mengakses dan mengunduh di website resmi Perusahaan, yaitu www.ifg.id

Aspek Keberlanjutan dalam Laporan

Laporan keberlanjutan ini menyajikan pembahasan aspek-aspek yang material, yaitu aspek-aspek yang penting, relevan dan menjadi prioritas, serta memiliki dampak yang signifikan bagi IFG sebagai Holding BUMN Asuransi dan Penjaminan maupun para pemangku kepentingan selama tahun 2022. Penentuan aspek material merujuk pada Lampiran II POJK No. 51/POJK.03/2017.

Lingkup dan Batasan Pelaporan

Laporan keberlanjutan ini mencakup aspek keberlanjutan IFG sebagai Holding BUMN Asuransi dan Penjaminan, tidak termasuk entitas anak, selama tahun 2022. Namun demikian, khusus mengenai aspek/kinerja ekonomi, data merujuk pada neraca keuangan konsolidasian tahun 2022.

Umpam Balik

Untuk terwujudnya komunikasi dua arah, Perusahaan menyediakan Lembar Umpam Balik di bagian akhir laporan ini. Dengan lembar tersebut diharapkan pembaca dan pengguna laporan ini dapat memberikan usulan, umpan balik, opini dan sebagainya, yang sangat berguna bagi peningkatan kualitas pelaporan di masa depan. Pemberian umpan balik bisa disampaikan kepada:

Corporate Secretary

Indonesia Financial Group (IFG)

Gedung Graha CIMB Niaga, 18th Floor

Jl. Jendral Sudirman Kav. 58 RT 5/RW 3, Senayan, Kebayoran Baru
Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12190

Telp. : (+62 21) 50890929

Surel : cs@ifg.id

Website Perusahaan: www.ifg.id

reputation as well as public trust, and facilitating and improving relationships with stakeholders.

In line with the commitment to save paper usage, the Company prints this report on a limited basis. Therefore, stakeholders who wish to read and review this report can access and download it on the Company's official website, namely www.ifg.id

Sustainability Aspects in the Report

This sustainability report presents a discussion of material aspects, namely aspects that are important, relevant and prioritized, and have a significant impact on IFG as a Holding SOE Insurance and Guarantee and stakeholders during 2022. The determination of material aspects refers to Appendix II POJK No. 51/POJK.03/2017.

Scope and Limitation of Reporting

This sustainability report covers the sustainability aspects of IFG as the Insurance and Guarantee SOE Holding, excluding subsidiaries, during 2022. However, specifically regarding economic aspects/ performance, the data refers to the consolidated balance sheet in 2022.

Feedback

To realize two-way communication, the Company provides a Feedback Sheet at the end of this report. With this sheet, it is expected that readers and users of this report can provide suggestions, feedback, opinions and so on, which will be very useful for improving the quality of reporting in the future. Feedback can be submitted to:

Corporate Secretary

Indonesia Financial Group (IFG)

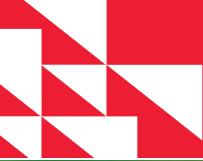
Gedung Graha CIMB Niaga, 18th Floor

Jl. Jendral Sudirman Kav. 58 RT 5/RW 3, Senayan, Kebayoran Baru
South Jakarta, DKI Jakarta 12190

Phone : (+62 21) 50890929

Email: cs@ifg.id

Company Website : www.ifg.id



PROFIL PERUSAHAAN

COMPANY PROFILE

INFORMASI UMUM DAN IDENTITAS PERUSAHAAN

GENERAL INFORMATION AND COMPANY IDENTITY



Nama Perusahaan
Company Name

: PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)



Tanggal dan
Tahun Pendirian
Date and Year of
Establishment

: 17 April 1973
April 17, 1973



Dasar Hukum Pendirian
Legal Basis of
Establishment

- Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia No. 18 tahun 1973, tanggal 13 April 1973, tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan dalam Bidang Pengembangan Usaha Swasta Nasional.
- Akta No. 11 tanggal 17 April 1973, yang dibuat dihadapan Mohamad Ali, S.H., Notaris, di Jakarta, dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia tertanggal 22 Mei 1973 No. YA.5/191/20 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 57 tanggal 17 Juli 1973 Tambahan Nomor 508.
- Government Regulation (PP) of the Republic of Indonesia No. 18 of 1973, dated April 13, 1973, concerning the State Equity Participation of the Republic of Indonesia for the Establishment of a Limited Liability Company in the Sector of National Private Business Development.
- Deed No. 11 dated April 17, 1973, drawn up before Mohamad Ali, S.H., Notary, in Jakarta, and has been approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia dated May 22, 1973 No. YA.5/191/20 and has been announced in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 57 dated July 17, 1973 Supplement Number 508.



**Dasar Hukum
Pembentukan
Holding**
Legal Basis
of Holding
Establishment

- : • Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1973 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan dalam Bidang Pengembangan Usaha Swasta Nasional maksud dan tujuan dari IFG adalah untuk melaksanakan kegiatan sebagai perusahaan holding di bidang keuangan dan investasi serta konsultasi manajemen untuk kepentingan perusahaan afiliasi atau pihak lain termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah, dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perusahaan Perseroan (Persero) berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
- Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia, yang berasal dari pengalihan seluruh saham Seri B milik Negara Republik Indonesia pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asuransi Kredit Indonesia, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asuransi Jasa Indonesia, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja, dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Jaminan Kredit Indonesia.
- Government Regulation No. 15 of 2020 concerning Amendments to Government Regulation No. 18 of 1973 concerning State Equity Participation of the Republic of Indonesia for the Establishment of Limited Liability Company in the sector of National Private Business Development. The purpose and objectives of IFG are to conduct activities as a holding company in the financial and investment sectors as well as management consulting for the benefit of affiliated companies or other parties including micro, small and medium enterprises, as well as optimizing the utilization of the Company's (Persero) resources based on the principles of good corporate governance.
- Government Regulation No. 20 of 2020 dated March 16, 2020 concerning the addition of the Republic of Indonesia's State Equity Participation into the Share Capital of the Company (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia, which originated from the transfer of all Series B shares owned by the Republic of Indonesia to the Limited Liability Company (Persero) PT Asuransi Kredit Indonesia, the Limited Liability Company (Persero) PT Asuransi Jasa Indonesia, the Limited Liability Company (Persero) PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja, and the Limited Liability Company (Persero) PT Jaminan Kredit Indonesia.



**Bidang Usaha
[OJK C.4]**
Line of Business
[OJK C.4]

- : Bidang asuransi, penjaminan, modal ventura, sekuritas, manajer investasi, penasehat investasi, konsultan keuangan dan konsultan manajemen, serta usaha jasa-jasa keuangan lainnya termasuk pada usaha pengelolaan gedung perkantoran.
Insurance, guarantee, venture capital, securities, investment managers, investment advisors, financial consultants, and management consultants, as well as other financial services businesses, including the business of managing office buildings



**Kepemilikan
Saham**
Share Ownership
Modal Dasar
Authorized Capital

- : 100% Dimiliki oleh Negara Republik Indonesia (AKTA No. 4 Tanggal 4 November 2021)
100% Owned by Republic of Indonesia (DEED NO. 4 DATED NOVEMBER 4, 2021)
- : Rp240.000.000.000.000
IDR 240,000,000,000,000



Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh : **Rp87.163.537.000.000**
IDR 87,163,537,000,000
Issued and Fully-Paid Capital



Jumlah Karyawan : **242 (orang) per 31 Desember 2022**
Total Employees
242 (people) as of December 12, 2022



ALAMAT [OJK C.2] : **Gedung Graha CIMB Niaga, 18th Floor**
Jl. Jendral Sudirman Kav. 58 RT 5/RW 3, Senayan, Kebayoran Baru
Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12190
Graha CIMB Niaga Building, 18th Floor
Jl. Jendral Sudirman Kav. 58 RT 5/RW 3, Senayan, Kebayoran Baru
South Jakarta, DKI Jakarta 12190



Telp. : **(+62 21) 50890929**
Phone

Surel : **CS@IFG.ID**
Email

Website Perusahaan **WWW.IFG.ID**
Company Website

Jaringan Bisnis dan Wilayah Operasi : **Seluruh wilayah di Indonesia**
All regions in Indonesia

Business Network and Operation Area

- Kelompok Usaha** : • **Anak Perusahaan Bidang Asuransi dan Penjaminan:**
1. PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja (Jasa Raharja)
 2. PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo)
 3. PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo)
 4. PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo)
 5. PT Asuransi Jiwa IFG (IFG Life)
- **Anak Perusahaan Bidang Keuangan dan Pasar Modal:**
1. PT Bahana Sekuritas (BS)
 2. PT Bahana TCW Investment Management (BTIM)
 3. PT Bahana Artha Ventura (BAV)
 4. PT Bahana Kapital Investa (BKI)
 5. PT Bahana Mitra Investa (BMI)
- **Anak Perusahaan Bidang Non Keuangan**
1. PT Grahaniaga Tatautama (GNTU)
- Subsidiaries in the sector of Insurance and Guarantee:
1. PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja (Jasa Raharja)
 2. PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo)
 3. PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo)
 4. PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo)
 5. PT Asuransi Jiwa IFG (IFG Life)
- Subsidiaries in the sector of Financial and Capital Market:
1. PT Bahana Sekuritas (BS)
 2. PT Bahana TCW Investment Management (BTIM)
 3. PT Bahana Artha Ventura (BAV)
 4. PT Bahana Kapital Investa (BKI)
 5. PT Bahana Mitra Investa (BMI)
- Subsidiaries in Non-Financial Sector
1. PT Grahaniaga Tatautama (GNTU)

SEKILAS INDONESIA FINANCIAL GROUP (IFG)

INDONESIA FINANCIAL GROUP (IFG) AT A GLANCE



Indonesia Financial Group (IFG) adalah Holding BUMN Asuransi dan Penjaminan, yang merupakan transformasi brand dari PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) atau PT BPUI. Transformasi brand tertuang dalam Surat Kementerian BUMN No. S-562/MBU/08/2020 tanggal 6 Agustus 2020 tentang Persetujuan Perubahan Brand dan Logo PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) menjadi Indonesia Financial Group (IFG).

Setelah ditetapkan sebagai holding, IFG mendapat tugas dari pemerintah untuk berperan dalam pembangunan nasional melalui pengembangan industri keuangan non bank yang lengkap dan inovatif melalui layanan investasi, asuransi dan penjaminan. Untuk mewujudkan tugas tersebut, Perusahaan berkomitmen untuk menghadirkan perubahan di bidang keuangan, khususnya asuransi, investasi, dan penjaminan yang akuntabel, prudent, dan transparan dengan tata kelola perusahaan yang baik dan penuh integritas. [OJK C.4]

Dalam implementasi di lapangan, semangat kolaboratif dengan tata kelola perusahaan yang transparan menjadi landasan IFG dalam bergerak untuk menjadi penyedia jasa asuransi, penjaminan, investasi yang terdepan, terpercaya, dan terintegrasi. Dengan spirit tersebut, IFG meyakini kehadirannya merupakan masa depan industri keuangan di Indonesia, sekaligus menjadi motor penggerak ekosistem yang inklusif dan berkelanjutan.

Indonesia Financial Group (IFG) is Holding Company for Insurance and Guarantee SOEs, which is a brand transformation of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) or PT BPUI. The brand transformation is stipulated in the Ministry of SOEs Letter No. S-562/MBU/08/2020 dated August 6, 2020 concerning Approval of Brand and Logo Changes of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) to Indonesia Financial Group (IFG).

After being established as a holding company, IFG was assigned by the government to play a role in national development through the development of a complete and innovative non-bank financial industry through investment, insurance and guarantee services. To realize this task, the Company is committed to bringing change in the financial sector, especially insurance, investment and guarantees that are accountable, prudent and transparent with good corporate governance and full of integrity. [OJK C.4]

In its implementation in the field, the collaborative enthusiasm with transparent corporate governance is the foundation of IFG in moving to become a leading, trusted, and integrated insurance, guarantee, and investment service provider. As a result, IFG believes that its presence is the future of the financial industry in Indonesia, as well as a driving force for an inclusive and sustainable ecosystem.



Transformasi brand dari PT BPUI menjadi IFG tak lepas dari penetapan PT BPUI sebagai holding sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia. Penambahan penyertaan modal negara tersebut berasal dari pengalihan seluruh saham Seri B milik Negara Republik Indonesia di Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asuransi Kredit Indonesia, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asuransi Jasa Indonesia, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja, dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Jaminan Kredit Indonesia.

Dengan adanya pengalihan saham Seri B, maka negara melakukan kontrol terhadap Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asuransi Kredit Indonesia, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asuransi Jasa Indonesia, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja, dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Jaminan Kredit Indonesia melalui kepemilikan saham Seri A dwi warna dengan kewenangan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar.

Kebijakan penambahan penyertaan modal negara tersebut mengakibatkan status Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asuransi Kredit Indonesia, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asuransi Jasa Indonesia, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja, dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Jaminan Kredit Indonesia, berubah menjadi perseroan terbatas yang tunduk sepenuhnya pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Akibat hukum yang lain, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia menjadi Pemegang Saham PT Asuransi Kredit Indonesia, PT Asuransi Jasa Indonesia, PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja, dan PT Jaminan Kredit Indonesia.

Dalam perkembangannya, pada bulan Desember 2020, Pemerintah melakukan Penyertaan Modal Negara (PMN) ke IFG untuk mendirikan PT Asuransi Jiwa IFG atau IFG Life. Pendirian IFG Life sekaligus dapat memperkuat bisnis holding melalui penjualan bundling cross-selling dengan anak-anak perusahaan PT BPUI lainnya sehingga muncul nilai tambah dari sinergi holding. Dengan demikian, hingga saat ini, IFG beranggotakan PT Jasa Raharja, PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo), PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo), PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo), PT Asuransi Jiwa IFG (IFG Life), PT Bahana Sekuritas, PT Bahana TCW Investment Management, PT Bahana Artha Ventura, PT Bahana Kapital Investa dan PT Grahaniaga Tatautama.

Pada tahun 2021, berdasarkan surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan Nomor S-387/NB.2/2021, IFG Life sebagai Anak Perusahaan IFG, telah mulai menerima pengalihan polis dari nasabah eks PT Asuransi Jiwasraya (Jiwasraya). Dalam prosesnya, polis yang dialihkan telah dilakukan due diligence untuk memastikan bahwa polis yang dialihkan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta memitigasi segala risiko yang berpotensi mempengaruhi kelayakan finansial, operasional, dan going concern kegiatan usaha IFG Life. Proses pengalihan dimulai dengan langkah proaktif perusahaan yang akan menghubungi setiap nasabah eks Jiwasraya untuk menyelesaikan proses pengalihan, sekaligus memastikan pelayanan prima perusahaan kepada pemegang polis secara berkesinambungan.

The brand transformation from PT BPUI to IFG is inseparable from the establishment of PT BPUI as a holding company as stipulated in Government Regulation No. 20 of 2020 dated March 16, 2020 concerning the Addition of State Capital of the Republic of Indonesia into the Share Capital of the Company (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia. The additional state capital came from the transfer of all Series B shares owned by the Republic of Indonesia in the Company (Persero) PT Asuransi Kredit Indonesia, Company (Persero) PT Asuransi Jasa Indonesia, Company (Persero) PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja, and Company (Persero) PT Jaminan Kredit Indonesia.

With the transfer of the B Series shares, the state exercises control over the Limited Liability Company (Persero) PT Asuransi Kredit Indonesia, the Limited Liability Company (Persero) PT Asuransi Jasa Indonesia, the Limited Liability Company (Persero) of Asuransi Kerugian Jasa Raharja, and the Limited Liability Company (Persero) PT Jaminan Kredit Indonesia through the ownership of A Series Dwipurna shares with the authority as stipulated in the Articles of Association.

The policy of adding state equity participation resulted in the status of the Limited Liability Company (Persero) PT Asuransi Kredit Indonesia, the Limited Liability Company (Persero) PT Asuransi Jasa Indonesia, the Limited Liability Company (Persero) PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja, and the Limited Liability Company (Persero) PT Jaminan Kredit Indonesia become a limited liability company that is fully subject to Law no. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. As a result of another law, the Limited Liability Company (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia became the Shareholder of PT Asuransi Kredit Indonesia, PT Asuransi Jasa Indonesia, PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja, and PT Jaminan Kredit Indonesia.

In its development, in December 2020, the Government conducted a State Equity Participation (PMN) to IFG to establish PT Asuransi Jiwa IFG or IFG Life. The establishment of IFG Life might, at the same time, strengthen the holding business through cross-selling bundling sales with other IFG subsidiaries, adding value from holding synergies. For that reason, presently, IFG consists of PT Jasa Raharja, PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo), PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo), PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo), PT Asuransi Jiwa IFG (IFG Life), PT Bahana Sekuritas, PT Bahana TCW Investment Management, PT Bahana Artha Ventura, PT Bahana Kapital Investa and PT Grahaniaga Tatautama.

In 2021, based on the letter from the Financial Services Authority (OJK) Number S-387/NB.2/2021, IFG Life, as a Subsidiary of IFG, has started accepting policy transfers from former customers of PT Asuransi Jiwasraya (Jiwasraya). In the process, due diligence has been carried out on the transferred policies to ensure that the transferred policies comply with the applicable laws and regulations, as well as mitigate any risks that could potentially affect the financial feasibility, operations and going concern of IFG Life's business activities. The transfer process begins with the company's proactive steps that will contact each former customer of Jiwasraya to complete the transfer process, while simultaneously ensuring the company's excellent service to policyholders on an ongoing basis.

Berkaitan dengan proses pengalihan polis tersebut, pada 22 Desember 2021, IFG Life menyerahkan polis secara simbolis kepada sejumlah nasabah eks Jiwasraya yang telah berhasil dialihkan kepada nasabah korporasi dan retail, serta simbolis pembayaran klaim untuk nasabah Bancassurance dengan produk Mantap Plus Plan C. Selaras dengan proses pengalihan polis tersebut, Kementerian BUMN menyatakan kehadiran IFG sebagai Holding Asuransi dan Penjaminan merupakan upaya Pemerintah dalam mengembangkan industri perasuransian agar bertumbuh semakin sehat dan kuat. Dalam konteks pengalihan polis eks nasabah Jiwasraya, IFG Life tidak hanya menjadi penyelamat Jiwasraya. Lebih dari itu, ke depan, IFG Life diharapkan mampu bersaing di segmen asuransi jiwa dan memberikan proteksi yang maksimal bagi masyarakat.

Per 31 Desember 2021, proses pengalihan polis nasabah eks Jiwasraya ke IFG Life tercatat sebanyak 155.216 polis atau setara dengan Rp20,87 triliun. Pengalihan polis ini merupakan 63,2 persen dari target liabilitas polis yang akan dialihkan. Adapun realisasi penerimaan premi hingga Desember 2021 mencapai Rp24,13 miliar, sedangkan untuk klaim tahapan ke-0 polis Mantap Plus C, Anuitas dan Utang Klaim dari polis eks Jiwasraya pembayarannya telah mencapai Rp976,13 miliar.

Berkaitan dengan operasional IFG, pada tahun 2022, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.05/2022 Tentang Pengawasan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia. Perusahaan menyambut baik peraturan OJK tersebut karena dinilai memiliki semangat yang sama dan selaras dengan upaya transformasi dan akselerasi terhadap penerapan tata kelola terintegrasi dan manajemen risiko terintegrasi, baik di holding maupun anak perusahaan. Bagi IFG, POJK yang diundangkan pada 8 Juli 2022 tersebut semakin membuat Perusahaan confident untuk mendorong terwujudnya industri asuransi, penjaminan, dan investasi yang sehat dan berkelanjutan.

Selama tahun 2022, IFG telah melakukan berbagai kebijakan strategis sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan. Pada akhir Desember, dalam posisinya sebagai Ketua Project Management Office (PMO) Percepatan Integrasi Pengelolaan Dana Pensiun BUMN misalnya, IFG melakukan penandatangan nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) rencana kerja sama pengelolaan aset investasi dana pensiun antara IFG dan 8 BUMN pendiri dana pensiun. Adapun ke-8 BUMN tersebut adalah PT Angkasa Pura I, PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo), PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja (Jasa Raharja), PT Nindya Karya (Persero), Perum Jasa Tirta II, Perum Peruri, PT Taspen (Persero) dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.

Bagi Kementerian BUMN, penandatanganan tersebut bermakna penting untuk memastikan bahwa pengelolaan dana pensiun karyawan dapat memberikan manfaat jangka panjang melalui pengelolaan investasi yang sehat. Jika pengelolaan dana pensiun tidak dilakukan secara baik dan optimal maka akan berpotensi menjadi masalah sistemik di masa yang akan datang. Pengelolaan yang baik antara lain terkait pada pemilihan investasi yang memperhatikan secara cermat kewajiban jangka panjang serta penempatan aset pada investasi yang sesuai dengan kewajiban jangka panjang tersebut (asset-liability matching). Di samping itu, karyawan mendapatkan benefit yang sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian dengan tetap memperhatikan kemampuan terukur perusahaan pendiri.

In connection with the policy transfer process, on December 22, 2021, IFG Life handed over policies symbolically to a number of former Jiwasraya customers who had been successfully transferred to corporate and retail customers, as well as symbolic payment of claims for Bancassurance customers with the Mantap Plus Plan C product. In line with the policy transfer process, the Ministry of SOEs stated that the presence of IFG as the SOE Holding for Insurance, Guarantees and Investments was the Government's effort to develop the insurance industry so that it grew healthier and stronger. In the context of transferring the policies of former Jiwasraya customers, IFG Life is not only a savior for Jiwasraya. Moreover, in the future, IFG Life is expected to be able to compete in the life insurance segment and provide maximum protection for the public.

As of December 31, 2021, there were 155,216 policies in the process of transferring the policies of former Jiwasraya customers to IFG Life, or the equivalent of IDR 20.87 trillion. The transfer of this policy represents 63.2 percent of the target of the policy liabilities to be transferred. Meanwhile, the realization of premium receipts until December 2021 reached IDR 24.13 billion, while for stage 0 claims for the Mantap Plus C, Annuity and Claim Payables policies from the former Jiwasraya policy, the payment has reached IDR 976.13 billion.

In relation to IFG operations, in 2022, the Financial Services Authority (OJK) issued Financial Services Authority Regulation Number 13/POJK.05/2022 concerning the Supervision of the Company (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia. The Company welcomes the OJK regulation because it is considered to have the same enthusiasm and is in line with the transformation and acceleration efforts towards the implementation of integrated governance and integrated risk management, both in the holding and subsidiaries. For IFG, the POJK, which was promulgated on July 8, 2022, makes the Company more confident to encourage the realization of a healthy and sustainable insurance, guarantee and investment industry.

During 2022, IFG has carried out various strategic policies in accordance with the Company's goals and objectives. At the end of December, in its position as Chairman of the Project Management Office (PMO) for the Acceleration of the Integration of BUMN Pension Fund Management, for example, IFG signed a memorandum of understanding (MoU) for a cooperation plan for the management of pension fund investment assets between IFG and 8 SOEs pension fund founders. The eight SOEs are PT Angkasa Pura I, PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo), PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja (Jasa Raharja), PT Nindya Karya (Persero), Perum Jasa Tirta II, Perum Peruri, PT Taspen (Persero) and PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.

For the Ministry of SOEs, the signing is important to ensure that the management of employee pension funds can provide long-term benefits through sound investment management. If pension fund management is not implemented properly and optimally, it will potentially become a systemic problem in the future. Good management, among others, is related to the selection of investments that pay careful attention to long-term liabilities and the placement of assets in investments that match these long-term liabilities (asset-liability matching). In addition, employees get benefits in accordance with the agreement stated while still paying attention to the measurable ability of the founding company.



Sejarah

PT BPUI didirikan pada tahun 1973. Pendirian Perusahaan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia No. 18 tahun 1973, tanggal 13 April 1973, tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan dalam Bidang Pengembangan Usaha Swasta Nasional, dan diaktakan dengan Akta No. 11 tanggal 17 April 1973, dibuat di hadapan Mohamad Ali, S.H., Notaris, di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia tertanggal 22 Mei 1973 No. YA.5/191/20 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 57 tanggal 17 Juli 1973 Tambahan Nomor 508.

Sesuai Anggaran Dasar, di antara maksud dan tujuan pendirian Perusahaan adalah, bertujuan untuk melakukan pembinaan terhadap para pengusaha usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia melalui pemberian pendampingan dan modal kerja. Pada saat pendirian, Perusahaan adalah lembaga keuangan sebagaimana ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1256/MK/IV/II/1973, yang kemudian diganti dengan Surat Keputusan No. 444/KMK/017/1993 tertanggal 23 Maret 1993, yang memberi izin usaha lembaga pembiayaan kepada Perusahaan untuk melakukan kegiatan dalam bidang sewa guna usaha, anjak piutang dan kartu kredit. Sejak tahun 1993, Perusahaan memperluas jangkauan usaha ke bidang jasa pembiayaan, sesuai dengan perizinan yang diperoleh Perusahaan.

Seiring dengan perkembangan dan kebutuhan bisnis, PT BPUI melebarkan bisnis layanan keuangannya di bidang investasi pasar modal, investment banking dan securities trading melalui PT Bahana Securities, melakukan joint venture dengan Trust Company of The West dengan membentuk perusahaan manajemen investasi PT Bahana TCW Investment Management, layanan pendampingan dan pembiayaan UMKM melalui PT Bahana Artha Ventura, layanan property management melalui PT Graha Niaga Tata Utama serta layanan penasihat investasi dan keuangan melalui PT Bahana Kapital Investa.

History

PT BPUI was established in 1973. The establishment of the Company was based on Government Regulation (PP) of the Republic of Indonesia No. 18 of 1973, dated April 13, 1973, concerning the Investment of State Capital of the Republic of Indonesia for the Establishment of a Company in the Field of National Private Business Development, and notarized by Deed No. 11 dated April 17, 1973, made before Mohamad Ali, S.H., Notary, in Jakarta, which was approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia on May 22, 1973 No. YA.5/191/20 and has been announced in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 57 dated July 17, 1973 Supplement Number 508

In accordance with the Articles of Association, among the purposes and objectives of the Company's establishment is to provide guidance to micro, small and medium enterprises (MSMEs) entrepreneurs in Indonesia through the provision of assistance and working capital. At the time of establishment, the Company was a financial institution as stipulated by the Decree of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. 1256/MK/IV/II/1973, which was later replaced by Decree No 444/KMK/017/1993 dated March 23, 1993, which granted the Company a license to engage in leasing, factoring and credit card business. Since 1993, the Company has expanded its business into the field of financing services, in accordance with the license obtained by the Company.

Along with business development and needs, PT BPUI expanded its financial services business in the field of capital market investment, investment banking and securities trading through PT Bahana Securities, joint venture with Trust Company of The West by forming an investment management company PT Bahana TCW Investment Management, mentoring and financing services for MSMEs through PT Bahana Artha Ventura, property management services through PT Graha Niaga Tata Utama and investment and financial advisory services through PT Bahana Kapital Investa.





JEJAK LANGKAH

MILESTONES

1973

PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) (BPUI) didirikan pada tahun 1973 memiliki misi untuk membina pengusaha-pengusaha Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) (IFG) was established in 1973 with a mission to foster entrepreneurs of Micro, Small and Medium Enterprises.

1993

Pada tahun 1993 BPUI melakukan pengembangan usaha di bidang pasar modal, di mana kemudian BPUI membentuk anak-anak perusahaan di bidang modal ventura dan pembinaan usaha kecil dan menengah (PT Bahana Artha Ventura), di bidang pasar modal dan pasar uang (PT Bahana Securities), dan di bidang manajemen investasi (PT Bahana TCW Investment Management). In 1993, BPUI conducted business development in the capital market sector, in which later IFG established subsidiaries in the sector of venture capital and small and medium business development (PT Bahana Artha Ventura), in the capital market and money market (PT Bahana Securities), and in the sector of investment management (PT Bahana TCW Investment Management).

2020

- Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1973 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan Dalam Bidang Pengembangan Usaha Swasta Nasional merupakan landasan hukum penunjukan BPUI sebagai holding di bidang Keuangan dan investasi di mana kemudian dengan Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia sebagai landasan hukum penunjukan BPUI sebagai Holding BUMN Asuransi dan Penjaminan sebagai tambahan dari peran BPUI selaku holding dibidang Keuangan dan Investasi. Setelah diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) tersebut Kementerian BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan menindaklanjuti dengan mengeluarkan Keputusan Menteri BUMN melalui surat No. S-203/MBU/03/2020 perihal Persetujuan Penerimaan Pengalihan Saham tanggal 31 Maret 2020 yang kemudian dituangkan dalam akta notaris berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Menteri BUMN selaku RUPS Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia maka BPUI resmi menjadi induk dari PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo), PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo), PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja (Jasa Raharja), dan PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) disamping anak-anak Perusahaan yang sudah ada yaitu PT Bahana Sekuritas, PT Bahana TCW Investment Management, PT Bahana Artha Ventura, PT Grahaniaga Tatautama dan PT Bahana Kapital Investa.
- Sehubungan dengan pembentukan holding tersebut dan sesuai Surat Kementerian BUMN No. S-562/MBU/08/2020 tanggal 6 Agustus 2020 tentang Persetujuan Perubahan Brand dan Logo PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) menjadi Indonesia Financial Group (IFG).
- Di bulan Desember 2020, Pemerintah bersama Komisi VI DPR RI menyetujui penyertaan Modal Negara (PMN) ke IFG untuk mendirikan IFG Life. Pendirian IFG Life sebagai bagian dari IFG menjadi peta bisnis IFG untuk portofolio bisnis di sektor asuransi jiwa, kesehatan dan dana pensiun.
- Government Regulation No. 15 of 2020 concerning Amendments to Government Regulation No. 18 of 1973 concerning State Equity Participation of the Republic of Indonesia for the Establishment of Companies in the sector of National Private Business Development is the legal basis for the appointment of BPUI as a holding company in the sector of finance and investment, in which then with the Government Regulation No. 20 of 2020 concerning the addition of the Republic of Indonesia's State Equity Participation in the Company's Capital (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia serves as the legal basis for the appointment of BPUI as the holding company for the Insurance and Guarantee SOEs, in addition to BPUI's role as a holding company in the field of Finance and Investment. After the issuance of the Government Regulation (PP), the Ministry of SOEs as the Company's General Meeting of Shareholders (GMS) followed up by issuing a Decree of the Minister of SOEs through letter No. S-203/MBU/03/2020 regarding Approval for Acceptance of Transfer of Shares dated March 31, 2020 which was then stated in a notarial deed based on the Deed of Statement of the Minister of SOEs Meeting Resolution as a General Meeting of Shareholders of the Company (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia. With the issuance of said regulation, BPUI officially becomes the holding company for PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo), PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo), PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja (Jasa Raharja), and PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo), in addition to existing subsidiaries, namely PT Bahana Sekuritas, PT Bahana TCW Investment Management, PT Bahana Artha Ventura, PT Grahaniaga Tatautama and PT Bahana Kapital Investa.
- In connection with the establishment of the holding and in accordance with the Ministry of SOEs Letter No. S-562/MBU/08/2020 dated August 6, 2020 concerning Approval of Brand and Logo Changes of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) to Indonesia Financial Group (IFG).
- In December 2020, the Government together with Commission VI of the House of Representatives approved the State Equity Participation (PMN) into IFG to establish IFG Life. The establishment of IFG Life as part of IFG is IFG's business map for business portfolios in the life insurance, health and pension fund sectors.

2004

Selanjutnya pada tanggal 23 Desember 2004, BPUI mengakuisisi PT Grahaniaga Tatautama (GNTU), sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang pengelolaan Gedung (building management).

Subsequently, on December 23, 2004, BPUI acquired PT Grahaniaga Tatautama (GNTU), a company engaged in building management.

2018

Pada bulan Juni 2018, BPUI melakukan aktivasi PT Bahana Kapital Investa (BKI) sebagai salah satu anak usaha yang bergerak di bidang investasi dan jasa penasehat keuangan (advisory).

In June 2018, BPUI activated PT Bahana Kapital Investa (BKI) as a subsidiary engaged in investment and financial advisory services.

2021

Sesuai dengan surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan Nomor S-387/NB.2/2021, IFG melalui Anak Perusahaan IFG Life menerima pengalihan polis eks PT Asuransi Jiwasraya. Berkaitan dengan proses pengalihan tersebut, IFG Life akan melakukan sosialisasi kepada pemegang polis eks Jiwasraya. Sosialisasi akan dilakukan dengan metode luring dan daring. Selanjutnya, pemegang polis yang telah menerima pemberitahuan dapat mengakses <https://asuransi.ifg-life.id/> dan melakukan pengkinian data secara mandiri untuk kemudian mendaftarkan diri guna mengikuti agenda sosialisasi pengalihan polis. Sosialisasi melalui metode luring dapat dilayani di 21 kantor representatif IFG Life yang tersebar di seluruh Indonesia.

In accordance with the letter of the Financial Services Authority (OJK) with Number S-387/NB.2/2021, IFG through its subsidiary IFG Life received the transfer of former PT Asuransi Jiwasraya policies. In connection with the transfer process, IFG Life will conduct socialization to former Jiwasraya policyholders. Socialization will be done via offline and online methods. Furthermore, policyholders who have received a notification can access <https://asuransi.ifg-life.id/> and update their data independently to then register to follow the policy transfer socialization agenda. Socialization via offline method can be served at 21 IFG Life representative offices spread throughout Indonesia.

2022

- Terbit Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.05/2022 tentang Pengawasan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia.
- Sebagai Ketua Project Management Office (PMO) Percepatan Integrasi Pengelolaan Dana Pensiun BUMN, IFG melakukan penandatangan nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) rencana kerja sama pengelolaan aset investasi dana pensiun antara IFG dan 8 BUMN pendiri dana pensiun.
- Financial Services Authority Regulation No. 13/POJK.05/2022 on the Supervision of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero).
- As the Chairperson of the Project Management Office (PMO) for the Acceleration of the Integration of SOEs Pension Fund Management, IFG signed a memorandum of understanding (MoU) on the cooperation plan for the management of pension fund investment assets between IFG and 8 SOEs pension fund founders.



VISI, MISI, DAN BUDAYA PERUSAHAAN [OJK C.1]

VISION, MISSION, AND CORPORATE CULTURE [OJK C.1]



VISI
VISION

Menjadi Perusahaan grup Keuangan Perasuransian dan Penjaminan yang terdepan, terpercaya, dan terintegrasi dalam memberikan layanan jasa dan produk yang terkemuka dan handal.

To become a leading, trusted, and integrated Insurance and Guarantee Financial Group Company in providing leading and reliable services and products.



MISI
MISSION

1. Memberikan jaminan perlindungan dasar dan kemudahan usaha kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dan taraf hidup bangsa di seluruh wilayah dalam kerangka negara kesatuan.
 2. Memberikan pelayanan berkualitas, solusi inovatif dan terintegrasi melalui SDM yang kompeten dan produk yang accessible dalam menjawab kebutuhan nasabah dan meningkatkan nilai pemegang saham.
 3. Menjalankan usaha yang sustainable dengan menjunjung nilainilai tata kelola perusahaan yang baik dengan berlandaskan sinergi dan prinsip *Utmost Good Faith*.
1. Provide basic protection guarantees and ease of business to the community to improve the social welfare and standard of living of the nation in all regions within the framework of a unitary state.
 2. Provide quality services, innovative and integrated solutions through competent HR and accessible products in responding to customer needs and increasing shareholders' values
 3. Operate a sustainable business by upholding the values of good corporate governance based on synergy and the principle of Utmost Good Faith.

REVIEW VISI DAN MISI PERUSAHAAN OLEH MANAJEMEN KUNCI

Dewan Komisaris dan Direksi telah melakukan kajian atas visi dan misi Perusahaan, baik dalam periodik jangka pendek maupun Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2022 yang telah disahkan dan ditandatangani oleh Dewan Komisaris dan Direksi pada tanggal 28 Januari 2022.

REVIEW OF COMPANY VISION AND MISSION BY KEY MANAGEMENT

The Board of Commissioners and the Board of Directors have reviewed the Company's vision and mission both in the short-term period and in the 2022 Corporate Work Plan and Budget (RKAP) which was ratified and signed by the Board of Commissioners and the Board of Directors on January 28, 2022.

TUJUAN PERUSAHAAN

COMPANY'S OBJECTIVES

TUJUAN PERUSAHAAN

Sebagai Perusahaan BUMN Holding Asuransi, Penjaminan, dan Investasi, Perusahaan memiliki 3 (tiga) objektif utama, antara lain:

1. Meningkatkan Bisnis Non-Asuransi Jiwa

Saat ini, perusahaan non-asuransi jiwa terbesar yang memberikan pengaruh terhadap keseimbangan kondisi di Industri, praktik terbaik dan potensi sinergi dengan perusahaan BUMN lainnya.

- a. Menjaga keseimbangan Industri dengan mitra-mitra bisnis (mis. bank, dealers, penyedia layanan Kesehatan) untuk memastikan praktik bisnis yang lebih berkelanjutan;
- b. Menyediakan arahan yang strategis termasuk fokus pada bisnis, cross-selling, shared-services, dan infrastruktur; dan
- c. Manajemen risiko yang kuat dan berdasarkan prinsip kehatihan.

2. Transformasi Bisnis Asuransi Jiwa

Menciptakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terbesar di Indonesia dengan memetamorfosikan perusahaan asuransi tertua di Indonesia.

- a. Konsep "Bridge Bank": Perusahaan asuransi jiwa yang baru untuk mengambil alih portofolio yang direstrukturisasi;
- b. Restrukturisasi yang massif untuk membuat portofolio yang sehat;
- c. Didorong oleh dukungan signifikan dari pemerintah termasuk PMN, konsesi ke pasar captive, dan lain-lain; dan
- d. Bisnis baru termasuk kerja sama dengan BUMN, membuat platform kesehatan yang baru, dan institusi pemerintahan.

3. Agen Pengembangan

Menciptakan sebuah model yang berkelanjutan sebagai agen pengembangan untuk mendukung program pemerintah.

- a. Mengembangkan sebuah model yang berkelanjutan untuk mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang melibatkan Jamkrindo dan Askrindo;
- b. Menyediakan penjaminan kredit untuk KUR (Kredit Usaha Rakyat) dan UMKM (bisnis mikro dan kecil); dan
- c. Memastikan Jamkrindo dan Askrindo tidak terekspos risiko kredit yang berlebihan.

COMPANY'S OBJECTIVES

As an Insurance, Guarantee, and Investment Holding Company, the Company has 3 (three) main objectives, among others:

1. Increase Non-Life Insurance Business

Currently, the Company is the largest non-life insurance company that has an influence on the balance of conditions in the industry, best practices and potential synergies with other state-owned enterprises.

- a. Maintain a balance of Industry with business partners (e.g. banks, dealers, healthcare providers) to ensure more sustainable business practices
- b. Provide strategic direction including focus on business, cross-selling, shared-services, and infrastructure; and
- c. Strong and prudent risk management

2. Life Insurance Business Transformation

Creating one of the largest life insurance companies in Indonesia by metamorphosing the oldest insurance company in Indonesia.

- a. "Bridge Bank" concept: New life insurance company to take over restructured portfolio;
- b. Massive restructuring to create a healthy portfolio;
- c. Driven by significant support from the government including State Equity Participation (PMN), concessions to captive markets, etc; and
- d. New business including cooperation with SOEs, creating new healthcare platforms, and government institutions.

3. Development Agent

Creating a sustainable model as a development agent to support government programs.

- a. Develop a sustainable model to support the National Economic Recovery (PEN) Program involving Jamkrindo and Askrindo;
- b. Provide credit guarantees for KUR (People's Business Credit) and MSMEs (micro, small, and medium enterprises);
- c. Ensure that Jamkrindo and Askrindo are not exposed to excessive credit risk



SIKAP DASAR DAN BUDAYA PERUSAHAAN

BASIC ATTITUDE AND CORPORATE CULTURE

AKHLAK

Sesuai dengan Surat Edaran No. SE – 07/MBU/07/2020 tentang Nilai-Nilai Utama (Core Values) Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara tanggal 1 Juli 2020 dan Surat Keputusan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia No. 042/SK-DIR/CORP/BPUI/IX/2020 tentang Penetapan Nilai-Nilai Utama (Core Values) Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia tanggal 29 September 2020, maka saat ini nilai-nilai utama Perusahaan yaitu Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif (AKHLAK) dengan penjabaran sebagai berikut:

In accordance with Circular Letter No. SE- 07/MBU/07/2020 concerning the Core Values of Human Resources of State-Owned Enterprises dated July 1, 2020, and the Decree of the Board of Directors of the Company (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia No. 042/SK-DIR/CORP/BPUI/IX/2020 concerning the Determination of the Core Values of the Company (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia dated September 29, 2020, currently, the Company's main values are Amanah (Trustworthy), Kompeten (Competent), Harmonis (Harmonious), Loyal (Loyal), Adaptif (Adaptive), and Kolaboratif (Collaborative) which is abbreviated into AKHLAK (Moral Values) with the following description:

AMANAH TRUSTWORTHY

Kami memegang teguh kepercayaan yang diberikan dengan memenuhi janji dan komitmen, bertanggung jawab atas tugas, keputusan dan tindakan yang dilakukan serta berpegang teguh kepada nilai moral dan etika.

The Company upholds the trust given by fulfilling promises and commitments, being responsible for the tasks, decisions and actions taken and adhering to moral and ethical values

KOMPETEN COMPETENT

Kami terus belajar dan mengembangkan kapabilitas dengan meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, membantu orang lain belajar dan menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik.

The Company continues to learn and develop its capabilities by improving competence to respond to ever-changing challenges, helping others learn and completing assignments with the best quality.

HARMONIS

HARMONIOUS

Kami terus meningkatkan rasa saling peduli dan menghargai perbedaan yang ada apapun latar belakangnya serta selalu berkeinginan untuk menolong sesama dan juga membangun lingkungan kerja yang kondusif.

The Company continues to increase mutual care and respect for differences regardless of background and always want to support others and also build a conducive work environment

LOYAL

LOYAL

Kami akan terus berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara dengan cara menjaga nama baik karyawan, pimpinan, Badan Usaha Milik Negara dan Negara. Rela berkorban untuk mencapai tujuan yang lebih besar dan juga menjunjung tinggi rasa patuh kepada pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan juga etika.

The Company will continue to be dedicated and prioritize the interests of the nation and state by maintaining the good name of employees, leaders, State-Owned Enterprises and the State. The Company is willing to sacrifice to achieve a bigger goal and also uphold a sense of obedience to the leadership as long as it does not conflict with the law and ethics

ADAPTIF

ADAPTIVE

Kami akan terus berinovasi dan juga dengan antusias menggerakkan ataupun menghadapi perubahan yang terjadi dengan menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik, terus-menerus melakukan perbaikan dengan mengikuti perkembangan teknologi dan bertindak proaktif.

The Company will continue to innovate and also enthusiastically drive or face changes that occur by adapting to be better, to continuously make improvements by following technological developments and acting proactively

KOLABORATIF

COLLABORATIVE

Kami terus membangun kerja sama yang sinergis dengan cara memberikan kesempatan kepada pihak untuk berkontribusi, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah dan juga mengerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.

The Company continues to build synergistic cooperation by providing opportunities for parties to contribute, being open to working together to generate added value and also mobilizing the use of various resources for common goals.



BIDANG USAHA, PRODUK DAN JASA [OJK C.4]

LINE OF BUSINESS, PRODUCTS AND SERVICES [OJK C.4]

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan yang terakhir diubah melalui Akta No. 07 tanggal 6 April 2020, maksud dan tujuan Perusahaan adalah melaksanakan kegiatan sebagai perusahaan holding di bidang keuangan dan investasi serta konsultasi manajemen untuk kepentingan afiliasi atau pihak lain termasuk usaha mikro, kecil dan menengah, dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perusahaan berdasarkan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

Sebagai Holding BUMN Perasuransian dan Penjaminan, saat ini IFG memiliki 11 (sebelas) anak perusahaan, yang terdiri dari 5 (lima) anak perusahaan yang bergerak di bidang asuransi dan penjaminan serta 6 (enam) anak perusahaan yang bergerak di bidang pasar modal dan investasi. Melalui 11 (sebelas) anak perusahaan tersebut, Perusahaan melakukan kegiatan usaha di bidang asuransi, penjaminan, modal ventura, sekuritas, manajer investasi, penasehat investasi, konsultan keuangan dan konsultan manajemen, serta usaha jasa-jasa keuangan lainnya termasuk pada usaha pengelolaan gedung perkantoran.

Kegiatan usaha yang dijalankan Perusahaan melalui 11 (sebelas) anak perusahaannya, secara rinci dapat dijabarkan sebagai berikut:

Kegiatan Usaha Business Activities	Telah/Belum Dijalankan Has/Has not been Carried Out	Keterangan Description
Jasa Keuangan dan Pasar Modal Financial Service and Capital Market	✓	Telah dijalankan melalui PT Bahana Sekuritas (BS), PT Bahana TCW Investment Management (BTIM), PT Bahana Artha Ventura (BAV), PT Bahana Kapital Investa (BKI), dan PT Bahana Mitra Investa (BMI). It has been carried out through PT Bahana Sekuritas (BS), PT Bahana TCW Investment Management (BTIM), PT Bahana Artha Ventura (BAV), PT Bahana Kapital Investa (BKI), PT Grahaniaga Tatautama (GNTU) and PT Bahana Mitra Investa (BMI).
Asuransi Umum dan Reasuransi General Insurance and Reinsurance	✓	Telah dijalankan melalui PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja (Jasa Raharja), PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) dan PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo). It has been carried out through PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja (Jasa Raharja), PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) and PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo).
Penjaminan Guarantee	✓	Telah dijalankan melalui PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo). It has been carried out through PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo).
Asuransi Jiwa dan Kesehatan Life and Health Insurance	✓	Telah dijalankan melalui PT Asuransi Jiwa IFG (IFG Life). It has been carried out by PT Asuransi Jiwa IFG (IFG Life)
Jasa Non- Keuangan Non Financial Service it has been carried out through	✓	PT Grahaniaga Tatautama (GNTU),

v = telah dijalankan / x = belum dijalankan
✓ = has been carried out / x = has not been carried out

In accordance with the Company's Articles of Association which was last amended through Deed No. 07 dated April 6, 2020, the purpose and objective of the Company is to do activities as a holding company in the fields of finance and investment as well as management consulting for the benefit of affiliates or other parties including micro, small and medium enterprises, and optimizing the utilization of Company resources based on the principles of Good Corporate Governance.

As a Holding Company of Insurance and Guarantee SOEs, IFG currently has 11 (eleven) subsidiaries, consisting of 5 (five) subsidiaries engaged in insurance and guarantee and 6 (six) subsidiaries engaged in capital market and investment. Through these 11 (eleven) subsidiaries, the Company conducts business activities in the fields of insurance, guarantee, venture capital, securities, investment managers, investment advisors, financial consultants and management consultants, as well as other financial services businesses including office building management businesses.

The business activities carried out by the Company through its 11 (eleven) subsidiaries can be described in detail as follows:

PRODUK DAN LAYANAN [OJK C.4]

PRODUCTS AND SERVICES [OJK C.4]

Per 31 Desember 2022, produk dan layanan IFG melalui 11 (sebelas) anak perusahaan terdiri dari:

As of December 31, 2022, IFG's products and services through 11 (eleven) subsidiaries consist of:

Jenis Produk dan Layanan Type of Products and Services	Keterangan Description
Produk Products	
Reksa Dana Mutual Funds	Melalui PT Bahana TCW Investment Management (BTIM), IFG memiliki beragam produk Reksadana baik Reksadana Pasar Uang, Reksadana Pendapatan Tetap, Reksadana Ekuitas, Reksadana Campuran, Reksadana Index, Reksadana Terproteksi, Reksadana Penyertaan Terbatas/Investasi Alternatif, dan Kontrak Pengelolaan Dana.
Pendanaan Ultra Mikro Ultra Micro Funding	BAV sebagai agent of Development UMKM menyalurkan program UMi Pusat Investasi Pemerintah (PIP) kepada Koperasi untuk mendukung pengusaha mikro.
Pendanaan PMVD PMVD (Regional Venture Capital Company) Funding	Melalui anak usaha Perusahaan Modal Ventura Daerah (PMVD) yang tersebar di 25 provinsi di Indonesia, maka BAV memperkuat jaringan kerja dan memperluas basis UMKM yang ada di setiap daerah.
Pendanaan PMVJP PMVJP (Short-Term Venture Capital Company) Funding	PMVJP merupakan pembiayaan Anjak Piutang/Invoice Financing yaitu jasa pengalihan piutang (hak tagih) jangka pendek yang dimiliki oleh Nasabah kepada BAV.
Layanan Services	
Asuransi dan Penjaminan Insurance and Guarantee	Jamkrindo: Penjaminan Konsumtif, Penjaminan Produktif, KUR, PEN dan Suretyship Askrindo: KUR, AKK, AKM, Askredag, Surety, KBG, Asuransi Umum, LC/SKBDN dan PEN Jasindo: Cargo, Aviation, M.Hull, Offshore, Onshore, Fire, Engineering, Motor, Satellite, Public Liability, Accidental & Health, Credit, Suretyship and Miscellaneous Jasa Raharja: Iuran Wajib dan Sumbangan Wajib Jamkrindo: Consumptive Guarantee, Productive Guarantee, KUR, PEN and Suretyship Askrindo: KUR, AKK, AKM, Askredag, Surety, KBG, Asuransi Umum, LC/SKBDN and PEN Jasindo: Cargo, Aviation, M.Hull, Offshore, Onshore, Fire, Engineering, Motor, Satellite, Public Liability, Accidental & Health, Credit, Suretyship and Miscellaneous Jasa Raharja: Compulsory Premium and Compulsory Contribution
Jasa Perantara Pedagangan Efek bersifat ekuitas (saham) Equity-based Securities Trading Brokerage Services (shares)	PT Bahana Sekuritas (BS) memiliki izin sebagai Perantara Pedagang Efek dengan strategi meningkatkan volume transaksi untuk memperbesar market shares dan untuk meningkatkan pendapatan usaha. PT Bahana Sekuritas (BS) has a license as a Broker-Dealer with a strategy of increasing transaction volume to increase market shares and to increase operating income.
Jasa Perantara Pedagangan Efek bersifat Utang dan Sukuk (EBUS) Debt and Sukuk-based Securities (EBUS) Trading Brokerage Services	PT Bahana Sekuritas (BS) memiliki layanan Jasa Perantara Pedagangan Efek bersifat Utang dan Sukuk (EBUS). Hal ini selaras dengan penetapan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 9/POJK.04/2019 tentang Perantara Pedagang Efek untuk Efek Bersifat Utang dan Sukuk. PT Bahana Sekuritas (BS) has Debt and Sukuk Securities Trading Brokerage Services (EBUS). This is in line with the stipulation of Financial Services Authority Regulation No. 9/POJK.04/2019 concerning Securities Broker-Dealers for Debt Securities and Sukuk.
Penjamin Emisi Efek Underwriter	PT Bahana Sekuritas (BS) melakukan penjaminan emisi efek untuk saham dan utang. PT Bahana Sekuritas (BS) underwrites securities issuance for shares and debt.
Penasihat Keuangan Financial Advisor	PT Bahana Kapital Investa (BKI) merupakan anak perusahaan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia yang bergerak di bidang investasi dan jasa penasihat keuangan (financial advisory) dan sudah berdiri sejak tahun 1993 dengan nama PT Bahana Mitra Usaha. Seiring perkembangannya, BKI memiliki layanan jasa konsultasi meliputi Feasibility Study, Merger and Acquisition, Divestment, Capital Raising, Debt Restructuring, Alliance & Joint Venture, Risk Management, and Leverage Buyout. PT Bahana Kapital Investa (BKI) is a subsidiary of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia which is engaged in investment and financial advisory services and has been established since 1993 under the name PT Bahana Mitra Usaha. Along with its development, BKI has consulting services including Feasibility Study, Merger and Acquisition, Divestment, Capital Raising, Debt Restructuring, Alliance & Joint Venture, Risk Management, and Leverage Buyout.
Manajemen Aset Asset Management	PT Bahana TCW Investment Management mendapatkan pendapatan usaha yang bersumber dari kegiatan utama perusahaan adalah pendapatan usaha yang dihasilkan dari jasa pengelolaan produk investasi yang dikelola perusahaan. Prinsip pengelolaan risiko yang berhati-hati (prudent) dan ketataan terhadap peraturan telah melekat dan dijalankan oleh seluruh insan BTIM dalam praktik pengelolaan perusahaan dan portofolio secara berkesinambungan. PT Bahana TCW Investment Management earns business income sourced from the company's main activities, namely business income generated from investment product management services managed by the company. The principles of prudent risk management and compliance with regulations have been adhered to and conducted by all BTIM personnel in the practice
Investasi dan Manajemen Properti Investment and Property Management	PT Grahaniaga Tatautama (GNTU) merupakan pemilik dan pengelola Gedung Graha CIMB yang merupakan landmark Jalan Sudirman dan telah memperoleh Sertifikasi Green Building sejak tahun 2015. PT Grahaniaga Tatautama (GNTU) owns and manages Graha CIMB Building which is a landmark on Jalan Sudirman and has received Green Building Certification since 2015
Jasa Keuangan Non Bank dan Investasi Non-Bank Financial Services and Investment	PT Bahana Mitra Investa bergerak di bidang jasa keuangan non bank dan investasi, BMI pada tahun buku 2022 tidak melakukan kegiatan usaha atau dalam kondisi dormant. PT Bahana Mitra Investa is engaged in non-bank financial services and investment, BMI in the financial year 2022 does not carry out business activities or is in a dormant condition.

Kompetensi Inti

IFG memiliki kompetensi inti sebagai penyedia solusi yang berkualitas bagi pelanggannya. Setiap produk dan jasa yang dibuat oleh Perusahaan adalah solusi terhadap kebutuhan pelanggan dan diberikan dalam kualitas yang tinggi secara konsisten.

Core Competency

IFG has a core competency as a quality solution provider for its customers. Every product and service made by the Company is a solution to customer's needs and is provided in consistently high quality.



WILAYAH DAN JARINGAN OPERASI

OPERATION AREA AND NETWORK

Hingga akhir tahun 2022, IFG beserta 11 (sebelas) anak perusahaan beroperasi di seluruh wilayah Indonesia.

By the end of 2022, IFG and its 11 (eleven) subsidiaries operate in all region in Indonesia





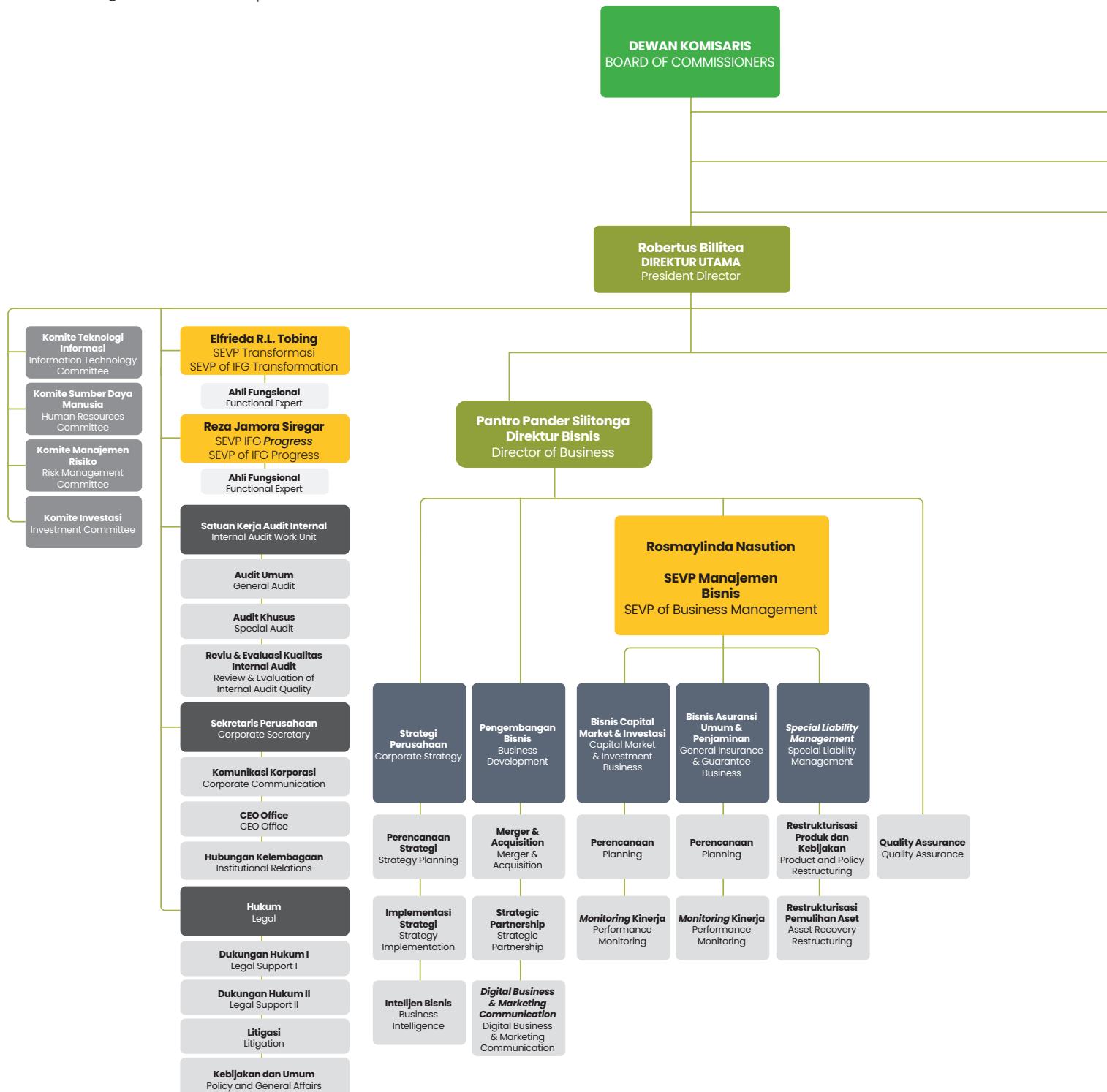


STRUKTUR ORGANISASI

ORGANIZATIONAL STRUCTURE

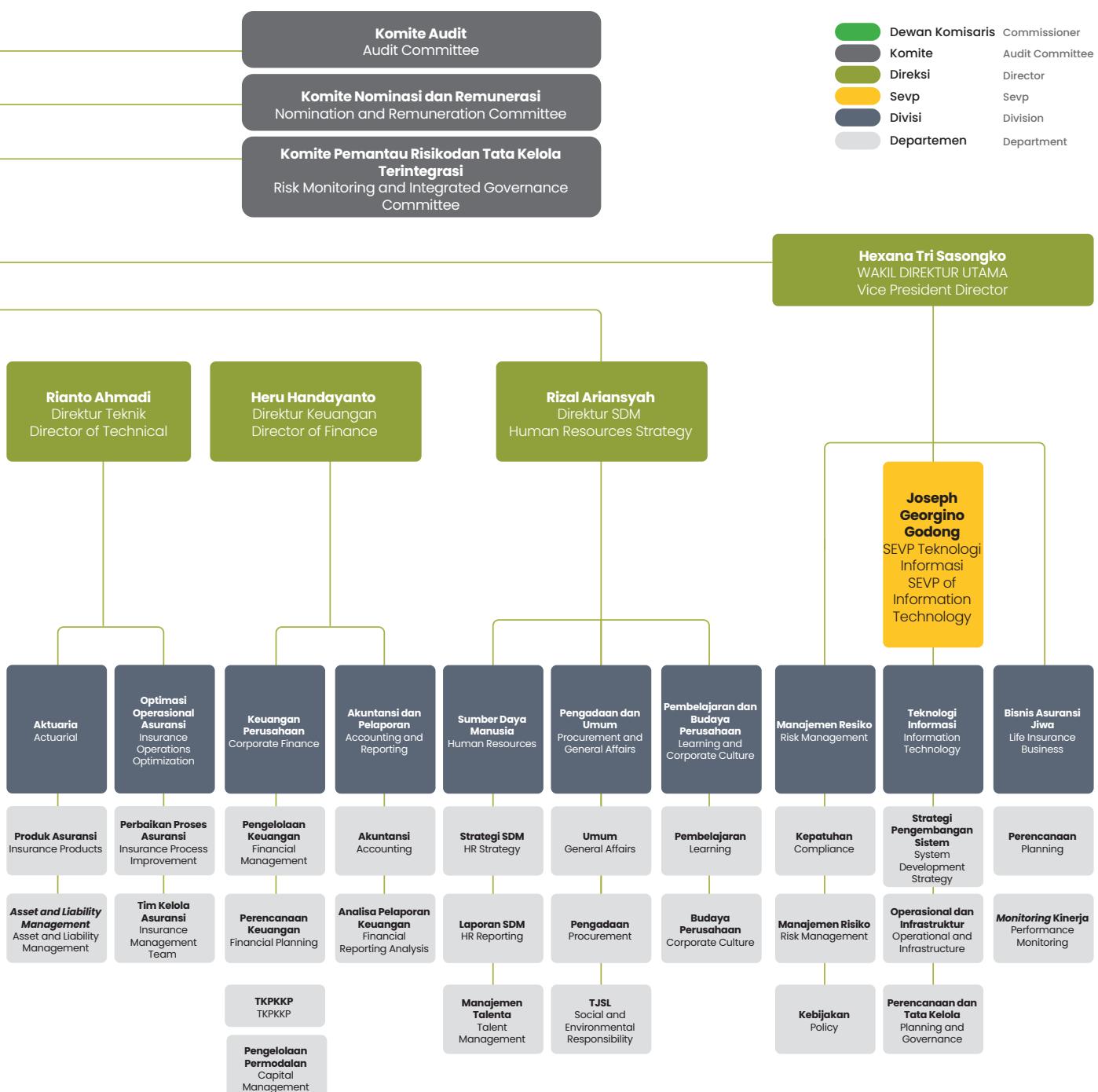
Struktur organisasi IFG disusun dan ditetapkan berdasarkan pertimbangan arah dan tujuan pengembangan korporasi, efektivitas pengelolaan korporasi, alur kerja yang efektif serta proses kontrol yang seimbang sehingga memberikan dukungan optimal kepada arah tujuan Perusahaan. Struktur organisasi Perusahaan telah disahkan melalui Surat Keputusan Direksi IFG No. 67 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Surat Keputusan Direksi IFG No. 30 Tahun 2022 tentang Kebijakan Struktur Organisasi. Adapun struktur organisasi Perusahaan dapat dilihat sebagai berikut:

Struktur Organisasi Perusahaan per 31 Desember 2022



IFG's organizational structure is prepared and determined based on consideration of the direction and objectives of corporate development, effectiveness of corporate management, effective workflow and balanced control processes so as to provide optimal support to the direction of the Company's goals. The Company's organizational structure has been ratified through IFG's Board of Directors Decree No. 67 of 2022 on Amendment to IFG Board of Directors Decree No. 30 of 2022 on Organizational Structure Policy. Company's organizational structure can be summarized as follows:

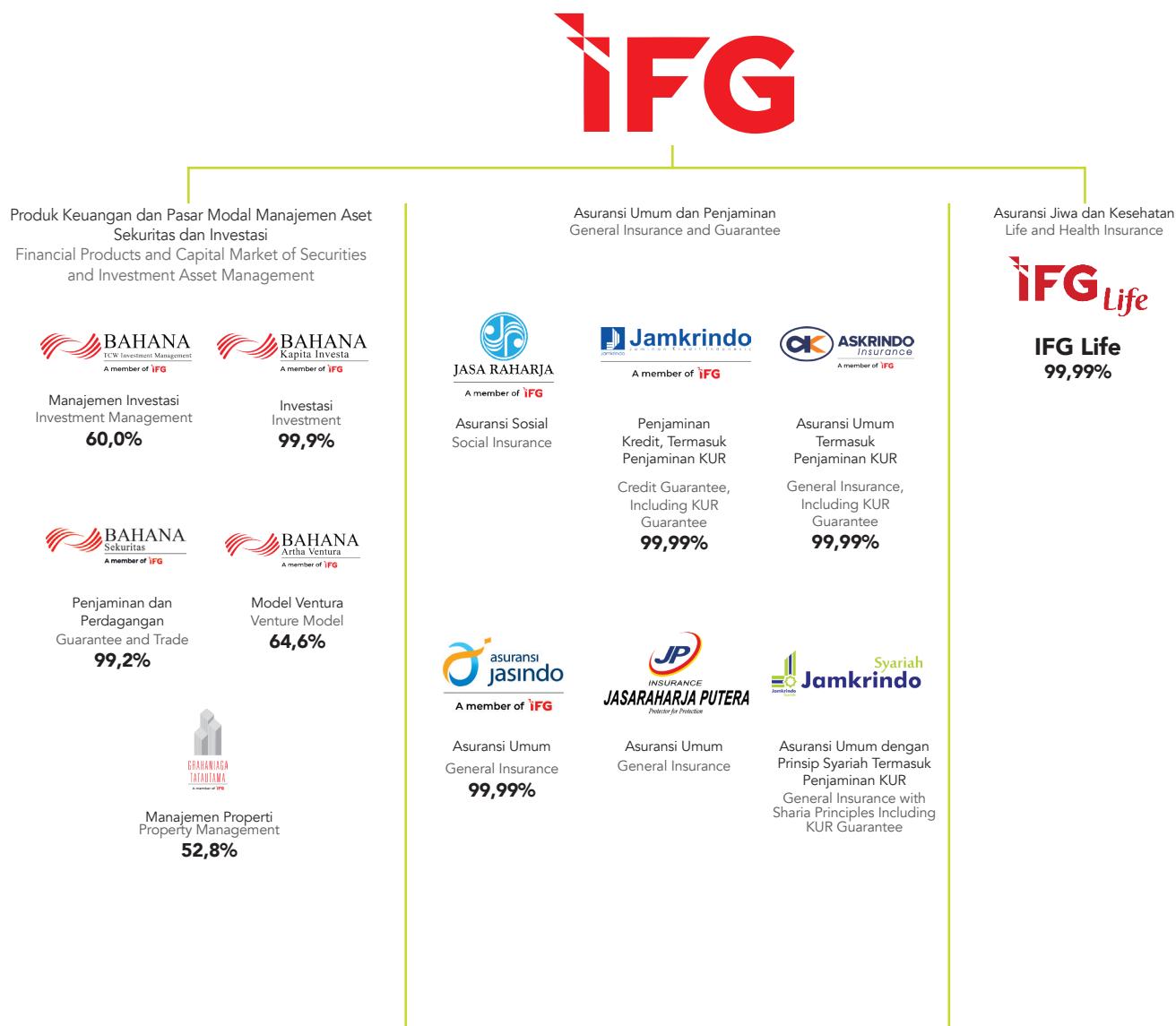
Company Organizational Structure as of December 31, 2022





STRUKTUR GRUP

GROUP STRUCTURE



ALAMAT KANTOR PUSAT DAN ENTITAS ANAK [OJK C.2]

ADDRESS OF HEAD OFFICE AND SUBSIDIARIES [OJK C.2]

KANTOR PUSAT

Graha CIMB Niaga, Lantai 18
Jl. Jendral Sudirman Kav. 58
RT.5/RW.3, Senayan, Kebayoran Baru
Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12190
Telp. : (+62 21) 50890929
Surel: cs@ifg.id
Situs web: www.ifg.id

HEAD OFFICE

Graha CIMB Niaga, 18th floor
Jl. Jendral Sudirman Kav. 58
RT.5/RW.3, Senayan, Kebayoran Baru
South Jakarta, DKI Jakarta 12190
Phone : (+62 21) 50890929
Email: cs@ifg.id
Website: www.ifg.id

ALAMAT ENTITAS ANAK

PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja
Jl. HR. Rasuna Said Kav. C-2, Kuningan, Jakarta 12920
Telp: +6281210500500
Fax: +62 21 522084
Surel: pusat@jasaraharja.co.id
Web: www.jasaraharja.co.id

PT Jaminan Kredit Indonesia
Gedung Jamkrindo
Jl. Angkasa Blok B-9 Kav.6 Kota Baru, Bandar Kemayoran, Jakarta Pusat 10610
Telp: +62 21 6540335
Surel: contact@jamkrindo.co.id
Web: www.jamkrindo.co.id

PT Asuransi Kredit Indonesia
Jl. Angkasa Blok B-9, Kav. B Kota Baru Bandar Kemayoran Jakarta 10610
Telp: +62 21 6546471-72
Fax: +62 21 6546483-84
Surel: askrindo@askrindo.co.id
Web: www.askrindo.co.id

PT Asuransi Jasa Indonesia
Graha Jasindo, Jl. Menteng Raya No.21, RW.10, Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10340
Telepon: +6221 7987908
Contact Center: 1500073
Surel: contactcenter@asuransijasindo.co.id
Situs: www.jasindo.co.id

PT Bahana TCW Investment Management
Graha CIMB Niaga, Lantai 21
Jl. Jend. Sudirman, Kav 58, Jakarta 12190 - Indonesia
Telp: +62 21 250 5585
Surel: support.bahanatcw@bahana.co.id
Web: www.link.bahanatcw.com

PT Grahaniaga Tatautama
Graha CIMB Niaga, Lantai B1
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58, Jakarta 12190 Indonesia
Telp: +62 21 2505250
Fax: +62 21 2505150
Web: www.grahaniaga.co.id

PT Bahana Artha Ventura
KMO Building Suite 701, Lt.7
Jl. Kyai Maja No.1
Gunung Kebayoran - Jakarta Selatan 12120
Telp : +62 21 7918 2688
web : www.bahanaventura.com

PT Bahana Sekuritas
Graha CIMB Niaga, Lantai 19
Jl. Jendral Sudirman Kav. 58 Jakarta 12190, Indonesia
Telp: +62 21 250 5678
Fax: +62 21 250 5087
Surel: cs@bahana.co.id
Web: www.bahanasekuritas.id

PT Bahana Kapital Investa
Graha CIMB Niaga, Lantai 23
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58, Jakarta 12190 - Indonesia
Telp: +62 21 2505080
Surel: adminbki@bahana.co.id
Web: www.bahanakapitalinvesta.id

PT Asuransi Jiwa IFG
Graha CIMB Niaga Lantai 6
Jl. Jend. Sudirman Kav 58 Jakarta – 12190
Telp: +62 21 1500 176
Surel: customer_care@ifg-life.id
Web: www.ifg-life.id

PT Bahana Mitra Investa (BMI)
Di tahun 2022, BMI tidak melakukan kegiatan usaha atau dalam kondisi dormant dan hanya menempatkan dana dalam bentuk deposito bank.

ADDRESSES OF SUBSIDIARIES

PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja
Jl. HR. Rasuna Said Kav. C-2, Kuningan, Jakarta 12920
Phone: +6281210500500
Fax: +62 21 522084
Email: pusat@jasaraharja.co.id
Web: www.jasaraharja.co.id

PT Jaminan Kredit Indonesia
Jamkrindo Building
Jl. Angkasa Blok B-9 Kav.6 Kota Baru, Bandar Kemayoran, Central Jakarta 10160
Phone: +62 21 6540335
Email: contact@jamkrindo.co.id
Web: www.jamkrindo.co.id

PT Asuransi Kredit Indonesia
Jl. Angkasa Blok B-9, Kav. B Kota Baru Bandar Kemayoran Jakarta 10610
Phone: +62 21 6546471-72
Fax: +62 21 6546483-84
Email: askrindo@askrindo.co.id
Web: www.askrindo.co.id

PT Asuransi Jasa Indonesia
Graha Jasindo, Jl. Menteng Raya No.21, RW.10, Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Central Jakarta, Special Capital Region of Jakarta 10340
Phone: +6221 7987908
Contact Center: 1500073
Email: contactcenter@asuransijasindo.co.id
Web: www.jasindo.co.id

PT Bahana TCW Investment Management
Graha CIMB Niaga, 21st floor
Jl. Jend. Sudirman, Kav 58, Jakarta 12190 - Indonesia
Phone: +62 21 250 5585
Email: support.bahanatcw@bahana.co.id
Web: www.link.bahanatcw.com

PT Grahaniaga Tatautama
Graha CIMB Niaga, B1 floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58, Jakarta 12190 Indonesia
Phone: +62 21 2505250
Fax: +62 21 2505150
Web: www.grahaniaga.co.id

PT Bahana Artha Ventura
KMO Building
Suite 701, Lt.7
Jl. Kyai Maja No.1
Gunung Kebayoran - South Jakarta 12120
Phone: +62 21 7918 2688
Web: www.bahanaventura.com

PT Bahana Sekuritas
Graha CIMB Niaga, 19th floor
Jl. Jendral Sudirman Kav. 58 Jakarta 12190, Indonesia
Phone: +62 21 250 5678
Fax: +62 21 250 5087
Email: cs@bahana.co.id
Web: www.bahanasekuritas.id

PT Bahana Kapital Investa
Graha CIMB Niaga, 23rd floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58, Jakarta 12190 - Indonesia
Phone: +62 21 2505080
Email: adminbki@bahana.co.id
Web: www.bahanakapitalinvesta.id

PT Asuransi Jiwa IFG
Graha CIMB Niaga, 6th floor
Jl. Jend. Sudirman Kav 58 Jakarta – 12190
Phone: +62 21 1500 176
Email: customer_care@ifg-life.id
Web: www.ifg-life.id

PT Bahana Mitra Investa (BMI)
In 2022, BMI did not conduct business activities or in dormant conditions and only put funds in the form of bank deposits.



INFORMASI TENTANG KARYAWAN [OJK C.3]

INFORMATION ABOUT EMPLOYEES [OJK C.3]

Karyawan merupakan penggerak dan garda depan bagi IFG dalam memberikan layanan terbaik. Per 31 Desember 2022, Perusahaan memiliki 242 orang karyawan, bertambah 63 orang atau 35,20% dibanding tahun 2021 dengan karyawan sebanyak 179 orang. Penambahan terjadi untuk menyesuaikan dengan pengembangan Perseroan. Komposisi karyawan IFG berdasarkan status, jenis kelamin, rentang usia, kelompok usia, jenjang pendidikan, dan level organisasi selengkapnya disajikan dalam tabel-tabel berikut:

[OJK C.3]

Employees are the driving force and frontline for IFG in providing the best service. As of December 31, 2022, the Company has 242 employees, an increase of 63 people or 35.20% compared to 2021 with 179 employees. The addition occurred to adjust to the development of the Company. IFG's employee composition based on status, gender, age range, age group, education level, and organizational level is presented in the following tables: [OJK C.3]

Komposisi Karyawan Berdasarkan Status dan Jenis Kelamin Tahun 2020–2022

Employee Composition by Status and Gender in 2020–2022

Status Keppegawaiannya Employment Status	2022				2021				2020			
	L M	P F	Jumlah Total	Percentase (%) Percentage (%)	L M	P F	Jumlah Total	Percentase (%) Percentage (%)	L M	P F	Jumlah Total	Percentase (%) Percentage (%)
Karyawan Tetap Permanent Employee	122	201	223	92,15	94	63	157	87,71%	36	25	61	79,2%
Karyawan Kontrak Contract Employee(s)	11	8	19	7,85	9	13	22	12,29%	5	11	16	20,8%
Jumlah Total	133	109	242	100,00	103	76	179	100,00	41	36	77	100,00%

Komposisi Karyawan Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2020–2022

Employee Composition by Gender in 2020–2022

Gender/Jenis Kelamin Gender	2022			2021			2020			
	Jumlah Total	Percentase (%) Percentage (%)								
Laki-laki Male	133	54,96			103	57,55	41	53,2%		
Perempuan Female	109	45,04			76	42,45	36	46,7%		
Jumlah Total	242	100,00			179	100,00%	77	100,00%		

Komposisi Karyawan Berdasarkan Usia dan Jenis Kelamin Tahun 2020–2022

Employee Composition by Age and Gender in 2020–2022

Rentang Usia Age Group	2022				2021				2020			
	L M	P F	Jumlah Total	Percentase (%) Percentage (%)	L M	P F	Jumlah Total	Percentase (%) Percentage (%)	L M	P F	Jumlah Total	Percentase (%) Percentage (%)
> 55 tahun > 55 years old	3	2	5	2,07	2	3	5	2,79	1	0	1	1,4
51 – 55 tahun 51 - 55 years old	6	5	11	4,55	8	3	11	6,1	6	2	8	11,0
46 – 50 tahun 46 - 50 years old	14	4	18	7,44	12	3	15	8,3	10	4	14	19,2

Komposisi Karyawan Berdasarkan Usia dan Jenis Kelamin Tahun 2020–2022

Employee Composition by Age and Gender in 2020–2022

Rentang Usia Age Group	2022				2021				2020			
	L M	P F	Jumlah Total	Percentase (%) Percentage (%)	L M	P F	Jumlah Total	Percentase (%) Percentage (%)	L M	P F	Jumlah Total	Percentase (%) Percentage (%)
41 – 45 tahun 41 - 45 years old	23	10	33	13,64	19	6	25	13,9	8	4	12	16,4
36 – 40 tahun 36 - 40 years old	16	15	31	12,81	6	8	14	7,8	4	5	9	12,3
31 – 35 tahun 31 - 35 years old	30	15	45	18,60	21	13	34	18,99	5	7	12	16,4
26 – 30 tahun 26 - 30 years old	33	33	66	27,27	24	20	44	24,5	2	4	6	8,2
21 – 25 tahun 21 - 25 years old	8	25	33	13,64	11	20	31	17,3	5	6	11	15,1
< 20 tahun < 20 years old	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Total	133	109	242	100,00	103	76	179	100,00	41	36	73	100,00%

L = Laki-laki / P = Perempuan

M = Male / F = Female

Komposisi Karyawan Berdasarkan Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2020–2022

Employee Composition by Education Level and Gender 2020–2022

Jenjang Pendidikan Education Level	2022				2021				2020			
	L M	P F	Jumlah Total	Percentase (%) Percentage (%)	L M	P F	Jumlah Total	Percentase (%) Percentage (%)	L M	P F	Jumlah Total	Percentase (%) Percentage (%)
>Strata 2 > Master's Degree	39	18	60	24,79	30	12	42	23,46	10	5	15	19,5%
Strata 1 Bachelor's Degree	87	85	170	70,25	65	59	124	69,27	22	28	50	64,9%
Diploma 3 Diploma Degree	1	4	5	2,07	2	3	5	2,7	3	1	4	5,2%
<Diploma 3 < Diploma Degree	6	2	7	2,89	6	2	8	4,4	6	2	8	10,4%
Jumlah Total	133	109	242	100,00	103	76	179	100,00	41	36	77	100,00%

L = Laki-laki / P = Perempuan

M = Male / F = Female

Komposisi Karyawan Berdasarkan Jenjang Jabatan dan Jenis Kelamin Tahun 2020–2022

Employee Composition by Position Level and Gender 2020–2022

Jenjang Jabatan	2022				2021				2020			
	L M	P F	Jumlah Total	Percentase (%) Percentage (%)	L M	P F	Jumlah Total	Percentase (%) Percentage (%)	L M	P F	Jumlah Total	Percentase (%) Percentage (%)
Senior Management	18	8	26	10,74	12	2	14	7,82
Middle Management	34	12	46	19,01	40	21	61	34,08
Officer	58	45	103	42,56	24	18	42	23,46
Staff	23	44	67	27,69	28	34	62	34,64
Jumlah Total	133	109	242	100,00	104	75	179	100,00	77	100,00



SKALA PERUSAHAAN [OJK C.3]

COMPANY SCALE [OJK C.3]

Deskripsi Description	Satuan Unit	2022	2021	2020
Jumlah Karyawan Total Employees	Orang People	242	179	77
Jumlah Pendapatan Underwriting Bersih Total Net Underwriting Income	Juta Rupiah IDR Million	27.651.864	23.681.774	18.783.051
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	Juta Rupiah IDR Million	93.735.557	77.483.446*	54.839.945*
Jumlah Ekuitas Total Equity	Juta Rupiah IDR Million	39.772.219	42.220.797*	37.816.956*
Jumlah Aset Total Assets	Juta Rupiah IDR Million	132.462.723	119.109.556*	92.468.047*
Laba Tahun Berjalan Profit for the Year	Juta Rupiah IDR Million	3.279.450	3.439.505*	2.202.807
Jumlah Produk dan Jasa yang Ditawarkan Number of Products and Services Offered	Jumlah Produk/Jasa Number of Product/ Services	<p>4 Produk</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reksa Dana • Pendanaan Ultra Mikro • Pendanaan PMVD • Pendanaan PMVJP <p>7 Layanan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Asuransi dan Penjaminan • Jasa Perantara Perdagangan Efek bersifat ekuitas (saham) • Jasa Perantara Perdagangan Efek bersifat Utang dan Sukuk (EBUS) • Penjamin Emisi Efek • Penasihat Keuangan • Manajemen Aset • Investasi dan Manajemen Properti 	<p>4 Produk</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reksa Dana • Pendanaan Ultra Mikro • Pendanaan PMVD • Pendanaan PMVJP <p>7 Layanan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Asuransi dan Penjaminan • Jasa Perantara Perdagangan Efek bersifat ekuitas (saham) • Jasa Perantara Perdagangan Efek bersifat Utang dan Sukuk (EBUS) • Penjamin Emisi Efek • Penasihat Keuangan • Manajemen Aset • Investasi dan Manajemen Properti 	<p>4 Produk</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reksa Dana • Pendanaan Ultra Mikro • Pendanaan PMVD • Pendanaan PMVJP <p>7 Layanan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Asuransi dan Penjaminan • Jasa Perantara Perdagangan Efek bersifat ekuitas (saham) • Jasa Perantara Perdagangan Efek bersifat Utang dan Sukuk (EBUS) • Penjamin Emisi Efek • Penasihat Keuangan • Manajemen Aset • Investasi dan Manajemen Properti

Deskripsi Description	Satuan Unit	2022	2021	2020
		<p>4 Products of</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mutual Funds • Ultra-Micro Funding • PMVD (Regional Venture Capital Company) Funding • PMVJP (Short-term Venture Capital Company) Funding <p>7 Services:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Insurance and Guarantee • Equity-based Securities Trading Brokerage Services (share) • Debt and Sukuk- Based Securities Trading Brokerage Services (EBUS) *Sukuk (EBUS) • Underwriter • Financial Advisor • Asset Management • Investment and Property Management 	<p>4 Products of</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mutual Funds • Ultra-Micro Funding • PMVD (Regional Venture Capital Company) Funding • PMVJP (Short-term Venture Capital Company) Funding <p>7 Services:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Insurance and Guarantee • Equity-based Securities Trading Brokerage Services (share) • Debt and Sukuk- Based Securities Trading Brokerage Services (EBUS) *Sukuk (EBUS) • Underwriter • Financial Advisor • Asset Management • Investment and Property 	<p>4 Products of</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mutual Funds • Ultra-Micro Funding • PMVD (Regional Venture Capital Company) Funding • PMVJP (Short-term Venture Capital Company) Funding <p>7 Services:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Insurance and Guarantee • Equity-based Securities Trading Brokerage Services (share) • Debt and Sukuk- Based Securities Trading Brokerage Services (EBUS) *Sukuk (EBUS) • Underwriter • Financial Advisor • Asset Management • Investment and Property
Jumlah total operasi Total Number of Operations	Kantor Pusat/Entitas Induk Head Office/Parent Entity	1	1	1
	Kantor Entitas Anak Subsidiaries Offices	11	10	10
Persentase kepemilikan saham Percentage of share ownership	Per센 Percent	100% Dimiliki oleh Negara Republik Indonesia 100% Owned by Republic of Indonesia	100% Dimiliki oleh Negara Republik Indonesia 100% Owned by Republic of Indonesia	100% Dimiliki oleh Negara Republik Indonesia 100% Owned by Republic of Indonesia

*disajikan kembali
* Restated

HUBUNGAN INDUSTRIAL INDUSTRIAL RELATIONS

IFG berkomitmen untuk mewujudkan hubungan industrial yang harmonis dengan karyawan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang diperbarui dengan Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Untuk menjamin hak dan kewajiban karyawan dan perusahaan, pada tahun 2022, Perusahaan melakukan pemutakhiran Peraturan Perusahaan IFG Periode 2022-2025. Peraturan tersebut telah diimplementasikan sesuai dengan ketentuan ketenagakerjaan sejak tanggal 7 Desember 2022.

Selain melakukan pemutakhiran Peraturan Perusahaan IFG, pada tahun 2022 juga telah dilakukan perpanjangan masa berlaku Peraturan Perusahaan Anggota Holding Bidang Capital Market

IFG is committed to realizing harmonious industrial relations with employees as stipulated in Law no. 13 of 2003 concerning Manpower, which was updated to Law Number 6 of 2023 on the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law No. 2 of 2022 on Job Creation to Become Law. To ensure the rights and obligations of employees and the company, in 2022, the Company updated the IFG Company Regulations for the Period 2022-2025. The regulation has been implemented in accordance with labor provisions since December 7, 2022.

In addition to updating the IFG Company Regulations, in 2022 there was also an extension of the validity period of the Company Regulations of the Capital Market and Investment Holding



dan Investasi, sekaligus penyelarasan dengan Peraturan Perusahaan IFG Periode 2022-2025.

Selaras dengan pemutakhiran Peraturan Perusahaan IFG, guna mengatur tata cara pemberian hukuman disiplin karyawan yang berlandaskan keadilan, transparansi dan akuntabilitas, Direksi menerbitkan Surat Keputusan Direksi IFG Nomor 75 Tahun 2022 tentang Kebijakan Tata Cara Pemberian Hukuman atas Pelanggaran Disiplin Karyawan. Surat keputusan tersebut antara lain berisi tentang jenis dan masa berlaku hukuman, tata cara pemberian hukuman serta pengakhiran hubungan kerja karyawan.

Selama tahun 2022, tidak terdapat demonstrasi atau kasus sengketa perburuhan yang dibawa atau diselesaikan ke Pengadilan Hubungan Industrial. Hubungan yang harmonis antara karyawan dan manajemen IFG tercipta melalui kebijakan perusahaan yang memberikan ruang seluas-luasnya kepada karyawan untuk menyalurkan aspirasi melalui jalur komunikasi yang baik antara karyawan dengan manajemen.

Members, as well as alignment with the IFG Company Regulations for the 2022-2025 Period.

In line with the update of IFG's Company Regulations, in order to regulate the procedures for administering employee disciplinary penalties based on fairness, transparency and accountability, the Board of Directors issued IFG's Board of Directors Decree No. 75 of 2022 concerning Policy on Procedures for Administering Penalties for Employee Disciplinary Offenses. The decree contains, among others, the types and validity period of penalties, procedures for administering penalties and termination of employment.

During 2022, there were no demonstrations or cases of labor disputes brought or resolved to the Industrial Relations Court. A harmonious relationship between IFG's employees and management is created through company policies that provide employees with the widest possible space to channel their aspirations through good communication channels between employees and management.

RANTAI PASOKAN SUPPLY CHAIN

Dalam menjalankan usaha, IFG tidak bisa memenuhi kebutuhan barang dan jasa secara mandiri. Untuk itu, Perusahaan menjalin kerja sama dengan berbagai pemasok/vendor/supplier barang dan jasa. Perusahaan telah menentukan syarat dan kriteria tertentu dalam memilih pemasok/vendor/supplier yang akan menjadi rekan serta mitra strategis dalam menjalankan kegiatan bisnisnya. Kebijakan IFG tentang seleksi pemasok/vendor/supplier bertujuan untuk memastikan agar proses seleksi serta evaluasi atas pengadaan barang/jasa dilakukan secara efektif, efisien, kompetitif, adil dan wajar, transparan serta dapat dipertanggungjawabkan.

Secara khusus, dalam statusnya sebagai BUMN, pengadaan barang dan jasa IFG merujuk pada regulasi yang berlaku, antara lain, Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER - 08/MBU/ 12/2019 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara, serta Surat Edaran Nomor SE-10/MBU/08/2020 Tentang Peningkatan Peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Badan Usaha Milik Negara.

Sesuai dengan regulasi tersebut di atas, pengadaan barang dan jasa di IFG menerapkan prinsip-prinsip:

- a. efisien, berarti Pengadaan Barang dan Jasa harus diusahakan untuk mendapatkan hasil yang optimal dan terbaik dalam waktu yang cepat dengan menggunakan dana dan kemampuan seoptimal mungkin secara wajar dan bukan hanya didasarkan pada harga terendah. Untuk Pengadaan Barang dan Jasa strategis yang memiliki nilai yang signifikan dapat dilakukan pendekatan total cost of ownership (TCO);

In running the business, IFG cannot fulfill the needs of goods and services independently. Therefore, the Company cooperates with various suppliers/vendors/suppliers of goods and services. The Company has determined certain requirements and criteria in selecting suppliers/vendors/suppliers who will become partners and strategic partners in performing its business activities. IFG's policy on supplier/vendor/supplier selection aims to ensure that the selection and evaluation process for the procurement of goods/services is effective, efficient, competitive, fair and reasonable, transparent and accountable.

Specifically, in its status as an SOE, IFG's procurement of goods and services refers to applicable regulations, including the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia Number PER - 08/MBU/ 12/2019 concerning General Guidelines for the Implementation of Procurement of Goods and Services of State-Owned Enterprises, as well as Circular Letter Number SE-10/MBU/08/2020 concerning Increasing the Role of Micro, Small and Medium Enterprises in the Procurement of Goods and Services in State-Owned Enterprises.

In accordance with the aforementioned regulations, the procurement of goods and services at IFG applies the principles of:

- a. efficient, meaning that the Procurement of Goods and Services must be endeavored to obtain the optimal and best results in a short time by using funds and capabilities as optimally as reasonably possible and not just based on the lowest price. For strategic Goods and Services Procurement that has a significant value, a total cost of ownership (TCO) approach can be taken;

- b. efektif, berarti Pengadaan Barang dan Jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
- c. kompetitif, berarti Pengadaan Barang dan Jasa harus terbuka bagi Penyedia Barang dan Jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara Penyedia Barang dan Jasa yang setara dan memenuhi syarat/ kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan;
- d. transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang dan Jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil
- e. evaluasi, penetapan calon Penyedia Barang dan Jasa, sifatnya terbuka bagi peserta Penyedia Barang dan Jasa yang berminat;
- f. adil dan wajar, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang dan Jasa yang memenuhi syarat;
- g. terbuka, berarti pengadaan Barang dan Jasa dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang dan Jasa yang memenuhi syarat; dan
- h. akuntabel, berarti harus mencapai sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menjauhkan dan potensi penyalahgunaan dan penyimpangan
- b. effective, means that the Procurement of Goods and Services must be in accordance with the predetermined needs and provide the maximum benefit in accordance with the specified objectives;
- c. competitive, means that the Procurement of Goods and Services must be open to Goods and Services Providers who meet the requirements and is carried out through fair competition among Providers of Goods and Services that are equal and meet certain requirements/criteria based on clear and transparent provisions and procedures;
- d. transparent, means that all provisions and information regarding the Procurement of Goods and Services, including procurement administration technical requirements, evaluation procedures, evaluation results
- e. determination of prospective Goods and Services Providers, are open to interested Goods and Services Provider participants;
- f. fair and reasonable, means providing equal treatment for all qualified prospective Goods and Services Providers;
- g. open, means that the procurement of Goods and Services can be followed by all qualified Goods and Services Providers; and
- h. g. accountable, means having to achieve the target and can be accounted for so as to avoid potential abuse and irregularities

Selain memegang ketujuh prinsip, pengadaan barang dan jasa di Perusahaan juga mengutamakan produksi dalam negeri, rancang bangun dan perekayasaan nasional, serta perluasan kesempatan bagi usaha kecil sepanjang kualitas, harga, dan tujuannya dapat dipertanggungjawabkan. Dalam pengadaan barang dan jasa, IFG juga membuka peluang untuk melakukan sinergi antar BUMN/ Anak Perusahaan/ Perusahaan Terafiliasi BUMN. Seiring dengan itu, Perusahaan telah memiliki pedoman pengadaan barang/jasa berupa standar operasional dan prosedur pengadaan barang dan/atau jasa yang telah disahkan melalui Surat Keputusan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia No.62 Tahun 2022 Tentang Kebijakan Pengadaan Barang dan/atau Jasa.

Sesuai dengan berbagai ketentuan dan regulasi tersebut, dalam pengadaan barang dan jasa, IFG mengutamakan pemasok lokal, yaitu pemasok yang lokasi usahanya berdekatan dengan operasional perusahaan, atau lokasinya jauh dari operasional perusahaan namun masih berada dalam wilayah Indonesia. Pemasok barang dan jasa kategori ini terbuka kemungkinan adalah mereka yang masuk kategori usaha kecil, sepanjang kualitas, harga, dan tujuannya dapat dipertanggungjawabkan. Apabila pemasok lokal tidak mampu memenuhi kebutuhan barang dan jasa yang diperlukan perusahaan, maka IFG akan menggandeng pemasok asing, yaitu mereka yang menjalankan usaha dan berdomisili di luar Indonesia.

Sesuai dengan kaidah dan prinsip pengadaan seperti di atas, maka pemasok barang dan jasa yang digandeng Perusahaan dan nilai kontraknya selama 2022 adalah sebagai berikut:

In addition to adhering to the seven principles, the procurement of goods and services at the Company also prioritizes domestic production, national design and engineering as well as expanding opportunities for small businesses as long as the quality, price and objectives are accountable. In the procurement of goods and services, IFG also opens opportunities for synergies between SOEs and Subsidiaries, as well as SOE Affiliated Companies Furthermore, the Company has a goods/services procurement guideline in the form of operational standards and procedures for the procurement of goods and/or services that have been authorized through Decree of the Board of Directors of the Company (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia No.62 of 2022 concerning the Policy on Procurement of Goods and/or Services

In accordance with these various provisions and regulations, in the procurement of goods and services, IFG prioritizes local suppliers, namely suppliers whose business locations are close to the company's operations, or are located far from the company's operations but still within Indonesia. Suppliers of goods and services in this category are open to the possibility of being categorized as small businesses, as long as the quality, price, and purpose can be accounted for. If local suppliers are unable to meet the needs of goods and services required by the company, IFG will cooperate with foreign suppliers, namely those who run businesses and are domiciled outside Indonesia.

In accordance with the procurement rules and principles as above, the suppliers of goods and services engaged by the Company and their contract values during 2022 are as follows :



Jumlah Pemasok Barang Tahun 2020-2022

Number of Supplier of Goods in 2020-2022

Keterangan Description	Jumlah Pemasok Barang Number of Supplier of Goods			Nilai Kontrak Pekerjaan (Rp) Work Contract Value		
	2022	2021	2020	2022	2021	2020
Lokal (Indonesia) Local (Indonesia)	17	8	11	913.527.990	580.729.239	5.931.425.078
Asing (Internasional) Foreign (International)	-	-	-	-	-	-
Jumlah Total	17	8	11	913.527.990	580.729.239	5.931.425.078

Jumlah Pemasok Jasa Tahun 2020-2022

Number of Supplier of Services in 2020-2022

Keterangan Description	Jumlah Pemasok Jasa Number of Supplier of Services			Nilai Kontrak Pekerjaan Work Contract Value		
	2022	2021	2020	2022	2021	2020
Lokal (Indonesia) Local (Indonesia)	190	109	49	287.235.819.407	121.765.273.773	60.139.332.998
Asing (Internasional) Foreign (International)	-	-	-	-	-	-
Jumlah Total	190	109	49	287.235.819.407	121.765.273.773	60.139.332.998

PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA PERUSAHAAN [OJK C.6]

SIGNIFICANT CHANGES IN THE COMPANY [OJK C.6]

Selama tahun pelaporan terdapat perubahan signifikan di IFG, antara lain, perpindahan anak perusahaan bidang asuransi dan penjaminan, yaitu PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo). Per 18 Juli 2022, Kantor Pusat Jasindo pindah ke Graha Jasindo, Jalan Menteng Raya Nomor 21, Jakarta Pusat 10340. Sebelumnya, Kantor Pusat Perusahaan berada di Mulia Business Park di Jl. Letjen. M.T. Haryono Kav. 58-60 Jakarta, 12780, Indonesia. Perpindahan Kantor Pusat juga dilakukan anak perusahaan IFG yang lain, yaitu PT Asuransi Jiwa IFG. Per 5 Desember 2022, Kantor Pusat Perusahaan ini berada di Graha CIMB Niaga Lantai 6, Jl. Jend. Sudirman Kav 58 Jakarta – 12190. Sebelumnya, Kantor Pusat Perusahaan berada di gedung yang sama, namun di lantai 21

During the reporting year there were significant changes in IFG, among others, the transfer of its insurance and guarantee subsidiary, PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo). As of July 18, 2022, Jasindo's Head Office moved to Graha Jasindo, Jalan Menteng Raya Number 21, Central Jakarta 10340. Previously, the Company's Head Office was located at Mulia Business Park on Jl. Letjen. M.T. Haryono Kav. 58-60 Jakarta, 12780, Indonesia. Another IFG subsidiary, PT Asuransi Jiwa IFG, also moved its Head Office. As of December 5, 2022, the Company's Head Office is located at Graha CIMB Niaga 6th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav 58 Jakarta – 12190. Previously, the Company's Head Office was located in the same building, but on the 21st floor.

KEANGGOTAAN ASOSIASI [OJK C.5] ASSOCIATION MEMBERSHIP [OJK C.5]

IFG bergabung dengan berbagai asosiasi atau perhimpunan yang memiliki bidang usaha yang sama, yaitu perasuransian dan penjaminan. Dengan demikian, Perusahaan dapat mengikuti berbagai perkembangan isu terkini, sekaligus bisa memberikan masukan dan saran untuk perkembangan dan kemajuan bersama dalam asosiasi/perhimpunan tersebut. Asosiasi/perhimpunan yang diikuti IFG selama tahun 2022 adalah sebagai berikut:

IFG joins various associations that have the same line of business, namely insurance and guarantee. Thus, the Company can follow various developments in the latest issues, as well as provide input and suggestions for mutual development and progress in the association. The associations that IFG participated in during 2022 are as follows:

1. Forum Hukum BUMN
2. Forum Humas BUMN
3. Forum Human Capital Indonesia BUMN
4. Forum Komunikasi Satuan Pengawasan Internal
5. Forum Manajemen Risiko BUMN

1. SOE Law Forum
2. SOE Public Relations Forum
3. SOE Human Capital Forum
4. Internal Audit Unit Communication Forum
5. SOE Risk Management Forum

PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI

AWARDS AND CERTIFICATIONS

Dalam menjalankan operasional usaha, IFG berkomitmen untuk mematuhi berbagai ketentuan yang berlaku dan menerapkan standar baku yang berlaku di bidang usaha asuransi dan penjaminan, baik di bidang tata kelola maupun dalam praktik bisnis secara umum. Standar baku itu antara lain berupa sertifikasi yang dikeluarkan oleh lembaga internasional maupun nasional. Atas komitmen itu, selama tahun 2022, Perusahaan mendapat sejumlah penghargaan sebagai bukti apresiasi dari pihak eksternal terhadap keberhasilan IFG dalam menjalankan bisnis, baik yang berkaitan dengan tata kelola perusahaan, kinerja ekonomi, lingkungan maupun sosial sebagai berikut:

In performing its business operations, IFG is committed to complying with various applicable regulations and implementing standard standards applicable in the insurance and guarantee business, both in the field of governance and in general business practices. These standards include certifications issued by international and national institutions. For this commitment, during 2022, the Company received a number of awards as evidence of appreciation from external parties for IFG's success in running the business, both related to corporate governance, economic, environmental and social performance as follows:

Sertifikasi Certification

Tanggal Date	Nama Sertifikasi Certification Name	Diberikan oleh Given By	Berlaku Hingga Valid until
18 Agustus 2022 August 18, 2022	IT Capability Level 3.32 - COBIT 2019	PT Mitratex Konsultan - COBIT 2019	-
12 November 2021 November 12, 2021	Anti Bribery Management System – ISO 37001:2016	The British Standards Institution (BSI)	12 November 2021 November 11, 2024

Penghargaan Awards

Tanggal Date	Nama Penghargaan Awards Name	Diberikan oleh Awarded By
25 Februari February 25	Most Popular Financial CEO's Awards	The Economics
25 Maret March 25	Silver Winner untuk Manajemen Pra Krisis dalam kategori BUMN Non Tbk, Bronze Winner untuk Departemen Komunikasi Kategori BUMN non Tbk serta Kategori Terpopuler di Media Cetak 2021 Kategori BUMN non Tbk. Silver Winner for Pre-Crisis Management in the Non Tbk SOEs category, Bronze Winner for the Communication Department in the Non Tbk SOEs category and Most Popular in Print Media 2021 in the Non Tbk SOEs category.	PR Indonesia Awards
30 Juni June 30	Special Awards of Outstanding Performance	iNews Maker Awards
3-5 Agustus August 3-5	Inclusive Digital Communication Strategy for Indonesia's Sustainable Future	IDEAS
22 Agustus August 22	Penghargaan Implementasi AKHLAK Klaster Jasa Asuransi dan Dana Pensiun dan BUMN Kolaboratif AKHLAK Implementation Award for Insurance and Pension Fund Services Cluster and Collaborative SOEs	Accelerated Culture Transformation (ACT) International Consulting



TATA KELOLA KEBERLANJUTAN

TATA KELOLA KEBERLANJUTAN

Komitmen Penerapan GCG

Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance), yang selanjutnya disebut GCG, adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha. Sebagai korporasi yang bertanggungjawab, IFG berkomitmen untuk menerapkan GCG di semua lini. Penerapan tersebut dilakukan tidak sekedar memenuhi ketentuan otoritas atau pdvdf Peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi lebih didorong oleh kesadaran bahwa tata kelola yang baik merupakan kunci penting untuk meningkatkan kinerja dan keunggulan daya saing berkelanjutan.

Perseroan meyakini bahwa penerapan GCG akan dapat mewujudkan keseimbangan dalam pengendalian perusahaan sehingga menekan peluang terjadinya kecurangan (fraud) serta meminimalkan risiko terjadinya kesalahan pengelolaan perusahaan. Dengan upaya tersebut, maka akan tercipta nilai tambah perusahaan yang optimal bagi segenap pemangku kepentingan. Selain itu, dengan penerapan GCG yang tepat sesuai dengan perundangan-undangan yang berlaku, dan standar best practice yang ada, maka IFG optimistis akan mampu menjawab tantangan dan tuntutan dari pemangku kepentingan. Lebih dari itu, dengan penerapan GCG, Perseroan akan mampu bertahan, bahkan semakin berkembang dan berkelanjutan pada masa-masa mendatang.

Bagi IFG, penerapan GCG sekaligus merupakan sarana terbaik untuk membuktikan kepada para pemegang saham bahwa investasi mereka aman, dikelola secara baik dan bertanggungjawab. Pengelolaan serupa itu pada gilirannya akan meningkatkan kepercayaan para pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Di tengah tantangan yang semakin kompleks, meningkatnya kepercayaan terhadap perusahaan merupakan modal penting untuk menghadirkan citra dan reputasi terbaik bagi IFG.

Secara khusus, sebagai bagian dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), IFG menerapkan GCG karena didorong keinginan yang kuat untuk mengoptimalkan nilai BUMN agar memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional. Dengan posisi seperti itu, maka IFG akan mampu mempertahankan keberadaannya, bahkan hidup berkelanjutan untuk mencapai maksud dan tujuan sebagai BUMN.

Untuk mendapatkan hasil terbaik dalam penerapan GCG, prinsip-prinsip GCG yang dikembangkan dan diterapkan IFG mengacu pada Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara, yang telah diubah melalui PER-09/MBU/2012, serta Pedoman Umum GCG di Indonesia yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG)

GCG Implementation Commitment

Good Corporate Governance, hereinafter referred to as GCG, are the principles that underlie a process and mechanism for managing a company based on laws and regulations and business ethics. As a responsible corporation, IFG is committed to implementing GCG at all levels. The implementation is done not just to fulfill the provisions of the authority or pdvdf applicable laws and regulations, but is more driven by the realization that good governance is an important key to improving performance and sustainable competitive advantage.

The Company believes that the implementation of GCG will be able to create a balance in controlling the company so as to reduce the opportunity for fraud and minimize the risk of mismanagement of the company. With these efforts, the Company will create optimal added value for all stakeholders. In addition, with the proper implementation of GCG in accordance with applicable laws and regulations, and existing best practice standards, IFG is optimistic that it will be able to answer the challenges and demands of stakeholders. Moreover, with the implementation of GCG, the Company will be able to survive, even grow and be sustainable in the future.

For IFG, GCG implementation is also the best means to prove to shareholders that their investment is safe, well-managed and responsible. Such management will in turn increase the confidence of shareholders and other stakeholders. In the midst of increasingly complex challenges, increased trust in the company is an important asset to present the best image and reputation for IFG.

Particularly, as part of a State-Owned Enterprise (SOE), IFG implements GCG because it is driven by a strong desire to optimize the value of SOEs in order to have strong competitiveness, both nationally and internationally. With such a position, IFG will be able to maintain its existence, and even live in a sustainable manner to achieve its goals and objectives as an SOE.

To obtain the best results in the implementation of GCG, the GCG principles developed and implemented by IFG refer to the Law on Limited Liability Companies, the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises PER-01/MBU/2011 on the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises, which has been amended through PER-09/MBU/2012, as well as the General Guidelines for GCG in Indonesia issued by the National Committee on Governance Policy (KNKG), namely the General

PRINSIP-PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)

PRINCIPLES OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)

Dalam menjalankan usaha, IFG memastikan bahwa prinsip-prinsip GCG diterapkan pada setiap aspek bisnis dan di semua jajaran perusahaan. Prinsip GCG yaitu keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, serta kesetaraan dan kewajaran diperlukan untuk mencapai kesinambungan usaha (sustainability) perusahaan dengan memperhatikan pemangku kepentingan (stakeholders). Prinsip-prinsip GCG, sebagaimana tercantum dalam Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi No. 09/SK-DEKOM/BPUI/XII/2021 dan No. 060/SK-Dir/CORP/BPUI/XII/2021 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia adalah sebagai berikut:

a. Keterbukaan (transparency)

Transparansi adalah keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi material dan relevan mengenai BPUI dan Anggota Holding.

b. Akuntabilitas (accountability)

Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban Organ Perseroan dan Anggota Holding sehingga pengelolaan perseroan dapat terlaksana secara efektif.

c. Pertanggungjawaban (responsibility)

Pertanggungjawaban adalah kesesuaian dalam pengelolaan BPUI dan Anggota Holding terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat

d. Kemandirian (independency)

Kemandirian adalah keadaan BPUI dan Anggota Holding yang dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

e. Kewajaran (fairness)

Kewajaran adalah keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan (stakeholders) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya, IFG juga merujuk pembaruan yang dilakukan Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) melalui penerbitan Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUG-KI) di mana prinsip-prinsip di dalamnya dijiwai oleh empat pilar governansi korporat yaitu: perilaku beretika, akuntabilitas, transparansi, dan keberlanjutan, yang pertama kali diperkenalkan dalam PUGKI 2021 dan merupakan pengembangan sesuai dengan perkembangan terkini dari nilai dasar TARIF (Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi, dan Fairness) yang terakhir digunakan pada PUGKI 2019.

In running the business, IFG ensures that GCG principles are applied to every aspect of the business and at all levels of the company. GCG principles of openness, accountability, responsibility, independence, as well as equality and fairness are required to achieve the company's sustainability by taking into account stakeholders. GCG principles, as stated in the Joint Decree of the Board of Commissioners and Board of Directors No. 09/SK-DEKOM/BPUI/XII/2021 and No. 060/SK-Dir/CORP/BPUI/XII/2021 concerning the Guidelines for Good Corporate Governance at the Company (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia are as follows:

a. Transparency

Transparency, which refers to openness in the decision-making process and in the disclosure of material and relevant information about BPUI and Holding Members

b. Accountability

Accountability, which refers to function clarity and implementation of the responsibility of the Insurance Company's organs and Holding Members so that the company's management can be implemented in an effective manner;

c. Responsibility

Responsibility which refers to the compliance in the management of BPUI and Holding Members with the applicable laws and regulations and sound corporate principles

d. Independence

Independence which refers to the condition of BPUI and Holding Members which are managed professionally without conflict of interest and influence or pressure from any party that is not in accordance with applicable laws and regulations and sound corporate principles

e. Fairness

Fairness which refers to the balance and equality in fulfilling the rights of stakeholders that arise based on agreements and applicable laws and regulations.

Furthermore, IFG also refers to updates made by the National Committee on Governance Policy (KNKG) through the issuance of the General Guidelines for Indonesian Corporate Governance (PUG-KI) in which the principles are imbued with the four pillars of corporate governance, namely: ethical behavior, accountability, transparency, and sustainability, which were first introduced in PUGKI 2021 and are developments in accordance with the latest developments of the basic values of TARIF (Transparency, Accountability, Responsibility, Independence, and Fairness) which were last used in PUGKI 2019.

Keempat prinsip dasar PUGKI 2021 selengkapnya adalah sebagai berikut:

- **Perilaku Beretika**

Dalam melaksanakan kegiatannya, korporasi senantiasa mengedepankan kejujuran, memperlakukan semua pihak dengan hormat (respect), memenuhi komitmen, membangun serta menjaga nilai-nilai moral dan kepercayaan secara konsisten. Korporasi memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan (fairness) dan dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

- **Akuntabilitas**

Korporasi dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu Korporasi harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan korporat dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkelanjutan.

- **Transparansi**

Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, korporasi menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Korporasi mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.

- **Keberlanjutan**

Korporasi mematuhi peraturan perundang-undangan serta berkomitmen melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan agar berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan melalui kerjasama dengan semua pemangku kepentingan terkait untuk meningkatkan kehidupan mereka dengan cara yang selaras dengan kepentingan bisnis dan agenda pembangunan berkelanjutan.

STRUKTUR TATA KELOLA STRUCTURE OF GOVERNANCE

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) menyebutkan bahwa Organ Perseroan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi. Sistem kepengurusan di IFG menganut sistem dua badan (two tier system) yaitu Dewan Komisaris dan Direksi yang memiliki wewenang dan tanggung jawab yang jelas sesuai fungsinya masing-masing sebagaimana diamanatkan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan.

Merujuk pada Undang-undang Perseroan Terbatas seperti tersebut di atas, maka struktur tata kelola IFG terdiri dari RUPS, Dewan Komisaris dan Direksi. Untuk menunjang pelaksanaan tugasnya dengan baik, Dewan Komisaris dibantu oleh organ pendukung berupa Sekretaris Dewan Komisaris dan Komite Audit. Sementara

The four basic principles of PUGKI 2021 are as follows:

- **Ethical Behavior**

In conducting its activities, the corporation always prioritizes honesty, treat all parties with respect, fulfill commitments, build and maintain moral values and trust consistently. Corporations pay attention to the interests of shareholders and other stakeholders based on the principles of fairness and equality and are managed independently so that each organ of the company does not dominate each other and cannot be intervened by other parties.

- **Accountability**

The Corporation can be accountable for its performance in a transparent and fair manner. Thus, the Corporation must be managed properly, measurably and in accordance with corporate interests while taking into account the interests of shareholders and stakeholders. Accountability is a necessary prerequisite for achieving sustainable performance.

- **Transparency**

To maintain objectivity in conducting business, the corporation provides material and relevant information in a manner that is easily accessible and understood by stakeholders. The Corporation takes the initiative to disclose not only matters required by laws and regulations, but also matters that are important for decision-making by shareholders, creditors and other stakeholders.

- **Sustainability**

The Corporation complies with laws and regulations and is committed to completing its responsibilities towards society and the environment in order to contribute to sustainable development by working with all relevant stakeholders to improve their lives in a way that is aligned with business interests and the sustainable development agenda.

Law of the Republic of Indonesia Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (PT Law) states that the Company's organs consist of the General Meeting of Shareholders (GMS), the Board of Commissioners and the Board of Directors. The management system in IFG adheres to a two-tier system, namely the Board of Commissioners and the Board of Directors, which have clear authorities and responsibilities according to their respective functions as mandated in the Articles of Association and laws and regulations.

Referring to the Limited Liability Company Law as mentioned above, IFG's governance structure consists of GMS, Board of Commissioners and Board of Directors. To support the implementation of its duties properly, the Board of Commissioners is assisted by supporting organs in the form of the Secretary of the

itu, Direksi dibantu oleh Sekretaris Perusahaan, dan Audit Internal/Satuan Pengawasan Intern, serta Komite pendukung lainnya.

1. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang dan/atau Anggaran Dasar.
2. Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
3. Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

Implementasi GCG Perseroan mengacu pada optimalisasi peran dan hubungan antara Organ Perseroan yaitu Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi. RUPS, Dewan Komisaris dan Direksi dan saling menghormati tugas, tanggung jawab dan wewenang masing-masing sesuai peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.

Board of Commissioners and the Audit Committee. Meanwhile, the Board of Directors is assisted by the Corporate Secretary, and Internal Audit/Internal Audit Unit, as well as other supporting Committees.

1. General Meeting of Shareholders, hereinafter referred to as GMS, is an organ of the Company that has authority not granted to the Board of Directors or the Board of Commissioners within the limits set forth in the Law and/or the Articles of Association.
2. The Board of Commissioners is the Company's organ responsible for performing general and/or specific supervision in accordance with Articles of Association as well as providing advice to the Board of Directors.
3. The Board of Directors is the Company's organ that is fully authorized and responsible for managing the Company in the interest of the Company in accordance with its purposes and objectives, and also representing the Company both inside and outside of the court in accordance with the provisions of Articles of Association.

The implementation of the Company's GCG refers to optimizing the role and relationship between the Company's organs, namely the General Meeting of Shareholders, the Board of Commissioners and the Board of Directors. The GMS, Board of Commissioners and Board of Directors respect each other's duties, responsibilities and authorities in accordance with the laws and regulations and the Company's Articles of Association

PENANGGUNG JAWAB PENERAPAN KEUANGAN BERKELANJUTAN RESPONSIBLE FOR SUSTAINABLE FINANCE IMPLEMENTATION

Sesuai dengan statusnya sebagai BUMN Holding Perasuransi dan Penjaminan, IFG tidak termasuk sebagai Lembaga Jasa Keuangan, Emiten maupun Perusahaan Publik yang terkena kewajiban untuk menjalankan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik. Oleh karena itu, pada laporan ini, Perseroan tidak bisa menyampaikan informasi mengenai pegawai, pejabat dan/atau unit kerja yang menjadi penanggung jawab penerapan Keuangan Berkelanjutan, sebagaimana diatur dalam POJK tersebut. [OJK E.1]

In accordance with its status as an SOE of Insurance and Guarantee Holding, IFG is not included as a Financial Services Institution, Issuer or Public Company that is subject to the obligation to implement the Financial Services Authority (OJK) Regulation No. 51/POJK.03/2017 on the Implementation of Sustainable Finance for Financial Services Institutions, Issuers and Public Companies. Therefore, in this report, the Company is unable to submit information regarding employees, officials and/or work units that are responsible for the implementation of Sustainable Finance, as stipulated in the POJK. [OJK E.1]

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (GMS)

Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dalam Anggaran Dasar Perseroan, serta dalam Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) Perusahaan Perseroan (Persero), PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia IFG Tahun 2022.

The General Meeting of Shareholders, hereinafter referred to as GMS, has been regulated in Law of the Republic of Indonesia Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, in the Company's Articles of Association, as well as in the Good Corporate Governance (GCG) Guidelines of the Company (Persero), PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia IFG of 2022.

RUPS adalah Organ Perseroan yang memiliki semua kewenangan yang tidak dilimpahkan kepada Dewan Komisaris dan Direksi, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas dan/atau anggaran dasar BPUI. RUPS prinsip dasarnya merupakan wadah bagi pemegang saham dalam memutuskan arah BPUI dan merupakan forum Dewan Komisaris dan Direksi melaporkan dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas serta kinerja kepada pemegang saham. Melalui RUPS para pemegang saham dapat mempergunakan haknya dan memberikan pendapat untuk mengambil keputusan penting dalam menentukan arah BPUI.

Berdasarkan jenisnya, RUPS Perseroan terdiri atas RUPS Tahunan (RUPS yang wajib dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun, paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir) dan RUPS Lainnya (RUPS yang dapat dilakukan setiap saat apabila dipandang perlu oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris dan/atau pemegang saham), yaitu:

- a. RUPS Pengesahan RJPP.
- b. RUPS Pengesahan RKAP.
- c. RUPS Pengesahan Laporan Tahunan.
- d. RUPS Lainnya.

Selain jenis RUPS tersebut di atas, Pemegang Saham Perusahaan juga memiliki mekanisme Keputusan Sirkuler, yaitu pengambilan keputusan oleh Pemegang Saham di luar mekanisme RUPS. Keputusan Sirkuler memiliki kekuatan hukum yang sama dengan Keputusan RUPS, dengan syarat seluruh Pemegang Saham memberikan persetujuan secara tertulis atas usul yang akan diputuskan dalam perihal Keputusan Sirkuler. Hal ini sesuai dengan Pasal 91 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Selama tahun 2022, IFG melaksanakan RUPS Tahunan sebanyak 2 (Dua) kali dan RUPS Luar Biasa sebanyak 3 (tiga) kali. Informasi mengenai pelaksanaan RUPS selengkapnya pada tahun pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel Pelaksanaan RUPS Tahunan Tahun 2022
 Table of Annual GMS Implementation in 2022

No.	Jenis RUPS Type of GMS	Waktu Time	Hasil Keputusan Decree
1	RUPS Tahunan Annual GMS	28 Januari 2022 January 28, 2022	<p>Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2022 termasuk Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris Tahun 2022.</p> <p>Mengesahkan Rencana dan Anggaran Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (RKA-TJSL) tahun 2022 sesuai Risalah Rapat Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.</p> <p>Menetapkan Key Performance Indicators (KPI) antara Direksi dan Dewan Komisaris IFG dengan Pemegang Saham Tahun 2022.</p> <p>Menetapkan Key Performance Indicators (KPI) Dewan Komisaris Tahun 2022.</p> <p>Ratification of the 2022 Company's Work Plan and Budget (RKAP) including the 2022 Work Plan and Budget of the Board of Commissioners.</p> <p>Ratification of the 2022 Plan and Budget of the Social and Environmental Responsibility Program (RKA-TJSL) in accordance with the Minutes of the Meeting to Discuss the Work Plan and Budget of the Social and Environmental Responsibility Program.</p> <p>Establishment of Key Performance Indicators (KPI) between IFG's Board of Directors and Board of Commissioners with Shareholders in 2022.</p> <p>Determination of the Key Performance Indicators (KPI) of the Board of Commissioners in 2022.</p>

GMS is an organ of the Company that has all the authority that is not delegated to the Board of Commissioners and the Board of Directors, within the limits specified in Law of the Republic of Indonesia Number 40 of 2007 concerning Limited Companies and/or the articles of association of BPUI. The GMS is basically a forum for shareholders to decide the direction of BPUI and a forum for the Board of Commissioners and Board of Directors to report and be responsible for the implementation of their duties and performance to the shareholders. Through the GMS, shareholders can exercise their rights and provide opinions to make important decisions in determining the direction of BPUI.

Based on its type, the Company's GMS consists of Annual GMS (GMS that must be held at least 1 (one) time a year, no later than 6 (six) months after the fiscal year ends) and Other GMS (GMS that can be held at any time if deemed necessary by the Board of Directors and/or Board of Commissioners and/or shareholders), namely:

- a. GMS of Company's Long-Term Plan Approval
- b. GMS of Company's Work Plan and Budget Approval
- c. GMS of Annual Report Approval
- d. Other GMS

In addition to the types of GMS mentioned above, the Company's Shareholders also have a Circular Resolution mechanism, which is decision-making by Shareholders outside the GMS mechanism. Circular Resolutions have the same legal force as GMS Resolutions, provided that all Shareholders provide written approval for the proposal to be decided in the Circular Resolution. This is in accordance with Article 91 of Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Company.

During 2022, IFG conducted the Annual GMS as many as 2 (two) time(s) and Extraordinary GMS 3 (three) time(s). Information regarding the implementation of the GMS in the reporting year is as follows:

			<p>Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2020 serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2020.</p> <p>Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan Tahun Buku 2020.</p> <p>Penetapan Penggunaan Laba Bersih Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2020.</p> <p>Penetapan Remunerasi (Gaji/Honorarium berikut fasilitas dan Tunjangan Lainnya) untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2021 serta Tantiem/Insentif Kinerja untuk Tahun Buku 2020 bagi Direksi dan Dewan Komisaris atas Kinerja Tahun Buku 2020.</p> <p>Approval of the Annual Report and Ratification of the Company's Consolidated Financial Statements for the 2020 Fiscal Year and the Board of Commissioners Supervisory Report for the 2020 Fiscal Year.</p> <p>Approval of the Annual Report and Ratification of the Financial Statements of the Implementation of the Company's Partnership and Community Development Program in the 2020 Fiscal Year.</p> <p>Determination on the Use of the Company's Consolidated Net Income of the 2020 Fiscal Year.</p> <p>Determination of Remuneration (Salary/Honorarium, and other facilities and benefits) for Board of Directors and Board of Commissioners in the 2021 Fiscal Year, and Bonuses/Performance Incentives for Board of Directors and Board of Commissioners based on the performance in the 2020 Fiscal Year.</p>
		12 Oktober 2022 October 12, 2022	

No.	Jenis RUPS Type of GMS	Waktu Time	Hasil Keputusan Decree
1	RUPS Luar Biasa Extraordinary GMS	18 Maret 2022 March 18, 2022	<p>Pengesahan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) PT BPUI tahun 2020 – 2024.</p> <p>Ratification of the Company Long Term Plan (RJPP) of PT BPUI for 2020 - 2024.</p>
		25 April 2022 April 25, 2022	<p>Persetujuan Penyertaan Modal PT BPUI kepada PT Asuransi Jiwa IFG sebesar Rp6,7 Triliun.</p> <p>Approval of the state equity participation of PT BPUI to PT Asuransi Jiwa IFG amounting to IDR 6.7 Trillion.</p>
		26 September 2022 September 26, 2022	<p>Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan PT BPUI.</p> <p>Changes in Position Nomenclature, Transfer of Duties, and Appointment of Members of the Board of Directors of PT BPUI.</p>

DEWAN KOMISARIS

BOARD OF COMMISSIONERS

Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi. Pengawasan dan pemberian nasihat oleh Dewan Komisaris dilakukan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

- **Kriteria dan Prosedur Pengangkatan serta Pemberhentian Dewan Komisaris**

Dewan Komisaris dipilih dan ditetapkan oleh satu-satunya pemegang saham, yaitu Kementerian BUMN. Oleh karena itu, informasi mengenai kriteria pengangkatan anggota Dewan Komisaris, sepenuhnya adalah wewenang Kementerian BUMN.

- **Masa Jabatan Dewan Komisaris**

Anggota Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 atau 5 tahun setelah tanggal pengangkatannya dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya, tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan para anggota Komisaris yang bersangkutan sewaktu-waktu.

- **Tugas, Wewenang dan Kewajiban Dewan Komisaris**

- a. **Tugas Dewan Komisaris:**

Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai BPUI maupun usaha BPUI yang dilakukan oleh Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan RJPP, RKAP, serta ketentuan anggaran dasar dan keputusan RUPS, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk kepentingan BPUI dan sesuai dengan maksud dan tujuan BPUI.

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap anggota Dewan Komisaris harus:

- i) Mematuhi anggaran dasar BPUI dan peraturan perundang-undangan serta prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran.
- ii) Beritikad baik, penuh kehati-hatian dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk kepentingan BPUI dan sesuai dengan maksud dan tujuan BPUI.

- b. **Wewenang Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:**

Dalam melaksanakan tugas, Dewan Komisaris berwenang untuk:

The Board of Commissioners is the Company's organ responsible for performing general and/or specific supervision in accordance with Articles of Association as well as providing advice to the Board of Directors. The Board of Commissioners supervises the management policy, the course of management in general, both regarding the Company and the Company's business, and provides advice to the Board of Directors. Supervisory and advisory by the Board of Commissioners is carried out for the benefit of the Company and in accordance with the purposes and objectives of the Company.

- **Criteria and Procedures for Appointment and Dismissal of the Board of Commissioners**

The Board of Commissioners is elected and appointed by the sole shareholder, and that is the Ministry of SOEs. Therefore, information regarding the criteria for appointment of members of the Board of Commissioners is the sole authority of the Ministry of SOEs.

- **Term of Office of the Board of Commissioners**

Members of the Board of Commissioners are appointed for a period starting from the date determined by the GMS until the closing of the 5th Annual GMS or 5 years after the date of appointment and may be reappointed for the next 1 (one) period, without prejudice to the right of the GMS to dismiss the members of the Board of Commissioners concerned at any time.

- **Duties, Authorities and Obligations of the Board of Commissioners**

- a. **Duties of the Board of Commissioners:**

The Board of Commissioners is assigned with supervising the management policy, the course of management in general both regarding BPUI and BPUI's business conducted by the Board of Directors and providing advice to the Board of Directors including supervision of the implementation of the Company's Long-Term Plan, Company's Work Plan and Budget, as well as the provisions of the articles of association and resolutions of the GMS, as well as applicable laws and regulations, for the benefit of BPUI and in accordance with the purposes and objectives of BPUI.

In carrying out their duties, each member of the Board of Commissioners must:

- i) Comply with BPUI's articles of association and laws and regulations as well as the principles of professionalism, efficiency, transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness.
- ii) Be in good faith, prudent and responsible in carry through the supervisory and advisory duties to the Board of Directors for the benefit of BPUI and in accordance with the purposes and objectives of BPUI.

- b. **The authority of the Board of Commissioners is as follows:**

In implementing its duties, the Board of Commissioners is authorized to:

- i) Membentuk organ-organ dibawah Dewan Komisaris yang diperlukan/ dipersyaratkan untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan pengawasan penerapan tata kelola perusahaan.
 - ii) Menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangka waktu tertentu atas beban BPUI (jika diperlukan).
 - iii) Secara aktif meminta keterangan secara lisan maupun tertulis kepada Direksi tentang suatu permasalahan yang terjadi, dan atau berdasarkan hasil evaluasi komite audit/organ-organ Dewan Komisaris berkenaan dengan perkembangan kegiatan/pengurusan BPUI yang dianggap penting dan strategis dapat mempengaruhi kinerja BPUI.
 - iv) Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi.
 - v) Melakukan tindakan pengurusan BPUI dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
 - vi) Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.
- c. Kewajiban Dewan Komisaris:
- Dewan Komisaris berkewajiban untuk:
- i) Memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan BPUI.
 - ii) Meneliti dan menelaah RJPP dan RKAP yang disiapkan Direksi, serta memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai RJPP/ RKAP BPUI mengenai alasan Dewan Komisaris menandatangani RJPP dan RKAP.
 - iii) Mengikuti perkembangan kegiatan BPUI, memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap masalah yang dianggap penting dan/atau strategis bagi pengurusan BPUI, serta melaporkan dengan segera kepada RUPS apabila terjadi gejala penurunan kinerja BPUI.
 - iv) Memberikan persetujuan atas pedoman strategis, kebijakan dan prosedur BPUI, serta memastikan pelaksanaan tanggung jawab Direksi atas penerapannya.
 - v) Memberikan persetujuan atas transaksi-transaksi material dengan limit-limit tertentu sesuai yang ditetapkan kebijakan BPUI.
 - vi) Memberikan persetujuan atas tindakan-tindakan strategis yang belum diatur dalam kebijakan BPUI.
 - vii) Memberikan persetujuan atas kelebihan penggunaan anggaran dan/atau penggunaan anggaran diluar rencana yang ditetapkan.
 - viii) Memberikan persetujuan atas tindakan-tindakan yang berkaitan dengan kegiatan untuk melakukan recovery/restrukturisasi investasi dan/atau pembiayaan/ penggunaan biaya cadangan dengan batasan-batasan tertentu sesuai yang ditetapkan kebijakan BPUI.
 - ix) Memberikan persetujuan pemilihan dan penunjukan eksternal audit untuk pelaksanaan audit laporan keuangan tahunan.
 - x) Menetapkan kebijakan yang mengatur tentang pembahasan gejala menurunnya kinerja BPUI,
 - i) Establish organs under the Board of Commissioners that are necessary/required to assist the Board of Commissioners in supervising the implementation of corporate governance.
 - ii) Use experts for certain matters and within a certain period of time at the expense of BPUI (if needed).
 - iii) Actively request information orally or in writing to the Board of Directors about a problem that occurs, and/or based on the results of the evaluation of the audit committee/organs of the Board of Commissioners regarding the development of BPUI activities/management which are considered important and strategic can affect the performance of BPUI.
 - iv) Understand all policies and actions that have been and will be carried out by the Board of Directors.
 - v) Perform BPUI management actions in certain circumstances for a certain period of time in accordance with the provisions of the articles of association.
 - vi) Carry out other supervisory authority as long as it does not conflict with laws and regulations, articles of association, and/or GMS resolutions.
- c. Obligations of the Board of Commissioners:
- The Board of Commissioners are obliged:
- i) To provide advice to the Board of Directors in performing the management of BPUI.
 - ii) To examine and review the Long-Term Plan (RJPP) and Work Plan and Budget (RKAP) prepared by the Board of Directors, and provide opinions and suggestions to the GMS on the BPUI RJPP/RKAP regarding the reasons for the Board of Commissioners to sign the RJPP and RKAP.
 - iii) To follow the development of BPUI activities, provide opinions and suggestions to the GMS regarding any issues deemed important and/or strategic for the management of BPUI, and report immediately to the GMS if there are symptoms of a decline in BPUI's performance.
 - iv) To approve the strategic guidelines, policies and procedures of BPUI, and ensure the implementation of the Board of Directors' responsibility for their implementation.
 - v) To approve material transactions with certain limits as determined by BPUI policy.
 - vi) To approve strategic actions that have not been regulated in BPUI policy.
 - vii) To approve the excess use of budget and/or the use of budget outside the established plan.
 - viii) To approve actions related to activities to recover/restructure investments and/or financing/use of reserve costs with certain limits as determined by BPUI policy.
 - ix) To approve the selection and appointment of external auditors for the audit of annual financial statements.
 - x) To establish policies governing the discussion of symptoms of declining BPUI performance, providing

pemberian saran kepada Direksi untuk memperbaiki permasalahan yang berdampak pada penurunan kinerja BPUI, dan pelaporan kepada RUPS jika terjadi gejala menurunnya kinerja BPUI.

- x) Menetapkan kebijakan pengukuran dan penilaian kinerja Dewan Komisaris, mengevaluasi atas capaian kinerja Dewan Komisaris dan dituangkan dalam risalah rapat Dewan Komisaris.
- xii) Meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani laporan tahunan dan memberikan penjelasan, pendapat dan saran kepada RUPS mengenai laporan tahunan, apabila diminta. Memberikan laporan pelaksanaan tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku kepada RUPS.
- xiii) Memastikan pelaksanaan rapat/forum komunikasi secara regular berkenaan dengan evaluasi efektivitas penerapan tata kelola, manajemen risiko dan kepatuhan.
- xiv) Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan pemberian nasihat sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.

- **Jumlah, Komposisi dan Susunan Dewan Komisaris Tahun 2022**

Sesuai dengan Pasal 102, Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, Perseroan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat, Perseroan yang menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat atau Perseroan Terbuka wajib mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris. Sebagaimana disampaikan pada Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2022, selama tahun 2022 tidak terdapat perubahan susunan Anggota Dewan Komisaris di IFG. Dengan demikian, per 31 Desember 2022, Dewan Komisaris IFG beranggotakan lima orang dengan salah satunya menjabat sebagai Ketua Dewan Komisaris sehingga sudah memenuhi ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas. Semua anggota Dewan Komisaris melalui uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) oleh pemegang saham guna menjamin Dewan Komisaris memiliki integritas, kompetensi, reputasi, bebas dari afiliasi maupun benturan kepentingan lainnya dan pengalaman serta keahlian yang dibutuhkan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya masing-masing. Komposisi anggota Dewan Komisaris IFG per 31 Desember 2022 selengkapnya adalah sebagai berikut:

advice to the Board of Directors to fix problems that have an impact on the decline in BPUI performance, and reporting to the GMS in the event of symptoms of declining BPUI performance.

- x) To establish policies for measuring and assessing the performance of the Board of Commissioners, evaluating the performance achievements of the Board of Commissioners and outlining them in the minutes of the Board of Commissioners meetings.
- xii) To examine and review periodic reports and annual reports prepared by the Board of Directors and signing the annual report and providing explanations, opinions and suggestions to the GMS regarding the annual report, if requested. To provide a report on the implementation of supervisory duties that have been carried out during the fiscal year to the GMS.
- xiii) To ensure the implementation of regular meetings/ communication forums regarding the evaluation of the effectiveness of the implementation of governance, risk management and compliance.
- xiv) To carry out other obligations in the context of supervisory and advisory duties as long as they do not conflict with laws and regulations, articles of association, and/or GMS resolutions.

- **Number, Composition and Structure of the Board of Commissioners in 2022**

In accordance with Article 102 of the Law on Limited Liability Companies, a Company whose business activities are related to collecting and/or managing public funds, a Company that issues debt acknowledgment letters to the public or a Public Company must have at least 2 (two) members of the Board of Commissioners. As presented in the Company's 2022 Annual Report, during 2022 there was no change in the composition of the Board of Commissioners at IFG. Thus, as of December 31, 2022, IFG's Board of Commissioners consists of five members with one of them serving as Chairman of the Board of Commissioners, thus meeting the provisions of the Limited Liability Company Law. All members of the Board of Commissioners go through a fit and proper test by the shareholders to ensure that the Board of Commissioners has the integrity, competence, reputation, freedom from affiliation or other conflicts of interest and the experience and expertise required to carry out their respective functions and duties. The composition of IFG's Board of Commissioners as of December 31, 2022 is as follows:

Tabel Komposisi dan Susunan Dewan Komisaris per 31 Desember 2022

Table of Composition and Composition of the Board of Commissioners as of December 31, 2022

Nama Name	Jabatan Position	Masa Jabatan Term of Office	Periode Jabatan Term of Office	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment
Fauzi Ichsan	Komisaris Utama/Independen President Commissioner/ Independent Commissioner	30 Desember 2020-RUPS Tahun 2025 December 30, 2020 - 2025 GMS	Ke-1 1st	Diangkat sebagai Komisaris Utama berdasarkan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS Perseroan IFG No. SK-400/MBU/12/2020 tanggal 30 Desember 2020. Appointed as President Commissioner in accordance to the Decree of Ministry of SOEs as IFG GMS No. SK-400/MBU/12/2020 dated December 30, 2020.
Masyita Crystallin	Komisaris Commissioner	30 Desember 2020-RUPS Tahun 2025 December 30, 2020 - 2025 GMS	Ke-1 1st	Diangkat sebagai Komisaris berdasarkan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS Perseroan IFG No. SK-400/MBU/12/2020 tanggal 30 Desember 2020. Appointed as Commissioner in accordance to the Decree of Ministry of SOEs as IFG GMS No. SK-400/MBU/12/2020 dated December 30, 2020.
Nasrudin	Komisaris Commissioner	29 April 2021 – RUPS Tahun 2026 April 29, 2021– 2026 GMS	Ke-1 1st	Diangkat sebagai Komisaris berdasarkan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS Perseroan IFG No. SK-135/MBU/04/2021 tanggal 29 April 2021. Appointed as Commissioner in accordance to the Decree of Ministry of SOEs as IFG GMS No. SK-135/MBU/04/2021 dated April 29, 2021
Sumiyati	Komisaris Commissioner	30 Juli 2021 – RUPS tahun 2026 July 30, 2021– 2026 GMS	Ke-1 1st	Diangkat sebagai Komisaris berdasarkan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS Perseroan IFG No. SK-254/MBU/07/2021 tanggal 30 Juli 2021. Appointed as Commissioner in accordance to the Decree of Ministry of SOEs as IFG GMS No. SK-254/MBU/07/2021 dated July 30, 2021.
Hotbonar Sinaga	Komisaris Independen Independent Commissioner	20 Oktober 2020-RUPS Tahun 2025 October 20, 2020 - 2025 GMS	Ke-1 1st	Diangkat sebagai Komisaris Independen berdasarkan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS Perseroan IFG No. SK-337/MBU/10/2020 tanggal 20 Oktober 2020. Appointed as Independent Commissioner in accordance to the Decree of Ministry of SOEs as IFG GMS No. SK-337/MBU/10/2020 dated October 20, 2020.

DIREKSI

BOARD OF DIRECTORS

Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

• Pengangkatan serta Pemberhentian Direksi

Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS dan keputusan RUPS harus disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna. Anggota Direksi diangkat dari calon yang diusulkan oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan pencalonan tersebut mengikat bagi RUPS

• Masa Jabatan Anggota Direksi

Prosedur penunjukan Direksi dilakukan melalui mekanisme RUPS, anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 atau 5 tahun setelah tanggal pengangkatannya dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya, tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan para anggota Komisaris yang bersangkutan sewaktu-waktu.

Dalam hal pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dilakukan melalui keputusan pemegang saham di luar RUPS, maka mulai berlakunya pengangkatan dan pemberhentian tersebut dimuat dalam keputusan pemegang saham tersebut. Dalam hal keputusan pemegang saham di luar RUPS tidak menetapkan, maka pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi tersebut berlaku sejak keputusan pemegang saham tersebut ditetapkan.

Anggota Direksi dapat diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya dan berdasarkan alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS demi kepentingan dan tujuan BPUI. Keputusan pemberhentian untuk alasan-alasan tertentu sebagaimana dimaksud anggaran dasar BPUI atau peraturan yang berlaku, diambil dengan terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada anggota Direksi yang bersangkutan untuk membela diri.

Rencana pemberhentian anggota Direksi diberitahukan kepada anggota Direksi yang bersangkutan secara lisan atau tertulis oleh pemegang saham. Selama rencana pemberhentian masih dalam proses, maka anggota Direksi yang bersangkutan wajib melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya. Pemberhentian karena alasan terlibat dalam tindakan yang merugikan BPUI dan dinyatakan bersalah dengan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, merupakan pemberhentian dengan tidak hormat

The Board of Directors is the Company's Organ which is authorized and fully responsible for the management of the Company for the interests of the Company, in accordance with the purposes and objectives of the Company and representing the Company, both inside and outside the court in accordance with the provisions of the articles of association.

• Appointment and Dismissal of the Board of Directors

Members of the Board of Directors are appointed and dismissed by the GMS and the GMS resolutions must be approved by the Series A Dwiwarna Shareholders. Members of the BOD are appointed from candidates proposed by Seri A Dwiwarna Shareholders and the nomination is binding for the GMS.

• Term of Office for Members of the Board of Directors

The appointment procedure of the Board of Directors is conducted through the mechanism of GMS, members of the Board of Directors are appointed for a period commencing from the date determined by the GMS until the closing of the 5th Annual GMS or 5 years after the date of their appointment and may be reappointed for the next 1 (one) period, without prejudice to the right of the GMS to dismiss the members of the Board of Commissioners concerned at any time.

In the event that the appointment and dismissal of members of the Board of Directors is made through a shareholder resolution outside the GMS, the effective date of such appointment and dismissal shall be stated in such shareholder resolution. In the event that the shareholders' resolution outside the GMS does not stipulate, the appointment and dismissal of the members of the Board of Directors shall take effect from the date of the shareholders' resolution.

Members of the BOD may be dismissed by GMS resolution by stating the reasons thereof and based on other reasons deemed appropriate by the GMS for the interests and objectives of the BPUI. The decision to dismiss for certain reasons as referred to in the articles of association of the BPUI or applicable regulations, is taken by first giving an opportunity to the member of the BOD concerned to defend himself/herself.

The plan to dismiss a member of the Board of Directors is notified to the member of the Board of Directors concerned verbally or in writing by the shareholders. As long as the dismissal plan is still in process, the member of the Board of Directors concerned must carry out his/her duties as appropriate. Dismissal for reasons of involvement in actions that are detrimental to the BPUI and found guilty by a Court decision that has permanent legal force, is a dismissal with dishonor.

• **Tugas, Wewenang, Kewajiban dan Hak Direksi**

a. Tugas Direksi adalah sebagai berikut:

Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan BPUI untuk kepentingan BPUI dan sesuai dengan maksud dan tujuan BPUI serta mewakili BPUI baik di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.

b. Wewenang Direksi

Direksi berwenang untuk:

- i) Menetapkan kebijakan yang dipandang tepat dalam kepengurusan BPUI.
- ii) Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seorang atau beberapa orang anggota Direksi untuk mengambil keputusan atas nama Direksi atau mewakili BPUI di dalam dan di luar pengadilan.
- iii) Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seorang atau beberapa orang pekerja BPUI baik sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang lain, untuk mewakili BPUI di dalam dan di luar pengadilan.
- iv) Mengatur ketentuan tentang pekerja BPUI termasuk penetapan gaji, pensiun, atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pekerja BPUI berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ketentuan penetapan gaji, pensiun, atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pekerja yang melampaui kewajiban yang ditetapkan peraturan perundang-undangan, harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari RUPS.
- v) Mengangkat dan memberhentikan pekerja BPUI berdasarkan peraturan ketenagakerjaan BPUI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- vi) Mengangkat dan memberhentikan Divisi Sekretaris Perusahaan dan/atau Kepala SKAI.
- vii) Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai pengurusan maupun pemilikan kekayaan BPUI, mengikat BPUI dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan BPUI, serta mewakili BPUI di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, anggaran dasar BPUI, dan/atau keputusan RUPS.
- viii) Menetapkan kebijakan pada Anggota Holding termasuk Anggota Holding eks BUMN agar selalu selaras dan sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku pada BPUI dalam bidang yang diatur di dalam anggaran dasar BPUI.
- ix) Melakukan tindakan untuk dan atas nama Pemegang Saham Seri A Dwiwarna yang diberikan oleh Pemegang Saham seri A Dwiwarna pada Anggota Holding yang berasal dari eks BUMN berdasarkan anggaran dasar dan Surat Kuasa dari Pemegang Saham seri A Dwiwarna Anggota Holding.

c. Kewajiban Direksi

Direksi berkewajiban untuk:

- i) Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan

• **Duties, Authorities, Obligations and Rights of the Board of Directors**

a. The duties of the Board of Directors are as follows:

The Board of Directors is in charge of carrying out all actions related to the management of BPUI for the benefit of BPUI and in accordance with the aims and objectives of BPUI and representing BPUI both inside and outside the court on all matters and all events with limitations as stipulated in laws, articles of association, and/or GMS resolutions

b. Authorities of the Board of Directors

The Board of Directors are authorized to:

- i) Establish policies that are deemed appropriate in the management of BPUI.
 - ii) Organize the transfer of powers of the Board of Directors to one or several members of the Board of Directors to make decisions on behalf of the Board of Directors or represent BPUI inside and outside the court.
 - iii) Manage the delegation of the Board of Directors' authorities to one or several BPUI workers either alone or jointly or to other people, to represent BPUI in and out of court.
 - iv) Regulate provisions regarding BPUI workers including the determination of salary, pension or old-age benefits and other income for BPUI workers based on applicable laws and regulations, with provisions for determining salaries, pensions or old-age benefits and other income for workers that exceed their obligations determined by laws and regulations, must obtain prior approval from the GMS.
 - v) Appoint and dismiss BPUI workers based on BPUI labor regulations and applicable laws and regulations.
 - vi) Appoint and dismiss the Corporate Secretary Division and/or Head of Internal Audit Unit.
 - vii) Perform all actions and other actions regarding the management and ownership of BPUI assets, bind BPUI with other parties and/or other parties with BPUI, and represent BPUI inside and outside the court on all things and all events, with restrictions as stipulated in laws and regulations, BPUI articles of association, and/or GMS resolutions.
 - viii) Establish policies for Holding Members including former SOEs Holding Members so that they are always aligned and in accordance with the policies and regulations that apply to BPUI in the fields regulated in BPUI's articles of association.
 - ix) Take action for and on behalf of the Series A Dwiwarna Shareholder given by the Series A Dwiwarna Shareholder to a Holding Member from a former SOEs based on the articles of association and Power of Attorney from the Series A Dwiwarna Shareholder as a Holding Member.
- c. Obligations of the Board of Directors
- The Board of Directors are obliged to:
- i) Seek and guarantee the implementation of BPUI's

- kegiatan BPUI sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya.
- ii) Menyiapkan dan memberikan penjelasan kepada RUPS pada waktunya mengenai RJPP, RKAP, dan perubahannya serta menyampaikan kepada Dewan Komisaris dan pemegang saham untuk mendapatkan pengesahan RUPS.
 - iii) Menyampaikan Laporan Tahunan sebagai wujud pertanggungjawaban pengurusan BPUI, serta dokumen keuangan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang kepada RUPS untuk disetujui dan disahkan.
 - iv) Menyiapkan susunan organisasi BPUI lengkap dengan perincian dan tugasnya.
 - v) Memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau yang diminta anggota Dewan Komisaris dan para pemegang saham.
 - vi) Menyusun dan menetapkan blueprint organisasi BPUI.
 - vii) Memformulasikan dan menetapkan risk appetite, risk tolerance dan risk limit.
 - viii) Meminta persetujuan RUPS untuk melakukan tindakan untuk dan atas nama Pemegang Saham seri A Dwiwarna yang diberikan oleh Pemegang Saham seri A Dwiwarna pada Anggota Holding yang berasal dari eks BUMN berdasarkan anggaran dasar Anggota Holding dan surat kuasa dari Pemegang Saham seri A Dwiwarna Anggota Holding tersebut.
 - ix) Melaporkan setiap pelaksanaan tindakan untuk dan atas nama Pemegang Saham seri A Dwiwarna yang diberikan oleh Pemegang Saham seri A Dwiwarna pada Anggota Holding yang berasal dari eks BUMN berdasarkan anggaran dasar Anggota Holding dan surat kuasa dari Pemegang Saham seri A Dwiwarna Anggota Holding tersebut.
 - x) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap anggota Direksi wajib:
 - a) Mencurahkan tenaga, pikiran, perhatian dan pengabdinya secara penuh pada tugas, kewajiban dan pencapaian tujuan BPUI.
 - b) Mematuhi anggara dasar BPUI, peraturan perundang-undangan dan wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, serta kewajaran.
 - c) Menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha BPUI dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

• Jumlah, Komposisi dan Susunan Direksi Tahun 2022

Sebagaimana disampaikan dalam Laporan Tahunan Perseroan, pada tahun 2022, terdapat perubahan komposisi dan susunan Anggota Direksi berdasarkan Keputusan Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Per 31 Desember 2022, Direksi IFG beranggotakan enam orang dengan salah satunya menjabat sebagai Direktur Utama. Jumlah dan komposisi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 92, Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, yang mengatur bahwa Perseroan

- business and activities in accordance with the aims and objectives and business activities;
- ii) Prepare and provide explanations to the GMS in a timely manner regarding the RJPP, RKAP, and their amendments and submit them to the Board of Commissioners and shareholders to obtain approval from the GMS.
- iii) Submit the Annual Report as a form of accountability for managing BPUI, as well as the company's financial documents as referred to in the Law to the GMS for approval and ratification.
- iv) Prepare BPUI organizational structure complete with details and duties.
- v) Provide an explanation of all matters that are asked or requested by members of the Board of Commissioners and shareholders.
- vi) Compile and determine the BPUI organizational blueprint.
- vii) Formulate and determine risk appetite, risk tolerance and risk limits.
- viii) Request approval from the GMS to take action for and on behalf of the Series A Dwiwarna Shareholder given by the Series A Dwiwarna Shareholder to a Holding Member from a former SOE based on the Articles of Association of the Holding Member and a power of attorney from the Series A Dwiwarna Shareholder of the Holding Member.
- ix) Report any implementation of actions for and on behalf of the Series A Dwiwarna Shareholder given by the Series A Dwiwarna Shareholder to a Holding Member originating from a former SOE based on the Articles of Association of the Holding Member and a power of attorney from the Series A Dwiwarna Shareholder of the Holding Member.
- x) In carrying out their duties, each member of the Board of Directors must:
 - a) Devote energy, thoughts, attention and full dedication to the duties, obligations and achievement of BPUI goals.
 - b) Comply with BPUI's articles of association, laws and regulations and must implement the principles of professionalism, efficiency, transparency, accountability, responsibility, independence and fairness.
 - c) Carry out tasks for the interests and business of BPUI in good faith, full of responsibility, and comply with applicable laws and regulations

• Number, Composition and Structure of the Board of Directors in 2022

As stated in the Company's Annual Report, in 2022, there were changes in the composition and structure of the Board of Directors based on the Shareholders' Resolution in the General Meeting of Shareholders (GMS). As of December 31, 2022, IFG's Board of Directors consists of six members with one of them serving as President Director. The number and composition has fulfilled the provisions of Article 92, Law on Limited Liability Companies, which stipulates that a Company whose business activities are related to collecting

yang kegiatan usahanya berkaitan dengan menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat, Perseroan yang menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat, atau Perseroan Terbuka, wajib mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang anggota Direksi. Komposisi anggota Direksi IFG per 31 Desember 2022 selengkapnya adalah sebagai berikut

and/or managing public funds, a Company that issues debt recognition letters to the public, or a Public Company, must have at least 2 (two) members of the Board of Directors. The composition of IFG's Board of Directors as of December 31, 2022 is as follows

Tabel Komposisi dan Susunan Direksi per 31 Desember 2022

Table of Composition and Structure of the Board of Directors as of December 31, 2022

Nama Name	Jabatan Position	Masa Jabatan Term of Office	Periode Jabatan Period	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment
Robertus Billitea	Direktur Utama President Director	11 Februari 2020 - RUPS 2025 February 11, 2020 – 2025 GMS	Ke-1 1st	Diangkat sebagai Direktur Utama berdasarkan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS Perusahaan IFG No. SK-46/MBU/02/2020 tanggal 11 Februari 2020. Appointed as President Director in accordance to the Decree of Ministry of SOEs as IFG GMS No. SK-46/MBU/02/2020 dated February 11, 2020.
Hexana Tri Sasongko	Wakil Direktur Utama Vice President Director	4 Juni 2021 - RUPS 2026 June 4, 2021 – 2026 GMS	Ke-1 1st	Diangkat sebagai Wakil Direktur Utama berdasarkan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS Perusahaan IFG No. SK-186/MBU/06/2021 tanggal 4 Juni 2021. Appointed as Vice President Director in accordance to the Decree of Ministry of SOEs as IFG GMS No. SK-186/MBU/06/2021 dated June 4, 2021.
Rizal Ariansyah	Direktur SDM Director of HR	11 Februari 2020 - RUPS 2025 September 26, 2022 – 2026 GMS	Ke-1 1st	Diangkat sebagai Direktur SDM berdasarkan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS Perusahaan IFG No. SK-216/MBU/09/2022 tanggal 26 September 2022. Appointed as Director of HR in accordance to the Decree of Ministry of SOEs as IFG GMS No. SK-216/MBU/09/2022 dated September 26, 2022.
Pantro Pander Silitonga	Direktur Bisnis Director of Business	11 Februari 2020 - RUPS Tahun 2025 February 11, 2020 - 2025 GMS	Ke-1 1st	Diangkat sebagai Direktur Bisnis berdasarkan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS Perusahaan IFG No. SK-46/MBU/02/2020 tanggal 11 Februari 2020. Appointed as Director of Business in accordance to the Decree of Ministry of SOEs as IFG GMS No. SK-46/MBU/02/2020 dated February 11, 2020
Rianto Ahmadi	Direktur Teknik Director of Technical	20 September 2021 – RUPS Tahun 2025 September 20, 2021 - 2025 GMS	Ke-1 1st	Diangkat sebagai Direktur Teknik berdasarkan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS Perusahaan IFG No. SK-313/MBU/09/2021 tanggal 20 September 2021. Appointed as Director of Technical in accordance to the Decree of Ministry of SOEs as IFG GMS No. SK-313/MBU/09/2021 dated September 20, 2021
Heru Handayanto	Direktur Keuangan Director of Finance	26 September 2022 - RUPS Tahun 2026 September 26, 2022 - 2026 GMS	Ke-1 1st	Diangkat sebagai Direktur Keuangan berdasarkan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS Perusahaan IFG No. SK-216/MBU/09/2022 tanggal 26 September 2022. Appointed as Director of Finance based on the Decree of the Minister of SOEs as IFG GMS No. SK-216/MBU/09/2022 dated September 26, 2022

PENGEMBANGAN KOMPETENSI PENERAPAN KEUANGAN BERKELANJUTAN [OJK E.2]

COMPETENCY DEVELOPMENT IN SUSTAINABLE FINANCE IMPLEMENTATION [OJK E.2]

Selama tahun 2022, Dewan Komisaris dan Direksi telah mengikuti pengembangan kompetensi di bidang keberlanjutan sebagai berikut:

During 2022, the Board of Commissioners and Board of Directors have participated in competency development in the field of sustainability as follows:

Dewan Komisaris Board of Commissioners

Nama dan Jabatan Name and Position	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Type of Education and Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Material	Tanggal Pelaksanaan Date of Implementation	Penyelenggara Organizer
Sumiyati (Komisaris) (Commissioner)	Seminar dan Konferensi Seminars and Conferences	Risk Beyond 2022: International Conference	Bali, 8-9 Desember 2022 Bali, December 8-9, 2022	Enterprise Risk Management Academy (ERMA)
Nasrudin (Komisaris) (Commissioner)	Seminar dan Konferensi Seminars and Conferences	Risk Beyond 2022: International Conference	Bali, 8-9 Desember 2022 Bali, December 8-9, 2022	Enterprise Risk Management Academy (ERMA)

Direksi Board of Directors

Nama dan Jabatan Name and Position	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Type of Education and Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Material	Tanggal Pelaksanaan Date of Implementation	Penyelenggara Organizer
Hexana Tri Sasongko (Direktur Utama) (President Director)	In Class Training	Implementasi PSAK 74 PSAK 74 Implementation	Jakarta, 27 April 2022 Jakarta, April 27, 2022	Deloitte
Rianto Ahmadi (Direktur Teknik) (Director of Technical)	In Class Training	Implementasi PSAK 74 PSAK 74 Implementation	Jakarta, 27 April 2022 Jakarta, April 27, 2022	Deloitte
Pantro Pander Silitonga (Direktur Bisnis) (Director of Business)	In Class Training	Authentic Leader Development	Boston, 4-9 Desember 2022 Boston, December 4-9, 2022	Harvard Business School

PENILAIAN RISIKO ATAS PENERAPAN KEUANGAN BERKELANJUTAN [OJK E.3]

RISK ASSESSMENT OF SUSTAINABLE FINANCE IMPLEMENTATION [OJK E.3]

IFG menyadari adanya berbagai risiko yang dihadapi dalam menjalankan operasional usaha yang berpotensi menghambat pencapaian kinerja dan target-target yang telah ditetapkan. Untuk meminimalkan risiko dan dampaknya, Perseroan melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, termasuk risiko atas keuangan berkelanjutan, yang timbul dari seluruh kegiatan organisasi dengan menerapkan Manajemen Risiko, yang menampilkan gambaran dinamika profil risiko yang dihadapi perusahaan.

IFG is aware of the various risks faced in doing business operations that have the potential to hinder the achievement of performance and targets that have been set. To minimize risks and their impacts, the Company conducts a process of identifying, measuring, monitoring and controlling risks, including risks on sustainable finance, arising from all organizational activities by implementing Risk Management, which displays a dynamic picture of the risk profile faced by the company.

- **Tugas dan Tanggung Jawab**

Pengelola Manajemen Risiko memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memberikan pertimbangan pengambilan keputusan dalam menangani pekerjaan baru yang belum pernah dikerjakan oleh Perusahaan sebelumnya maupun seluruh kegiatan yang dilakukan di seluruh unit kerja. Uraian tugas pengelola Manajemen Risiko selengkapnya adalah sebagai berikut:

1. Membuat, melaksanakan, dan memonitor rencana program kerja Divisi Manajemen Risiko;
2. Menyusun, me-review dan/atau melakukan evaluasi pedoman strategis pengelolaan manajemen risiko operasional, pengadaan barang dan jasa dan/atau kebijakan yang akan diberlakukan di Perusahaan dan Anak Perusahaan;
3. Melakukan identifikasi, pengukuran, mitigasi risiko dan pengendalian risiko di Perusahaan dan Anak Perusahaan serta melaporkannya secara berkala;
4. Melakukan pemeriksaan kepatuhan atas semua usulan dan/atau Internal Memo yang diajukan kepada Direksi untuk mendapatkan persetujuan sesuai dengan peraturan internal Perusahaan;
5. Membuat evaluasi risiko Perusahaan sehubungan dengan kegiatan aksi korporasi Perusahaan;
6. Me-review dan mengevaluasi pelaksanaan manajemen mutu Perusahaan untuk melakukan identifikasi, perolehan dan penerapan sertifikasi internasional/regional/nasional yang diperlukan oleh Perusahaan untuk memperoleh pengakuan standar secara internasional/regional/nasional;
7. Membuat, me-review, mengadministrasikan, mengelola dan mengevaluasi seluruh Kebijakan dan SPO;
8. Melakukan pemeriksaan, penyelarasan dan memberikan rekomendasi atas penyusunan kebijakan dan SPO di seluruh unit kerja Perusahaan, termasuk kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan;
9. Melakukan penyusunan, penyelarasan dan penetapan Service Level Agreement (SLA) pada seluruh Direktorat;
10. Melakukan pengukuran terhadap pemahaman karyawan terkait kebijakan yang berlaku di Perusahaan;
11. Melakukan evaluasi secara periodik atas kebijakan dan SPO dari seluruh Direktorat dan menyampaikannya kepada Direktur terkait;
12. Mengajukan, mempersiapkan, membuat analisa dan membuat Internal Memo sehubungan dengan adanya permohonan dari Anak Perusahaan terkait kegiatan manajemen risiko di Anak Perusahaan untuk dapat ditindaklanjuti kepada Direktur Keuangan dan Umum;
13. Membuat laporan terkait kegiatan yang dilakukan oleh Divisi Manajemen Risiko kepada Direktur Keuangan dan Umum secara berkala;
14. Melakukan pembinaan dan pengawasan langsung terhadap karyawan-karyawan di dalam Divisi Manajemen Risiko; dan
15. Menyelesaikan segala pekerjaan yang tertunda (pending matters) dan menyelesaikan tindak lanjut temuan audit.

- **Pihak yang Mengangkat dan Memberhentikan Kepala Divisi Manajemen Risiko**

Pengelola Manajemen Risiko di IFG diketuai oleh Kepala Divisi Manajemen Risiko yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris.

- **Duties and Responsibilities**

The Risk Management Manager has the duty and responsibility to provide decision-making considerations in handling new work that has never been done by the Company before and all activities carried out in all work units. The full description of the duties of the Risk Management Manager is as follows:

1. Create, implement, and monitor the work program plan of the Risk Management Division;
2. Develop, review and/or evaluate strategic guidelines for operational risk management, procurement of goods and services and/or policies that will be applied in the Company and its subsidiaries;
3. Identify, measure, mitigate risks and control risks in the Company and Subsidiaries and report them periodically;
4. Conduct compliance checks on all proposals and/or Internal Memos submitted to the Board of Directors for approval in accordance with the Company's internal regulations;
5. Make an evaluation of the Company's risk in connection with the Company's corporate action activities;
6. Review and evaluate the implementation of the Company's quality management to identify, obtain and implement international/regional/national certifications required by the Company to obtain international/regional/national standard recognition;
7. Create, review, administer, manage and evaluate all Policies and SPO);
8. Examine, harmonize and provide recommendations on the preparation of policies and SPOs in all work units of the Company, including compliance with laws and regulations;
9. Conduct the preparation, alignment and determination of Service Level Agreement (SLA) in all Directorates;
10. Measure employees' understanding of policies applicable in the Company;
11. Conduct periodic evaluations of policies and SPOs from all Directorates and submit them to the relevant Director;
12. Submit, prepare, analyze and make Internal Memos in connection with requests from Subsidiaries related to risk management activities in Subsidiaries to be followed up to the Director of Finance and General Affairs;
13. Make reports related to activities carried out by the Risk Management Division to the Director of Finance and General Affairs on a regular basis;
14. Provide direct guidance and supervision to employees in the Risk Management Division; and
15. Complete all pending matters and completing follow-up on audit findings.

- **The Party Appointing and Dismissing the Head of the Risk Management Division**

The Risk Management Manager at IFG is chaired by the Head of the Risk Management Division who is appointed and dismissed by the President Director after obtaining approval from the Board of Commissioners.

- **Profil Risiko Tahun 2022 dan Mitigasinya**

Perusahaan telah mengklasifikasi profil risiko dan mitigasi yang telah dilakukan sepanjang tahun 2022 sebagai berikut:

- **2022 Risk Profile and Its Mitigation**

The Company has classified the risk profile and mitigations that have been implemented throughout 2022 as follows:

No.	Risiko Risk(s)	Uraian Risiko dan Penyebab Description of Risks and Causes	Mitigasi Mitigation
1	Capaian penerimaan dividen dari anggota holding kurang dari yang direncanakan Achievement of dividend income from holding members less than planned	Kinerja anak perusahaan secara konsolidasi tidak mencapai target RKAP The performance of consolidated subsidiaries did not achieve the RKAP target	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan monitoring ketat terhadap kinerja anggota holding dengan meminta anggota holding agar: <ul style="list-style-type: none"> – Fokus kepada bisnis yang memberikan hasil positif; – Melakukan inisiatif - inisiatif bisnis baru khususnya dengan memanfaatkan platform teknologi; – Menjaga rasio biaya operasional di tingkat yang wajar/sesuai rata – rata industri. • Conduct strict monitoring of the performance of holding members by asking holding members to: <ul style="list-style-type: none"> – Focus on businesses that provide positive results; – Conduct new business initiatives, especially by utilizing technology platforms; – Maintain the operating cost ratio at a reasonable level/according to industry averages.
2	Pelaksanaan penugasan pemerintah untuk penyelamatan pemegang polis Jiwasraya tidak terlaksana dengan baik Implementation of the government's assignment to rescue Jiwasraya policyholders is not well implemented	IFG Life pasca penempatan dana PMN dan fundraising tidak dapat menyelesaikan kewajiban kepada nasabah karena kekurangan dana After the placement of PMN funds and fundraising, IFG Life cannot settle obligations to customers due to lack of funds	<ul style="list-style-type: none"> • Kesiapan operasional IFG Life telah mencapai 100%. • Divisi Bisnis Asuransi Jiwa melakukan monitoring kesiapan operasional dan kinerja rutin terjadwal IFG Life setiap bulan dan turut mengundang divisi lain terkait seperti Divisi Akuntansi dan Pelaporan, Divisi Strategi Perusahaan, dan Divisi Manajemen Risiko. • IFG saat ini sedang dalam proses untuk transfer portofolio polis dari Jiwasraya ke IFG Life dengan progres transfer per akhir maret 2022 mencapai 66% untuk pengalihan portofolio polis dan 31% untuk pengalihan aset. • IFG Life's operational readiness has reached 100%. • The Life Insurance Business Division monitors IFG Life's operational readiness and scheduled routine performance on a monthly basis and invites other relevant divisions such as the Accounting and Reporting Division, Corporate Strategy Division, and Risk Management Division. • IFG is currently in the process of transferring policy portfolio from Jiwasraya to IFG Life with the transfer progress as of end of March 2022 reaching 66% for policy portfolio transfer and 31% for asset transfer.
3	Risiko laporan keuangan tidak dapat diterbitkan sesuai batas waktu sesuai ketentuan Risk of financial statements not being issued within the stipulated deadline	'Pelaksanaan audit laporan keuangan membutuhkan waktu lama karena kendala kelengkapan data di anggota holding sehingga memperpanjang proses audit' 'The implementation of financial statement audits takes a long time due to data completeness constraints in holding members, thus prolonging the audit process.'	<ul style="list-style-type: none"> • Meminta anggota holding melakukan perbaikan tata kelola untuk memperbaiki proses data entry dan meningkatkan akurasi data. • Melakukan persiapan implementasi sistem keuangan terintegrasi untuk IFG dan anggota holding. • Requesting holding members to improve governance to improve the data entry process and increase data accuracy. • Preparing the implementation of integrated financial system for IFG and holding members.
4	Risiko dividen anggota holding tidak dapat digunakan untuk pembayaran kewajiban keuangan IFG Risk that holding members' dividends cannot be used to pay IFG's financial obligations	Penarikan dividen PT Jasa Raharja tidak disetujui Menteri Keuangan Pemerintah memutuskan untuk menarik dividen dari IFG PT Jasa Raharja's dividend withdrawal was not approved by the Minister of Finance. Government decides to withdraw dividend from IFG	IFG mengajukan permohonan kepada Pemerintah (Kemenkeu via KBUMN) agar: <ul style="list-style-type: none"> • Diberikan ijin untuk menarik dividen JR setiap tahun sampai dengan 5 tahun ke depan. • Tidak dilakukan penarikan dividen dari IFG sampai dengan 5 tahun ke depan. IFG submits a request to the Government (MoF via Ministry of SOEs) that: <ul style="list-style-type: none"> • Given permission to withdraw JR dividends every year for the next 5 years. • No dividend withdrawal from IFG for the next 5 years.
5	IFG tidak dapat menjalankan kewajiban sesuai ketentuan OJK (jika POJK pengawasan IFG telah diterbitkan) IFG is unable to carry out obligations in accordance with OJK regulations (if POJK for IFG supervision has been issued).	Internal IFG belum siap untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diminta POJK IFG's internal is not ready to perform the obligations required by POJK.	<ul style="list-style-type: none"> • Merencanakan dengan baik persiapan untuk pelaksanaan kewajiban berdasarkan POJK. • Meminta waktu penerapan POJK agar dapat dimulai setelah BPUI siap sesuai jadwal yang direncanakan. • Properly plan to prepare for the implementation of obligations under POJK. • Request for the implementation of POJK to start after the BPUI is ready according to the planned schedule.

6	Risiko BPUI sebagai pemegang saham pengendali harus ikut bertanggung jawab atas kerugian seluruh anggota holding yang disebabkan oleh pihak dalam pengendalian IFG The risks of BPUI as the controlling shareholder, must take responsibility for the losses of all holding members caused by parties under IFG's control.	Adanya kesalahan pengelolaan oleh pengurus perusahaan yang menyebabkan kerugian Mismanagement by the company's management that causes losses	Seluruh anggota IFG Holding (anak dan cucu perusahaan) diminta menerapkan Governansi Korporat meliputi namun tidak terbatas pada: <ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan prinsip tata kelola sesuai ketentuan regulator. • Menerapkan manajemen risiko yang prudent sesuai standar yang ditetapkan holding. • Menerapkan prinsip 3LoD dan 4EP secara konsisten. All IFG Holding members (subsidiaries and sub-subsidiaries) are required to implement Corporate Governance including but not limited to: <ul style="list-style-type: none"> • Implementing governance principles in accordance with regulatory requirements. • Implementing prudent risk management according to the standards set by the holding. • Implementing 3LoD and 4EP principles consistently.
7	Risiko IFG sebagai pemegang saham anggota holding terlalu terlibat dalam keputusan - keputusan yang bersifat operasional di anggota holding The risks of IFG as a shareholder of a holding member is too involved in operational decisions of the holding member.	Kurangnya pemahaman mengenai tata kelola hubungan holding dan anggota holding, UU PT dan ketentuan regulator lainnya terkait tata kelola di lingkungan IFG Lack of understanding of the governance of the relationship between the holding and holding members, the PT Law and other regulatory provisions related to governance in the IFG environment.	<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun dan memastikan kebijakan mengenai pengelolaan anggota holding selaras dengan ketentuan perundangan. • Melakukan sosialisasi penerapan Governansi Perusahaan kepada seluruh satuan kerja di IFG. • Develop and ensure policies regarding the management of holding members are in line with statutory provisions. • Socialize the implementation of Corporate Governance to all work units in IFG.
8	Risiko hilangnya captive market anggota holding yang berasal dari penugasan Pemerintah Risk of loss of holding members' captive market derived from Government assignments	Perubahan Kebijakan pemerintah Changes in government policy	<ul style="list-style-type: none"> • IFG meminta anggota holding untuk melakukan inisiatif bisnis baru dengan tetap berpegang pada prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik. • IFG meminta anggota holding untuk secara berkesinambungan melakukan perbaikan tata kelola dan penguatan manajemen risiko, serta senantiasa berkomunikasi dengan stakeholder mengenai kinerja dan perbaikan yang dilakukan. • IFG asks holding members to conduct new business initiatives while adhering to the principles of prudence and good governance. • IFG requests holding members to continuously improve governance and strengthen risk management, and always communicate with stakeholders regarding performance and improvements made.
9	Suku bunga pinjaman meningkat drastis Interest rates on loans increase dramatically	Perubahan kondisi makro ekonomi Changes in macroeconomic conditions	<p>Melakukan lindung nilai atas kenaikan tingkat suku bunga utang yang dimiliki IFG.</p> <p>Hedging the increase in interest rates on IFG's debt.</p>

- **Evaluasi Atas Efektivitas Sistem Manajemen Risiko Oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris**

Perusahaan senantiasa melakukan evaluasi atas efektivitas Sistem Manajemen Risiko IFG dibantu oleh Komite Pengelolaan Risiko yang berada di bawah Dewan Direksi. Adapun Perusahaan telah merumuskan evaluasi terhadap efektivitas sistem manajemen risiko sebagai berikut:

1. Pengelolaan untuk setiap kategori risiko termasuk manajemen risiko korporasi yang dicantumkan dalam kebijakan yang ditandatangani Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris.
2. Pemenuhan komponen manajemen risiko terintegrasi sesuai amanat regulator (OJK) yang mencakup antara lain pembentukan komite manajemen risiko terintegrasi dan kerangka acuan kerja komite manajemen risiko terintegrasi, penyusunan kebijakan manajemen risiko terintegrasi
3. Pemenuhan implementasi atas pedoman strategis yang telah ditetapkan di tahun sebelumnya untuk diturunkan ke anak perusahaan.
4. Pelaksanaan risk & control self assessment (RCSA) semesteran.
5. Penetapan risk appetite dan risk tolerance.

- **Evaluation on the Effectiveness of the Risk Management System by the Board of Directors and/or Board of Commissioners**

The Company continuously evaluates the effectiveness of the IFG Risk Management System with the assistance of the Risk Management Committee under the Board of Directors. The Company has formulated an evaluation on the effectiveness of the risk management system as follows:

1. Management for each risk category including corporate risk management as stated in the policy signed by the Board of Directors and approved by the Board of Commissioners.
2. Fulfillment of integrated risk management components in accordance with the mandate of the regulator (OJK) which includes, the establishment of an integrated risk management committee and terms of reference for the integrated risk management committee, preparation of an integrated risk management policy.
3. Fulfillment of the implementation of strategic guidelines that have been set in the previous year to be passed down to subsidiaries.
4. Implementation of risk & control self-assessment (RCSA) every semester.
5. Determination of risk appetite and risk tolerance.

- Evaluasi dan pengkinian kebijakan, prosedur dan metodologi dilakukan secara berkala untuk menjaga kesesuaian dengan regulasi dan kondisi operasional. Evaluasi terhadap efektivitas manajemen risiko juga dilakukan melalui laporan berkala yang dikirimkan kepada Dewan Komisaris dan Direksi, antara lain Laporan Profil Risiko, Laporan Risiko Utama, dan laporan terkait lainnya. Keseluruhan evaluasi, khususnya evaluasi dan pengkinian kebijakan, prosedur, dan metodologi dilakukan secara berkala untuk menjaga kesesuaian dengan peraturan Kementerian BUMN, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan kondisi terkini operasional IFG.
- Sebagai perusahaan yang berbentuk konglomerasi, evaluasi juga dilakukan oleh Dewan Komisaris dan Direksi serta komite yang berada di bawah Direksi dan Komisaris terhadap pelaksanaan manajemen risiko terintegrasi. Anak perusahaan secara umum telah menerapkan manajemen risiko melalui Unit Manajemen Risiko yang berada di masing-masing Anak perusahaan, dengan tetap dilakukan koordinasi secara terintegrasi melalui Unit Manajemen Risiko IFG di entitas utama. Dewan Komisaris dan Direksi pada masing-masing Anak Perusahaan secara aktif melakukan pemantauan dan evaluasi melalui laporan-laporan yang disampaikan oleh masing-masing Anak Perusahaan untuk selanjutnya digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam menetapkan kebijakan pada Anak Perusahaan. Setiap pelaporan oleh Anak Perusahaan juga disampaikan dan ditelaah oleh Unit Manajemen Risiko IFG. IFG juga telah melakukan koordinasi dengan Anak Perusahaan untuk menerapkan manajemen risiko tersebut sesuai dengan kebijakan yang ada di Indonesia Financial Group ("IFG").
- Sebagai salah satu bentuk penerapan risiko secara enterprise-wide, IFG memiliki risk appetite sebagai tingkat dan jenis risiko yang bersedia diambil oleh IFG dalam rangka mencapai sasaran bisnis IFG. Risk appetite yang ditetapkan oleh IFG tercermin dalam strategi dan sasaran bisnis Perusahaan. Agar setiap aspek dari pengelolaan operasional dan keuangan Perusahaan dapat meminimalisir potensi benturan kepentingan, Perusahaan memiliki Surat Keputusan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia No.62 Tahun 2022 Tentang Kebijakan Pengadaan Barang dan/atau Jasa.
- Evaluation and updating of policies, procedures and methodologies are conducted periodically to maintain their suitability with regulations and operational conditions. Evaluation on the effectiveness of risk management is also conducted through periodic reports sent to the Board of Commissioners and Board of Directors, including the Risk Profile Report, Major Risk Report, and other related reports. The overall evaluation, especially the evaluation and updating of policies, procedures, and methodologies is done periodically to maintain its suitability with the regulations of the Ministry of SOEs, the Financial Services Authority (OJK) and the current condition of IFG's operations
- As a conglomerate company, evaluation is also conducted by the Board of Commissioners and Directors as well as committees under the Board of Directors and Commissioners on the implementation of integrated risk management. Subsidiaries have generally implemented risk management through the Risk Management Unit located in each Subsidiary, while still coordinating in an integrated manner through IFG's Risk Management Unit at the main entity. The Board of Commissioners and the Board of Directors of each Subsidiary actively monitor and evaluate through reports submitted by each Subsidiary to be used as one of the considerations in determining policies in the Subsidiary. Each report by the Subsidiaries is also submitted and reviewed by the IFG Risk Management Unit. IFG has also coordinated with the Subsidiaries to implement risk management in accordance with the policies of the Indonesia Financial Group ("IFG").
- As a form of enterprise-wide risk implementation, IFG has a risk appetite as the level and type of risk that IFG is willing to take to achieve IFG's business objectives. The risk appetite set by IFG is reflected in the Company's business strategy and objectives. In order for every aspect of the Company's operational and financial management to minimize potential conflicts of interest, the Company has Decree of the Board of Directors of the Company (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia No.62 of 2022 concerning the Policy on Procurement of Goods and/or Services.

PENGELOLAAN HUBUNGAN DENGAN PEMANGKU KEPENTINGAN [OJK E.4]

RELATIONSHIP MANAGEMENT WITH STAKEHOLDERS [OJK E.4]

• Kebijakan Umum

1. Pengelolaan Pemangku Kepentingan diarahkan pada kepentingan bisnis BPUI dengan memperhatikan tanggung jawab sosial dan lingkungan BPUI, keselamatan, dan kesehatan kerja, serta memperhatikan skala prioritas dan saling menghargai (mutual respect) sehingga tercapai keseimbangan dan keharmonisan antara:
 - a) Dimensi bisnis yang berorientasi pada penciptaan nilai (value creation) dan kepuasan pelanggan.
 - b) Dimensi sosial yang menyangkut aspek etika usaha dan tanggung jawab sosial BPUI, kondisi kesehatan, dan keselamatan serta kesejahteraan pekerja dan aspek sosial kemasyarakatan.
 - c) Dimensi lingkungan yang mengarahkan BPUI untuk memperhatikan aspek kelestarian dan keseimbangan lingkungan hidup di sekitar unit operasi/lapangan usaha.
2. Pengelolaan Pemangku Kepentingan didasarkan prinsip-prinsip GCG, yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, kemandirian, dan kewajaran.
3. Penghubung antara BPUI dengan Pemangku Kepentingan adalah Divisi Sekretaris Perusahaan atau pejabat lain yang ditunjuk berdasarkan ketentuan.

• Asas Pemangku Kepentingan

Asas Pemangku Kepentingan, adalah:

1. Komunikatif, yaitu pesan yang disampaikan tepat sasaran, relevan serta dapat diterima dan dipahami secara optimal, efektif, dan efisien.
 2. Harmonis, yaitu tercipta hubungan saling menghargai, mendukung, sinergis, dan saling menguntungkan antara BPUI dengan Pemangku Kepentingan.
 3. Etis, yaitu menuntut insan BPUI melaksanakan tugas sesuai dengan etika dan kode etik yang ditetapkan.
 4. Kemitraan, yaitu terbinanya hubungan kerja yang baik dan setara antara BPUI dan Pemangku Kepentingan.
 5. Profesional, yaitu menuntut insan BPUI mengutamakan keahlian, keterampilan, pengalaman, dan konsisten terhadap penugasan.
 6. Transparan, yaitu menuntut BPUI menyediakan informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif.
 7. Akuntabel, yaitu menentukan setiap kegiatan dan hasil kegiatan insan BPUI harus dapat dipertanggungjawabkan.
 8. Partisipatif, yaitu peran serta aktif BPUI dan Pemangku Kepentingan dalam menjalin hubungan yang saling menguntungkan.
- Pengelompokan Pemangku Kepentingan

Kegiatan BPUI berkaitan erat dengan publik internal dan publik eksternal. Kegiatan ini berkembang menjadi hubungan antara

• General Policy

1. Stakeholder management is directed at the business interests of the BPUI by taking into account the social and environmental responsibilities of the BPUI, safety and health, as well as paying attention to the priority scale and mutual respect so as to achieve balance and harmony between:
 - a) business dimension that is oriented towards value creation and customer satisfaction.
 - b) Social dimension concerning aspects of business ethics and social responsibility BPUI, health conditions, and the safety and welfare of workers and social aspects of the community.
 - c) The environmental dimension that directs BPUI to pay attention to aspects of preservation and balance of the environment around the operating unit or business sector
2. Stakeholder management is based on GCG principles, namely transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness.
3. The liaison between the BPUI and the Stakeholders is the Corporate Secretary Division or other officials appointed based on the provisions.

• Stakeholder Principle

The principle of Stakeholders, are:

1. Communicative, which means messages delivered on target, relevant and can be received and understood optimally, effectively and efficiently.
2. Harmonious, which means creating a relationship of mutual respect, support, synergy, and mutual benefit between BPUI and Stakeholders.
3. Ethical, which means requiring BPUI personnel to carry out their duties in accordance with the stipulated ethics and code of conduct.
4. Partnership, which means fostering a good and equal working relationship between BPUI and Stakeholders
5. Professional, which means requiring BPUI personnel to prioritize expertise, skills, experience, and be consistent with assignments.
6. Transparent, which means demanding that BPUI to provide correct, honest and non-discriminatory information.
7. Accountable, which means determining that every activity and result of the activities of BPUI personnel must be accountable.
8. Participatory, which means the active participation of BPUI and Stakeholders in establishing a mutually beneficial relationship.

• Classification of Stakeholders

BPUI's activities are closely related to the internal public and external public. This activity developed into a relationship

BPUI dengan Pemangku Kepentingan internal dan Pemangku Kepentingan eksternal. Pemangku Kepentingan internal merupakan publik yang menjadi bagian dari kegiatan BPUI, sedangkan Pemangku Kepentingan eksternal adalah publik yang berada di luar BPUI yang harus diberi informasi agar dapat membina hubungan dengan baik. Berdasarkan hal ini, Pemangku Kepentingan internal dan Pemangku Kepentingan eksternal perlu menyesuaikan dengan bentuk, sifat, jenis, dan karakter BPUI.

- **Hak dan Partisipasi Pemangku Kepentingan**

1. Hak Pemangku Kepentingan dapat timbul secara hukum karena pemberlakuan peraturan perundang-undangan, perjanjian/kontrak, atau karena nilai etika/moral dan tanggung jawab sosial dan lingkungan BPUI yang tidak bertentangan dengan kebijakan BPUI dan peraturan perundang-undangan.
2. Hak-hak Pemangku Kepentingan dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh BPUI, antara lain melalui pemberian informasi yang relevan dan penting secara transparan, akurat dan tepat waktu dan melalui mekanisme komunikasi yang sehat dan beretika.
3. BPUI menciptakan kondisi yang memungkinkan Pemangku Kepentingan berpartisipasi dalam menaati peraturan perundang-undangan.
4. BPUI mempunyai mekanisme untuk menampung dan menindaklanjuti saran dan keluhan dari Pemangku kepentingan.

- **Pedoman Pokok Pelaksanaan**

Dalam melakukan interaksi kerja dengan pemangku kepentingan diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pelanggan

BPUI menyadari bahwa sebagai penyedia layanan finansial yang lengkap dan inovatif harus mengutamakan kepentingan dan kepuasan pelanggan dengan memberikan pelayanan yang cepat, tepat, akurat, adil, dan transparan. BPUI bertanggung jawab atas kualitas produk dan jasa yang dihasilkan serta dampak negatif terhadap keselamatan pengguna.

2. Mitra Bisnis

BPUI bertindak adil dengan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh mitra bisnis untuk melakukan transaksi usaha dengan BPUI. Mitra Bisnis berhak memperoleh informasi yang relevan sesuai dengan hubungan bisnis dengan BPUI sehingga masing-masing pihak dapat membuat keputusan atas dasar pertimbangan yang adil dan wajar.

3. Pemerintah

Dalam berinteraksi dengan lembaga-lembaga pemerintah, BPUI senantiasa menjalin hubungan yang harmonis dan konstruktif atas dasar kejujuran dan saling menghormati dengan mengutamakan kepentingan umum.

4. Masyarakat

BPUI menyadari pentingnya hubungan yang harmonis dengan masyarakat sekitar sehingga masyarakat dapat berkontribusi untuk pengamanan aset BPUI.

5. Media Massa

BPUI menyadari bahwa peranan media masa, baik media cetak maupun media komunikasi yang efektif untuk meningkatkan citra BPUI.

between BPUI and internal Stakeholders and external Stakeholders. Internal Stakeholders are the public who are part of BPUI activities, while external Stakeholders are the public outside BPUI who must be informed to build good relations. Accordingly, internal Stakeholders and external Stakeholders need to adapt to the form, nature, type and character of BPUI.

- **Stakeholder Rights and Participation**

1. Stakeholder rights may occur legally due to the enactment of laws, regulations, agreements/contracts, or due to ethical/moral and BPUI's social and environmental responsibility that are not in conflict with BPUI policies and laws and regulations.
2. Stakeholders' rights are respected, protected and fulfilled by BPUI, among others, through the provision of relevant and important information in a transparent, accurate and timely manner and through a healthy and ethical communication mechanism.
3. BPUI creates conditions that allow Stakeholders to participate in complying with laws and regulations.
4. BPUI has a mechanism to accommodate and follow up on suggestions and complaints from Stakeholders.

- **Basic Guidelines for Implementation**

In conducting work interactions with stakeholders, it is regulated with the following provisions:

1. Customer

BPUI realizes that as a comprehensive and innovative financial service provider, it must prioritize the interests and satisfaction of its customers by providing fast, precise, accurate, fair, and transparent services. BPUI is responsible for the quality of the products and services produced and the negative impact on user safety.

2. Business Partners

BPUI acts fairly by providing equal opportunity to all business partners to conduct business transactions with BPUI. Business Partners are entitled to obtain relevant information in accordance with their business relationship with BPUI so that each party can make decisions on the basis of fair and reasonable considerations.

3. Government

In interacting with government agencies, BPUI always maintains harmonious and constructive relationships based on honest and mutual respect by prioritizing the public interest.

4. Community

BPUI realizes the importance of harmonious relationship with the surrounding community so that the community can contribute to safeguarding BPUI's assets

5. Mass Media

BPUI realizes that the role of mass media, both print media and communication media are effective to improve the image of BPUI.

6. Karyawan

BPUI memberikan perlakuan yang adil dan kesempatan yang sama bagi semua karyawan dan berkomitmen untuk menjunjung tinggi asas profesionalisme dengan mengembangkan kompetensi karyawan selaras dengan rencana pengembangan BPUI.

Selanjutnya, berdasarkan pemetaan dan kategorisasi di atas, Perseroan telah menetapkan metode pelibatan, frekuensi dan topik yang dibahas dalam menjalin hubungan dengan pemangku kepentingan sebagai berikut:

6. Employees

BPUI provides fair treatment and equal opportunities for all employees and is committed to upholding the principles of professionalism by developing employee competencies in line with BPUI's development plan.

Furthermore, based on the above mapping and categorization, the Company has determined the involvement method, frequency and topics discussed in establishing relationships with stakeholders as follows:

Pemangku Kepentingan Stakeholders	Metode Pelibatan Involvement Method	Frekuensi Frequency	Topik/Masalah yang Dibahas Topics/Issued Being Discussed
Pelanggan/ Konsumen Customer/ Consumer	Website dan frontline information Website and frontline information	Setiap saat bila diperlukan Any time if deemed necessary	Mendapatkan kepuasan layanan Obtaining Customer Satisfaction
	Kunjungan langsung Direct visits	Setiap saat bila diperlukan Any time if deemed necessary	Informasi produk dan jasa terbaru yang dimiliki Perseroan Information on the latest products and services owned by the Company
	Layanan Call Center Call Center Service	Setiap saat apabila diperlukan Any time if deemed necessary	Mendapatkan solusi apabila ada pertanyaan atau keluhan soal layanan produk dan jasa Obtaining solutions if you have questions or complaints about products and services
	Survei Kepuasan Pelanggan/ Konsumen Customer/ Consumer Satisfaction Survey	1 kali dalam setahun 1 (once) a year	Mendapatkan gambaran tentang angka kepuasan dan ketidakpuasan pelanggan. Obtaining an overview of customer satisfaction and dissatisfaction figures.
Mitra Bisnis Business Partners	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrak kerja • Mitra investasi • Seminar dan workshop • Work contract • Investment Partner • Seminars and workshops 	Apabila dibutuhkan If deemed necessary	Proses pengadaan yang obyektif Memperoleh kerja sama saling menguntungkan Objective procurement process Obtaining mutually beneficial cooperation
Pemerintah Government	Pelaporan pelaksanaan kepatuhan) Compliance implementation reporting)	4 (empat) kali dalam setahun 4 (four) times a year	Memberikan informasi tentang kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku Providing information about compliance with applicable laws and regulations
Masyarakat Community	kerja sama strategis untuk menjalankan program program Tanggung Jawab Perseroan, baik di bidang sosial maupun lingkungan Strategic cooperation to run programs of Corporate Responsibility, both in the social and environmental sectors	Saat diperlukan If deemed necessary	Mengoptimalkan pencapaian Program TSJL BUMN Perseroan Optimizing the achievement of the Company's SOE TSJL Program
Media Media	Press release	Saat diperlukan If deemed necessary	Narasumber berita yang terpercaya Memberikan informasi terkait bisnis perbankan yang perlu diketahui oleh publik Reliable news sources Providing information related to banking business that needs to be known by the public
Karyawan Employees	Media Internal (Majalah) Internal Media (Magazine)	(tiga) bulan sekali Once every 3 (three) months	Melakukan sosialisasi ihwal kebijakan dan strategi yang berkaitan dengan kepegawaian Socialization of policies and strategies related to employment
	Survei Kepuasan Pegawai Employee Satisfaction Survey	1 (satu) kali setahun 1 (once) a year	Mengukur tingkat kepuasan pegawai dan menjaring harapan mereka Measure employee satisfaction levels and capture their expectations



PERMASALAHAN DALAM PENERAPAN KEUANGAN BERKELANJUTAN [OJK E.5] ISSUES IN IMPLEMENTING SUSTAINABLE FINANCE [OJK E.5]

Dalam posisinya sebagai BUMN Holding Perasuransian dan Penjaminan, IFG tidak dikenai kewajiban untuk menjalankan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik. Namun demikian, Perseroan telah mengalokasikan sebagian dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSN) untuk membiayai program-program yang selaras dengan keuangan berkelanjutan, yaitu melalui Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara (TJSN BUMN). Dalam menjalankan TJSN BUMN, Perseroan tidak menghadapi masalah yang signifikan dan berbagai program yang direncanakan bisa diwujudkan di lapangan .

In its position as an Insurance and Guarantee Holding SOE, IFG is not subject to the obligation to implement the Financial Services Authority (OJK) Regulation No. 51/POJK.03/2017 on the Implementation of Sustainable Finance for Financial Services Institutions, Issuers and Public Companies. However, the Company has allocated some of its Social and Environmental Responsibility (TJSN) funds to finance programs that are aligned with sustainable finance, namely through the State-Owned Enterprises Social and Environmental Responsibility Program (SOE TJSN). In conducting SOE TJSN, the Company did not face any significant problems and the various programs planned could be achieved in the field.





KINERJA KEBERLANJUTAN

SUSTAINABLE PERFORMANCE

KEGIATAN MEMBANGUN BUDAYA KEBERLANJUTAN [OJK F.1]

Seiring dengan terbentuknya Financial Group (IFG) sebagai Holding Asuransi dan Penjaminan maka diperlukan transformasi budaya sebagai salah satu komponen yang mendukung akselerasi kinerja perusahaan. Budaya Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif (AKHLAK) menjadi pedoman perilaku setiap karyawan untuk menjadi insan-insan yang bertanggung jawab dan kinerja individu Perusahaan.

Untuk memastikan implementasi Budaya AKHLAK maka IFG menyusun Roadmap Budaya Perusahaan tahun 2020-2024 yang menjadi pedoman atau acuan bagi penyalarasan nilai dan budaya perusahaan IFG dan Anak Perusahaan. Roadmap tersebut mencerminkan perencanaan berbagai aspek implementasi budaya AKHLAK, yang kemudian dituangkan dalam bentuk program kerja dan integrasinya pada satuan kerja SDM. Roadmap Budaya Perusahaan mempunyai sasaran untuk mewujudkan pelaksanaan transformasi budaya perusahaan yang akan mendorong tercapainya visi dan misi perusahaan serta demi mendukung tercapainya culture fit behavior di IFG.

Sebagai bagian dari kegiatan membangun budaya keberlanjutan, IFG mensosialisasikan Roadmap Budaya Perusahaan melalui berbagai media dan kesempatan, baik kepada pemangku kepentingan internal maupun eksternal. Melalui sosialisasi tersebut, Perusahaan optimis roadmap akan bisa diwujudkan sesuai dengan periode waktu yang telah ditetapkan.

Gambar Roadmap Budaya Perusahaan Tahun 2020 – 2024

Image of Corporate Culture Roadmap 2020 – 2024



Culture Roadmap	Change & Build	Understanding & Integration	Buy In	I am IFG	Culture Excellent
	Memahami current situation budaya yang ada di holding dan anak perusahaan Merumuskan dan sinergi arah transformasi budaya holding dan anak perusahaan Menyusun payung strategi atau roadmap budaya yang menjadi acuan holding dan anak Perusahaan Understand the current situation of culture in the holding and subsidiaries Formulate and synergize the direction of cultural transformation of the holding and subsidiaries Develop an umbrella strategy or cultural roadmap that becomes a reference for holding and subsidiaries	Mengkonsolidasi tingkat pemahaman dan meningkatkan kapabilitas dalam menerapkan nilai AKHLAK dikaitkan dengan visi IFG Group Menyeraskan proses kerja yang sesuai Meningkatkan komitmen pimpinan dan insan IFG Group dalam menerapkan AKHLAK Consolidate the level of understanding and improve capabilities in applying the value of AKHLAK associated with the vision of IFG Group Align the appropriate work process Increase the commitment of IFG Group leaders and people in implementing AKHLAK	Menyalarkan ke dalam sistem manajemen yang terkait Mendorong kinerja insan IFG Group dalam melakukan pekerjaan dengan mengaitkan AKHLAK ke dalam target yang harus dicapai organisasi Align into related management systems Encourage the performance of IFG Group personals in doing work by linking AKHLAK to the targets that must be achieved by the organization.	Mengidentifikasi kemajuan pencapaian "Group Keuangan Non-bank Terbesar di Asia Tenggara" dengan penerapan AKHLAK Setiap insan IFG menjadi insan yang ber-AKHLAK Identify the progress of achieving "The Largest Non-Bank Financial Group in Southeast Asia" with the implementation of AKHLAK. Every IFG personnel becomes an individual with morals (AKHLAK)	Insan IFG Group growing to full of potential menjadi group keuangan non-bank terbesar di Asia Tenggara dengan penerapan AKHLAK IFG Group personals are growing to their full potential to become the largest non-bank financial group in Southeast Asia with the implementation of AKHLAK.
Evaluasi Keberhasilan Implementasi Budaya (Culture Survey Index) Evaluation of Culture Implementation Success (Culture Survey Index)					





KINERJA EKONOMI KEBERLANJUTAN

SUSTAINABLE ECONOMIC PERFORMANCE

Sekilas Ekonomi Global dan Nasional

Perekonomian global selama tahun 2022 mengalami berbagai guncangan dan tantangan. Inflasi yang lebih tinggi dari perkiraan, kondisi keuangan yang semakin ketat, perang Rusia melawan Ukraina yang tak kunjung selesai, pandemi COVID-19 berkepanjangan, serta ketidaksesuaian penawaran-permintaan semakin memperlambat prospek ekonomi global.

Situasi ekonomi yang muram tersebut berimbang pada perekonomian sejumlah negara besar. Dana Moneter Internasional (IMF) menyebutkan produk domestik bruto (PDB) Amerika Serikat mengalami kontraksi pada semester I/2022, sedangkan pertumbuhan ekonomi di kawasan Eropa mengalami kontraksi pada kuartal II/2022. Sementara itu, China masih terbelenggu dengan kebijakan zero covid policy dan krisis di sektor properti. Imbas dari kondisi tersebut sangat luar biasa. Menurut IMF, sepertiga ekonomi dunia menghadapi pertumbuhan negatif selama dua kuartal berturut-turut.

Dengan situasi dan kondisi seperti itu, IMF menahan proyeksi pertumbuhan ekonomi global untuk periode 2022 dan 2023. Mengacu pada World Economic Outlook yang dirilis akhir Januari 2023, Dana Moneter Internasional (IMF) mempertahankan outlook pertumbuhan ekonomi global kemungkinan melambat menjadi 3,4 persen pada 2022 dibanding pencapaian tahun 2021 sebesar 5,9%. Sebelumnya, pada Januari 2022, pertumbuhan ekonomi tahun 2022 sempat diproyeksikan mencapai 4,4 persen. Adapun pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun 2023 diperkirakan mencapai 2,9%, lebih tinggi dibandingkan proyeksi terakhir yang disampaikan IMF pada Oktober 2022 yang memperkirakan pertumbuhan ekonomi global tahun 2023 hanya 2,7%.

Di tengah kondisi perekonomian global tahun 2022 yang diproyeksikan mengalami perlambatan tersebut, kondisi sebaliknya justru terjadi dengan Indonesia. Pada tahun 2022, Indonesia mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Menurut Badan Pusat Statistik, ekonomi Indonesia pada tahun 2022 tumbuh 5,31%, naik dibanding tahun 2021, yang tercatat sebesar 3,69% (year on year /y-on-y). Bahkan, pertumbuhan ekonomi tahun 2022 lebih tinggi dibanding tahun 2019, pada saat pandemi belum terjadi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tersebut sesuai dengan prediksi sejumlah lembaga ekonomi dunia, antara lain, Dana Moneter Internasional (IMF) seperti disampaikan dalam World Economic Outlook (WEO) edisi Januari 2023, dengan menyebut angka pertumbuhan di kisaran 5,3% pada 2022.

Global and National Economy at A Glance

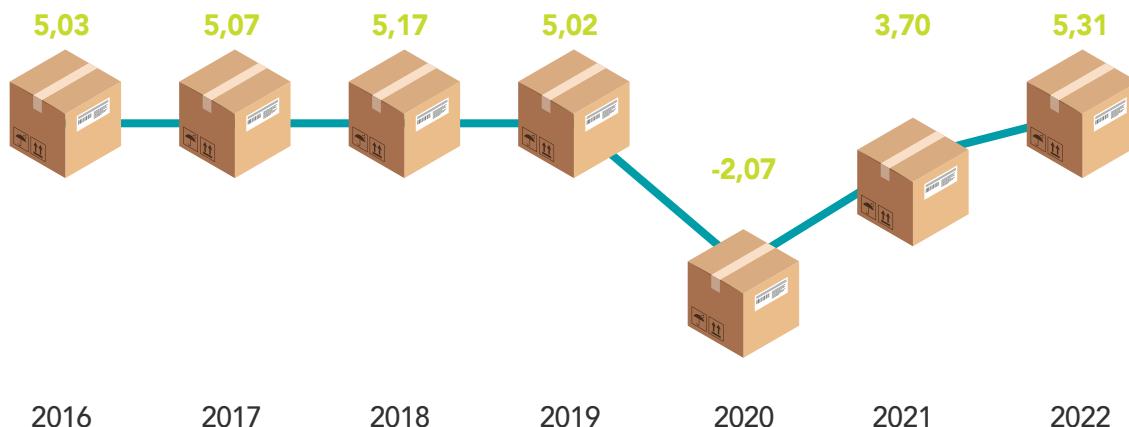
The global economy during 2022 experienced various shocks and challenges. Higher-than-expected inflation, tighter financial conditions, Russia's ongoing war with Ukraine, the prolonged COVID-19 pandemic, and supply-demand mismatches further slowed the global economic outlook.

The gloomy economic situation has affected the economies of a number of major countries. The International Monetary Fund (IMF) said that the gross domestic product (GDP) of the United States contracted in the first semester of 2022, while economic growth in the European region contracted in the second quarter of 2022. Meanwhile, China is still shackled by the zero COVID policy and the crisis in the property sector. The impact of these conditions is extraordinary. According to the IMF, a third of the world economy has faced negative growth for two consecutive quarters.

With such situations and conditions, the IMF withheld its global economic growth projections for 2022 and 2023. Referring to the World Economic Outlook released at the end of January 2023, the International Monetary Fund (IMF) maintains an outlook that global economic growth is likely to slow down to 3.4 percent in 2022 compared to the achievement in 2021 of 5.9%. Previously, in January 2022, economic growth in 2022 was projected to reach 4.4 percent. Meanwhile, world economic growth in 2023 is estimated to reach 2.9%, higher than the last projection submitted by the IMF in October 2022 which estimated global economic growth in 2023 at only 2.7%.

In the midst of the global economic conditions in 2022 which are projected to experience a slowdown, the opposite conditions occur with Indonesia. In 2022, Indonesia recorded significant economic growth. According to Statistics Indonesia, the Indonesian economy in 2022 grew by 5.31%, up from 2021, which was recorded at 3.69% (year on year /y-on-y). In fact, 2022 saw higher economic development than 2019, the year the epidemic had not yet occurred. Indonesia's economic growth is in line with the predictions of a number of world economic institutions, including the International Monetary Fund (IMF) as stated in the January 2023 edition of the World Economic Outlook (WEO), by mentioning a growth rate of around 5.3% in 2022.

Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) 2016-2022



PERTUMBUHAN PDB MENURUT LAPANGAN USAHA 2022 (persen)
PERTUMBUHAN PDB MENURUT PENGELOUARAN 2022 (persen)

Pertumbuhan ekonomi seperti disampaikan BPS tersebut di atas prediksi Kementerian Keuangan yang menyebut angka pertumbuhan ekonomi tahun 2022 sebesar 5,2% atau sedikit lebih tinggi. Perkiraan itu dirilis dengan asumsi pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV-2022 di bawah 5% karena situasi dan kondisinya memang lebih menantang dibanding triwulan sebelumnya. Antara lain, pada September 2022, pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak, dan imbasnya terhadap perekonomian terasa pada tiga bulan berikutnya

Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan hingga tahun 2022 merupakan cerminan atas keberhasilan pemerintah menangani pandemi COVID-19, yang trend-nya terus melandai sejak akhir tahun 2021. Temuan kasus COVID-19 yang terus menurun membuat pemerintah memberikan pelonggaran Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sehingga masyarakat bisa lebih leluasa menjalankan aktivitas, termasuk bekerja di berbagai sektor ekonomi. Dengan kebijakan tersebut, perekonomian pun terus bertumbuh.

Muara atas keberhasilan dalam menangani pandemi COVID-19 adalah dicabutnya secara resmi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di seluruh wilayah Indonesia per 30 Desember 2022 oleh Presiden Joko Widodo. Kebijakan tersebut diambil karena data perkembangan COVID-19 menunjukkan perbaikan dalam beberapa bulan terakhir dengan positive rate mingguan dan perawatan di rumah sakit di bawah standar yang ditetapkan Badan Kesehatan Dunia (WHO). Data per 27 Desember 2022, kasus COVID-19 harian mencapai 1,7 kasus per 1.000.000 penduduk dengan positivity rate mingguan mencapai 3,35% dan tingkat perawatan rumah sakit berada di angka 4,79%, serta angka kematian di angka 2,39%.

GDP GROWTH BY BUSINESS SECTOR IN 2022 (percent)
GDP GROWTH BY EXPENDITURE IN 2022 (percent)

The economic growth as presented by Statistics Indonesia is above the prediction of the Ministry of Finance, which mentions an economic growth rate in 2022 of 5.2% or slightly higher. The estimation was released with the assumption that economic growth in the fourth quarter of 2022 was below 5% because the situation and conditions were more challenging than in the previous quarter. Among other things, in September 2022, the government raised the price of fuel oil, and the impact on the economy was felt in the following three months

The realization of sustainable economic growth until 2022 is a reflection of the government's success in handling the COVID-19 pandemic, whose downward trend has persisted since the end of 2021. The declining number of COVID-19 cases has led the government to relax the Community Activity Restrictions Enforcement (PPKM) so that people can more freely doing activities, including working in various economic sectors. With this policy, the economy continues to grow.

The mouthpiece of the success in handling the COVID-19 pandemic is the official revocation of the Community Activity Restrictions Enforcement (PPKM) in all regions of Indonesia as of December 30, 2022 by President Joko Widodo. The policy was taken because data on the development of COVID-19 showed improvement in recent months with weekly positive rates and hospitalization below the standards set by the World Health Organization (WHO). Data as of December 27, 2022, daily COVID-19 cases reached 1.7 cases per 1,000,000 population with a weekly positivity rate of 3.35% and a hospitalization rate of 4.79%, and a mortality rate of 2.39%.



Tinjauan Industri Asuransi, Penjaminan dan Pasar Modal Indonesia

Dalam menyusun dan menghitung angka pertumbuhan ekonomi Indonesia, BPS menggunakan 17 lapangan usaha atau sektor. Selama tahun 2022, semua sektor tercatat tumbuh, termasuk sektor Jasa Keuangan dan Asuransi, yang mencapai 1,93%, lebih tinggi dibanding tahun 2021 yang mencapai 1,56%. Pertumbuhan sektor asuransi tersebut dikukuhkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan indikator bertumbuhnya akumulasi premi asuransi umum dan reasuransi sebesar 14,06% y-o-y selama periode Januari-November 2022, yang mencapai Rp106,91 triliun. Pada periode yang sama, akumulasi pendapatan sektor asuransi tercatat sebesar Rp280,24 triliun atau tumbuh sebesar 0,44%dibandingkan tahun sebelumnya.

Gambar Pertumbuhan PDB Beberapa Lapangan Usaha Tahun 2022 (persen)

Figure of GDP Growth of Several Business Sectors in 2022 (percent)



Pertumbuhan industri asuransi, asuransi umum dan reasuransi tahun 2022 dibandingkan tahun 2021 selengkapnya dirilis oleh Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) pada awal Maret 2023. Menurut AAUI, premi industri asuransi mencatatkan pertumbuhan sebesar 2,5% pada tahun 2022. Dari pertumbuhan tersebut, premi asuransi umum tumbuh sebesar 16,8%, sedangkan reasuransi mencatatkan pertumbuhan premi sebesar 4,6%. Dari sisi klaim, industri asuransi mencatatkan peningkatan sebesar 10,3%. Dalam hal ini, industri asuransi umum mencatat peningkatan klaim sebesar 26,0% dengan porsi sebesar 10,4% dari total industri, sedangkan klaim reasuransi meningkat 3,9% dengan porsi 3,3%. Adapun pangsa pasar asuransi umum pada tahun 2022 masih dipegang oleh Asuransi Harta Benda/Property (29%), Asuransi Kendaraan Bermotor/Motor Vehicle (20%) dan asuransi Kredit/Credit Insurance (16%). Total tiga lini usaha tersebut mencakup 65% pendapatan premi dari seluruh lini usaha asuransi umum.

Sementara itu, keberadaan Lembaga Penjamin sebagai bagian dari lembaga jasa keuangan di Indonesia, menurut situs resmi Otoritas Jasa Keuangan, hingga akhir Mei 2022 tercatat sebanyak 20 Perusahaan Penjaminan di Tanah Air, yang terbagi menjadi 1 (satu) Perusahaan Penjamin BUMN, 18 Perusahaan Penjamin Daerah, dan

Overview of the Insurance, Guarantee and Capital Market Industries

In compiling and calculating Indonesia's economic growth figures, BPS uses 17 business fields or sectors. During 2022, all sectors recorded growth, including the Financial Services and Insurance sector, which reached 1.93%, higher than in 2021 which reached 1.56%. The growth of the insurance sector was confirmed by the Financial Services Authority (OJK) with an indicator of the growth of general insurance and reinsurance premium accumulation by 14.06% y-o-y during the January-November 2022 period, which reached IDR 106.91 trillion. In the same period, the accumulated revenue of the insurance sector was recorded at IDR 280.24 trillion or grew by 0.44% compared to the previous year.

The growth of the insurance, general insurance and reinsurance industry in 2022 compared to 2021 was fully released by the Indonesian General Insurance Association (AAUI) in early March 2023. According to AAUI, the insurance industry premium recorded a growth of 2.5% in 2022. Of this growth, general insurance premiums grew by 16.8%, while reinsurance recorded premium growth of 4.6%. In terms of claims, the insurance industry recorded an increase of 10.3%. In this case, the general insurance industry recorded an increase in claims of 26.0% with a share of 10.4% of the total industry, while reinsurance claims increased by 3.9% with a share of 3.3%. The general insurance market share in 2022 is still held by Property Insurance (29%), Motor Vehicle Insurance (20%) and Credit Insurance (16%). The three lines of business account for 65% of premium income from all general insurance lines of business.

Meanwhile, the existence of Guarantee Institutions as part of financial services institutions in Indonesia, according to the official website of the Financial Services Authority, until the end of May 2022 there were 20 Guarantee Companies in the country, which were divided into 1 (one) SOE Guarantee Company, 18 Regional

1 (satu) Perusahaan Penjamin Swasta. Sejalan dengan terjaganya pertumbuhan ekonomi Indonesia, kinerja lembaga penjamin turut terdampak positif. Total aset hingga akhir Mei 2022 tercatat sebesar Rp35,34 triliun, naik 8,91% apabila dibandingkan per 31 Desember 2021 yang mencapai Rp32,45 triliun.

Kinerja Perusahaan Penjamin selengkapnya per akhir Mei di antaranya Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan (IJP) Bersih tercatat sebesar Rp2,23 triliun, beban klaim Rp1,48 triliun, pendapatan penjaminan bersih Rp753 miliar, pendapatan operasional lainnya Rp723 miliar, dan beban operasional lainnya Rp446 miliar. Setelah dikurangi pajak penghasilan, laba (rugi) bersih tercatat sebesar Rp508 miliar. Adapun total outstanding penjaminan hingga akhir Mei 2022 tercatat sebesar Rp233,32 triliun, yang terbagi dalam outstanding penjaminan-usaha produktif sebesar Rp165,28 triliun, dan outstanding penjaminan-usaha non produktif sebesar Rp68,04 triliun. Sedangkan jumlah klaim dibayar terbilang sebesar Rp982 miliar. Untuk jumlah terjamin tercatat mencapai 18,08 juta orang.

Adapun kinerja pasar modal Indonesia pada tahun 2022, sebagaimana disampaikan PT Bursa Efek Indonesia (BEI), ditutup dengan kinerja positif dengan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mencapai posisi 6.850,52 atau naik 4,09% dibandingkan akhir tahun 2021. Adapun total nilai kapitalisasi pasar saham pada akhir tahun 2022 tercatat sebesar Rp9.499 triliun atau mengalami peningkatan sebesar 15,1% (yoY). Dari segi likuiditas perdagangan efek saham, Rata-rata Nilai Transaksi Harian (RNTH) saham pada tahun 2022 juga mengalami kenaikan sebesar 10% (yoY) mencapai Rp14,7 triliun. Pada tahun 2022, rata-rata frekuensi perdagangan harian saham juga mengalami kenaikan sebesar 0,9% menjadi 1,3 juta transaksi per hari. Sementara itu, posisi IHSG sempat menyentuh rekor tertinggi sepanjang sejarah BEI yaitu 7.318 pada 13 September 2022. Selain itu, rata-rata volume perdagangan harian saham juga mengalami kenaikan sebesar 16% menjadi 23,9 miliar saham per hari.

Menurut BEI, aktivitas jumlah pencatatan efek baru masih bertumbuh secara positif di sepanjang tahun 2022. Indikatornya, antara lain, BEI mampu mencatatkan 59 Perusahaan Tercatat saham baru dengan fund raised mencapai Rp33,1 triliun. Dengan demikian, per 31 Desember 2022, tercatat sebanyak 825 Perusahaan Tercatat di BEI. Selain saham, BEI juga mencatatkan 1 (satu) penerbitan ETF baru, 13 emisi waran terstruktur, 9 (sembilan) emisi obligasi dan sukuk dari penerbit baru dan 122 emisi obligasi dan sukuk dari penerbit yang sebelumnya pernah menerbitkan obligasi/sukuk. Selanjutnya, dari sisi pengembangan investor, pada tahun 2022, total jumlah investor di pasar modal Indonesia tercatat sebanyak 10,3 juta, tumbuh 37,7% atau sebanyak 2,8 juta dibandingkan tahun sebelumnya. Pada rentang waktu yang sama, investor saham tercatat sebanyak 4,4 juta investor atau naik 28,6% dibandingkan posisi pada akhir tahun 2021.

Sasaran dan Strategi IFG Tahun 2022

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 tanggal 17 Maret 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham BPUI ("PP No 20/2020"), IFG sebagai Holding BUMN Perasuransian dan Penjaminan saat ini

Guarantee Companies, and 1 (one) Private Guarantee Company. In line with Indonesia's sustained economic growth, the performance of guarantee institutions has also been positively affected. Total assets as of the end of May 2022 were recorded at IDR 35.34 trillion, an increase of 8.91% when compared to December 31, 2021 which reached IDR 32.45 trillion.

The complete performance of the Guarantee Company as of the end of May included Net Guarantee Fee (IJP) recorded at IDR 2.23 trillion, claim expenses of IDR 1.48 trillion, net guarantee income of IDR 753 billion, other operating income of IDR 723 billion, and other operating expenses of IDR 446 billion. After deducting income tax, net profit (loss) was recorded at IDR 508 billion. The total outstanding guarantees until the end of May 2022 were recorded at IDR 233.32 trillion, which was divided into outstanding guarantees-productive businesses of IDR 165.28 trillion, and outstanding guarantees-non-productive businesses of IDR 68.04 trillion. Meanwhile, the number of paid claims amounted to IDR 982 billion. The number of guaranteed was recorded at 18.08 million people.

As for the performance of the Indonesian capital market in 2022, as stated by the Indonesia Stock Exchange (IDX), it closed with a positive performance with the Composite Stock Price Index (IDX Composite) reaching a position of 6,850.52 or an increase of 4.09% compared to the end of 2021. The total stock market capitalization value at the end of 2022 was recorded at IDR 9,499 trillion or an increase of 15.1% (yoY). In terms of stock trading liquidity, the Average Daily Transaction Value (RNTH) of shares in 2022 also increased by 10% (yoY) to reach IDR 14.7 trillion. In 2022, the average daily trading frequency of stocks also increased by 0.9% to 1.3 million transactions per day. Meanwhile, the position of the IDX Composite touched the highest record in the history of the IDX, namely 7,318 on September 13, 2022. In addition, the average daily trading volume of shares also increased by 16% to 23.9 billion shares per day.

According to the IDX, the activity of the number of new securities listings is still growing positively throughout 2022. Indicators, among others, include the IDX being able to list 59 new listed companies with funds raised reaching IDR 33.1 trillion. Thus, as of December 31, 2022, there were 825 Listed Companies on the IDX. In addition to stocks, the IDX also recorded 1 (one) new ETF issuance, 13 structured warrant issuances, 9 (nine) bond and sukuk issuances from new issuers and 122 bond and sukuk issuances from issuers who had previously issued bonds/sukuk. Furthermore, in terms of investor development, in 2022, the total number of investors in the Indonesian capital market was recorded at 10.3 million, growing 37.7% or 2.8 million compared to the previous year. At the same time, stock investors were recorded at 4.4 million investors, an increase of 28.6% compared to the position at the end of 2021.

IFG's Goals and Strategies for 2022

In accordance with Government Regulation No. 20 dated March 17, 2020 concerning the Addition of State Equity Participation of the Republic of Indonesia into the Share Capital of BPUI ("PP No. 20/2020"), IFG as an Insurance and Guarantee SOE Holding



memiliki 10 (sepuluh) anak perusahaan yang terdiri dari 4 Anak Perusahaan di bidang Asuransi Umum dan Penjaminan; Anak Perusahaan di bidang Pasar Modal dan Investasi 1 Perusahaan di Asuransi Jiwa; serta 1 Anak Perusahaan dormant dengan rincian sebagai berikut:

1. Anak perusahaan di bidang asuransi dan penjaminan yaitu: Jasa Raharja, Jasindo, Jamkrindo, dan Askindo;
2. Anak perusahaan di bidang Keuangan dan Pasar Modal yaitu: Bahana Sekuritas (BS), Bahana TCW Investment Management (BTIM), Bahana Artha Ventura (BAV), Bahana Kapital Investa (BKI), Bahana Mitra Investa (BMI);
3. Anak Perusahaan dibidang Jasa Non-keuangan PT Grahaniaga Tatautama (GNTU);
4. Anak perusahaan di bidang asuransi jiwa yaitu: IFG Life.

Pada tahun 2020, Perseroan telah mendirikan IFG Life untuk melengkapi portofolio layanan asuransi dan penjaminan serta mempertimbangkan peluang bisnis. IFG Life mendapatkan amanah untuk melaksanakan penugasan dari Menteri BUMN berdasarkan Surat No. S - 187/MBU/03/2020 perihal Penugasan Penyehatan Keuangan Jiwasraya. Sebagai tindak lanjut atas upaya penugasan pemerintah tersebut maka dilakukan migrasi portofolio Jiwasraya oleh IFG Life pada tahun 2021

Strategic Issues yang Dihadapi Holding dan Anak Perusahaan Tahun 2022

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh IFG, strategic issues yang dihadapi holding dan anak perusahaan pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Tantangan dan Solusi yang Telah Dilakukan terkait Bisnis Asuransi Jiwa
 - a. Penyelesaian Pengalihan Aset dan Liabilitas Jiwasraya ke IFG Life

Sampai dengan Desember 2022, IFG Life telah menerima pengalihan liabilitas (polis) sebesar Rp30,9 triliun dan masih terdapat liabilitas (polis) Jiwasraya yang belum dapat dialihkan dikarenakan keterbatasan kapasitas keuangan IFG Life. Selain liabilitas (polis), juga masih terdapat aset-aset Jiwasraya yang belum dapat dialihkan, seperti aset reksa dana dengan kondisi masih dalam status sita oleh Kejaksaan Agung sebesar Rp1,97 triliun serta beberapa aset tanah dan bangunan berkaitan dengan permasalahan ke penghunian sebesar Rp0,97 triliun dan pencairan dana jaminan Jiwasraya yang diperlukan persetujuan dari OJK sebesar Rp0,72 triliun. Aset-aset hasil penerimaan pengalihan dari Jiwasraya pun didominansi oleh aset-aset dengan likuiditas rendah di mana terdapat faktor risiko dalam perhitungan Modal Minimum Berbasis Risiko ("MMBR") sehingga mempengaruhi perhitungan solvabilitas yang juga berdampak pada proses pengalihan portofolio polis.

IFG telah melakukan penambahan modal kepada IFG Life sebesar Rp6,7 triliun pada tahun 2022 sebagai bentuk pelaksanaan penugasan dalam penyelamatan polis Jiwasraya. IFG juga melakukan monitoring secara berkala melalui penyusunan timeline pengalihan portofolio

currently has 10 (ten) subsidiaries consisting of 4 Subsidiaries in the field of General Insurance and Guarantee; Subsidiaries in the field of Capital Markets and Investment 1 Company in Life Insurance; as well as 1 dormant Subsidiary with the following details as follows:

1. Subsidiaries in the sector of Insurance and Guarantee are: Jasa Raharja, Jasindo, Jamkrindo, and Askindo;
2. Subsidiaries in the sector of Financial and Capital Market are: Bahana Sekuritas (BS), Bahana TCW Investment Management (BTIM), Bahana Artha Ventura (BAV), Bahana Kapital Investa (BKI), Bahana Mitra Investa ((BMI));
3. Subsidiary in non-financial services, PT Grahaniaga Tatautama;
4. Subsidiary in the sector of life insurance is: PT Asuransi Jiwa IFG.

In 2020, the Company has established IFG Life to complete the insurance and guarantee service portfolio and consider business opportunities. IFG Life received the mandate to carry out the assignment from the Minister of SOEs based on Letter No. S - 187/MBU/03/2020 concerning the Assignment of Jiwasraya Financial Restructuring. As a follow-up to the government's assignment efforts, the Jiwasraya portfolio migration was completed by IFG Life in 2021.

Strategic Issues Faced by Holding and Subsidiaries in 2022

Based on the results of the analysis conducted by IFG, the strategic issues faced by the holding and its subsidiaries in 2022 are as follows:

1. Challenges and Solutions Related to Life Insurance Business
 - a. Completion of the Transfer of Jiwasraya Assets and Liabilities to IFG Life

As of December 2022, IFG Life has received the transfer of liabilities (policies) amounting to IDR 30.9 trillion and there are still Jiwasraya liabilities (policies) that cannot be transferred due to IFG Life's limited financial capacity. In addition to liabilities (policies), there are also Jiwasraya assets that cannot be transferred, such as mutual fund assets with conditions still under confiscation status by the Attorney General's Office amounting to IDR 1.97 trillion and several land and building assets related to occupancy issues amounting to IDR 0.97 trillion and disbursement of Jiwasraya guarantee funds which require approval from OJK amounting to IDR 0.72 trillion. The assets received from Jiwasraya are also dominated by assets with low liquidity where there is a risk factor in the calculation of Minimum Risk-Based Capital ("MMBR") thus affecting the solvency calculation which also has an impact on the policy portfolio transfer process.

IFG has provided additional capital to IFG Life amounting to IDR 6.7 trillion in 2022 as a form of implementation of the assignment in rescuing Jiwasraya policies. IFG also conducts regular monitoring through the preparation of a timeline for the transfer of policy portfolios and assets. In

polis dan aset. Selain itu, IFG juga telah melakukan permohonan dukungan kepada Menteri BUMN dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian terkait relaksasi pajak, serta berkoordinasi dengan lembaga dan kementerian terkait, seperti Kementerian Keuangan dan OJK. IFG telah menunjuk konsultan independen untuk menghitung kebutuhan penambahan aset IFG Life agar dapat menerima pengalihan liabilitas (polis) yang masih belum dialihkan dengan didampingi oleh BPKP.

b. Optimalisasi Aset Properti

Sebagai tindak lanjut atas aksi korporasi pengalihan, IFG Life memiliki inisiasi berupa aksi korporasi dalam bentuk optimalisasi penjualan aset properti berupa tanah dan/ atau bangunan. Namun, hingga 31 Desember 2022, rencana penjualan aset tanah dan bangunan tersebut belum dapat terealisasikan karena adanya isu beban pajak yang cukup besar pada proses balik nama aset untuk dilakukan penjualan. Pada tahun 2022, IFG melakukan upaya untuk mengajukan relaksasi biaya perpajakan dengan mendaftarkan program restrukturisasi sebagai PSN dan berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait penyusunan peraturan dalam rangka pemberian relaksasi perpajakan.

Hingga Desember 2022, IFG Life telah menjalankan optimalisasi aset tanah/bangunan melalui kerja sama sewa dan pelepasan aset tanah dan bangunan termasuk aset sodetan kali Ciliwung dan pelepasan aset di Bulukumba. IFG berperan aktif memberikan izin untuk proses optimalisasi aset yang akan dilakukan oleh IFG Life.

c. Pengembangan Bisnis IFG Life

Dalam rangka melakukan aktivitas penjualan produk asuransi di tahun 2022, IFG Life masih memiliki kendala terkait perizinan produk dari OJK, di mana masih terdapat beberapa produk yang perlu dilakukan penyesuaian terkait fitur, pricing, dan ketentuan produk lainnya. SEOJK Nomor 5/SEOJK.05/2022 tentang PAYDI menjadi salah satu faktor atas bergesernya timeline perizinan produk. Terkait hal ini, IFG telah melakukan gap analysis dan reviu atas SEOJK Nomor 5/SEOJK.05/2022 tentang PAYDI dan melakukan follow up terkait kesiapan IFG Life dalam penerapan SEOJK Nomor 5/SEOJK.05/2022 tentang PAYDI, baik dari sisi produk maupun kesiapan infrastruktur.

Di samping itu, premi new business (APE) IFG Life pada Desember 2022 belum mencapai target sebagai dampak belum optimalnya sales activity yang dijalankan serta kondisi realisasi produk yang belum sesuai rencana pada RKAP tahun 2022. Untuk mendukung premi new business IFG Life, IFG melakukan monitoring atas pencapaian program kerja IFG Life, termasuk modernisasi operasional dan infrastruktur, serta memberikan dukungan melalui aksi korporasi dan beberapa proyek yang sedang dilakukan seperti inisiasi kerja sama bancassurance dengan BTN dan co-insurance dengan Mandiri Inhealth.

Adapun untuk meningkatkan bisnis IFG Life yang berasal dari portofolio migrasi Jiwasraya, IFG telah melakukan

addition, IFG has also requested support from the Minister of SOEs and the Coordinating Minister for Economic Affairs regarding tax relaxation, as well as coordinating with related institutions and ministries, such as the Ministry of Finance and OJK. IFG has appointed an independent consultant to calculate the need for additional IFG Life assets in order to accept the transfer of liabilities (policies) that have not yet been transferred, accompanied by BPKP.

b. Optimization of Property Assets

As a follow-up to the transfer corporate action, IFG Life has initiated corporate action in the form of optimizing the sale of property assets in the form of land and/or buildings. However, until December 31, 2022, the plan to sell the land and building assets could not be realized due to the issue of high tax burden in the process of transferring the title of the assets to be sold. In 2022, IFG made efforts to apply for tax cost relaxation by registering the restructuring program as National Strategic Project (PSN) and coordinating with ministries/agencies related to the preparation of regulations in order to provide tax relaxation.

Until December 2022, IFG Life has carried out the optimization of land/building assets through lease cooperation and disposal of land and building assets including the Ciliwung river basin assets and the disposal of assets in Bulukumba. IFG plays an active role in providing permits for the asset optimization process to be implemented by IFG Life.

c. IFG Life Business Development

In the context of conducting insurance product sales activities in 2022, IFG Life still has obstacles related to product licensing from OJK, where there are still several products that need to be adjusted regarding features, pricing, and other product provisions. SEOJK Number 5/SEOJK.05/2022 regarding PAYDI is one of the factors for the shift in product licensing timeline. Related to this, IFG has conducted a gap analysis and review of SEOJK Number 5/SEOJK.05/2022 concerning PAYDI and conducted follow-up related to IFG Life's readiness in implementing SEOJK Number 5/SEOJK.05/2022 concerning PAYDI, both in terms of product and infrastructure readiness.

In addition, IFG Life's new business premium (APE) in December 2022 has not reached the target as a result of not optimal sales activity executed and the condition of product realization that is not in accordance with the plan in the 2022 Work Plan and Budget. To support IFG Life's new business premium, IFG monitors the achievement of IFG Life's work program, including operational and infrastructure modernization, and provides support through corporate actions and several ongoing projects such as the initiation of bancassurance cooperation with BTN and co-insurance with Mandiri Inhealth.

As for increasing IFG Life's business from the Jiwasraya migration portfolio, IFG has increased capital by IDR 6.7



penambahan modal sebesar Rp6,7 triliun pada tahun 2022 sehingga IFG Life dapat menerima polis yang memiliki potensi bisnis dan meningkatkan bisnis yang berasal dari portofolio migrasi Jiwasraya.

2. Tantangan dan Solusi yang Telah Dilakukan terkait Bisnis Asuransi Umum dan Penjaminan

a. Implementasi Fokus Bisnis Anggota Holding

Pada tahun 2022, IFG telah memberikan arahan mengenai fokus bisnis anggota holding. Akan tetapi, implementasi dari fokus bisnis anggota holding belum optimal, di mana kenaikan premi dari lini bisnis yang difokuskan di masing-masing anggota holding masih belum meningkat secara signifikan. Berdasarkan analisis internal, hal tersebut disebabkan masih adanya kesenjangan kapabilitas teknis di anggota holding.

IFG telah melakukan berbagai inisiatif di 2022 untuk meningkatkan kapabilitas di anggota holding, antara lain melalui pelatihan lini bisnis offshore dan onshore yang menghadirkan expert, seminar, maupun melalui penguatan COE di IFG, inisiasi pembentukan kapabilitas risk manager di Jasindo dan financial lines di Askindo yang akan diimplementasikan di 2023.

b. Kontribusi HUW yang Sebagian Masih Berasal dari Release Pencadangan

HUW dari bisnis non-penugasan masih bersumber dari hasil release pencadangan seperti release cadangan teknis di lini bisnis asuransi kredit di Askindo sebesar Rp1,5 triliun. Untuk menindaklanjuti isu tersebut, IFG melakukan inisiatif untuk memperkuat proses underwriting, di mana salah satunya melalui pembentukan kapabilitas risk manager dan financial lines, serta optimalisasi KAM di anggota holding.

c. Proses Bisnis Belum Berjalan Optimal

Berdasarkan hasil asesmen dan observasi yang dilakukan oleh IFG pada project business process improvement di proses bisnis KUR, terdapat gap di mana proses bisnis di anggota holding masih belum berjalan secara optimal seperti panjangnya proses rekonsiliasi produksi, klaim dan subrogasi di lini bisnis KUR yang disebabkan belum sepenuhnya dilakukan secara otomasi. Maka dari itu, IFG akan melanjutkan project business process improvement untuk mendorong dilakukannya implementasi perbaikan proses bisnis berdasarkan hasil asesmen dan observasi di lini bisnis utama, serta akan dilanjutkan ke lini bisnis lainnya di tahun 2023.

d. Restrukturisasi Portofolio Asuransi Kredit Belum disetujui oleh Seluruh Mitra

Proses restrukturisasi portofolio asuransi kredit pada tahun 2022 masih menyisakan 1 (satu) bank BUMN yang belum menyetujui untuk dilakukan restrukturisasi/refund. Sedangkan dengan mitra Bank Pembangunan Daerah ("BPD"), proses restrukturisasi masih belum berjalan lancar akibat adanya penentangan dari Asbanda. Permasalahan tersebut ditindaklanjuti melalui intensifikasi proses restrukturisasi portofolio asuransi kredit dengan mencari asuransi jiwa pengganti bagi mitra BPD sebagai salah satu solusi restrukturisasi.

trillion in 2022 so that IFG Life can accept policies that have business potential and increase business from the Jiwasraya migration portfolio.

2. Challenges and Solutions Related to General Insurance and Guarantee Businesses

a. Implementation of Business Focus of Holding Members

In 2022, IFG has provided direction regarding the business focus of holding members. However, the implementation of the business focus of the holding members has not been optimal, where the increase in premiums from the focused business lines in each holding member has not increased significantly. Based on internal analysis, this is due to the gap in technical capabilities of the holding members.

IFG has undertaken various initiatives in 2022 to improve capabilities in the holding members, among others through offshore and onshore business line training that presents experts, seminars, as well as through strengthening COE in IFG, initiating the formation of risk manager capabilities in Jasindo and financial lines in Askindo which will be implemented in 2023.

b. HUW Contribution Partly from Release of Reserves

HUW from non-assignment business still comes from the release of reserves such as the release of technical reserves in the credit insurance business line at Askindo amounting to IDR 1.5 trillion. To follow up on this issue, IFG has taken initiatives to strengthen the underwriting process, one of which is through the establishment of risk manager and financial lines capabilities, as well as optimizing KAM in holding members.

c. Business Processes Have Not Operated Optimally

Based on the results of assessments and observations conducted by IFG on business process improvement projects in the KUR business process, there are gaps where business processes in holding members are still not running optimally such as the lengthy process of reconciling production, claims and subrogation in the KUR business line due to not being fully automated. Therefore, IFG will continue the business process improvement project to encourage the implementation of business process improvements based on the results of assessments and observations in the main business lines, and will continue to other business lines in 2023.

d. Credit Insurance Portfolio Restructuring Not Yet Approved by All Partners

The credit insurance portfolio restructuring process in 2022 still leaves 1 (one) state-owned bank that has not agreed to restructure/refund. Meanwhile, with Regional Development Bank ("BPD") partners, the restructuring process is still not running smoothly due to opposition from Asbanda. The problem was followed up through intensification of the credit insurance portfolio restructuring process by finding replacement life insurance for BPD partners as one of the restructuring solutions.

e. Kondisi Kesehatan Keuangan Nasre

Di pertengahan tahun 2022, anak perusahaan Askrindo, yaitu Nasre memiliki RBC di bawah ketentuan dari OJK. Hal ini terjadi karena peningkatan liabilitas perusahaan yang signifikan, di mana secara umum disebabkan oleh penyesuaian cadangan teknis untuk portofolio inforced lini bisnis asuransi kredit.

IFG berkontribusi untuk melakukan monitoring penyusunan dan implementasi RPK Nasre. Nasre akan melakukan pengurangan dan/atau pembatasan liabilitas perusahaan, berupa cadangan teknis dan/atau utang saat ini. Selain itu, Nasre akan memperbaiki struktur aset perusahaan sehingga porsi AYD meningkat untuk perhitungan Rasio Pencapaian Solvabilitas atau RBC saat ini.

f. Kenaikan Klaim Signifikan di Askrindo dan Jamkrindo

Sejak awal tahun 2022, Askrindo dan Jamkrindo mengalami kenaikan klaim yang signifikan dengan porsi LAR (hutang yang direstrukturasi) yang terus bertambah. Upaya yang dilakukan untuk menindaklanjuti permasalahan ini, yaitu melalui penguatan permodalan di Askrindo dan Jamkrindo dengan dilakukan penambahan modal melalui PMN sebesar Rp3 triliun dan mengajukan kenaikan tarif KUR berdasarkan kualitas kredit yang dijaminkan.

g. Kenaikan Klaim SW di Jasa Raharja

Di tahun 2022, terjadi kenaikan klaim SW yang signifikan di Jasa Raharja. Hal tersebut dikarenakan meningkatnya jumlah dan fatalitas korban kecelakaan lalu lintas seiring dengan kenaikan mobilitas masyarakat pada masa pandemi yang membaik. Untuk memitigasi kenaikan klaim tersebut, Jasa Raharja telah melakukan program bersinergi dengan Korps Lalu Lintas Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta melakukan roadshow penerapan UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta meningkatkan kolektabilitas SW melalui inisiatif bersama dengan stakeholder terkait seperti pemutihan denda keterlambatan pajak kendaraan bermotor.

h. Implementasi Asuransi Umum dengan Model Bisnis Retail berbasis Digital di JRP

Salah satu tantangan yang dihadapi yang dihadapi untuk model bisnis ritel digital di IFG adalah belum adanya anggota holding yang secara fokus melakukan proses penjualan dengan skema digital untuk segmen retail, di mana dalam menjalankan bisnis model tersebut diperlukan adanya kesiapan baik secara infrastruktur teknologi informasi, organisasi, dan proses operasional yang dijalankan. Oleh karena itu, IFG telah mulai melakukan transformasi, dimulai dari pilot project di Labuan Bajo, melalui penjualan produk asuransi kecelakaan diri, project ini berhasil menjual 2.749 polis. Dari keberhasilan tersebut JRP melanjutkan replikasi mekanisme embedded insurance melalui partnership dengan partner-partner lainnya. Selain itu, JRP juga melakukan transformasi proses bisnis menuju digital dengan mengimplementasikan API integration yang menghubungkan 2 (dua) sistem berbeda.

e. Nasre's Financial Health Condition

In mid-2022, Askrindo's subsidiary Nasre had an RBC below the OJK requirement. This was due to a significant increase in the company's liabilities, which was mainly due to technical reserve adjustments for the inforced portfolio of the credit insurance business line.

IFG contributes to monitoring the preparation and implementation of Nasre's RPK. Nasre will reduce and/or limit the company's liabilities, in the form of technical reserves and/or current debt. In addition, Nasre will improve the company's asset structure so that the AYD portion increases for the calculation of the current Solvency Achievement Ratio or RBC.

f. Significant Increase in Claims at Askrindo and Jamkrindo

Since the beginning of 2022, Askrindo and Jamkrindo have experienced a significant increase in claims with a growing portion of LAR (restructured loan). Efforts have been made to follow up on this issue, namely through strengthening capital in Askrindo and Jamkrindo by increasing capital through PMN by IDR 3 trillion and proposing an increase in KUR rates based on the quality of the collateralized credit.

g. Increase in Compulsory Contribution (SW) Claims at Jasa Raharja

In 2022, there was a significant increase in Compulsory Contribution claims at Jasa Raharja. This is due to the increasing number and fatality of traffic accident victims along with the increase in community mobility during the pandemic. To mitigate the increase in claims, Jasa Raharja has carried out a synergy program with the Traffic Corps of the Indonesian National Police Headquarters, as well as conducting roadshows on the implementation of Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation and increasing Compulsory Contribution collectability through joint initiatives with relevant stakeholders such as the elimination of late motor vehicle tax fines.

h. Implementation of General Insurance with a Digital-based Retail Business Model at JRP

One of the challenges faced for the digital retail business model in IFG is that there is no holding member that focuses on the sales process with digital schemes for the retail segment, where in executing the business model it is necessary to be prepared both in terms of information technology infrastructure, organization, and operational processes carried out. Therefore, IFG has begun to transform, starting with a pilot project in Labuan Bajo, through the sale of personal accident insurance products, this project succeeded in selling 2,749 policies. From this success, JRP continued to replicate the embedded insurance mechanism through partnerships with other partners. In addition, JRP also transformed its business processes to digital by implementing API integration that connects 2 (two) different systems.



3. Tantangan dan Solusi yang Telah Dilakukan terkait Bisnis Capital Market dan Investasi

Pada tahun 2022, bisnis capital market dan investasi dihadapi oleh beberapa tantangan. Di bawah ini adalah beberapa tantangan dan solusi yang dijalankan untuk menghadapi tantangan tersebut:

- a. Proses operasional bisnis sekuritas yang masih belum optimal sehingga adanya exposure terhadap operational risk dan beban yang dibukukan di Bahana Sekuritas. Untuk mencegah terjadinya risk event ke depannya, IFG merekomendasikan agar Bahana Sekuritas untuk menunjuk pihak ketiga untuk melakukan reviu keseluruhan proses bisnis. Atas rekomendasi ini, reviu telah selesai dilakukan oleh pihak ketiga di bulan Desember 2022 dan selanjutnya akan dilakukan implementasi perbaikan internal antara lain dengan pembuatan, pembaharuan, atau penyempurnaan kebijakan.
- b. Industri sekuritas yang semakin kompetitif, sejalan dengan adanya tren penurunan fee dan keterbatasan sumber daya di pasar. IFG dan anggota holding melakukan optimasi sinergi, seperti penerbitan MTN, turnaround Jasindo, dan aksi korporasi lainnya yang dilakukan IFG dan anggota holding. Hal ini dilakukan guna mengembangkan portofolio dan kredensial Bahana Sekuritas dalam melakukan berbagai transaksi untuk memperkuat posisi Bahana Sekuritas di pasar.
- c. Perubahan beberapa regulasi (SEOJK Nomor 5/ SEOJK.05/2022 tentang PAYDI, PP Nomor 91 tahun 2021 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap, POJK Nomor 2/ POJK.04/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan POJK Nomor 17/POJK.04/2022 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi) yang berpengaruh pada penurunan AUM di BTIM, dengan adanya penurunan AUM yang terjadi, BTIM melakukan beberapa inisiasi untuk tetap mempertahankan pendapatannya seperti memperkuat kinerja jenis reksa dana yang memiliki high margin, mengembangkan dan memperluas pangsa pasar pada segmen retail high networth individual dan inisiasi bisnis lainnya. Selain itu, IFG telah membantu meningkatkan AUM BTIM dengan mendorong BTIM untuk melakukan pengelolaan bagi captive market, antara lain dengan dimulainya proses pembuatan Kebijakan Sinergi Investasi grup IFG, memfasilitasi BTIM untuk melakukan monitoring bulanan atas kinerja investasi anggota holding bidang asuransi dan penjaminan, serta pemberian rekomendasi pengelolaan investasi berbasis LDI. Adapun dalam membantu peningkatan AUM BTIM dari non-captive market IFG membantu memperkenalkan kepada institusi asuransi dan dana pensiun top tier untuk menjadi klien BTIM.
- d. Pembatasan dari OJK bagi BTIM untuk menerbitkan Reksa Dana Terproteksi yang mengakibatkan penurunan terhadap nilai AUM sebesar 36% dari Rp10,2 triliun di 2021 menjadi Rp6,4 triliun di 2022. Langkah yang diambil untuk mengatasi pembatasan dari OJK berupa komunikasi secara intensif antara IFG, BTIM dan OJK untuk memberikan update atas

3. Challenges and Solutions Related to Capital Market and Investment Businesses

In 2022, the capital market and investment business faced several challenges. Below are some of the challenges and solutions implemented to overcome these challenges:

- a. The operational process of the securities business is still not optimized, resulting in exposure to operational risk and expenses booked at Bahana Sekuritas. To prevent future risk events, IFG recommended that Bahana Sekuritas appoint a third party to review the entire business process. Based on this recommendation, the review has been completed by a third party in December 2022 and further internal improvements will be implemented, including the creation, updating, or refinement of policies.
- b. The securities industry is increasingly competitive, in line with the downward trend in fees and limited resources in the market. IFG and holding members optimize synergies, such as MTN issuance, Jasindo turnaround, and other corporate actions conducted by IFG and holding members. This was done to develop Bahana Sekuritas' portfolio and credentials in conducting various transactions to strengthen Bahana Sekuritas' position in the market.
- c. Changes in several regulations (SEOJK Number 5/ SEOJK.05/2022 concerning PAYDI, PP Number 91 of 2021 concerning Income Tax on Income in the Form of Bond Interest Received or Obtained by Domestic Taxpayers and Permanent Establishments, POJK Number 2/POJK.04/2020 concerning Amendments to Financial Services Authority Regulation Number 23/POJK.04/2016 concerning Mutual Funds in the Form of Collective Investment Contracts and POJK Number 17/POJK.04/2022 concerning Guidelines for Investment Manager Code of Conduct, which affected the decline in AUM at BTIM. With the decline in AUM that occurred, BTIM took several initiatives to maintain its income such as strengthening the performance of high margin mutual fund types, developing and expanding market share in the retail high networth individual segment and other business initiatives. In addition, IFG has helped increase BTIM's AUM by encouraging BTIM to carry out management for captive markets, including by starting the process of making the IFG group Investment Synergy Policy, facilitating BTIM to conduct monthly monitoring of the investment performance of insurance and guarantee holding members, and providing recommendations for LDI-based investment management. As for helping to increase BTIM's AUM from non-captive markets, IFG helped introduce top tier insurance institutions and pension funds to become BTIM clients.
- d. OJK's restriction for BTIM to issue Protected Mutual Funds resulted in a 36% decrease in AUM value from IDR 10.2 trillion in 2021 to IDR 6.4 trillion in 2022. The steps taken to overcome the restrictions from OJK were intensive communication between IFG, BTIM and OJK to provide updates on the Sritex PKPU process so that in December

- proses PKPU Sritex sehingga pada Desember 2022 OJK telah mencabut pembatasan tersebut.
- e. Model bisnis UMi BAV yang saat ini belum profitable dan sustainable, termasuk dengan ketatnya persaingan untuk lini bisnis pembiayaan UMi jika dibandingkan dengan pembiayaan dari peer to peer lending, program KUR, dan kredit UMKM perbankan. Pada tahun 2022, IFG merekomendasikan BAV untuk lebih selektif dalam memberikan pemberian pembiayaan BAV sehingga menjadi lebih sehat. NPI BAV di tahun 2022 mengalami perbaikan sebesar 0,8% dibanding tahun sebelumnya sehingga NPI turun dari 4,85% menjadi 4,01%. Selain itu, ke depannya IFG akan melakukan kajian terkait model bisnis BAV untuk menilai strategic role perusahaan dalam sinergi holding.
- f. Pendapatan operasional BKI masih terkonsentrasi dari jasa advisory, di mana bisnis ini bersinggungan dengan Bahana Sekuritas, untuk mengatasi persaingan bisnis antara Bahana Sekuritas dan BKI, ke depannya BKI direkomendasikan untuk fokus dalam pengembangan mekanisme recovery aset subrogasi anggota holding IFG sebagai lini bisnis utama BKI yang dapat di leverage oleh anggota holding bidang asuransi umum dan penjaminan. Pada tahun 2022, IFG telah memfasilitasi BKI untuk bekerja sama dengan Askrindo, Jamkrindo, dan JRP. Pada akhir Desember 2022, BKI telah melakukan penandatanganan PKS dengan JRP. Selain itu, IFG telah memfasilitasi BKI untuk bertemu dengan potential partner untuk melakukan pengelolaan subrogasi.
- g. Pertumbuhan pendapatan GNTU dari rental gedung yang dimiliki saat ini terbatas, dikarenakan occupancy rate sudah hampir mencapai 100%. Untuk mengatasi rintangan yang dihadapi, GNTU dengan pendampingan dan monitoring yang dilakukan oleh IFG telah melakukan perencanaan untuk merumuskan pengembangan bisnis baru seperti pengelolaan videotron, peningkatan retail tenant, dan lainnya, termasuk juga dalam mengelola aset di IFG dan anggota holding dengan tujuan diversifikasi pendapatan untuk meminimalisir risiko konsentrasi. Selain itu, rentable spaces GNTU tetap dijadikan prioritas dalam pemenuhan kebutuhan ruang kantor seiring bertumbuhnya kebutuhan IFG dan anggota holding.
4. Tantangan dan Solusi yang Telah Dilakukan terkait Marketing, Reputasi Perusahaan, dan Brand
- Marketing Pengembangan digital platform One by IFG merupakan sebuah bentuk implementasi IFG sebagai perusahaan holding BUMN menuju digitalisasi. Melalui pengembangan ini, IFG juga turut serta dalam mendukung program inklusi dan literasi keuangan dengan menyediakan solusi finansial secara digital kepada ekosistem BUMN menggunakan instrumen investasi, proteksi, dan penjaminan. Bentuk marketing yang telah dilakukan IFG adalah dengan menawarkan produk asuransi perjalanan milik Jasindo pada peluncuran internal aplikasi One by IFG dan pilot project IFG Labuan Bajo Marathon dengan menawarkan embedded produk asuransi kecelakaan diri milik JRP dan IFG Life.
- Adapun tantangan yang dihadapi adalah diperolehnya izin dari regulator untuk meluncurkan aplikasi ke publik. Integrasi produk
- 2022 OJK had lifted the restrictions.
- e. BAV's UMi business model is currently not profitable and sustainable, including the tight competition for the UMi financing business line when compared to financing from peer to peer lending, the KUR program, and bank MSME loans. In 2022, IFG recommends BAV to be more selective in providing BAV financing so that it becomes healthier. BAV's NPI in 2022 improved by 0.8% compared to the previous year so that the NPI decreased from 4.85% to 4.01%. In addition, in the future IFG will conduct a study related to the BAV business model to assess the company's strategic role in the holding synergy.
- f. BKI's operating income is still concentrated from advisory services, where this business intersects with Bahana Sekuritas, to overcome business competition between Bahana Sekuritas and BKI, in the future BKI is recommended to focus on developing a mechanism for recovering subrogated assets of IFG holding members as BKI's main business line which can be leveraged by holding members in the fields of general insurance and guarantee. In 2022, IFG has facilitated BKI to work with Askrindo, Jamkrindo, and JRP. By the end of December 2022, BKI had signed an agreement with JRP. In addition, IFG has facilitated BKI to meet with potential partners to manage subrogation.
- g. GNTU's revenue growth from building rentals is currently limited, as the occupancy rate has almost reached 100%. To overcome the obstacles faced, GNTU with assistance and monitoring conducted by IFG has carried out planning to formulate new business development such as videotron management, increasing retail tenants, and others, including managing assets in IFG and holding members with the aim of diversifying income to minimize concentration risk. In addition, GNTU's rentable spaces remain a priority in meeting the needs of office space as the needs of IFG and holding members grow.
4. Challenges and Solutions Implemented Related to Marketing, Corporate Reputation, and Brand.

Marketing The development of the One by IFG digital platform is a form of IFG's implementation as a state-owned holding company towards digitalization. Through this development, IFG also participates in supporting financial inclusion and literacy programs by providing digital financial solutions to the SOE ecosystem using investment, protection and guarantee instruments. The form of marketing that IFG has done is by offering Jasindo's travel insurance products at the internal launch of the One by IFG application and the IFG Labuan Bajo Marathon pilot project by offering embedded personal accident insurance products owned by JRP and IFG Life.

The challenge faced was obtaining permission from the regulator to launch the application to the public.



lain termasuk reksa dana, SBN, dan stocks juga merupakan tantangan bagi holding, karena masih adanya anggota holding yang membutuhkan waktu lebih lama dalam mengimplementasi digitalisasi. Selain itu, penetrasi atau keikutsertaan penuh dari seluruh karyawan IFG dan anggota holding untuk mendapatkan benefit dan merasakan user journey dari pengembangan dan penambahan fitur produk di One by IFG juga belum optimal. Sedangkan, melalui program marketing tersebut, IFG berharap dapat memperoleh masukan atas pengembangan yang dilakukan.

Dengan adanya tantangan di atas, IFG berusaha melakukan percepatan melalui pembentukan Task Force Pengembangan Aplikasi One by IFG yang beranggotakan seluruh pihak penanggung jawab di IFG dan anggota holding. Selain itu, untuk dapat menjangkau pangsa pasar yang lebih luas, IFG juga melakukan akselerasi perizinan dari regulator terkait sehingga di tahun 2022 IFG berhasil terdaftar sebagai anggota AFTECH yang merupakan salah satu izin tercatatnya aplikasi One by IFG di OJK sektor IKD sebelum diluncurkan kepada publik.

Reputasi Perusahaan

Pada tahun 2022, terdapat beberapa tantangan terkait dengan reputasi perusahaan, yaitu sebagai berikut:

- a. sentimen publik, di mana posisi brand IFG sebagai holding masih dikaitkan dengan penyelesaian kasus Jiwasraya;
- b. perlu ditingatkannya kegiatan komunikasi bersama antara IFG dan anggota holding dalam penguatan narasi holding;
- c. perlu ditingatkannya kegiatan bersama dan kerja sama dengan media sebagai sarana dalam penyampaian informasi perusahaan; dan
- d. perlu ditingatkannya kegiatan pengelolaan digital asset perusahaan.

Adapun solusi yang telah dilakukan terhadap tantangan tersebut, adalah sebagai berikut:

- a. adanya strategi komunikasi holding yang komprehensif;
- b. adanya Pedoman Strategis Komunikasi antara IFG dan anggota holding;
- c. adanya agenda setting tahunan dalam bentuk kegiatan secara berkala, baik formal maupun non-formal bersama media; dan
- d. adanya strategi pengelolaan digital asset perusahaan melalui pembuatan editorial plan.

Brand

Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh konsultan independen, brand "IFG" memiliki skor awareness yang cukup rendah dibandingkan dengan holding BUMN lainnya. Hal ini terindikasi dari kajian konsultan independen kepada responden masyarakat umum yang menunjukkan IFG berada di posisi 11 (sebelas) dari 16 (enam belas) untuk brand awareness holding BUMN dan posisi 15 (lima belas) dari 16 (enam belas) untuk brand top of mind holding BUMN.

Berdasarkan temuan dari kajian tersebut, awareness yang rendah terhadap IFG mengingat

- a. IFG saat ini belum memiliki citra khusus, di mana belum terdapat adanya persepsi/image spesifik terkait brand IFG dari sudut pandang masyarakat, walaupun bagi masyarakat

Integration of other products including mutual funds, SBN, and stocks is also a challenge for the holding, as there are still holding members that take longer to implement digitalization. In addition, penetration or full participation of all IFG employees and holding members to benefit and experience the user journey from the development and addition of product features in One by IFG is also not optimal. Meanwhile, through the marketing program, IFG hopes to get feedback on the development implemented.

With the above challenges, IFG is trying to accelerate through the establishment of One by IFG Application Development Task Force consisting of all responsible parties in IFG and holding members. In addition, to be able to reach a wider market share, IFG also accelerated licensing from relevant regulators so that in 2022 IFG was successfully registered as a member of AFTECH, which is one of the licenses for One by IFG application to be registered with OJK in the IKD sector before being launched to the public.

Company Reputation

In 2022, there were several challenges related to corporate reputation, as follows:

- a. public sentiment, where IFG's brand position as a holding is still associated with the resolution of the Jiwasraya case;
- b. the need to increase joint communication activities between IFG and holding members in strengthening the narrative of the holding;
- c. the need to increase joint activities and cooperation with the media as a means of delivering company information; and
- d. the need to improve the company's digital asset management activities.

The solutions that have been made to these challenges are as follows:

- a. a comprehensive holding communication strategy;
- b. Strategic Communication Guidelines between IFG and holding members;
- c. annual agenda setting in the form of regular activities, both formal and non-formal with the media; and
- d. a corporate digital asset management strategy through the creation of an editorial plan.

Brand

Based on studies conducted by independent consultants, the "IFG" brand has a fairly low awareness score compared to other SOE holdings. This is indicated by an independent consultant study to general public respondents which shows IFG is in the 11th (eleven) position out of 16 (sixteen) for SOE holding brand awareness and the 15th (fifteen) position out of 16 (sixteen) for SOE holding top of mind brands.

Based on the findings of the study, low awareness of IFG considering that

- a. IFG currently does not have a specific image, where there is no specific perception/image related to the IFG brand from the public's point of view, although people who

- yang sudah mengetahui/mengenal IFG berpendapat bahwa citra IFG sudah cukup baik.
- b. Usia IFG yang masih sangat muda (baru berusia 2 (dua) tahun di tahun 2022) sehingga masih tergolong usia bertumbuh untuk awaraness akan suatu brand perusahaan.
 - c. IFG belum memiliki communication positioning yang dikomunikasikan secara konsisten sebagai basis pembentukan citra brand IFG ke depannya.
- Dalam rangka melakukan pengelolaan brand dari sisi corporate image, di tahun 2022 IFG telah melakukan berbagai program dan kegiatan untuk meningkatkan inisiatif komunikasi terkait brand perusahaan dalam mencapai audiens, melalui:
- a. Peningkatan offline presence, melalui:
 - i) mengadakan kegiatan promosi dan acara seminar berskala besar dan mempublikasikan dan mempromosikan brand IFG terkait kegiatan tersebut melalui berbagai platform komunikasi (cetak, elektronik, online dan digital) kepada masyarakat umum, di antaranya adalah IFG International Conference 2022 dan IFG Labuan Bajo Marathon 2022; dan
 - ii) berpartisipasi dalam berbagai kegiatan sponsorship yang dilakukan oleh institusi atau organisasi yang dapat mengekspos dan mengenalkan brand IFG terhadap masyarakat umum melalui logo placement, pemasangan materi komunikasi IFG, pengembangan booth, pembagian merchandise dan lainnya, antara lain kegiatan berskala internasional (B20 Summit 2022), kegiatan festival arts and culture (Joyland Festival 2022), kegiatan professional gathering (BUMN Legal Summit 2022) dan kegiatan yang menyasar milenial (Pekan Millenials Naik Kelas 2022).
 - b. Peningkatan online presence, melalui
 - i) peningkatan utilitas media sosial IFG, terutama melalui pengembangan dan diseminasi konten motion dan non-motion secara rutin di kanal media sosial IFG Instagram dan berkala di kanal media sosial IFG Youtube; dan
 - ii) melakukan pemasangan iklan berbentuk TVC sebanyak 11 (sebelas) kali di media elektronik selama periode 19-25 Desember 2022.
- Terkait pengelolaan brand untuk corporate image, IFG melalui kegiatan offline dan online presence, mendapatkan pencapaian antusiasme yang cukup tinggi di masyarakat umum, di antaranya:
- a. pelaksanaan tahun pertama dari IFG International Conference 2022 diikuti secara luring oleh 300 (tiga ratus) peserta undangan dari berbagai pemangku kepentingan. Konferensi ini juga dihadiri secara daring yang dibuka luas untuk masyarakat umum (baik dari Indonesia, maupun luar Indonesia), yaitu Singapura, Amerika, Jepang, Australia, Jerman, dan Arab Saudi sebanyak 599 peserta di hari ke-1 (satu) dan 599 peserta di hari ke-2 (dua);
 - b. pelaksanaan tahun pertama dari IFG Labuan Bajo Marathon 2022 diikuti oleh 1200 (seribu dua ratus) peserta baik dari dalam negeri (NTT, Jakarta, Surabaya, Bali) dan luar negeri (Belanda, Cina, Singapore dan Uzbekistan). Aktivasi booth IFG selama 3 (tiga) hari pelaksanaan IFG Labuan Bajo Marathon 2022 juga dapat meningkatkan followers Instagram IFG secara organik sebesar 220 followers/perhari; already know/familiar with IFG think that IFG's image is good enough.
 - b. IFG is still very new (only 2 (two) years old in 2022) so it is still classified as a growing age for awareness of a company brand.
 - c. IFG does not yet have a communication positioning that is consistently communicated as the basis for the formation of IFG's brand image in the future.
- In order to conduct brand management in terms of corporate image, in 2022 IFG has conducted various programs and activities to improve communication initiatives related to the company's brand in reaching audiences, through:
- a. Increasing offline presence, through:
 - i) holding promotional activities and large-scale seminar events and publicizing and promoting IFG brand related activities through various communication platforms (print, electronic, online and digital) to the general public, including IFG International Conference 2022 and IFG Labuan Bajo Marathon 2022; and
 - ii) participating in various sponsorship activities carried out by institutions or organizations that can expose and introduce the IFG brand to the general public through logo placement, installation of IFG communication materials, booth development, merchandise distribution and others, including international scale activities (B20 Summit 2022), arts and culture festival activities (Joyland Festival 2022), professional gathering activities (SOE Legal Summit 2022) and activities targeting millennials (Millennials Week Upgrade 2022).
 - b. Increasing online presence, through
 - i) Utility improvement of IFG's social media, especially through the development and dissemination of motion and non-motion content regularly on IFG Instagram social media channels and periodically on IFG Youtube social media channels; and
 - ii) Placing 11 (eleven) TVC advertisements in electronic media during the period of December 19-25, 2022.
- Regarding brand management for corporate image, IFG through offline and online presence activities, has achieved high enthusiasm in the general public, including:
- a. The first year implementation of IFG International Conference 2022 was attended offline by 300 (three hundred) invited participants from various stakeholders. The conference was also attended online which was widely opened to the general public (both from Indonesia, as well as outside of Indonesia), namely Singapore, America, Japan, Australia, Germany, and Saudi Arabia with 599 participants on day 1 (one) and 599 participants on day 2 (two);
 - b. the first year implementation of IFG Labuan Bajo Marathon 2022 was attended by 1200 (one thousand two hundred) participants from both domestic (East Nusa Tenggara, Jakarta, Surabaya, Bali) and overseas (Netherlands, China, Singapore and Uzbekistan). IFG booth activation during the 3 (three) days of IFG Labuan Bajo Marathon 2022 implementation can also increase IFG Instagram followers organically by 220 followers/day;



- c. kegiatan sponsorship di Joyland Festival 2022 melalui aktivasi booth IFG bersama anggota holding, Bahana Sekuritas, berhasil membukukan pembukaan akun sebanyak 160 (seratus enam puluh) akun dan aktivasi aplikasi DX Trade Bahana sekuritas oleh pengunjung Joyland Festival selama 3 (tiga) hari pelaksanaan acara; dan
- d. performa media sosial IFG yang meningkat selama tahun 2022, terutama Instagram IFG yang tahun 2022 dapat mencapai 9503 followers dan 1.038.055 reach dan impressions, serta Youtube IFG yang tahun 2022 dapat mencapai 786 subscribers dan 1541 views.

Walaupun demikian, inisiatif pengelolaan brand untuk corporate image dan brand reach kepada masyarakat harus terus ditingkatkan di tahun mendatang, mengingat hasil Brand Communication Reach Index (indikasi tingkat capaian kegiatan komunikasi perusahaan terhadap audiens berkaitan dengan brand IFG) di akhir tahun 2022 masih terbilang rendah. Kajian dari konsultan independen menunjukkan Brand Communication Reach Index hanya mencapai 14,06% dari total 100% responden yang di-approach.

5. Tantangan dan Solusi yang Telah Dilakukan terkait Keuangan Perusahaan

Hingga akhir tahun 2022, IFG telah melaksanakan berbagai program kerja terkait fungsi keuangan perusahaan, yaitu perencanaan keuangan, pengelolaan permodalan, manajemen kas dan portofolio investasi serta tata kelola pelaporan PMN. Dalam menjalankan program kerja dimaksud masih terdapat tantangan yang dihadapi oleh IFG.

a. Fungsi Perencanaan Keuangan

Tantangan dalam melakukan evaluasi atau monitoring dengan masing-masing entitas anggota holding dan cucu perusahaan, sehubungan dengan pencapaian terhadap target RKAP tahun 2022, antara lain:

- i) cucu perusahaan belum mempunyai monthly reporting package yang sesuai dengan grouping Chart of Accounts ("COA") konsolidasi; dan
- ii) terdapat inkonsistensi antara mapping/grouping COA secara audited dengan mapping konsolidasi sehingga analisa keuangan menjadi bias dan tidak dapat dibandingkan.

Terhadap tantangan dalam monitoring dan evaluasi tersebut, berikut beberapa tindakan yang telah dilakukan oleh IFG:

- i) melakukan sosialisasi kepada anggota holding dan cucu perusahaan untuk menggunakan COA konsolidasi untuk setiap pelaporan keuangan; dan
- ii) melakukan pemetaan perbedaan antara grouping COA audited dan COA konsolidasi dengan berkoordinasi kepada unit kerja terkait untuk dapat diteruskan kepada auditor eksternal.

b. Fungsi Pengelolaan Permodalan

Tantangan dalam pemenuhan kebutuhan pendanaan sehubungan dengan mandat Pemerintah kepada IFG untuk menyelamatkan pemegang polis Jiwasraya antara lain terdiri dari:

- i) kebutuhan pendanaan untuk menyelesaikan transfer liabilitas (polis) yang masih tertinggal di Jiwasraya kepada IFG Life sehingga mandat tersebut dapat dituntaskan; dan
- ii) kebutuhan pembayaran bunga pinjaman yang timbul dalam rangka transfer portofolio Jiwasraya kepada IFG Life.

- c. sponsorship activities at Joyland Festival 2022 through IFG booth activation with holding member, Bahana Sekuritas, successfully booked 160 (one hundred and sixty) account openings and activation of DX Trade application of Bahana Sekuritas by Joyland Festival visitors during the 3 (three) days of the event; and
- d. IFG's increasing social media performance during 2022, especially IFG's Instagram which in 2022 can grow to have 9503 followers and 1,038,055 reach and impressions, and IFG's Youtube which in 2022 can get 786 subscribers and 1541 views.

Nevertheless, brand management initiatives for corporate image and brand reach to the public must continue to be improved in the coming year, given the results of the Brand Communication Reach Index (an indication of achievement level of corporate communication activities to audiences related to the IFG brand) at the end of 2022 is still relatively low. A study from an independent consultant showed that the Brand Communication Reach Index only reached 14.06% of the total 100% of respondents approached.

5. Challenges and Solutions Related to Corporate Finance

Until the end of 2022, IFG has implemented various work programs related to corporate finance functions, namely financial planning, capital management, cash management and investment portfolio as well as PMN reporting governance. In carrying out the work program, there are still challenges faced by IFG.

a. Financial Planning Function

Challenges in conducting evaluation or monitoring with each holding member entity and its sub-subsidiaries, in connection with the achievement of the 2022 RKAP target, among others:

- i) The sub-subsidiaries do not yet have a monthly reporting package in accordance with the consolidated Chart of Accounts ("COA") grouping; and
- ii) there are inconsistencies between audited COA mapping/grouping and consolidated mapping, resulting in biased and incomparable financial analysis.

Against these challenges in monitoring and evaluation, the following actions have been taken by IFG:

- i) conducting socialization to holding members and sub-subsidiaries to use consolidated COA for each financial reporting; and
- ii) mapping the difference between audited COA grouping and consolidated COA by coordinating with the relevant working units to be forwarded to external auditors.

b. Capital Management Function

Challenges in meeting funding needs in connection with the Government's mandate to IFG to save Jiwasraya policyholders consist of, among others:

- i) the need for funding to complete the transfer of liabilities (policies) remaining at Jiwasraya to IFG Life so that the mandate can be completed; and
- ii) the need to pay interest on loans arising from the transfer of Jiwasraya's portfolio to IFG Life.

Terhadap tantangan dalam pemenuhan kebutuhan pendanaan sehubungan dengan mandat Pemerintah kepada IFG untuk menyelamatkan pemegang polis Jiwasraya berikut tindakan strategis yang telah dilakukan oleh IFG:

- i) melakukan fundraising, baik dari dana PMN dan non-PMN untuk memenuhi kebutuhan pendanaan untuk menyelesaikan transfer liabilitas Jiwasraya yang salah satunya adalah dengan melakukan penerbitan surat utang di tahun 2022; dan
- ii) melakukan penarikan dividen dari anggota holding guna memenuhi kebutuhan holding.
- c. Fungsi Pengelolaan Kas dan Portofolio Investasi
Tantangan dalam monitoring dan pengelolaan kas serta portofolio investasi IFG beserta entitas anggota holding dan cuci perusahaan, antara lain:

 - i) kebutuhan transformasi digitalisasi monitoring dan review portofolio investasi masing-masing entitas anggota holding yang terintegrasi agar dapat dilakukan monitoring secara daily basis;
 - ii) kebutuhan transformasi digitalisasi monitoring cashflow perusahaan masing-masing entitas anggota holding yang terintegrasi sehingga dapat dilakukan optimalisasi pengelolaan kas dan setara kas serta proyeksi arus kas masing-masing entitas anggota holding;
 - iii) belum ter standardisasinya discount rate untuk perhitungan discounted liability pada ALM entitas anggota holding dan cuci perusahaan;
 - iv) belum optimalnya implementasi atas sinergi pengelolaan investasi melalui BTIM bersama anggota holding bidang asuransi dan penjaminan; dan
 - v) belum adanya kebijakan internal yang mengatur terkait penjualan aset investasi di bawah harga perolehan (cut loss).

Terhadap tantangan monitoring dan pengelolaan kas serta portofolio investasi, berikut tindakan strategis yang telah dilakukan oleh IFG:

- i) penyusunan rancangan kebijakan dan fase implementasi dari konsep sinergi pengelolaan investasi melalui BTIM dan bekerja sama dengan konsultan hukum Armand Yapsunto Muhamamsyah & Partners (AYMP) untuk penyusunan kajian hukum terkait rencana sinergi pengelolaan investasi grup IFG;
- ii) melaksanakan koordinasi bersama BPKP dan Jamdatun atas pembahasan Initial Draft Kebijakan Cut Loss yang telah disusun oleh IFG;
- iii) melakukan standardisasi template pelaporan pengelolaan investasi bulanan yang ditindaklanjuti oleh digitalisasi proses di masing-masing anggota holding, dengan pilot project pada Jasindo;
- iv) melakukan persiapan tahap awal transformasi digitalisasi monitoring cashflow perusahaan masing-masing entitas anggota holding yang terintegrasi, yaitu penunjukan konsultan pendukung, menyusun rencana kerja serta mendesain output yang diharapkan dapat ditampilkan pada dashboard cash management yang akan dibangun; dan
- v) melakukan diskusi awal dengan seluruh anggota holding untuk mendesain standardisasi discount rate untuk perhitungan discounted liability pada ALM entitas

Against the challenges in meeting funding needs in connection with the Government's mandate to IFG to save Jiwasraya policyholders, the following strategic actions have been taken by IFG:

- i) conduct fundraising, both from PMN and non-PMN funds to meet the funding needs to complete the transfer of Jiwasraya's liabilities, one of which is by issuing debt securities in 2022; and
- ii) withdrawing dividends from holding members to meet the needs of the holding.
- c. Cash and Investment Portfolio Management Function
Challenges in monitoring and managing cash and investment portfolios of IFG and its holding member entities and sub-subsidiaries, among others:

 - i) the need for digitalization transformation of monitoring and reviewing the investment portfolio of each holding member entity that is integrated so that monitoring can be carried out on a daily basis;
 - ii) the need for digitalization transformation of cash flow monitoring of each integrated holding member entity so that optimization of cash and cash equivalents management and cash flow projections of each holding member entity can be completed;
 - iii) not yet standardized discount rate for the calculation of discounted liability in the ALM of holding member entities and sub-subsidiaries;
 - iv) not yet optimal implementation of investment management synergies through BTIM with holding members in the field of insurance and guarantee; and
 - v) the absence of internal policies governing the sale of investment assets below the acquisition price (cut loss).

Against the challenges of monitoring and managing cash and investment portfolios, the following strategic actions have been taken by IFG:

- i) drafting the policy and implementation phase of the investment management synergy concept through BTIM and working with legal consultant Armand Yapsunto Muhamamsyah & Partners (AYMP) for the preparation of legal studies related to the IFG group investment management synergy plan;
- ii) coordinating with Finance and Development Supervisory Agency (BPKP) and Attorney General for Civil and State Administration (Jamdatun) on the discussion of the Initial Draft Cut Loss Policy that has been prepared by IFG;
- iii) standardizing monthly investment management reporting templates followed up by digitization of processes in each holding member, with a pilot project at Jasindo;
- iv) prepare the initial stage of the transformation of the digitization of cash flow monitoring of each integrated holding member entity, namely the appointment of supporting consultants, preparing work plans and designing outputs that are expected to be displayed on the cash management dashboard to be developed; and
- v) conduct initial discussions with all holding members to design a standardized discount rate for the calculation of discounted liability in the ALM of holding member



anggota holding dan cucu perusahaan.

d. Fungsi Tata Kelola Pelaporan PMN

Tantangan dalam tata kelola pelaporan PMN antara lain:

- i) pelaporan realisasi PMN tahun 2022 dari IFG kepada Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan telah dilakukan tanpa keterlambatan sesuai dengan aturan yang berlaku, namun dalam prosesnya masih terdapat anggota holding yang belum sesuai memenuhi tenggat waktu pelaporan kepada holding;
- ii) belum terdapatnya standardisasi untuk kegiatan monitoring dan evaluasi on site di IFG;
- iii) dashboard digital pelaporan PMN, yaitu Sistem Informasi Pelaporan PMN SIP- PMN masih terdapat bug pada sistem dan tampilan user interface belum sesuai dengan kebutuhan stakholder; dan
- iv) terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.06/2022 tentang Penyusunan Kajian, Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi Penyertaan Modal Negara Pada Perusahaan Negara dan Badan Hukum Lainnya berdampak pada IFG sehingga perlu melakukan penyesuaian pelaporan dan aturan internal perusahaan.

Terhadap tantangan dalam tata kelola pelaporan PMN, berikut tindakan strategis yang telah dilakukan:

- i) IFG telah melakukan pemetaan kendala yang terdapat pada proses pelaporan realisasi PMN anggota holding dan tindak lanjut perbaikannya sehingga potensi keterlambatan pelaporan dapat diminimalisir;
- ii) IFG melakukan koordinasi awal dengan anggota holding dan meminta masukan dari Kementerian terkait untuk merumuskan standardisasi monitoring dan evaluasi on site terhadap anggota holding penerima PMN;
- iii) IFG melakukan inisiasi pengembangan enhancement dashboard digital SIP- PMN untuk melakukan update sistem dan tampilan user interface sesuai dengan kebutuhan stakeholder; dan
- iv) IFG melakukan kajian dampak dan sosialisasi peraturan di IFG dan anggota holding terkait penerapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.06/2022 untuk proses pelaporan realisasi PMN kepada Kementerian Keuangan.

6. Tantangan dan Solusi yang Telah Dilakukan terkait Teknologi dan Informasi

IFG menjalankan fungsi teknologi informasi sebagai business enabler. Dalam mengimplementasikan MPTI 2021-2024, IFG masih mendapatkan beberapa tantangan, di antaranya:

a. Integrasi MIS IFG dengan Anggota Holding

Pemberian akses data yang terbatas (bersifat agregat) dari anggota holding untuk menyesuaikan dengan terbitnya peraturan dan perundangan terbaru di tahun 2022, seperti UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dan POJK Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di sektor Jasa Keuangan. Data yang diperoleh dari integrasi MIS masih bersifat agregat, di mana data detail transaksi masih terbatas. Solusi yang dilakukan, yaitu dengan mendetailkan kebutuhan business indicator yang dapat dipenuhi dengan menggunakan data dari integrasi MIS dengan anggota holding dengan melakukan pembahasan bersama anggota holding.

b. Skor Governance Maturity Level

Sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas tata kelola

entities and sub-subsidiaries of the company.

d. PMN Reporting Governance Function

Challenges in PMN reporting governance include:

- i) the reporting of the realization of PMN in 2022 from IFG to the Ministry of SOEs and the Ministry of Finance has been conducted without delay in accordance with applicable regulations, but in the process there are still holding members who have not met the deadline for reporting to the holding;
- ii) there is no standardization for on-site monitoring and evaluation activities in IFG;
- iii) the PMN reporting digital dashboard, namely the PMN Reporting Information System SIP- PMN, still has bugs in the system and the user interface is not in accordance with the needs of stakeholders; and
- iv) the issuance of Minister of Finance Regulation No. 146/PMK.06/2022 concerning the Preparation of Studies, Reporting, Monitoring, and Evaluation of State Equity Participation in State Companies and Other Legal Entities has an impact on IFG so that it needs to make adjustments to reporting and internal company rules.

Against the challenges in the governance of PMN reporting, the following strategic actions have been taken:

- i) IFG has mapped the obstacles contained in the process of reporting the realization of PMN of holding members and follow-up improvements so that the potential for reporting delays can be minimized;
- ii) IFG conducted initial coordination with holding members and requested input from relevant Ministries to formulate standardization of on-site monitoring and evaluation of PMN recipient holding members;
- iii) IFG initiated the development of SIP- PMN digital dashboard enhancement to update the system and user interface in accordance with stakeholder needs; and
- iv) IFG conducted an impact assessment and socialization of regulations in IFG and holding members related to the implementation of the Minister of Finance Regulation Number 146/PMK.06/2022 for the PMN realization reporting process to the Ministry of Finance.

6. Challenges and Solutions Related to Information and Technology

IFG performed the function of information technology as a business enabler. In implementing MPTI 2021-2024, IFG still faces several challenges, including:

a. IFG MIS Integration with Holding Members

Providing limited data access (aggregate in nature) from holding members to adjust to the issuance of the latest rules and regulations in 2022, such as Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection and POJK Number 6/POJK.07/2022 concerning Consumer and Community Protection in the Financial Services sector. The data obtained from MIS integration is still aggregated, where detailed transaction data is still limited. The solution is to detail the needs of business indicators that can be met by using data from MIS integration with holding members by discussing with holding members.

b. Governance Maturity level Score

As part of efforts to improve the quality of sustainable

teknologi informasi berkelanjutan, pada tahun 2022 IFG melakukan Assessment IT Maturity Level bersama pihak eksternal menggunakan framework COBIT 2019 sesuai Pedoman Pelaksanaan Assessment IT Maturity Level BUMN dalam Surat Nomor S- 122/MBU/DSI/05/2021. Tantangan dari IFG adalah adanya anggota holding yang belum mencapai tingkat maturity Level 3.

Solusi yang dilakukan adalah IFG bersama konsultan memiliki timeline dan roadmap untuk pemenuhan maturity level anggota holding yang belum mencapai Level 3.

- c. Integrasi Sistem Utama, Infrastruktur dan Data Center
- IFG terbentuk dari beberapa perusahaan yang telah menjalankan kegiatan operasionalnya secara mandiri sehingga dukungan sistem, infrastruktur, dan data center sudah ada sebelumnya yang sangat beragam. Masih berlakunya kontrak pemeliharaan kepada pihak ketiga penyedia layanan teknologi informasi serta nilai buku dari investasi teknologi informasi yang telah dilakukan sebelumnya menyebabkan proses integrasi tidak bisa dilakukan secara langsung dan menunggu habisnya masa kontrak kerja sama yang telah dilakukan sebelumnya dengan penyedia layanan teknologi informasi dari luar perusahaan.

Sesuai dengan inisiatif program yang sudah disusun dalam MPTI IFG 2021-2024, kegiatan integrasi dilakukan secara bertahap, dimulai dari integrasi jaringan, data center, infrastruktur, hingga sistem utama. Penyediaan infrastruktur fondasi yang akan digunakan oleh seluruh anggota holding menjadi fokus pekerjaan dengan target penyelesaian di tahun 2023, serta secara bertahap melakukan integrasi data center. Pemanfaatan API Management juga akan dilakukan untuk pendukung berbasis teknologi dalam proses integrasi sistem utama dan sistem pendukungnya. Kolaborasi pengembangan sistem secara bersama telah berjalan melalui workstream teknologi informasi yang beranggotakan tim teknologi informasi IFG dan seluruh anggota holding.

7. Tantangan dan Solusi yang Telah Dilakukan terkait Manajemen Risiko

Salah satu tugas yang diamanatkan oleh pemegang saham IFG dengan penetapan IFG sebagai perusahaan holding adalah agar IFG melakukan penguatan tata kelola dan manajemen risiko di lingkungan IFG dan anggota holding. Penguatan tersebut didukung melalui implementasi fungsi manajemen risiko, kepatuhan dan kebijakan baik di IFG maupun anggota holding. Hal tersebut sejalan dengan kewajiban IFG dan anggota holding untuk memenuhi ketentuan mengenai konglomerasi keuangan melalui pemberlakuan POJK Nomor 13/POJK.05/2022 tentang Pengawasan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia. Sehubungan dengan pemberlakuan peraturan tersebut pada tanggal 8 Juli 2022, terdapat beberapa pemenuhan kewajiban yang harus dilakukan oleh IFG selaku entitas utama. Namun, tidak dipungkiri bahwa terdapat tantangan yang dihadapi dalam proses pemenuhan tersebut. IFG juga telah melakukan beberapa solusi atas tantangan sebagaimana dimaksud dengan rincian sebagai berikut:

- a. Peningkatan RMI dengan target 0,5 poin lebih tinggi dari tahun 2021. Solusi yang dilakukan IFG adalah melakukan pengukuran RMI untuk tahun 2022 dengan dibantu oleh

information technology governance, in 2022 IFG conducted an IT Maturity Level Assessment with an external party using the COBIT 2019 framework in accordance with the Guidelines for Implementing SOE IT Maturity Level Assessment in Letter Number S- 122/MBU/DSI/05/2021. The challenge of IFG is that there are holding members who have not reached Level 3 maturity level. The solution is that IFG and the consultant have a timeline and roadmap to fulfill the maturity level of holding members that have not reached Level 3.

- c. Integration of Main System, Infrastructure and Data Center
- IFG is formed from several companies that have conducted their operational activities independently so that the support systems, infrastructure, and data centers are very diverse. The validity of maintenance contracts to third party information technology service providers and the book value of information technology investments that have been made previously cause the integration process cannot be directly done and need to wait for the expiration of the cooperation contract that has been carried out previously with information technology service providers from outside the company.

In accordance with the program initiatives that have been prepared in MPTI IFG 2021-2024, integration activities are done in stages, starting from the integration of networks, data centers, infrastructure, to the main system. Provision of foundation infrastructure that will be used by all holding members is the focus of work with a target completion in 2023, as well as gradually integrating data centers. The utilization of API Management will also be done for technology-based support in the process of integrating the main system and its supporting systems. Collaborative system development together has been running through the information technology workstream which consists of IFG information technology team and all holding members.

7. Challenges and Solutions Related to Risk Management

One of the tasks mandated by IFG shareholders with the establishment of IFG as a holding company is for IFG to strengthen governance and risk management within IFG and holding members. Such strengthening is supported through the implementation of risk management functions, compliance and policies in both IFG and holding members. This is in line with the obligation of IFG and holding members to fulfill the provisions regarding financial conglomeration through the enactment of POJK Number 13/POJK.05/2022 concerning the Supervision of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) Company. In connection with the implementation of the regulation on July 8, 2022, there are several fulfillments of obligations that must be carried out by IFG as the main entity. However, it is undeniable that there are challenges faced in the fulfillment process. IFG has also made several solutions to the challenges as intended with the following details:

- a. RMI improvement with a target of 0.5 points higher than 2021. IFG's solution is to conduct RMI measurement for 2022 with the assistance of an independent consultant. The



konsultan independen. Pelaksanaan pengadaan dilakukan pada bulan Agustus 2022 dan dilanjutkan dengan pekerjaan pengukuran RMI dimulai sejak bulan Oktober sampai dengan bulan Desember 2022. Sehubungan dengan hal tersebut, IFG telah mencapai hasil pengukuran berupa peningkatan nilai RMI IFG dari repeatable ke managed.

- b. Belum tersedianya infrastruktur pendukung berbasis teknologi dalam penerapan ERM yang terintegrasi. Solusi yang dilakukan IFG adalah membangun sistem informasi yang disebut i-ERM untuk pencatatan, pengukuran dan pelaporan manajemen risiko guna mendukung proses manajemen risiko. Pada akhir tahun 2022 telah dibangun sistem i-ERM yang terdiri dari modul RCSA, KRI, dan RED.
- c. Penguatan tata kelola yang prudent melalui penerapan parenting governance dengan menetapkan 15 (lima belas) Pedoman Strategis untuk dilakukan harmonisasi pada level kebijakan di anggota holding. Solusi yang dilakukan adalah IFG melaksanakan RUPS secara sirkuler untuk mengimplementasikan Pedoman Strategis di anggota holding. Selain itu, IFG juga melakukan pendampingan dan pemantauan pada setiap proses penyusunan peraturan turunan Pedoman Strategis di anggota holding melalui pelaksanaan weekly meeting dengan melibatkan unit kerja pemilik Pedoman Strategis. IFG juga menyelenggarakan FGD antara unit kerja pemilik Pedoman Strategis di IFG dengan fungsi terkait di anggota holding dalam rangka penyusunan kebijakan turunan Pedoman Strategis. Penyelesaian implementasi Pedoman Strategis di anggota holding telah mencapai 100% dengan menghasilkan 144 ketentuan di anggota holding sehingga seluruh anggota holding telah memiliki ketentuan yang selaras dengan Pedoman Strategis.
- d. Penguatan tata kelola yang prudent dengan penguatan infrastruktur kebijakan di IFG melalui penyusunan dan pemutakhiran dokumen tata kelola perusahaan. Solusi yang dilakukan adalah IFG menetapkan Kebijakan Hierarki dan Penyusunan Peraturan serta Prosedur dan Juknis dalam melakukan pembuatan peraturan. Dari kebijakan tersebut IFG melakukan awareness terkait pemenuhan peraturan, pemetaan proses bisnis, diskusi peraturan yang akan dibuat oleh setiap unit kerja termasuk target penyelesaiannya. Proses penyusunan peraturan di IFG melalui proses reviu dan harmonisasi dari aspek kebijakan, kepatuhan, manajemen risiko dan hukum oleh mandatory reviewer. Sampai dengan bulan Desember 2022, IFG telah memiliki 112 (seratus dua belas) Peraturan.
- e. Selama tahun 2022, IFG memiliki tantangan berupa terbatasnya infrastruktur sistem manajemen kepatuhan yang dimiliki seperti minimnya rujukan dalam pelaksanaan fungsi kepatuhan dan terbatasnya kapasitas. Melihat tantangan tersebut, IFG melakukan penguatan tata kelola yang prudent berupa penguatan fungsi kepatuhan terhadap peraturan di internal holding melalui pembuatan Kebijakan Kepatuhan, Kebijakan dan Prosedur Kepatuhan terhadap Peraturan beserta penambahan SDM untuk mendukung pelaksanaan program sistem manajemen kepatuhan yang telah direncanakan dan tercantum dalam rujukan sebagaimana dimaksud. Selain itu, IFG juga telah melaksanakan implementasi dari Pedoman Strategis dan Kebijakan Kepatuhan tersebut berupa reviu peraturan

procurement was carried out in August 2022 and continued with RMI measurement work starting from October to December 2022. In connection with this, IFG has achieved measurement results in the form of an increase in IFG's RMI score from repeatable to managed.

- b. Unavailability of technology-based supporting infrastructure in the implementation of integrated ERM. IFG's solution is to build an information system called i-ERM for recording, measuring and reporting risk management to support the risk management process. By the end of 2022, an i-ERM system consisting of RCSA, KRI, and RED modules will be developed.
- c. Strengthening prudent governance through the implementation of parenting governance by establishing 15 (fifteen) Strategic Guidelines for harmonization at the policy level in holding members. The solution is that IFG conducts circular GMS to implement the Strategic Guidelines in the holding members. In addition, IFG also provides assistance and monitoring in every process of drafting regulations derived from the Strategic Guidelines in holding members through the implementation of weekly meetings involving the work unit that owns the Strategic Guidelines. IFG also organizes FGDs between the Strategic Guidelines owner's work unit in IFG and related functions in holding members in the context of drafting derivative policies of the Strategic Guidelines. Completion of the Strategic Guidelines implementation in the holding members has reached 100% by producing 144 provisions in the holding members so that all holding members have provisions that are in line with the Strategic Guidelines.
- d. Strengthening prudent governance by strengthening policy infrastructure in IFG through the preparation and updating of corporate governance documents. The solution is that IFG establishes a Hierarchy Policy and Preparation of Regulations as well as Procedures and Technical Guidelines in making regulations. From the policy, IFG conducts awareness related to regulatory compliance, business process mapping, discussion of regulations to be made by each work unit including the completion target. The process of drafting regulations in IFG goes through a review and harmonization process from the aspects of policy, compliance, risk management and law by mandatory reviewers. As of December 2022, IFG has 112 (one hundred and twelve) Regulations.
- e. During 2022, IFG had challenges in the form of limited compliance management system infrastructure such as the lack of references in the implementation of compliance functions and limited capacity. Seeing these challenges, IFG strengthens prudent governance in the form of strengthening the regulatory compliance function in the internal holding through the creation of Compliance Policies, Regulatory Compliance Policies and Procedures along with additional human resources to support the implementation of compliance management system programs that have been planned and listed in the reference as intended. In addition, IFG has also carried out the implementation of the Strategic Guidelines and Compliance Policy in the form of reviewing new regulations and/or regulatory changes

- baru dan/atau peraturan perubahan yang diterbitkan oleh regulator, reminder kewajiban pelaporan kepada satuan kerja terdampak, menyampaikan dan menindaklanjuti pemenuhan kewajiban dari peraturan baru dan/atau peraturan perubahan yang harus dilakukan oleh satuan kerja terdampak, dan sosialisasi peraturan baru dan/atau perubahan kepada seluruh satuan kerja terdampak di holding. Selain itu, IFG juga telah melaksanakan pelatihan dan awareness SMM sesuai dengan persyaratan dan standar ISO Standar Manajemen Mutu 9001:2015 dan juga pelatihan dan awareness SMAP sesuai dengan persyaratan dan standar ISO Sistem Manajemen Anti Penyuapan 37001:2016.
- f. Selain itu, tantangan selanjutnya yang dihadapi oleh IFG adalah belum terdapatnya media maupun wadah yang dapat digunakan untuk menyampaikan awareness terhadap seluruh Insan IFG terkait budaya kepatuhan. Hal ini sejalan dengan persoalan terkait bagaimana menumbuhkan tingkat kesadaran Insan IFG terhadap budaya kepatuhan. Menjawab tantangan tersebut, IFG melakukan peningkatan budaya kepatuhan melalui pelaksanaan compliance program awareness dalam bentuk kampanye anti penyuapan, penyampaian materi digital awareness berupa video animasi, maskot, dan tagline serta desain grafis kepada seluruh Insan IFG. Digital awareness sebagaimana dimaksud disampaikan melalui media komunikasi dan media sosial yang dimiliki IFG seperti Whatsapp, e-mail, Youtube, dan Instagram.
- g. Sehubungan dengan pemberlakuan POJK Nomor 13/POJK.05/2022 tentang Pengawasan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia pada tanggal 8 Juli 2022, IFG memiliki tantangan dalam hal persiapan pemenuhan kewajiban konglomerasi keuangan. Mengingat IFG sebagai entitas utama dan anggota holding sebagai anggota konglomerasi keuangan sudah harus memenuhi beberapa kewajiban dari peraturan tersebut, IFG mulai melakukan penyesuaian terhadap infrastruktur sejak semester I tahun 2022, agar sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam peraturan tersebut. Sebagai informasi, IFG telah mengambil langkah inisiatif dalam rangka penguatan fungsi kepatuhan secara terintegrasi sebelum pemberlakuan peraturan tersebut. Adapun langkah inisiatif sebagaimana dimaksud dilakukan melalui pelaksanaan FGD yang melibatkan anggota holding, one on one guna membahas laporan bulanan kepatuhan anggota holding, ratifikasi Pedoman Strategis kepatuhan dan kebijakan kepatuhan oleh anggota holding serta pembuatan sistem aplikasi terintegrasi bernama i-Compliance sebagai perangkat yang dapat membantu holding dalam melakukan penguatan fungsi kepatuhan terhadap peraturan secara internal dan dalam memantau implementasi kepatuhan yang dilakukan oleh anggota holding melalui pelaporan bulanan kepatuhan.
8. Tantangan dan Solusi yang Telah Dilakukan terkait SDM serta Pembelajaran dan Budaya Perusahaan
- Perubahan bentuk dan peran fungsi IFG sebagai holding mendorong dilakukannya berbagai penyesuaian. Salah satu tantangannya adalah pemenuhan SDM sesuai dengan perubahan bentuk dan peran fungsi IFG sebagai holding. Proses pencarian dan akuisisi karyawan bertalenta di era digital cukup menantang dan membutuhkan kanal sumber talenta yang issued by regulators, reminders of reporting obligations to affected work units, submitting and following up on the fulfillment of obligations from new regulations and/or regulatory changes that must be done by affected work units, and socialization of new regulations and/or changes to all affected work units in the holding. In addition, IFG has also conducted training and awareness of the QMS in accordance with the requirements and standards of ISO 9001:2015 Quality Management Standard and also training and awareness of SMAP in accordance with the requirements and standards of ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System.
- f. Furthermore, the next challenge faced by IFG is that there is no media or forum that can be used to convey awareness to all IFG personnel regarding the culture of compliance. This is in line with issues related to how to foster the level of awareness of IFG People towards a culture of compliance. Responding to these challenges, IFG increases the culture of compliance through the implementation of compliance awareness programs in the form of anti-bribery campaigns, delivery of digital awareness materials in the form of animated videos, mascots, and taglines and graphic designs to all IFG People. Digital awareness as intended is delivered through communication media and social media owned by IFG such as Whatsapp, e-mail, Youtube, and Instagram.
- g. In connection with the enactment of POJK Number 13/POJK.05/2022 concerning the Supervision of the Company (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia on July 8, 2022, IFG has challenges in terms of preparation for the fulfillment of financial conglomerate obligations. Given that IFG as the main entity and holding members as members of the financial conglomerate already have to fulfill some of the obligations of the regulation, IFG began to make adjustments to the infrastructure since the first semester of 2022, in order to comply with the provisions as stated in the regulation. For information, IFG has taken initiative steps in order to strengthen the compliance function in an integrated manner prior to the enactment of the regulation. The initiative steps as intended are carried out through the implementation of FGDs involving holding members, one on one to discuss monthly compliance reports of holding members, ratification of compliance Strategic Guidelines and compliance policies by holding members and the creation of an integrated application system called i-Compliance as a tool that can assist the holding in strengthening its regulatory compliance functions internally and in monitoring the implementation of compliance conducted by holding members through monthly compliance reporting.
8. Challenges and Solutions Related to Human Resources and Corporate Learning and Culture
- Changes in the form and role of IFG's function as a holding encourage various adjustments. One of the challenges is the fulfillment of human resources in accordance with the changes in the form and role of IFG's function as a holding. The process of finding and acquiring talented employees in the digital era is quite challenging and requires a wider talent sourcing channel.



lebih luas. Menanggapi tantangan tersebut IFG bekerja sama dengan pihak Recruitment Process Outsourcing ("RPO") dan Executive Search untuk membuka akses saluran rekrutmen yang lebih luas dan meningkatkan kualitas perekrutan. Selain itu, IFG juga berpartisipasi aktif dalam program RBB.

Di samping pencarian dan akuisisi talenta, retensi talenta juga menjadi tantangan. Berdasarkan hasil EES tahun 2022, ekspektasi karyawan terhadap perusahaan telah berubah. Di luar kompensasi dan benefit yang kompetitif serta pelatihan dan pengembangan, karyawan juga memiliki ekspektasi yang tinggi akan value proposition holistic, seperti pertumbuhan karier, pengembangan keterampilan, rasa kepemilikan, keadilan, kepercayaan, tujuan, budaya yang mendukung dan kesehatan lingkungan kerja. Menjawab tantangan tersebut, IFG telah menyusun Kajian EVP. Sesuai hasil kajian dan dengan mengacu kepada EVP BUMN, maka EVP IFG adalah Belajar, Bertumbuh, Berkontribusi untuk Indonesia dan Bekerja Tangguh dan Cerdas yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi IFG Nomor 38 Tahun 2023 tentang Peta Jalan Employee Value Proposition.

Sesuai dengan inisiatif strategis dan program kerja yang tertuang dalam RKAP tahun 2022, pada tahun 2022 telah dilakukan penguatan tata kelola SDM melalui pemutakhiran, penetapan dan implementasi kebijakan-kebijakan SDM. Tantangan terbesar terdapat pada tahap implementasi kebijakan-kebijakan SDM di mana diperlukan upaya dan strategi komunikasi dan edukasi kepada karyawan. Untuk memperlancar proses edukasi, IFG menerapkan beberapa cara komunikasi, seperti sosialisasi secara daring dan pembuatan booklet dan flyer edukasi yang secara reguler dikirimkan melalui e-mail dan sarana media sosial. Situasi di mana 35% karyawan di IFG adalah karyawan baru semakin menambah tantangan dalam penerapan kebijakan-kebijakan tersebut. Selain itu proses digitalisasi SDM juga telah memerlukan upaya yang khusus untuk memberikan edukasi dan membuat karyawan terbiasa dengan sistem yang digunakan.

Pada aspek pembelajaran, tantangan terbesar dihadapi pada bagian TNA. Pemahaman para learning coordinator atas pelaksanaan TNA pada masing-masing anggota holding belum sepenuhnya dipahami sebagai bentuk kebutuhan program pembelajaran yang prioritas/perlu dilaksanakan, sehingga masih ada beberapa akademi yang tidak mengacu pada hasil TNA sebagai arahan dalam melaksanakan program pembelajaran. Solusi yang ditawarkan oleh adalah dengan IFG melakukan pendampingan atas pelaksanaan TNA secara berkala kepada para learning coordinator.

Pada aspek budaya perusahaan, tantangan dihadapi pada alignment karyawan dalam membangun kesamaan sebagai keluarga besar IFG. Sebagai holding yang baru dibentuk, alignment karyawan antar perusahaan dibutuhkan guna menyuskeskan strategi besar yang telah disusun. Tantangan ini kemudian ditindaklanjuti oleh IFG dengan menyelenggarakan beberapa kegiatan karyawan yang bersifat informal, seperti kegiatan Festival Harmoni, yang merupakan kompetisi olahraga dan seni. Agar alignment berjalan dengan baik, penyelenggaraan pertandingan Festival Harmoni bukan pertandingan antar perusahaan, melainkan pertandingan antar kontingen yang terbentuk dari unit kerja lintas perusahaan.

In response to this challenge, IFG works with Recruitment Process Outsourcing ("RPO") and Executive Search to open access to broader recruitment channels and improve the quality of recruitment. Moreover, IFG also actively participates in the RBB program.

Other than talent search and acquisition, talent retention is also a challenge. Based on the 2022 EES results, employees' expectations of the company have changed. Beyond competitive compensation and benefits as well as training and development, employees also have high expectations of holistic value propositions, such as career growth, skills development, a sense of ownership, fairness, trust, purpose, a supportive culture and a healthy work environment. In response to these challenges, IFG has developed an EVP Study. In accordance with the results of the study and with reference to the EVP of SOE, IFG's EVP is Learning, Growing, Contributing to Indonesia and Working Tough and Smart which is stipulated through Decree of IFG's Board of Directors No. 38 of 2023 concerning Employee Value Proposition Roadmap.

In accordance with the strategic initiatives and work programs contained in the 2022 RKAP, in 2022, HR governance has been strengthened through updating, establishing and implementing HR policies. The biggest challenge lies in the implementation stage of HR policies where efforts and strategies for communication and education to employees are needed. To expedite the education process, IFG applies several communication methods, such as online socialization and the creation of educational booklets and flyers that are regularly sent via e-mail and social media tools. The situation where 35% of employees in IFG are new hires further adds to the challenges in implementing these policies. In addition, the process of digitizing HR has also required special efforts to educate and make employees familiar with the system.

On the learning aspect, the biggest challenge is TNA. The learning coordinators' understanding of the implementation of TNA on each holding member has not been fully understood as a form of learning program requirements that are priority/need to be implemented, so there are still some academies that do not refer to the TNA results as a direction in implementing learning programs. The solution offered by IFG is to provide assistance on the implementation of TNA periodically to the learning coordinators.

In the aspect of corporate culture, challenges are faced in employee alignment in establishing common ground as IFG's extended family. As a newly formed holding, employee alignment between companies is needed to succeed the grand strategy that has been formulated. This challenge was then followed up by IFG by organizing several informal employee activities, such as the Harmony Festival, which is a sports and arts competition. In order for the alignment to work properly, the organization of the Harmony Festival match shall not be an inter-company match, but a match between contingents formed from cross-company work units.

Selain Festival Harmoni, IFG juga melakukan banyak kegiatan-kegiatan kolaborasi antara IFG dan anggota holding secara informal, seperti millennial festival, peringatan hari pahlawan, peringatan hari ibu, kegiatan inklusivitas disabilitas dan lain-lain. Selain membangun alignment antar karyawan, kegiatan ini juga membangun identitas sebagai Insan IFG.

9. Tantangan dan Solusi yang Telah Dilakukan terkait Aktuaria
 - a. Keterbatasan tenaga aktuaria baik dari sisi jumlah maupun kompetensi keaktuariaan. Sebagai upaya dalam mengatasi hal tersebut, IFG telah melakukan hal-hal berikut:
 - i) IFG melakukan FGD dengan anggota holding secara rutin untuk memberikan pemahaman lebih mendalam, baik dalam hal pencadangan, pricing, evaluasi produk, ataupun isu-isu terkini terkait keaktuariaan di industri; dan
 - ii) IFG menerbitkan Pedoman Pencadangan Teknis sebagai acuan metodologi dan pembentukan asumsi untuk pencadangan yang telah diselaraskan serta diimplementasikan oleh anggota holding bidang asuransi dan penjaminan. Selanjutnya, sebagai perincian/turunan bagian pembentukan asumsi dalam pedoman tersebut, IFG menerbitkan beberapa kebijakan sebagai panduan anggota holding untuk melakukan studi asumsi pencadangan, yaitu Kebijakan Loss Ratio, Kebijakan Studi Mortalita, Kebijakan Perhitungan Probability of Default, dan Kebijakan Perhitungan Incidence Rate.
 - b. Penyesuaian kondisi dalam hal peningkatan granularitas data, laporan konsolidasi IFG, transaksi antar anggota holding, standardisasi proses dan core system dalam hal kebutuhan untuk implementasi PSAK 74. Sebagai upaya dalam mengatasi hal tersebut, IFG telah melakukan hal-hal berikut:
 - i) IFG bersama dengan anggota holding bekerja sama dengan konsultan dan vendor solusi PSAK 74 dalam akselerasi proses penyesuaian untuk menghadapi implementasi PSAK 74 di tahun 2025;
 - ii) IFG dengan bantuan konsultan menyusun standar PSAK 74; dan
 - iii) IFG bersama unit kerja teknologi informasi anggota holding terus berupaya memperbaiki core system.
 - c. Perbedaan metodologi pencadangan di anggota holding dan cuci perusahaan, khususnya perbedaan metodologi pada anggota holding bidang asuransi dan penjaminan. Sebagai upaya dalam mengatasi hal tersebut, IFG telah melakukan hal-hal berikut:
 - i) IFG terus berupaya menyusun template reviu yang lebih terstruktur dan mudah dipahami menyesuaikan metodologi pencadangan di anggota holding dan cuci perusahaan bidang asuransi dan penjaminan; dan
 - ii) IFG menyusun laporan reviu sesuai urgensi, misal dilakukan reviu untuk anggota holding dan produk dengan portofolio besar terlebih dahulu.
10. Tantangan dan Solusi yang Telah Dilakukan terkait Pengelolaan Proyek di IFG
Fungsi transformasi di IFG dibentuk sebagai salah satu upaya dalam melaksanakan mandat yang diberikan oleh Pemegang

In addition to the Harmony Festival, IFG also conducts many collaborative activities between IFG and holding members informally, such as millennial festivals, heroes' day commemoration, mother's day commemoration, disability inclusivity activities and others. In addition to building alignment among employees, these activities also build identity as IFG People.

9. Actuarial Challenges and Solutions that Have Been Implemented
 - a. Limitations of actuarial personnel both in terms of number and actuarial competence. As an effort to overcome this matter, IFG has done the following:
 - i) IFG conducts FGDs with holding members on a regular basis to provide a deeper understanding, both in terms of reserves, pricing, product evaluation, or the latest issues related to actuarial in the industry; and
 - ii) IFG issued Technical Provisioning Guidelines as a reference for methodology and assumption formation for provisioning that has been harmonized and implemented by the holding members in the insurance and guarantee sectors. Furthermore, as a detail/derivation of the assumption formation section in the guideline, IFG issued several policies as a guide for holding members to conduct reserve assumption studies, namely Loss Ratio Policy, Mortality Study Policy, Probability of Default Calculation Policy, and Incidence Rate Calculation Policy.
 - b. Adjustment of conditions in terms of increased data granularity, IFG consolidated reports, transactions between holding members, standardization of processes and core systems in relation to the need for PSAK 74 implementation. As an effort to overcome this matter, IFG has done the following:
 - i) IFG together with its holding members worked with PSAK 74 consultants and solution vendors in accelerating the customization process to face the implementation of PSAK 74 in 2025;
 - ii) IFG with the help of consultants to develop PSAK 74 standards; and
 - iii) IFG together with the information technology work unit of the holding members continue to work on improving the core system.
 - c. Differences in provisioning methodologies in holding members and sub-subsidiaries, especially differences in methodologies in insurance and guarantee holding members. As an effort to overcome this matter, IFG has done the following:
 - i) IFG continued to work on a more structured and easy-to-understand review template that adapts the provisioning methodology of holding members and sub-subsidiaries of insurance and guarantee companies; and
 - ii) IFG prepared review reports according to urgency, e.g. review for holding members and products with large portfolios first.
10. Challenges and Solutions Related to Project Management in IFG
The transformation function in IFG was established as one of the efforts in implementing the mandate given by the Shareholders



Saham untuk memperkuat transformasi industri asuransi yang mencakup aspek keuangan, manajemen risiko, investasi dan manajemen produk, dan aspek aktuarial. Dalam pelaksanaan fungsi transformasi IFG di tahun 2022, masih terdapat berbagai tantangan yang dihadapi, antara lain belum tersedianya kebijakan atau prosedur mengenai pengelolaan proyek yang dapat mengakomodir kepentingan IFG serta anggota holding dan pola komunikasi antara IFG dengan anggota holding untuk setiap proyek.

Untuk memitigasi tantangan sebagaimana di atas, solusi-solusi yang telah dilakukan IFG selama tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan proyek strategis perlu memiliki tata kelola proyek yang baik dan didukung oleh administrasi proyek yang memadai. Untuk hal tersebut, dalam menjalankan fungsi transformasinya, IFG telah menyusun tata kelola proyek sesuai dengan kebutuhan di IFG dan anggota holding. Adapun di tahun 2022, telah disusun beberapa template dokumen administrasi manajemen proyek. Substansi dari dokumen administrasi tersebut terus berkembang disesuaikan dengan kebutuhan.
- b. Dalam menjalankan fungsi transformasi IFG, diperlukannya adanya standardisasi dalam mengelola proyek di IFG dan anggota holding. Untuk mengatasi hal tersebut, IFG telah menyusun draft kebijakan terkait manajemen proyek dan kebutuhan untuk dokumen proyek, antara lain standar dokumen kick-off, steering committee meeting, dan project charter.

11. Tantangan dan Solusi yang Telah Dilakukan terkait Nasre
Berdasarkan hasil laporan keuangan (inhouse) per 31 Agustus 2022, tingkat RBC, RKI dan ekuitas Nasre masing-masing sebesar -58.51%, 81.74%, dan (Rp542.096,44) juta, berada di bawah ketentuan OJK. Pada tanggal 11 Oktober 2022, OJK menetapkan status pengawasan khusus kepada Nasre dan pada tanggal 13 Oktober 2022 menetapkan sanksi peringatan pertama.

Pada awal tahun 2022 teridentifikasi adanya dugaan mis-statement signifikan pencadangan pada portofolio asuransi kredit kontrak treaty dari ceding asuransi umum di Nasre pada balance unaudited 31 Desember 2021. Penyebab utama dari mis-statement tersebut adalah pada data input, di mana Nasre menganggap kontrak tersebut adalah berjangka pendek padahal kontrak yang di-cover adalah jangka panjang. Hal ini disebabkan oleh data yang dimiliki Nasre berbentuk Statement of Account ("SoA") yang merupakan summary dari premi, komisi, dan klaim yang dikirimkan oleh ceding companies setiap kuartal, bukan merupakan data detail per polis. Data dalam bentuk SoA dihasilkan dari kegiatan operasional yang perlu diperbaiki, di mana Nasre seharusnya dapat meminta data detail secara lebih tegas ke ceding companies karena sudah mandatory dalam kontrak untuk ceding dapat mengirim bordereau. Hal ini kemudian menyebabkan metodologi pencadangan yang umum digunakan untuk kontrak jangka panjang tidak dapat diterapkan sehingga diperlukan pendekatan lain.

RBC, RKI dan ekuitas Nasre yang belum memenuhi ketentuan OJK disebabkan oleh penyesuaian cadangan teknis yang signifikan dan profitabilitas negatif atas beberapa lini bisnis

to strengthen the transformation of the insurance industry covering financial aspects, risk management, investment and product management, and actuarial aspects. In the implementation of IFG's transformation function in 2022, there are still various challenges faced, including the unavailability of policies or procedures regarding project management that can accommodate the interests of IFG and holding members and communication patterns between IFG and holding members for each project.

To mitigate the challenges as above, the solutions that IFG has done during 2022 are as follows:

- a. Implementation of strategic projects needs to have good project governance and be supported by adequate project administration. Thus, in carrying out its transformation function, IFG has developed project governance in accordance with the needs of IFG and holding members. As for 2022, several project management administration document templates have been prepared. The substance of these administrative documents continues to evolve according to the needs.
- b. In carrying out IFG's transformation function, there is a need for standardization in managing projects at IFG and holding members. In response, IFG has drafted policies related to project management and the need for project documents, including standard kick-off documents, steering committee meetings, and project charters.

11. Nasre's Challenges and Solutions

Based on the results of the financial report (inhouse) as of August 31, 2022, Nasre's RBC, RKI and equity levels of -58.51%, 81.74%, and (IDR 542,096.44) million, respectively, were below OJK's requirements. On October 11, 2022, OJK assigned a special supervisory status to Nasre and on October 13, 2022 assigned a first warning sanction.

In early 2022, a significant mis-statement of provision in the treaty contract credit insurance portfolio of the ceding general insurer at Nasre was identified in the December 31, 2021 unaudited balance. The main cause of the mis-statement was in the input data, where Nasre considered the contract to be short term when in fact the contract covered was long term. This is due to the fact that the data held by Nasre is in the form of Statement of Account ("SoA") which is a summary of premiums, commissions and claims sent by ceding companies every quarter, not detailed data per policy. Data in the form of SoA is generated from operational activities that need to be improved, where Nasre should be able to request detailed data more explicitly to ceding companies because it is mandatory in the contract for ceding to send bordereau. This then led to the commonly used provisioning methodology for long-term contracts not being applicable and hence a different approach was required.

RBC, RKI and Nasre equity that did not meet OJK requirements were caused by significant technical reserve adjustments and negative profitability on several business lines such as property,

seperti properti, kredit dan surety, serta jiwa. Di samping itu, dana tabaruu pada UUS juga memberikan kontribusi negatif terhadap ekuitas Nasre.

Tindak lanjut yang telah dilakukan IFG adalah mengidentifikasi dan mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi Nasre melalui pembentukan Project Management Office ("PMO") yang diselenggarakan oleh Askrindo sebagai pemegang saham mayoritas. Di dalam PMO tersebut, dibentuk beberapa workstream, antara lain: (1) baselining terhadap penghitungan pencadangan; (2) reviu profitabilitas seluruh lini bisnis; (3) reviu kontrak dengan ceding atas lini bisnis yang memiliki loss ratio yang signifikan tinggi; (4) reviu atas klaim yang belum dibayarkan (long outstanding claim); serta (5) reviu umur piutang di atas 60 (enam puluh) hari.

Selain itu IFG juga memastikan Nasre telah menyusun dan menyampaikan RPK sesuai dengan tenggat waktu yang ditentukan oleh OJK. RPK Nasre telah di sampaikan kepada OJK pada tanggal 3 November 2022. Adapun hasil pencapaian RBC berdasarkan hasil audit per 31 Desember 2022 adalah sebesar 3,32%, di mana kontribusi terbesar atas pencapaian RBC tersebut dihasilkan dari: (1) penerapan stop loss yang berdampak pada penurunan pencadangan; (2) rekonsiliasi atas klaim yang belum dibayarkan (long outstanding claim) yang berdampak pada penurunan kewajiban melalui penghapusbukuan utang klaim yang tercatat ganda; (3) penagihan piutang yang berumur di atas 60 (enam puluh) hari menaikkan nilai AYD.

Fokus Utama IFG dan Anak Perusahaan Tahun 2022

Untuk menjawab strategic issues yang dihadapi oleh Perseroan dan anak perusahaan, berikut merupakan penjabaran dari fokus utama untuk tahun 2022:

1. Penguatan Tata Kelola.

Perlunya dilakukan implementasi dan evaluasi pedoman strategis di anak perusahaan. Pemenuhan infrastruktur kebijakan dan prosedur yang memadai yang dapat menaungi seluruh aktivitas pekerjaan Holding untuk level L1 - L4. Integrasi (alignment) kebijakan Holding dan anak perusahaan (termasuk tata kelola pengajuan, monitoring dan evaluasi PMN);

2. Digitalisasi Operasional.

Penyeragaman dan alignment sistem dan data untuk IFG, serta melakukan best practice untuk digitalisasi operasional asuransi di industri;

3. Perbaikan Kemampuan Teknis Asuransi.

Melakukan peningkatan dan perbaikan pada kemampuan teknis asuransi sesuai dengan best practice;

4. Penguatan Kapabilitas Sumber Daya Manusia.

Penguatan kapabilitas SDM dan budaya perusahaan untuk menjawab tantangan pasar;

5. Peningkatan Competitiveness.

Peningkatan Competitiveness dari masing - masing bidang atau fungsi di IFG;

6. Optimalisasi Existing Business.

Optimalisasi existing business (fokus pada LoB yang profitable, optimalisasi pasar ritel dan optimalisasi potensi pasar BUMN);

7. Persiapan Digital Business yang Menyasar pada Pasar Ritel.

Persiapan untuk new business venture (digital business yang menyasar pada pasar ritel);

credit and surety, and life. In addition, tabaruu funds in UUS also contributed negatively to Nasre's equity.

IFG's follow-up was to identify and find solutions to the problems faced by Nasre through the establishment of a Project Management Office ("PMO") organized by Askrindo as the majority shareholder. Within the PMO, several workstreams were established, including: (1) baselining of provision calculation; (2) reviewing profitability of all lines of business; (3) reviewing ceding contracts for lines of business that have a significantly high loss ratio; (4) reviewing long outstanding claims; and (5) reviewing the age of receivables above 60 (sixty) days.

In addition, IFG also ensures that Nasre has prepared and submitted the RPK in accordance with the deadline set by OJK. Nasre's RPK was submitted to OJK on November 3, 2022. The achievement of RBC based on the audit results as of December 31, 2022 is 3.32%, where the largest contribution to the achievement of RBC is generated from: (1) the application of stop loss which has an impact on reducing reserves; (2) reconciliation of long outstanding claims which has an impact on reducing liabilities through the write-off of double recorded claims payable; (3) collection of receivables over 60 (sixty) days old increases the value of AYD.

IFG and Subsidiaries' Main Focus in 2022

To answer the strategic issues faced by the Company and its subsidiaries, the following is a description of the main focus for 2022:

1. Strengthening Governance.

The need for implementation and evaluation of strategic guidelines in subsidiaries. Fulfillment of adequate Policies and Procedures infrastructure that can cover all Holding work activities for L1 - L4 levels. Alignment of Holding and subsidiary policies (including governance of PMN submission, monitoring and evaluation);

2. Operational Digitalization.

Uniformity and alignment of systems and data for IFG, as well as conducting best practices for the digitization of insurance operations in the industry;

3. Improvement of Insurance Technical Capability.

Enhancing and improving insurance technical capabilities in accordance with best practice;

4. Strengthening Human Resources Capability.

Strengthening human resource capabilities and corporate culture to respond to market challenges;

5. Competitiveness Improvement.

Increased Competitiveness of each field or function in IFG;

6. Optimization of Existing Business.

Optimization of existing business (focus on profitable LoB, optimization of retail market and optimization of BUMN market potential);

7. Preparation of Digital Business Targeting the Retail Market.

Preparation for new business venture (digital business targeting the retail market);



Alignment Strategic Issues, Fokus Utama dan Strategic Imperatives

Pada tahun 2022, alignment strategic issues, fokus utama dan strategic imperatives IFG adalah sebagai berikut:

Tabel Alignment Strategic Issues, Fokus Utama dan Strategic Imperatives

Alignment Strategic Issues, Main Focus and Strategic Imperatives

In 2022, IFG's alignment strategic issues, main focus and strategic imperatives are as follows:

Table of Alignment Strategic Issues, Main Focus and Strategic Imperatives

Strategic Issues	Fokus Utama Main Focus	Strategic Imperatives
Profitabilitas beberapa LoB yang masih belum maksimal Profitability of some LoB which are underutilized.	Optimalisasi existing business (fokus pada LoB yang profitable, optimalisasi pasar ritel dan optimalisasi potensi pasar BUMN) Optimization of existing business (focus on profitable LoB, optimization of retail market and optimization of SOEs' market potential)	<ul style="list-style-type: none"> • Restrukturisasi Portfolio • Restrukturisasi Model Bisnis • Sharpen our focus of business • Restructuring of portfolio • Restructuring Business Model • Sharpen Our Focus of Business
Adaptasi terhadap perubahan landscape industri yang sebelumnya didominasi institusi menjadi ritel Adaptation to changes in the industry landscape from institutional-dominated	Persiapan untuk new business venture (digital business yang menyasar pada pasar ritel). Preparation for new business venture (digital business targeting the retail market).	<i>Enhance our competitiveness</i>
Prosesi teknij dan operasional Asuransi tang belum sesuai best practice industri Insurance technical and operational processes that are not in accordance with industry best practices	Perbaikan kemampuan teknis asuransi Improvement of insurance technical capabilities	Restrukturisasi Model Bisnis. Business Model Restructuring
Pedoman dan tata kelola yang belum terstandardisasi Non-standardized guidelines and governance	Perbaikan dan standardisasi pedoman dan tata kelola yang digunakan Improvement and standardization of guidelines and governance used	<ul style="list-style-type: none"> • Tata Kelola yang Prudent • Risk Management yang Robust • Prudent Governance • Robust Risk Management
Sistem dan data yang digunakan belum seragam untuk IFG dan belum sesuai best practice digitalisasi operasi di industri The systems and data used for IFG are still inconsistent and do not follow industry best practices for digitizing operations in the industry.	Penyeragaman dan alignment sistem dan data untuk IFG, serta melakukan best practice untuk digitalisasi operasional asuransi di industri Uniformity and alignment of systems and data for IFG, as well as conducting best practices for digitizing insurance operations in the industry.	Sinergi Antar Anggota Holding. Synergy between Holding Members.
Perusahaan yang masih bertransformasi dengan berbagai agenda sehingga alokasi resources dan waktu dari stakeholder sering menjadi kendala Companies that are still transforming with various agendas so that the allocation of resources and time from stakeholders is often a constraint	Peningkatan competitiveness dari masing-masing bidang/fungsi perusahaan Increased competitiveness of each field/function of the company	<i>Enhance our competitiveness</i>
Tingginya tingkat turnover karyawan High employee turnover rate	Penguatan kapabilitas sumber daya manusia dan budaya IFG untuk menjawab tantangan pasar Strengthening IFG's human resource capabilities and culture to respond to market challenges	Peningkatan Kompetensi SDM Enhance HR competence

Strategic Initiatives & Performance Indicators Tahun 2022

Untuk dapat mencapai strategic imperative yang sudah ditetapkan, IFG telah melakukan pemetaan dan monitoring agar tujuan dari strategic imperative dapat tercapai. Indikator performa di bawah ini merupakan cara yang diambil Perseroan untuk dapat mengukur keberhasilan dari strategic initiative yang akan dilakukan:

Strategic Initiatives & Performance Indicators in 2022

To be able to achieve the strategic imperative that has been set, IFG has conducted mapping and monitoring so that the objectives of the strategic imperative can be achieved. The performance indicators below are a way for the Company to measure the success of the strategic initiatives that will be executed:

Tabel Strategic Initiatives dan Performance Indicators 2022

Table of Strategic Initiatives and Performance Indicators 2022

Strategic Imperative	Strategic Initiative	Performance Indicators
Restrukturisasi Portfolio Restructuring of portfolio	Restrukturisasi portfolio dan perbaikan kinerja Anak Perusahaan (sesuai dengan APS 2022) Portfolio restructuring and performance improvement of subsidiaries (in accordance with 2022 Shareholders' Aspirations)	<ul style="list-style-type: none"> Risk Based Capital ("RBC") Asuransi Jiwa Proporsi Portfolio Asuransi Kredit yang direkstrukturisasi Life Insurance Risk Based Capital ("RBC") Proportion of Credit Insurance Portfolio restructured
Restrukturisasi Model Bisnis Restructuring Business Model	Pengelolaan Risiko Bisnis yang terukur dengan penataan Kembali pengembangan produk, efisiensi klaim, dan optimalisasi kinerja anak Perusahaan (sesuai dengan APS 2022) Measurable Business Risk Management by reorganizing product development, claim efficiency, and optimizing subsidiary performance (in accordance with 2022 Shareholders' Aspirations)	<ul style="list-style-type: none"> Combined ratio Anak Perusahaan RBC Anak Perusahaan Combined ratio for Subsidiary RBC for Subsidiary
Sharpen Our Focus of Business	<ul style="list-style-type: none"> Ekspansi bisnis yang profitable (sesuai dengan APS 2022) Penugasan Pemerintah (sesuai dengan APS 2022) Profitable business expansion (in accordance with 2022 Shareholders' Aspirations) Government assignments (in accordance with 2022 Shareholders' Aspirations) 	<ul style="list-style-type: none"> Beban Operasional pada Pendapatan Operasional ("BOPO") Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization ("EBITDA") Return on Equity ("ROE") Volume Penjaminan Kredit Usaha Rakyat ("KUR") Operating Expenses to Operating Income ("BOPO") Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization ("EBITDA") Return on Equity ("ROE") People's Business Credit ("KUR") Guarantee Volume
Tata Kelola yang Prudent Prudent Governance	<ul style="list-style-type: none"> Parenting Governance Holding Penguatan fungsi kepatuhan Parenting Governance Holding Strengthening compliance functions 	<ul style="list-style-type: none"> 100% pemenuhan kebutuhan penyusunan/ pemutakhiran dokumen tata kelola Perusahaan Tidak ada sanksi berulang dari pemangku kepentingan di lingkungan BPUI 100% fulfillment of the need to prepare/ update corporate governance document No repeated sanctions from stakeholders in the BPUI environment
Risk Management yang Robust Robust Risk Management	Peningkatan nilai Risk Maturity Index ("RMI") Increasing Risk Maturity Index ("RMI") score	<ul style="list-style-type: none"> Target RMI tahun 2022 lebih tinggi 0.5 poin Penentuan Risk Appetite IFG RMI target in 2022 is 0.5 points higher IFG Risk Appetite Determination
Peningkatan Kompetensi SDM Enhancing HR competence	Menciptakan SDM yang unggul dan profesional (sesuai dengan APS 2022) Creating superior and professional human resources (in accordance with 2022 Shareholders' Aspirations)	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan komposisi pemimpin muda Peningkatan komposisi pemimpin perempuan Peningkatan kompetensi SDM di seluruh bidang utama Increasing composition of young leaders Increasing composition of female leaders Increasing HR competencies in all key areas



Sinergi Antar Anggota Holding
Synergy between Holding Members

<ul style="list-style-type: none"> • Integrasi infrastruktur aplikasi, teknologi informasi Holding dan Anak Perusahaan serta perbaikan manajemen data dan sistem informasi (sesuai dengan APS 2022) • Melakukan optimalisasi manajemen portofolio aset investasi untuk mencapai optimalisasi return dengan turun mendukung tingkat AYD (sesuai dengan APS 2022) • Integration of application infrastructure, information technology of Holding and Subsidiaries and improvement of data management and information systems (in accordance with 2022 Shareholders' Aspirations) • Optimizing investment asset portfolio management to achieve return optimization by down supporting the level of AYD (in accordance with 2022 Shareholders' Aspirations) 	<ul style="list-style-type: none"> • Integrasi MIS induk dan Anak Perusahaan • Skor IT Governance Maturity level • Persiapan penerapan ERP dan PSAK 74 • Penerapan pengelolaan investasi sesuai LDI • Return portfolio Holding konsolidasi • Total AUM portfolio Holding konsolidasi • Integration of parent and subsidiary MIS • IT Governance Maturity level score • Preparation for ERP and PSAK 74 implementation • Implementation of investment management in accordance with LDI • Consolidated Holding portfolio return • Total AUM of consolidated Holding portfolio
<p>Enhance Our Competitiveness</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Penerapan sistem keteknikan asuransi sesuai best practice di masing-masing anak perusahaan • Implementasi pilot project produk-produk digital di BPUI dan anak perusahaan • Peningkatan brand image perusahaan • Implementation of insurance engineering systems according to best practices in each subsidiary • Implementation of digital products pilot project in BPUI and subsidiaries • Enhancement of the company's brand image

Kinerja IFG Tahun 2022

IFG menyadari bahwa keberhasilan pelaksanaan inisiatif strategis, termasuk pencapaian target RAKP tahun 2022, sangat dipengaruhi oleh dukungan dari para pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal. Oleh karena itu, Perseroan secara berkala melakukan sosialisasi berbagai inisiatif strategis tersebut. Kepada pemangku kepentingan internal, sosialisasi dilakukan dengan memanfaatkan berbagai media dan kesempatan, termasuk saat manajemen melakukan rapat yang terjadwal maupun pertemuan-pertemuan lain yang bersifat insidental. Kegiatan tersebut dilakukan sekaligus sebagai upaya dan komitmen Perusahaan dalam membangun budaya keberlanjutan. Sementara itu, sosialisasi kepada pemangku kepentingan eksternal, seperti pemerintah, regulator, mitra, pemasok, dan pemangku kepentingan eksternal yang lain dilakukan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan kepentingan masing-masing pemangku kepentingan. [OJK F.1]

Selaras dengan sosialisasi yang dilakukan di atas, manajemen dengan dukungan karyawan menerapkan inisiatif dan kebijakan strategis tersebut secara konsisten. Pelaksanaannya terus dipantau dan dievaluasi sehingga Perseroan bisa menentukan solusi terbaik apabila ditemukan deviasi atau hambatan di lapangan. Komitmen dan kesungguhan tersebut bermuara dengan pencapaian kinerja positif IFG pada tahun 2022 sebagaimana disampaikan dalam tabel berikut: [OJK F.2]

Performance of IFG in 2022

IFG realizes that the successful implementation of strategic initiatives, including the achievement of the 2022 target Work Plan and Budget, is greatly influenced by the support of stakeholders, both internal and external. Therefore, the Company regularly socializes the various strategic initiatives. To internal stakeholders, socialization is implemented by utilizing various media and opportunities, including when management conducts scheduled meetings and other incidental meetings. These activities are carried out as well as the Company's efforts and commitment in building a culture of sustainability. Meanwhile, socialization to external stakeholders, such as the government, regulators, partners, suppliers, and other external stakeholders is implemented through various activities in accordance with the interests of each stakeholder. [OJK F.1]

In line with the socialization executed above, management with the support of employees implements these strategic initiatives and policies consistently. The implementation is continuously monitored and evaluated so that the Company can determine the best solution if deviations or obstacles are found in the field. This commitment and devotion lead to the achievement of IFG's positive performance in 2022 as presented in the following table: [OJK F.2]

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Comparison of Target and Performance Realization in 2022

Uraian Description	Satuan Unit	Realisasi 2022 2022 Realization (1)	RKAP 2022 2022 Work Plan and Budget (2)	Pencapaian Realisasi terhadap Target Actual Achievement Compared to the Target (1:2)
Pendapatan Underwriting Bersih Net Underwriting Income	Miliar Rupiah IDR Billion	27.652	22.756	121,52%
Beban Underwriting Bersih Underwriting Expense – Net	Miliar Rupiah IDR Billion	20.835	15.096	138%
Hasil Underwriting Bersih Net Underwriting Income	Miliar Rupiah IDR Billion	6.817	7.660	88,99%
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan Profit (Loss) for the Year	Miliar Rupiah IDR Billion	3.279	2.976	110,18%
Jumlah Aset Total Assets	Miliar Rupiah IDR Billion	132.463	139.127	95,21%
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	Miliar Rupiah IDR Billion	93.736	93.835	99,89%
Jumlah Ekuitas Total Equity	Miliar Rupiah IDR Billion	39.772	45.292	87,81%

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

Comparison of Target and Performance Realization in 2021

Uraian Description	Satuan Unit	Realisasi 2021 2021 Realization (1)	RKAP 2021 2021 Work Plan and Budget (2)	Pencapaian Realisasi terhadap Target Actual Achievement Compared to the Target (1:2)
Pendapatan Underwriting Bersih Net Underwriting Income	Miliar Rupiah IDR Billion	23.681	20.533	111%
Beban Underwriting Bersih Underwriting Expense – Net	Miliar Rupiah IDR Billion	17.564	14.837	118,39%
Hasil Underwriting Bersih Net Underwriting Income	Miliar Rupiah IDR Billion	6.117	5.697	128%
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan Profit (Loss) for the Year	Miliar Rupiah IDR Billion	3.419	2.517	153%
Jumlah Aset Total Assets	Miliar Rupiah IDR Billion	118.963	127.914	97%
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	Miliar Rupiah IDR Billion	76.876	85.179	96%
Jumlah Ekuitas Total Equity	Miliar Rupiah IDR Billion	42.087	42.735	99%

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020

Comparison of Target and Performance Realization in 2020

Uraian Description	Satuan Unit	Realisasi 2020 2020 Realization (1)	RKAP 2020 2020 Work Plan and Budget (2)	Pencapaian Realisasi terhadap Target Actual Achievement Compared to the Target (1:2)
Pendapatan Underwriting Underwriting Income	Miliar Rupiah IDR Billion	18.442	16.725	110,3%
Hasil Underwriting Underwriting Income	Miliar Rupiah IDR Billion	4.799	5.132	93,5%
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan Profit (Loss) for the Year	Miliar Rupiah IDR Billion	2.203	1.819	121,1%



Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020

Comparison of Target and Performance Realization in 2020

Uraian Description	Satuan Unit	Realisasi 2020 2020 Realization (1)	RKAP 2020 2020 Work Plan and Budget (2)	Pencapaian Realisasi terhadap Target Actual Achievement Compared to the Target (1:2)
Jumlah Aset Total Assets	Miliar Rupiah IDR Billion	92.339	81.156	113,8%
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	Miliar Rupiah IDR Billion	54.636	36.346	150,8%
Jumlah Ekuitas Total Equity	Miliar Rupiah IDR Billion	37.703	44.810	84,1%

Informasi selengkapnya tentang kinerja ekonomi Perseroan disampaikan dalam Bab Analisa dan Pembahasan Manajemen Laporan Tahunan IFG Tahun 2022, halaman 168

More information on the Company's economic performance is provided in the Management Discussion and Analysis chapter of IFG's 2022 Annual Report, page 168

Kontribusi kepada Negara

Sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN), IFG berkomitmen untuk bisa memberikan kontribusi sebesar-besarnya kepada negara (Pemerintah Republik Indonesia selaku pemegang). Kontribusi tersebut di antaranya dalam bentuk dividen tunai yang berasal dari laba Perusahaan. Selain itu, sebagai wajib pajak, IFG juga memberikan kontribusi finansial lain secara langsung kepada negara berupa pembayaran pajak, sebagaimana tabel berikut:

Contribution to the Country

As one of the State-Owned Enterprises (SOEs), IFG is committed to being able to provide the maximum possible contribution to the state (the Government of the Republic of Indonesia as the holder). These contributions include cash dividends originating from the Company's profits. In addition, as a taxpayer, IFG also makes other financial contributions directly to the state in the form of paying taxes, as shown in the following table:

Tabel Pembayaran Pajak Tahun 2022

Table of 2022 Tax Payment

(Rupiah penuh)/(in full IDR)

No.	URAIAN	RUPIAH
I	PUSAT CENTRAL	
	A. PPh/ A. Income tax	
	1 PPh psl. 4 ayat 2 (WAPU) / Income Tax Article 4 Paragraph 2(Compulsory Collection)	40.404.018.958
	2 PPh psl. 4 ayat 2 (WABA) / Income Tax Article 4 Paragraph 2 (VAT payer)	13.255.811.938
	3 PPh psl. 21 / Income Tax Article 21	-
	4 PPh Karyawan Psl. 21 (WAPU) / Employee's Income Tax Article 21 (Compulsory Collection)	338.588.621.328
	5 PPh Badan / Corporate Income Tax	
	a. PPh Badan Psl. 25 / Corporate Income Tax Article 25	503.109.804.978
	b. PPh Badan Psl. 29 / Corporate Income Tax Article 29	833.019.475.969
	6 PPh psl. 22 / Income Tax Article 22	-
	7 PPh psl. 22 (WAPU) / Income Tax Article 22 (Compulsory Collection)	3.241.157.516
	8 PPh psl. 23 (WABA) / Income Tax Article 23 (VAT payer)	30.601.766.101
	9 PPh psl. 23 (WAPU) / Income Tax Article 23 (Compulsory Collection)	26.519.562.751
	10 PPh psl. 26 / Income Tax Article 26	-
	11 PPh psl. 26 (WAPU) / Income Tax Article 26 (Compulsory Collection)	8.199.835.373
	B. PPN / B. VAT	
	1 PPN Barang dan Jasa / VAT of Goods and Services	

Tabel Pembayaran Pajak Tahun 2022

Table of 2022 Tax Payment

(Rupiah penuh)/(in full IDR)

No.	URAIAN	RUPIAH
	a. Keluaran / Output	59.812.088.694
	b. Masukan / Input	(38.804.605.121)
	2 PPn BM / Sales Tax on Luxury Goods	
	C PBB / Property Tax	12.144.131.701
	D Bea Masuk dan Cukai / Import and Excise Duties	-
	E BPHTB / Duty on the Acquisition of Land and Building Rights	-
	F. Pajak Lainnya / Other Taxes	153.398.394.419
SUB TOTAL		1.983.490.064.606
II.	DAERAH REGIONAL	
	A. Pajak Kendaraan Bermotor / Motor Vehicle Tax	1.407.640.295
	B. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor / Transfer of Motor Vehicle Title Fee	-
	C. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor / Motor Vehicle Fuel Tax	-
	D. Pajak Daerah Lainnya / Other Regional Taxes	-
SUB TOTAL		1.407.640.295
TOTAL		1.984.897.704.901



KINERJA LINGKUNGAN KEBERLANJUTAN

SUSTAINABLE ECONOMIC PERFORMANCE

Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022 telah menetapkan tujuh Prioritas Nasional untuk menjaga kesinambungan pembangunan. Ketujuh prioritas itu adalah (1) memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan; (2) mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan; (3) meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing; (4) revolusi mental dan pembangunan kebudayaan; (5) memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar; (6) membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim; serta (7) memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Sesuai dengan RKP Tahun 2022, pembangunan lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim merupakan prioritas keenam. Adapun fokus prioritas bidang ini adalah peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih tangguh dan adaptif untuk mendukung pemulihan dan transformasi dampak COVID-19 menuju pembangunan yang lebih hijau dan berkelanjutan. Transformasi pascapandemi COVID-19 pada pembangunan lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim akan dititikberatkan pada upaya perbaikan kualitas lingkungan hidup melalui penanganan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan peningkatan pemantauan kualitas lingkungan secara otomatis; perbaikan sistem ketahanan bencana yang tanggap terhadap bencana yang bersifat seketika (sudden onset) maupun perlakan (slow onset); serta pelaksanaan pembangunan yang menghasilkan pertumbuhan ekonomi rendah emisi gas rumah kaca (GRK).

Keberhasilan pencapaian seluruh prioritas nasional tahun 2022, termasuk di bidang lingkungan, memerlukan dukungan, kontribusi dan sinergi dari seluruh pemangku kepentingan di Tanah Air, termasuk dari kalangan korporasi. Dalam konteks inilah, IFG sebagai bagian dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berkomitmen untuk mendukung terwujudnya pembangunan lingkungan hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim seperti disampaikan dalam RKP Tahun 2022. Dukungan dilakukan semaksimal mungkin sesuai dengan bidang usaha yang dijalankan Perseroan sebagai Holding BUMN Perasuransi dan Penjaminan.

Era Baru Lembaga Jasa Keuangan dan Kepedulian Lingkungan

Operasional bisnis Industri perasuransi dan penjaminan tidak memiliki keterkaitan langsung dengan lingkungan. Namun demikian, sebagai lembaga jasa keuangan non-bank, pelaku usaha di kedua bidang tersebut dapat berkontribusi dalam mencegah kerusakan lingkungan. Salah satunya melalui penempatan investasi dana yang dikelolanya. Selain memegang prinsip investasi, yaitu ditempatkan pada jenis investasi yang aman dan menguntungkan, perusahaan juga perlu memberikan perhatian terkait dampak lingkungan dari investasi tersebut.

The Government of Indonesia through Presidential Regulation Number 85 of 2021 concerning the Government Work Plan (RKP) for 2022 has set seven National Priorities to maintain development sustainability. The seven priorities are (1) strengthening economic resilience for quality and equitable growth; (2) developing regions to reduce inequality and ensure equity; (3) improving quality and competitive human resources; (4) mental revolution and cultural development; (5) strengthening infrastructure to support economic development and basic services; (6) developing the environment, increasing disaster resilience, and climate change; and (7) strengthening political, law, defense and security stability as well as public service transformation.

In accordance with the 2022 RKP, environmental development, disaster resilience, and climate change are the sixth priority. The focus of this priority sector is to improve the quality of life of a more resilient and adaptive society to support the recovery and transformation of the impact of COVID-19 towards greener and more sustainable development. Post-COVID-19 transformation in environmental development, disaster resilience, and climate change will focus on efforts to improve the quality of the environment through handling hazardous and toxic waste (B3) and increasing automatic monitoring of environmental quality; improving disaster resilience systems that are responsive to sudden onset and slow onset disasters; and implementing development that produces low greenhouse gas (GHG) emissions economic growth.

The successful achievement of all national priorities in 2022, including in the environmental sector, requires support, contribution and synergy from all stakeholders in the country, including from corporations. In this context, IFG as part of a State-Owned Enterprise (SOE) is committed to supporting the realization of environmental development, disaster resilience and climate change as stated in the 2022 RKP. Support is done as much as possible in accordance with the business fields carried out by the Company as the Holding SOE of Insurance and Guarantee.

New Era of Financial Services Institutions and Environmental Concerns

The business operations of the insurance and guarantee industry do not have a direct relationship with the environment. However, as non-bank financial services institutions, business actors in both fields can contribute to preventing environmental damage. One of them is through the placement of investment funds that it manages. In addition to adhering to investment principles, which are placed in safe and profitable types of investment, companies also need to pay attention to the environmental impact of these investments.

Urgensi agar industri asuransi dan penjaminan peduli terhadap kelestarian lingkungan secara implisit telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam Pasal 43, ayat (3), huruf c terdapat klausul, "Pengembangan sistem lembaga keuangan dan pasar modal yang ramah lingkungan hidup". Menurut undang-undang ini, yang dimaksud dengan "sistem lembaga keuangan ramah lingkungan hidup" adalah sistem lembaga keuangan yang menerapkan persyaratan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam kebijakan pembiayaan dan praktik sistem lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank.

Sebagai tindak lanjut atas regulasi tersebut, Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik atau POJK Keuangan Berkelanjutan. Dengan peraturan ini, maka perusahaan asuransi dan penjaminan sebagai lembaga jasa keuangan non-bank wajib menerapkan prinsip keuangan berkelanjutan atau sustainable finance.

Merujuk POJK Keuangan Berkelanjutan, pengertian keuangan berkelanjutan adalah dukungan menyeluruh dari industri jasa keuangan untuk pertumbuhan berkelanjutan yang dihasilkan dari keselarasan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Penerapan keuangan berkelanjutan diperlukan sebagai modal penting untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebutkan sustainable finance memiliki lima dimensi, yaitu pencapaian keunggulan industri, sosial, dan ekonomi dalam rangka mengurangi ancaman pemanasan global serta pencegahan terhadap permasalahan lingkungan hidup dan sosial lainnya; pergeseran target menuju ekonomi rendah karbon yang kompetitif; promosi investasi ramah lingkungan hidup di berbagai sektor usaha/ekonomi, dan pemberian dukungan pada pelaksanaan prinsip-prinsip pembangunan Indonesia 4P (pro-growth, projobs, pro-poor, dan pro-environment).

Penerapan sustainable finance merupakan bentuk dukungan industri asuransi dan penjaminan terhadap Perjanjian Paris (Paris Agreement) yang telah ditandatangani pemerintah Indonesia. Piagam Pengesahan Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja PBB mengenai Perubahan Iklim diserahkan oleh Wakil Tetap RI pada PBB di New York pada 31 Oktober 2016. Perjanjian Paris adalah komitmen warga dunia untuk menahan laju kenaikan suhu rata-rata global di bawah 2°C guna mengurangi risiko dan dampak merugikan akibat perubahan iklim. Komitmen Indonesia terhadap Perjanjian Paris diwujudkan dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 16 tahun 2016 tentang Pengesahan Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim.

Lebih lanjut, implementasi sustainable finance sekaligus merupakan dukungan korporasi terhadap komitmen Indonesia mencapai net zero emission maksimal pada tahun 2060. Untuk itu, Indonesia terus mengkomunikasikan dan menjanjikan banyaknya CO2 yang akan dikurangi melalui National Determined Contribution (NDC), yaitu mengurangi 32% dengan upaya sendiri dan 43% dengan dukungan internasional pada tahun 2023.

The urgency for the insurance and guarantee industry to care about environmental sustainability is implicitly regulated in the Law of the Republic of Indonesia Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management. In Article 43, paragraph (3), letter c there is a clause, "Development of an environmentally friendly system of financial institutions and capital markets". According to this law, what is meant by "environmentally friendly financial institution system" is a financial institution system that applies environmental protection and management requirements in the financing policies and practices of the bank financial institution system and non-bank financial institutions.

As a follow-up to the regulation, the Financial Services Authority issued Financial Services Authority Regulation No. 51/POJK.03/2017 on the Implementation of Sustainable Finance for Financial Services Institutions, Issuers and Public Companies or POJK Sustainable Finance. With this regulation, insurance and guarantee companies as non-bank financial services institutions are required to apply the principles of sustainable finance.

Referring to the POJK Sustainable Finance, the definition of sustainable finance is comprehensive support from the financial services industry for sustainable growth resulting from harmony between economic, social and environmental interests. The implementation of sustainable finance is needed as an important capital to realize sustainable development.

The Financial Services Authority (OJK) states that sustainable finance has five dimensions, namely achieving industrial, social, and economic excellence in order to reduce the threat of global warming and prevention of environmental as well as other social problems; shifting targets towards a competitive low-carbon economy; promoting environmentally friendly investments in various business/economic sectors, and providing support for the implementation of Indonesia's 4P development principles (pro-growth, projobs, pro-poor, and pro-environment).

The implementation of sustainable finance is a form of support from the insurance and guarantee industry to the Paris Agreement that has been signed by the Indonesian government. The Charter Ratification of the Paris Agreement on the United Nations Framework Convention on Climate Change was submitted by the Permanent Representative of Indonesia to the United Nations in New York on October 31, 2016. The Paris Agreement is a commitment by global citizens to hold the rate of increase in global average temperature below 2°C in order to reduce the risks and adverse impacts of climate change. Indonesia's commitment to the Paris Agreement is realized by the issuance of Law No. 16 of 2016 on the Ratification of the Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change.

Furthermore, the implementation of sustainable finance is also corporate support for Indonesia's commitment to achieve maximum net zero emission by 2060. Therefore, Indonesia continues to communicate and promise the amount of CO2 to be reduced through the National Determined Contribution (NDC), which is to reduce 32% with its own efforts and 43% with international support by 2023.



Landasan Kebijakan Pengelolaan Lingkungan

Sebagai bagian dari lembaga jasa keuangan, IFG berkomitmen untuk turut serta mewujudkan lingkungan yang baik dan lestari. Komitmen tersebut diimplementasikan dengan merujuk pada berbagai regulasi yang berlaku, baik undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, beserta peraturan turunannya. Regulasi tersebut di antaranya:

1. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 2007 tentang Energi;
3. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
6. Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air;
7. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 111 Tahun 2003 Tentang Pedoman Mengenai Syarat dan Tata Cara Perizinan Serta Pedoman Kajian Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air;
8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 01 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air;
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 13 Tahun 2012 tentang Penghematan Pemakaian Tenaga Listrik.

Berdasarkan regulasi tersebut di atas, selanjutnya Perseroan menerbitkan sejumlah regulasi internal yang menjadi panduan operasional sehari-hari bagi manajemen dan karyawan IFG.

Komitmen IFG untuk Lingkungan

Sebagai BUMN Holding Perasuransi dan Penjaminan, IFG berkomitmen untuk turut menjaga kelestarian lingkungan dengan menaati berbagai regulasi yang mengatur hal tersebut, termasuk dalam hal penanaman dana investasi oleh entitas anak. Dalam hal ini, Perseroan menempatkan dana investasi ke dalam portofolio investasi sesuai dengan ketentuan regulator dan SOP Perusahaan. Lebih dari itu, agar tidak melanggar regulasi yang berlaku, IFG juga melakukan monitoring terhadap perubahan peraturan investasi di industri asuransi, penjaminan, dan investasi umumnya. Hingga akhir tahun 2022, tidak terdapat pengaduan terkait isu lingkungan yang ditujukan kepada IFG dari semua bentuk investasi tersebut.

Dukungan terhadap terjaganya lingkungan yang baik dan lestari secara konkret diwujudkan Perseroan dengan menerapkan operasional kantor yang ramah lingkungan. Kebijakan tersebut direalisasikan dengan melakukan pengelolaan yang baik terkait material kertas, sumber daya air, energi, limbah, dan sebagainya. Untuk mendukung keberhasilan operasional kantor yang ramah lingkungan, segenap insan Perseroan menerapkan prinsip 3R, yaitu reduce, reuse, and recycle. Pengelolaan energi dengan melakukan penghematan penggunaan listrik dan bahan bakar minyak, sebagai contoh, merupakan dukungan nyata IFG terhadap

Foundation of Environmental Management Policy

As part of a financial services institution, IFG is committed to participate in realizing a good and sustainable environment. This commitment is implemented by referring to various applicable regulations, including laws, government regulations, ministerial regulations, and their derivative regulations. These regulations include:

1. Law No. 32 of 2009 on Environmental Protection and Management;
2. Law of the Republic of Indonesia no. 30 of 2007 concerning Energy;
3. Government Regulation No. 27 of 2012 on Environmental Permits;
4. Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 101 of 2014 on Hazardous and Toxic Waste Management;
5. Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 27 of 2012 on Environmental Permits;
6. Government Regulation No. 20 of 1990 on Water Pollution Control;
7. Decree of Ministry of Environment No. 111 of 2003 Concerning Guidelines on Requirements and Procedures for Licensing as well as Guidelines for the Assessment of Wastewater Discharge to Water or Water Sources;
8. Regulation of the Minister of Environment No. 01 of 2010 concerning Water Pollution Control Procedures;
9. Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia no. 13 of 2012 concerning Electricity Usage Saving.

Based on the aforementioned regulations, the Company further issued a number of internal regulations that serve as daily operational guidelines for IFG management and employees.

IFG's Commitment to the Environment

As an Insurance and Guarantee Holding Company, IFG is committed to preserving the environment by complying with various regulations governing this matter, including in terms of investment funds by its subsidiaries. In this case, the Company places investment funds into an investment portfolio in accordance with regulatory requirements and the Company's SOP. Moreover, in order not to violate applicable regulations, IFG also monitors changes in investment regulations in the insurance, guarantee, and investment industries in general. Until the end of 2022, there were no complaints related to environmental issues addressed to IFG from all forms of investment.

Support for the maintenance of a good and sustainable environment is concretely realized by the Company by implementing environmentally friendly office operations. The policy is realized by conducting good management related to paper materials, water resources, energy, waste, and others. To support the success of environmentally friendly office operations, all employees of the Company apply the 3R principle, namely reduce, reuse, and recycle. Energy management by saving the use of electricity and fuel oil, for example, is IFG's real support for the government's efforts to reduce greenhouse gas emissions as an implementation

upaya pemerintah menurunkan emisi gas rumah kaca sebagai implementasi Perjanjian Paris dan target nett zero emmision tahun 2060. Langkah penghematan diambil karena seberapa pun kecilnya, Perseroan turut menyumbang emisi gas rumah kaca yang timbul akibat penggunaan listrik dan bahan bakar minyak dalam operasional sehari-hari.

Pengelolaan Material/Bahan Baku

Kertas merupakan salah satu kebutuhan material utama bagi operasional keseharian IFG. Kertas digunakan untuk keperluan administrasi perkantoran, seperti surat-menurut, pencetakan dokumen pelaporan, dan sebagainya.

Kertas dibuat dari bubur kayu di mana proses pembuatannya memerlukan berbagai komponen, termasuk listrik dan air dalam jumlah yang besar. Dengan demikian, jumlah penggunaan kertas dalam berbagai aktivitas manusia berbanding lurus dengan jumlah pohon yang ditebang, serta listrik dan air yang digunakan oleh pabrik kertas. Untuk mengurangi penebangan pohon serta komponen lain dalam pembuatan kertas, langkah nyata yang diambil IFG adalah menerapkan efisiensi penggunaan kertas. Kebijakan yang telah dilakukan antara lain mengadopsi konsep paperless office serta meminimalkan penggunaan kertas untuk memo dengan mengalihkannya ke surat elektronik (e-mail).

Lebih lanjut, sejalan dengan kebijakan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi terkini, Perseroan menyadari bahwa penggunaan kertas belum sepenuhnya bisa dihilangkan. Sebab itu, dalam kondisi tertentu, penggunaan kertas tetap tak bisa dihindarkan. Walau demikian, Perseroan tetap berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan langkah penghematan. Sebelum dicetak misalnya, personel yang membuat dokumen perlu melakukan pengecekan secara cermat sehingga tidak ditemukan adanya kesalahan tulisan atau ejaan. Dengan demikian, sekali mencetak selesai, dan tidak perlu mengulang karena tidak terdapat kesalahan dalam penulisan dokumen tersebut. Langkah lain, jika memungkinkan, pencetakan dilakukan bolak-balik. Efisiensi penggunaan kertas juga bisa dilakukan dengan memanfaatkan kertas bekas yang salah satu permukaannya masih bersih/polos. Kertas jenis ini bisa dipakai untuk mencetak draf dokumen.

Dengan berbagai upaya tersebut, per 31 Desember 2022, volume penggunaan kertas tercatat sebanyak 315 rim, naik dibanding tahun 2021 dengan volume sebanyak 300,27 rim. Kenaikan terjadi dipengaruhi oleh meningkatnya jam kerja dari kantor (*work from office*) sebagai dampak positif keberhasilan pemerintah menangani pandemi COVID-19.

Tabel Penggunaan Kertas Tahun 2020–2022

Table of Paper Usage in 2020–2022

Tahun Year	Jumlah Kertas (Rim) Total Paper (Ream)
2022	315
2021	300,27
2020	434,58

Dari penggunaan kertas, IFG menghasilkan limbah kertas antara lain dari draft dokumen maupun dokumen-dokumen lama yang sudah

of the Paris Agreement and the target of net zero emmision in 2060. No matter how small the contribution was, the Company has contributed greenhouse gases due to the usage of fuel oil and electricity for daily operations, and as a result, savings measures have been implemented.

Material Management

Paper is one of the main material requirements for IFG's daily operations. Paper is used for office administration purposes, such as correspondence, printing of reporting documents, and so on.

Paper is made from wood pulp where the manufacturing process requires various components, including large amounts of electricity and water. Thus, the amount of paper used in various human activities is directly proportional to the number of trees cut down, as well as the electricity and water used by paper mills. To reduce the cutting of trees and other components in papermaking, IFG has taken concrete steps to implement paper use efficiency. Policies that have been implemented include adopting the concept of paperless office and minimizing the use of paper for memos by shifting it to electronic mail (e-mail).

Furthermore, in line with the policy of optimizing the use of the latest technology, the Company realizes that the use of paper cannot be completely eliminated. Therefore, under certain conditions, the use of paper remains unavoidable. Nevertheless, the Company continues to make every effort to save as much as possible. Before printing, for example, personnel who create documents need to check carefully so that no writing or spelling errors are found. Hence, printing just needs to be done once, and there is no need to repeat because there are no errors in the writing of the document. Another step, if possible, is to print both sides. The efficient use of paper can also be done by utilizing used paper with one of the surfaces still clean/blank sheet. This type of paper can be used to print draft documents.

With these various efforts, as of December 31, 2022, the volume of paper use was recorded at 315 reams, an increase compared to 2021 with a volume of 300.27 reams. The increase was influenced by increased work from office hours as a positive impact of the government's success in handling the COVID-19 pandemic.

From the use of paper, IFG generates paper waste, among others from draft documents and old documents that are no longer used or



tidak terpakai atau sudah disimpan dalam dokumen elektronik. Untuk pengelolaan limbah kertas, Perseroan menyerahkan kepada pihak ketiga guna didaur ulang atau dimanfaatkan ulang. Adapun draft maupun dokumen yang isinya rahasia, semua akan dihancurkan terlebih dulu dengan mesin penghancur kertas sebelum diserahkan kepada pihak ketiga. Walau menggunakan material kertas yang bisa didaur ulang dan ramah lingkungan, IFG tidak menggunakan hasil kertas daur ulang tersebut dalam operasional sehari-hari. [OJK F.5]

Pengelolaan Energi

IFG memerlukan dua sumber energi utama dalam menjalankan operasi obal usaha, yaitu listrik dan bahan bakar minyak, yang keduanya diperoleh dari pihak ketiga. Kedua jenis energi yang termasuk dalam kategori energi tidak terbarukan tersebut diperoleh Perseroan dari pihak ketiga/pemasok.

Listrik digunakan Perseroan sebagai sumber penerangan dan sumber energi berbagai sarana dan prasarana peralatan elektronik, seperti mesin AC, fotokopi, lift, PC, laptop, televisi, dan lain-lain. IFG menyadari bahwa pasokan listrik saat ini masih didominasi oleh pembangkit listrik yang memanfaatkan batu bara sebagai sumber pembangkit. Saat ini, batu bara adalah bahan bakar fosil yang ketersediannya terbatas dan termasuk dalam sumber energi tak terbarukan. Becermin dari kondisi faktual tersebut, maka Perseroan melakukan langkah-langkah penghematan listrik antara lain dengan mematikan lampu dan piranti elektronik yang tidak digunakan, mengganti lampu biasa dengan lampu hemat energi/LED, memperbanyak panel kaca di perkantoran sehingga memungkinkan untuk memanfaatkan sinar matahari sebagai sumber cahaya pada siang hari, dan sebagainya. Langkah penghematan listrik semakin penting karena saat ini sebagian besar pembangkit listrik masih memanfaatkan batu bara sebagai sumber pembangkit berbahan fosil yang ketersediaannya terbatas. [OJK F.7]

Penghematan listrik yang dilakukan Perseroan merupakan bentuk dukungan terhadap Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penghematan Energi dan Air, serta Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 13 Tahun 2012 tentang Penghematan Pemakaian Tenaga Listrik

Per 31 Desember 2022, konsumsi listrik Kantor Pusat IFG tercatat sebesar 43.881 kWh atau setara dengan 157,92 Gigajoule (GJ), naik 15.902 kWh atau 56,84% dibandingkan tahun 2021, yang mencapai 27.979 kWh atau 100,72 GJ. Kenaikan terjadi karena operasional kantor secara bertahap mulai normal sejalan dengan keberhasilan pemerintah menangani pandemi COVID-19, yang ditandai dengan meningkatnya jam kerja dari kantor (*work from office*) dan berkurangnya kerja dari rumah (*work from home*). Volume penggunaan listrik diperoleh dengan melakukan konversi biaya penggunaan listrik dibagi biaya langganan per kWh. [OJK F.6]

Sementara itu, untuk mengetahui intensitas konsumsi energi (IKE) listrik, pada tahun 2022, IFG belum melakukan audit energi terhadap Kantor Pusat yang saat ini ditempati. Dengan demikian, pada laporan ini, Perseroan belum bisa menyampaikan data IKE berdasarkan audit energi. Sebagai pengganti, Perseroan menghitung IKE secara manual dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{IKE} = \text{Pemakaian energi listrik (KWh)}$$

Luas bangunan

have been stored in electronic documents. For the management of paper waste, the Company hands over to a third party for recycling or reutilization. As for drafts and documents with confidential contents, all will be destroyed first with a shredder before being handed over to a third party. Despite using recyclable and environmentally friendly paper materials, IFG does not use the recycled paper in its daily operations. [OJK F.5]

Energy Management

IFG requires two main sources of energy to run its business operations, namely electricity and fuel oil, both of which are obtained from third parties. Both types of energy that fall under the category of non-renewable energy are obtained by the Company from third parties/suppliers.

Electricity is used by the Company as a source of lighting and energy source for various electronic equipment facilities and infrastructure, such as air conditioning machines, photocopiers, elevators, PCs, laptops, televisions, and others. IFG realizes that the current electricity supply is still dominated by power plants that utilize coal as a source of generation. Currently, coal is a fossil fuel with limited availability and is included in non-renewable energy sources. Reflecting on these factual conditions, the Company has taken steps to save electricity, among others, by turning off lights and electronic devices that are not in use, replacing regular light bulbs with energy-saving light bulbs/LEDs, increasing glass panels in offices so that it is possible to utilize sunlight as a light source during the day, and so on. Electricity saving efforts are increasingly important as most power plants currently utilize coal as a fossil-based power source with limited availability. [OJK F.7]

The Company's electricity savings are a form of support for the Presidential Instruction of the Republic of Indonesia No. 13 of 2011 concerning Energy and Water Saving, as well as the Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia No. 13 of 2012 concerning Electricity Usage Saving

As of December 31, 2022, IFG Head Office electricity consumption was recorded at 43,881 kWh or equivalent to 157,92 Gigajoules (GJ), an increase of 15,902 kWh or 56,84% compared to 2021, which reached 27,979 kWh or 100.72 GJ. The increase office operations are gradually normalizing in line with the government's successful handling of the COVID-19 pandemic, which is characterized by increased work from office hours and less work from home. The volume of electricity use is obtained by converting the cost of electricity use divided by the subscription fee per kWh. [OJK F.6]

Meanwhile, to determine the intensity of electricity energy consumption (IKE), in 2022, IFG has not conducted an energy audit of the Head Office that is currently occupied. Thus, in this report, the Company has not been able to submit IKE data based on the energy audit. As a substitute, the Company calculates IKE manually using the following formula:

$$\text{IKE} = \frac{\text{Electric energy consumption (KWh)}}{\text{Building area}}$$

Per 31 Desember 2022, IFG Group menggunakan area kantor ber-AC dengan luas 3.084 m². Adapun penggunaan listrik tahun 2022 tercatat sebesar 43.881 kWh. Berdasarkan data tersebut, Perseroan menghitung IKE sesuai rumus di atas dan diperoleh hasil sebagai berikut: [OJK F.6]

As of December 31, 2022, IFG Group uses an air-conditioned office area with an area of 3,084 m². The electricity usage in 2022 was recorded at 43,881 kWh. Based on the data, the Company calculated IKE according to the formula above and obtained the following results: [OJK F.6]

Tabel Intensitas Konsumsi Energi Tahun 2020-2022

Table of Energy Consumption Intensity in 2020-2022

Tahun Year	Intensitas Konsumsi Energi (kWh/m ² /tahun) Energy Consumption Intensity (kWh/m ² /year)
2022	14,23
2021	9,07
2020	12,31

Selanjutnya, IKE yang diperoleh dicocokkan dengan tabel IKE sebagaimana dimuat dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 13 Tahun 2012 tentang Penghematan Pemakaian Tenaga Listrik sebagai berikut: [OJK F.6]

Furthermore, the IKE obtained is matched with the IKE table as contained in the Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia No. 13 of 2012 concerning Electricity Usage Saving as follow: [OJK F.6]

Tabel Kriteria Penggunaan Energi di Gedung Perkantoran Berdasarkan Konsumsi Energi Spesifik

Table of Energy Use Criteria in Office Buildings Based on Specific Energy Consumption

Kriteria Criteria	Ber-AC With AC	Tanpa AC Without AC		
	kWh/m ² /bulan kWh/m ² /month	kWh/m ² /tahun*) kWh/m ² /year*)	kWh/m ² /bulan kWh/m ² /month	kWh/m ² /tahun*) kWh/m ² /year*)
Sangat efisien\\ Very Efficient	<8,5	<102	<3,4	<40,8
Efisien Efficient	8,5-14	102-168	3,4-5,6	40,8-67,2
Cukup Efisien Fairly Efficient	14-18,5	168-222	5,6-7,4	67,2-88,8
Boros Wasteful	>18,5	>222	>7,4	88,8

*):konversi per tahun
*):conversion per year

Sesuai dengan tabel di atas, maka IKE Kantor Pusat IFG tahun 2022 termasuk dalam kategori "Cukup Efisien", turun dibanding IKE tahun 2021, yaitu sebesar 9,07 kWh/m²/tahun dan termasuk kategori "Sangat Efisien."

In accordance with the table above, the IKE of IFG Head Office in 2022 falls into the "Quite Efficient" category, decrease compared to IKE in 2021, which is 9.07 kWh/m²/year and falls into the category of "Very Efficient."

Selain listrik, konsumsi energi lain yang dipakai IFG adalah bahan bakar minyak (BBM), terutama untuk kendaraan operasional dan genset sebagai cadangan sumber energi apabila pasokan listrik mengalami gangguan. Jenis bahan bakar yang dipakai adalah bensin (Pertamax/Pertalite) dan solar. Sama seperti listrik, ketersediaan dan pasokan BBM juga terbatas karena masuk kategori energi tak terbarukan sehingga diperlukan efisiensi dalam penggunaannya. Kebijakan yang diambil Perseroan untuk mendukung efisiensi penggunaan BBM, antara lain, mengurangi perjalanan dinas, melakukan pemeliharaan kendaraan operasional secara berkala guna mengoptimalkan kinerja mesin agar makin efisien dalam pemakaian bahan bakar.

In addition to electricity, other energy consumption used by IFG is fuel oil (BBM), especially for operational vehicles and generators as a backup energy source if the electricity supply is interrupted. The types of fuel used are gasoline (Pertamax/Pertalite) and diesel. Just like electricity, the availability and supply of fuel is also limited because it is categorized as non-renewable energy so that efficiency in its use is required. Policies taken by the Company to support the efficient use of fuel, among others, reduce business trips, carry out periodic maintenance of operational vehicles to optimize engine performance so that it is more efficient in fuel consumption.

Pemeliharaan dan perbaikan serta pembatasan waktu penggunaan kendaraan operasional sekaligus bertujuan untuk menekan emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari mesin kendaraan operasional sehingga sesuai dengan baku mutu yang diperbolehkan. Adapun

Maintenance and repair as well as limiting the time of use of operational vehicles also aims to reduce greenhouse gas emissions generated from operational vehicle engines so that they comply with the permitted quality standards. The effort to reduce face-



upaya pengurangan rapat tatap muka mendapatkan momentum dengan adanya pandemi COVID-19 yang memungkinkan rapat secara online dengan memanfaatkan aplikasi teknologi informasi. Kebijakan rapat secara online dipertahankan untuk jenis rapat tertentu meski pada tahun 2022 pandemi berhasil ditangani dengan baik oleh pemerintah Indonesia.

Per 31 Desember 2022, jumlah penggunaan BBM Kantor Pusat IFG tercatat sebesar 24,45 kiloliter atau setara dengan 982,79 GJ, naik 133,75% dibandingkan tahun 2021, yang mencapai 10,46 kiloliter atau 541,14 GJ. Kenaikan terjadi karena adanya peningkatan penggunaan kendaraan operasional sejalan dengan peningkatan jam kerja dari kantor (work from office) sebagai dampak keberhasilan penanganan pandemi COVID-19 oleh pemerintah. Volume penggunaan BBM diperoleh dengan melakukan konversi biaya pembelian BBM dibagi dengan harga jenis BBM yang digunakan.

Tabel Perbandingan Penggunaan Listrik dan BBM Tahun 2020–2022
Comparison Table of Electricity and Fuel Consumption in 2020–2022

Uraian Description	Satuan Unit	2022	2021	2020
Penggunaan listrik Electricity Consumption	kWh	43.881		27.979
	Gigajoule	157,92		100,72
Penggunaan BBM Fuel Consumption	Kiloliter	24,45		13,46
	Gigajoule	982,79		541,14

kWh to Gigajoules Converter: <https://www.convertunits.com/from/kWh/to/gigajoule>
Kiloliter to Gigajoule Converter: <https://www.unitconverters.net/energy/fuel-oil-equivalent-kiloliter-to-gigajoule.htm>

Pengelolaan Air

Air merupakan salah satu kebutuhan vital dalam operasional sehari-hari IFG. Perseroan menggunakan air untuk berbagai keperluan domestik karyawan dan manajemen, seperti kebutuhan air minum, kebersihan, sanitasi, wudu dan sebagainya. Air juga digunakan untuk konsumsi minum sehari-hari bagi karyawan. Sumber air bersih yang digunakan Perseroan dipasok oleh PDAM.

Seperti halnya listrik dan BBM, persediaan air bersih terus mengalami penurunan dari waktu ke waktu. Pasokan bahan baku untuk PDAM semakin terbatas akibat banyak sumber air baku yang tercemar, terutama air sungai. Adapun air tanah ketersedianya kian terbatas seiring dengan semakin masifnya penyedotan untuk berbagai keperluan, termasuk untuk industri, pabrik, perkantoran, perhotelan, dan sebagainya. Apabila pemanfaatan air bersih tidak dikelola dengan baik, maka krisis air bersih niscaya akan terjadi. Berkaitan dengan masalah ini, Bappenas dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KKLS) RPJM 2019 memproyeksikan ketersediaan air akan mencapai kelangkaan absolut pada 2040. Kelangkaan absolut atau ‘absolut scarcity’ tak lain adalah jumlah sumber daya air tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia.

Keterbatasan pasokan air bersih semakin menguatkan IFG untuk menggunakan air secara bijaksana agar sejalan dengan prinsip efisiensi (reduce). Langkah nyata yang diambil antara lain mengeluarkan himbauan kepada segenap insan Perseroan agar hemat/tidak boros dalam menggunakan air. Selain itu, sesuai dengan prinsip pemeliharaan yang baik, maka Perusahaan segera melakukan perbaikan apabila ditemukan kebocoran atau kerusakan instalasi air sehingga pemborosan air bisa segera tertangani. Upaya

to-face meetings has gained momentum with the COVID-19 pandemic which allows online meetings by utilizing information technology applications. The online meeting policy is maintained for certain types of meetings even though in 2022 the pandemic was successfully handled by the Indonesian government.

As of December 31, 2022, the total fuel usage of IFG Head Office was recorded at 24.45 kiloliters or equivalent to 982.79 GJ, an increase 133.75% compared to 2021, which reached 10.46 kiloliters or 541.14 GJ. The increase occurred due to an increase in the use of operational vehicles in line with the increase in work from office hours as a result of the government's successful handling of the COVID-19 pandemic. handling of the COVID-19 pandemic by the government. The volume of fuel use is obtained by converting the cost of purchasing fuel divided by the price of the type of fuel used.

Water Management

Water is one of the vital needs in IFG's daily operations. The Company uses water for various domestic needs of employees and management, such as drinking water, cleaning, sanitation, ablution and so on. Water is also used for daily drinking consumption for employees. The source of clean water used by the Company is supplied by PDAM (Regional Water Utility Company).

Similar with electricity and fuel, the supply of clean water continues to decline over time. The supply of raw materials for PDAM is increasingly limited due to many polluted raw water sources, especially river water. As for groundwater, its availability is increasingly limited along with the increasingly massive siphoning for various purposes, including for industry, factories, offices, hotels, and so on. If the utilization of clean water is not managed properly, a clean water crisis will undoubtedly occur. In relation to this issue, Bappenas in the 2019 RPJM Strategic Environmental Assessment (KKLS) projects that water availability will reach absolute scarcity by 2040. Absolute scarcity means the amount of water resources is not sufficient to meet human needs and desires.

The limited supply of clean water has further strengthened IFG to use water wisely in line with the principle of efficiency (reduce). The concrete steps taken include issuing an appeal to all employees of the Company to be efficient/not wasteful in using water. In addition, in accordance with the principle of good maintenance, the Company immediately makes repairs if leaks or damage to water installations are found so that water wastage can be handled immediately. Water saving efforts are also part of the Company's

penghematan air juga merupakan dukungan Perseroan terhadap Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 13 Tahun 2011 tentang Penghematan Energi dan Air. Namun demikian, dalam laporan ini, IFG belum bisa menyampaikan volume penggunaan air karena termasuk dalam komponen sewa gedung dan Perseroan tidak mendapatkan data khusus terkait penggunaan air dari PDAM. [OJK F.8]

Pengurangan dan Pemanfaatan Sampah/Limbah

Sejalan dengan prinsip operasional kantor yang ramah lingkungan, IFG terus berupaya untuk mengurangi timbulan sampah dan limbah dengan menerapkan prinsip 3R (Reduce, Reuse dan Recycle). Untuk mengurangi timbulan sampah plastik dari kemasan air minum sekali pakai, antara lain, Perseroan menerapkan kebijakan berupa penggunaan tumbler untuk masing-masing personel. Kebijakan lain untuk mendukung pengelolaan sampah domestik perkantoran dilakukan IFG dengan menyediakan tempat sampah dalam jumlah cukup dan membedakannya berdasarkan jenis sampah: organik dan non-organik. Adapun pembuangan sampah domestik ke tempat pembuangan akhir, IFG bekerja sama dengan pihak ketiga dengan mengeluarkan biaya tertentu.

Biaya Lingkungan [OJK F.4]

IFG berkomitmen untuk mewujudkan lingkungan yang lebih baik melalui berbagai kebijakan dan tindakan nyata. Salah satunya, Perseroan mengalokasikan dana untuk biaya lingkungan. Pada tahun 2022, realisasi dana tersebut adalah sebesar Rp149 juta yang dianggarkan melalui Pilar Lingkungan dalam Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara (TJSB BUMN). Penggunaan biaya lingkungan selengkapnya disajikan dalam tabel berikut: [OJK F.4]

Tabel Biaya Lingkungan Tahun 2020–2022

Table of Environment Cost in 2020–2022

Tahun Year	Jumlah Biaya Lingkungan Total Environment Cost	Pemanfaatan/Penggunaan Utilization/Use
2022	Rp149.000.000	<ul style="list-style-type: none"> Program Kolaborasi TJSB Mandalika bersama sejumlah BUMN yang lain berupa penanaman 5.000 pohon serta untuk pengembangan UMKM Penanaman 2.700 bibit mangrove
2021	Rp225.000.000 IDR 225,000,000	<ul style="list-style-type: none"> Program Pompa Water Hydran di Kolbano, Nusa Tenggara Timur Program Pengembangan Kota dan Komunitas yang Berkelaanjutan di Stasi Nisar, Desa Nanga Bere, Kecamatan Lembor Selatan, Nusa Tenggara Timur Water Hydran Pump Program in Kolbano, East Nusa Tenggara Sustainable City and Community Development Program at Stasi Nisar, Nanga Bere Village, South Lembor District, East Nusa Tenggara
2020	Rp80.740.000 IDR 80,740,000	Program Penyediaan Air Bersih dan sanitasi yang layak untuk masyarakat Kampung Tenjo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat Provision of clean water and proper sanitation program for the people of Kampung Tenjo, Bogor Regency, West Java

support for the Presidential Instruction of the Republic of Indonesia No. 13 of 2011 concerning Energy and Water Saving. However, in this report, IFG has not been able to convey the volume of water usage because it is included in the building rental component and the Company does not obtain specific data related to water usage from PDAM. [OJK F.8]

Waste Reduction and Utilization

In line with the principle of environmentally friendly office operations, IFG continues to strive to reduce waste generation and waste by applying the 3R principle (Reduce, Reuse and Recycle). To reduce the generation of plastic waste from disposable drinking water packaging, among others, the Company implements a policy of using tumblers for each personnel. Another policy to support office domestic waste management is conducted by IFG by providing sufficient number of trash cans and distinguishing them based on the type of waste: organic and non-organic. As for the disposal of domestic waste to landfills, IFG cooperates with third parties by incurring certain costs.

Environmental Cost [OJK F.4]

IFG is committed to realizing a better environment through various policies and concrete actions. One of them is that the Company allocates funds for environmental costs. In 2022, the realization of the fund was IDR 149 million budgeted through the Environmental Pillar in the Social and Environmental Responsibility Program of State-Owned Enterprises (TJSB BUMN). The full use of environmental costs is presented in the following table: [OJK F.4]



KINERJA SOSIAL KEBERLANJUTAN

SUSTAINABLE SOCIAL PERFORMANCE

Keberlangungan IFG dalam menjalankan usaha dipengaruhi oleh sejumlah aspek. Salah satunya adalah aspek sosial, yang memiliki arti Perseroan bertanggung jawab terhadap dampak sosial yang diakibatkan dari operasional usaha, baik secara langsung maupun tidak langsung, baik dampak positif maupun negatif –bila ada. Inti dari aspek sosial adalah respect for people atau menghargai orang, tak hanya orang-orang yang berada di dalam perusahaan, tetapi juga mereka yang berada di luar perusahaan. Dalam konteks perusahaan, aspek sosial bisa diartikan sebagai penghargaan terhadap pemangku kepentingan internal dan eksternal.

Pemangku kepentingan internal Perseroan antara lain memegang saham, manajemen dan karyawan lintas divisi dan beragam level jabatan. Sedangkan pemangku kepentingan eksternal IFG di antaranya konsumen/pelanggan, pemasok/mitra, regulator, kreditor, pemerintah, penerima manfaat Program Tanggung Jawab dan Lingkungan (TJSL), serta masyarakat di sekitar lokasi operasional perusahaan.

Pemenuhan tanggung jawab aspek sosial dilakukan IFG berdasarkan hasil pemetaan yang dilakukan secara cermat, termasuk memetakan secara spesifik kepentingan dari masing-masing pemangku kepentingan. Berdasar pemetaan inilah, Perseroan bisa menentukan secara tepat kebijakan dan program yang diselenggarakan agar sesuai dengan kebutuhan para pemangku kepentingan.

IFG meyakini pemenuhan tanggung jawab aspek sosial merupakan sarana terbaik untuk mewujudkan hubungan yang harmonis dengan segenap pemangku kepentingan, yang pada gilirannya akan mengukuhkan keberadaan IFG. Lebih dari itu, terciptanya hubungan yang harmonis sekaligus merupakan faktor penting bagi keberlanjutan usaha Perseroan.

Landasan Kebijakan

Pemenuhan tanggung jawab terhadap aspek sosial perusahaan dilakukan IFG dengan memperhatikan berbagai regulasi sesuai dengan kepentingan masing-masing pemangku kepentingan. Regulasi tersebut antara lain:

1. Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Undang-Undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
3. Undang-Undang No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
4. Undang-Undang No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan.
5. Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen.
6. Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
7. Undang-Undang No. 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN),
8. Undang-Undang No. 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
9. Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
10. Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

IFG's sustainability in managing its business is influenced by a number of aspects. One of them is the social aspect, which means that the Company is responsible for the social impacts caused by business operations, both directly and indirectly, both positive and negative impacts - if any. The essence of the social aspect is respect for people, not only those within the company, but also those outside the company. In the context of a company, social aspects can be interpreted as respect for internal and external stakeholders.

The Company's internal stakeholders include shareholders, management and employees across divisions and various levels of positions. Meanwhile, IFG's external stakeholders include consumers/customers, suppliers/partners, regulators, creditors, government, beneficiaries of the Social and Environmental Responsibility Program (TJSL), and communities around the company's operational locations.

IFG's fulfillment of social aspect responsibilities is based on the results of careful mapping, including specific mapping of the interests of each stakeholder. Based on this mapping, the Company can precisely determine the policies and programs that are held to suit the needs of the stakeholders.

IFG believes that the fulfillment of social aspect responsibilities is the best means to create a harmonious relationship with all stakeholders, which in turn will strengthen IFG's existence. Moreover, the creation of harmonious relationship is also an important factor for the sustainability of the Company's business

Policy Foundation

IFG fulfills its corporate social responsibility by taking into account various regulations in accordance with the interests of each stakeholder. These regulations include:

1. Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Company.
2. Law No. 25 of 2007 concerning State Capital Investment.
3. Law No. 1 of 1970 concerning Work Safety.
4. Law No. 23 of 1992 concerning Healthcare.
5. Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection.
6. Law No. 13 of 2003 concerning Manpower.
7. Law No. 19 of 2003 concerning State Owned Enterprises (SOEs)
8. Law No. 24 of 2011 on the Social Security Organizing Agency.
9. Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation
10. Government Regulation No. 47 of 2012 concerning Social and Environmental Responsibility of Limited Liability Companies.

11. Peraturan Pemerintah No. 50 tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
12. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 05/Men/1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).
13. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. PER-05/MBU/04/2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara
14. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor: 1/POJK.07/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan
15. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 2/SEOJK.07/2014 tanggal 14 Februari 2014 tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen pada pelaku Jasa Keuangan.
11. Government Regulation No. 50 of 2012 concerning the Implementation of Occupational Safety and Health Management System.
12. Regulation of the Minister of Manpower No. 05/MEN/1996 concerning the Implementation of Occupational Safety and Health Management System(OHSMS).
13. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia No. PER-05/MBU/04/2021 concerning Social and Environmental Responsibility Program of State-Owned Enterprises
14. Financial Services Authority (POJK) No: 1/POJK.07/2013 dated July 26, 2013 concerning Consumer Protection in the Financial Services Sector
15. Circular Letter of the Financial Services Authority (SEOJK) Number 2/SEOJK.07/2014 dated February 14, 2014 concerning Services and Settlement of Consumer Complaints in Financial Services actors.

Merujuk berbagai regulasi di atas, selanjutnya IFG menyusun berbagai kebijakan internal sebagai panduan operasional keseharian di antaranya berkaitan dengan pengelolaan kepegawaian dengan berbagai aspeknya, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), tanggung jawab produk, serta Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).

Referring to the various regulations above, IFG further develops various internal policies as daily operational guidelines, including those related to personnel management with its various aspects, Occupational Safety and Health (OHS), product responsibility, and Social and Environmental Responsibility (TJSL)

Pengelolaan Kepegawaian

Karyawan merupakan salah satu pemangku kepentingan utama bagi IFG. Mereka adalah penggerak roda perusahaan, sekaligus menjadi penentu kemajuan. Dengan posisi yang sangat strategis seperti itu, maka Perseroan membutuhkan karyawan yang berdedikasi tinggi, serta memiliki kapasitas dan kompetensi di bidangnya. Lebih dari itu, yang tak kalah penting, karyawan tersebut harus memiliki loyalitas dan visi yang sama dengan Perseroan.

Di IFG, pengelolaan karyawan dilakukan oleh Unit Human Capital. Dalam menjalankan tugas, unit ini dibagi menjadi dua kelompok, yaitu Compensation & Benefit dan Organization Development. Bagian Compensation & Benefit menangani kegiatan yang berhubungan dengan remunerasi, benefit, Manpower Planning dan hubungan industrial, sedangkan bagian Organization Development menangani kegiatan rekrutmen, pelatihan dan pengembangan, performance management, talent management, people data base dan manajemen organisasi.

Tugas dan fungsi Unit Human Capital selengkapnya adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pembayaran remunerasi karyawan sesuai dengan kebijakan perusahaan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
2. Membuat perencanaan SDM sesuai dengan kebutuhan perusahaan;
3. Melakukan seleksi, rekrutmen, rotasi, mutasi dan pelatihan karyawan;
4. Mengkoordinasikan kegiatan penilaian kinerja karyawan;
5. Mengukur tingkat keterikatan karyawan secara berkala;
6. Membuat laporan profil dan pengelolaan SDM perusahaan secara berkala;
7. Melakukan pengelolaan database karyawan, sistem absensi dan sistem pengelolaan SDM secara terintegrasi;

Personnel Management

Employees are one of IFG's key stakeholders. They are the drivers of the company's wheels, as well as the determinants of progress. With such a strategic position, the Company needs employees who are highly dedicated, and have the capacity and competence in their fields. More than that, equally important, the employees must have the same loyalty and vision as the Company.

At IFG, employee management is conducted by the Human Capital Unit. In carrying out its duties, this unit is divided into two groups, namely Compensation & Benefit and Organization Development. The Compensation & Benefit section handles activities related to remuneration, benefits, manpower planning and industrial relations, while the Organization Development section handles recruitment, training and development, performance management, talent management, people data base and organizational management.

The duties and functions of the Human Capital Unit are as follows:

1. Make payments of employee remuneration in accordance with company policy and applicable laws and regulations;
2. Make HR planning in accordance with company needs;
3. Conduct employee selection, recruitment, rotation, transfer and training;
4. Coordinate employee performance appraisal activities;
5. Measure the level of employee engagement on a regular basis;
6. Make regular reports on the company's HR profile and management;
7. Manage employee database, attendance system, and HR management system in an integrated manner;

- 8. Mengelola pelaksanaan talent management di induk dan anak perusahaan
- 8. Manage the implementation of talent management in the parent and subsidiary companies

Struktur Organisasi Unit Sumber Daya Manusia Tahun 2022

Organizational Structure of Human Capital Unit in 2022

Pengelolaan kepegawaian di IFG merujuk pada berbagai regulasi ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia, khususnya Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang diubah melalui UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan melalui Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Selain itu, pengelolaan kepegawaian di Perseroan juga merujuk pada praktik-praktik ketenagakerjaan yang umum dilakukan di Indonesia, mulai perencanaan, seleksi dan perekrutan, manajemen karier, remunerasi, hingga jaminan sosial dan pensiun. Praktik dan pengelolaan seperti itu dilakukan sebagai komitmen Perseroan untuk menegakkan hak dan kewajiban di bidang ketenagakerjaan sehingga terwujud hubungan industrial yang harmonis.

Kesetaraan Kesempatan Bekerja [OJK F.18]

IFG menerapkan prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi di tempat kerja. Untuk itu, setiap karyawan mendapatkan perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dalam pekerjaan. Bagi Perseroan, perbedaan jenis kelamin, golongan, suku, agama, ras, pandangan politik dan sebagainya merupakan keniscayaan dan menjadikan kehidupan sosial menjadi lebih berwarna. Sularas dengan prinsip itu, maka IFG berkomitmen untuk memperlakukan seluruh karyawan secara setara dalam kesempatan bekerja, mendapatkan penilaian kinerja, termasuk untuk mendapatkan kenaikan jenjang karier, pengembangan kompetensi, remunerasi dan lain-lain. Berdasarkan komitmen itu, Perseroan memberikan kesempatan yang sama untuk bekerja dan mengisi pos-pos, posisi atau jabatan sesuai dengan kapasitas dan kompetensi karyawan. Kesamaan kesempatan dalam bekerja juga dipegang oleh IFG saat membuka rekrutmen karyawan.

Penerapan kesetaraan kesempatan dalam bekerja diterapkan di IFG sebagai bentuk ketataan Perseroan terhadap Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, serta Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Praktik serupa itu juga selaras dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention No. 111 Concerning Discrimination in Respect of Employment and Occupation (Konvensi ILO Mengenai Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan), serta Panduan Kesetaraan dan Non-Diskriminasi di Tempat Kerja di Indonesia (Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI).

Rekrutmen dan Turnover

Rekrutmen merupakan langkah paling awal yang diambil IFG untuk mendapatkan kandidat terbaik sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan perusahaan. Rekrutmen dilakukan secara terbuka

IFG's personnel management refers to various manpower regulations applicable in Indonesia, particularly Law No. 13 of 2003 concerning Manpower, which was amended through Law No. 11 of 2020 on Job Creation, and through Law (UU) Number 6 of 2023 on the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law No. 2 of 2022 on Job Creation to Become Law. In addition, employment management in the Company also refers to labor practices commonly practiced in Indonesia, starting from planning, selection and recruitment, career management, remuneration, to social security and retirement. Such practices and management are carried out as the Company's commitment to uphold the rights and obligations in the field of employment so as to realize harmonious industrial relations.

Equal Employment Opportunity [OJK F.18]

IFG applies the principles of equality and non-discrimination in the workplace. Thus, every employee receives equal treatment without discrimination in employment. For the Company, differences in gender, class, ethnicity, religion, race, political views and so on are inevitable and make social life more colorful. In line with this principle, IFG is committed to treat all employees equally in employment opportunities, performance appraisal, including career advancement, competency development, remuneration and others. Based on this commitment, the Company provides equal opportunities to work and fill posts, positions or titles in accordance with the capacity and competence of employees. Equal opportunity to work is also held by IFG when opening employee recruitment.

The implementation of equal opportunity in employment is applied in IFG as a form of the Company's compliance with Law No. 13 of 2003 concerning Manpower, Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation, as well as Law (UU) Number 6 of 2023 on the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law No. 2 of 2022 on Job Creation to Become Law. Such practices are also in line with Law No. 21/1999 concerning the Ratification of ILO Convention no. 111 Concerning Discrimination in Respect of Employment and Occupation, as well as the Guidelines on Equality and Non-Discrimination in the Workplace in Indonesia (Ministry of Manpower and Transmigration of Indonesia).

Recruitment and Turnover

Recruitment is the earliest step IFG takes to get the best candidates according to the needs and development of the company. Recruitment is conducted openly so that every qualified citizen can

sehingga setiap warga negara yang memenuhi kualifikasi bisa turut mendaftarkan diri. Dalam proses seleksi, IFG akan memilih kandidat sesuai dengan kapasitas dan kompetensi yang dimiliki agar selaras dengan kebutuhan perusahaan, dan tidak menenggang praktik-praktik jalan belakang atau kandidat titipan.

Sejalan dengan spirit yang dipegang IFG, sekaligus pemenuhan Tanjung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), Perseroan berupaya untuk merekrut tenaga kerja lokal, yakni penduduk yang berada di sekitar operasional perusahaan, sesuai dengan kualifikasi dan kebutuhan perusahaan. Dengan demikian, masyarakat tetap dapat merasakan manfaat keberadaan IFG.

Sesuai dengan kebutuhan perusahaan, selama tahun 2022, IFG merekrut karyawan baru sebanyak 242 orang, naik dibanding tahun sebelumnya dengan jumlah rekrutmen sebanyak 143 orang. Kenaikan terjadi untuk menyesuaikan dengan kebutuhan sumber daya manusia dalam pemenuhan kapasitas dan kapabilitas organisasi.

Selain bertambah karena program rekrutmen, jumlah karyawan IFG berkurang karena adanya karyawan yang berhenti bekerja dengan berbagai alasan, seperti pensiun, mengundurkan diri, habis masa kontrak, meninggal dan sebagainya. Menurut data dari Unit Human Capital, selama tahun pelaporan, karyawan yang berhenti bekerja dan meninggalkan Perseroan tercatat sebanyak 11 orang, turun dibanding tahun sebelumnya yaitu sebanyak 32 orang.

Berdasarkan data karyawan yang masuk serta berhenti atau meninggalkan IFG dengan berbagai alasan, maka tingkat turnover atau pergantian karyawan selama tahun pelaporan bisa dihitung. Dalam laporan ini, turnover diartikan sebagai kecenderungan atau intensitas individu untuk meninggalkan organisasi (perusahaan) dengan berbagai alasan dan di antaranya keinginan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Dengan demikian, karyawan yang berhenti atau meninggalkan Perseroan karena pensiun normal dan meninggal tidak menjadi faktor tingkat turnover. Adapun rumus yang dipakai untuk menghitung tingkat turnover adalah

$$\text{TO Tahunan} = \frac{\text{Jumlah pegawai yang berhenti kerja}}{\text{Jumlah pegawai awal tahun} + \text{jumlah pegawai akhir tahun}/2} \times 100$$

Number of employees who quit
(Number of employees at the beginning of the year + number of employees at the end of the year)/2

Dengan definisi dan rumus tersebut, maka tingkat turnover untuk tiga tahun terakhir adalah sebagai berikut:

apply. In the selection process, IFG will select candidates according to their capacity and competence to align with the company's needs, and does not tolerate backdoor practices or nepotism.

In line with the spirit of IFG, as well as the fulfillment of the Social and Environmental Responsibility (TJSL), the Company strives to recruit local workers, namely residents living around the company's operations, according to the qualifications and needs of the company. Thus, the community can still benefit from IFG's existence.

In accordance with the company's needs, during 2022, IFG recruited 242 new employees, an increase compared to the previous year with a total recruitment of 143 people. The increase occurred to adjust to the needs of human resources in fulfilling the capacity and capability of the organization.

In addition to the increase due to the recruitment program, the number of IFG employees decreased due to employees who stopped working for various reasons, such as retirement, resignation, contract expiration, death etc. According to data from the Human Capital Unit, during the reporting year, employees who stopped working and left the Company were recorded at 11 people, decreased compared to the previous year of 32 people.

Referring to the data of employees who enter and leave or resign from IFG for various reasons, the employee turnover rate during the reporting year can be calculated. In this report, turnover is defined as an individual's tendency or intensity to leave an organization (company) for various reasons and one of them is the desire to get a better job. Thus, employees who quit or leave the Company due to normal retirement and passed away are not a factor in the turnover rate. The formula used to calculate the turnover rate is as the following

With this definition and formula, the turnover rate for the last three years is as follows:

Jumlah dan Penyebab Karyawan Keluar dari Perusahaan Tahun 2020-2022

Number and Causes of Employees Leaving the Company in 2020-2022

Penyebab Causes	2022	2020	
		2021	2020
Pensiun Retired	1	1	4
Pensiun Dini Early Retirement	10	0	0
Meninggal dunia Passed Away	0	0	0
Mengundurkan diri atas permintaan sendiri Resigned at their own request	0	27	4

Jumlah dan Penyebab Karyawan Keluar dari Perusahaan Tahun 2020-2022

Number and Causes of Employees Leaving the Company in 2020-2022

Penyebab Causes	2022	2021	2020
Diberhentikan Laid off	0	4	0
Jumlah karyawan masuk Number of Employees Entering the Company	63	140	29
Jumlah Karyawan yang keluar Number of Employees Quitting the Company	11	32	7
Jumlah karyawan di awal tahun Total Employees in the beginning of the year	179	77	48
Jumlah karyawan di akhir tahun Total Employees at the end of the year	242	179	77
Tingkat turnover Turnover Rate	4,75%	12,5%	6,61%

Berdasarkan tabel di atas, tingkat turnover tahun 2022 adalah 4,75%, turun dibandingkan tahun 2021 yang mencapai 12,5%. Hal ini menunjukkan bahwa karyawan mendapatkan kepuasan saat bekerja di IFG.

Pendidikan dan Pelatihan [OJK F.22]

IFG berkomitmen untuk meningkatkan kualitas, kapasitas dan kapabilitas karyawan melalui program pengembangan kompetensi yang diselenggarakan melalui berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan diselenggarakan dengan memegang prinsip kesetaraan, yaitu memberikan kesempatan yang sama bagi setiap karyawan dan manajemen di semua tingkatan.

Sesuai dengan kebijakan Perseroan tentang pengembangan kompetensi, selama tahun 2022, IFG telah melakukan 83 program pendidikan dan pelatihan yang diikuti oleh 1.084 karyawan. Data tersebut menunjukkan bahwa karyawan berkesempatan mengikuti program berbagai pengembangan kompetensi yang diselenggarakan Perusahaan. Jenis pendidikan dan pelatihan di IFG terdiri dari pelatihan softskill dan teknikal.

Realisasi Pelatihan Karyawan berdasarkan Jam Pelatihan Tahun 2020-2022

Employee Training Realization based on Training Hours in 2020-2022

Uraian Description	2022	2021	2020
Jumlah Jam Pelatihan Soft Skill Total Hours of Soft Skill Training	144	320	368
Jumlah Jam Pelatihan Teknikal Total Hours of Technical Training	1.845	696	912
Jumlah Jam Pelatihan Total Hours of Training	1.989	1.016	1.280

Berdasarkan rekapitulasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tersebut, maka total jam pelatihan pada tahun 2022 adalah 1.989 jam, naik dibandingkan tahun 2021 yang mencapai 1.016 jam.

Komitmen IFG untuk memberikan pendidikan/pelatihan tidak hanya diberikan kepada karyawan yang masih aktif, tetapi juga diberikan kepada karyawan yang hendak memasuki usia pensiun. Pelatihan diberikan agar karyawan tersebut memiliki ketrampilan tertentu sesuai dengan minatnya sehingga bisa membuka usaha secara mandiri. Dengan demikian, kehidupan pasca-pensiun tetap produktif

Based on the table above, the turnover rate in 2022 is 4.75%, decreased compared to 2021 which reached 12.5%. This shows that employees get satisfaction while working at IFG.

Education and Training [FSA F.22]

IFG is committed to improving the quality, capacity and capability of its employees through competency development programs organized through various education and training activities. Education and training is organized by holding the principle of equality, which provides equal opportunities for every employee and management at all levels.

In accordance with the Company's policy on competency development, during 2022, IFG has conducted 83 education and training programs attended by 1.084 employees. The data shows that employees have the opportunity to participate in various competency development programs organized by the Company. The types of education and training at IFG consist of soft skill and technical training.

Based on the recapitulation of the implementation of education and training, the total training hours in 2022 are 1,989 hours, an increase compared to 2021 which reached 1,016 hours.

IFG's commitment to provide education/training is not only given to active employees, but also to employees who are about to retire. Training is provided so that the employee has certain skills in accordance with his/her interests so that he/she can open a business independently. Thus, post-retirement life remains productive and has income to meet their needs.

dan memiliki penghasilan guna mencukupi kebutuhan hidupnya.

Pada tahun 2022, IFG menganggarkan biaya pelatihan karyawan sebesar Rp 5.928.000.000 menurun 7% dibanding tahun 2021 yang sebesar Rp 6.349.428.595. Adapun realisasi biaya pelatihan karyawan di tahun 2022 adalah sebesar Rp 5.255.649.824, naik 126% dibanding tahun 2021, yang mencapai Rp 2.322.405.362

In 2022, IFG budgeted employee training costs of IDR 5,928,000,000, a 7% decrease compared to 2021 which amounted to IDR 6,349,428,595. The realization of employee training costs in 2022 was IDR 5,255,649,824, an increase of 126% compared to 2021, which reached IDR 2,322,405,362.

Tabel Biaya Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2020–2022
Table of Education and Training Costs in 2020–2022

Deskripsi Description	2022 (Rp) (IDR)	2021 (Rp) (IDR)	2020 (Rp) (IDR)	Peningkatan (Penurunan) 2021 – 2020 Increase (Decrease) 2021–2020		
	Selisih (Rp) Difference (IDR)	Percentase (%) Percentage (%)				
Pendidikan dan Pelatihan Education and Training	5.255.649.824	2.322.405.362	1.270.000.000	1.052.405.362	82,87%	⬇️

Penilaian Karyawan dan Pengembangan Karier

Sebagai bentuk imbal balik dan penghargaan atas upaya karyawan menjalankan tugas dan kewajibannya, IFG melakukan penilaian kepada karyawan, tanpa membedakan jenis kelamin. Adapun faktor yang dinilai adalah pencapaian kinerja dan Akhlak. Penilaian dilakukan kepada semua karyawan (100%) setiap tahun, atau sesuai kebutuhan perusahaan. Selain penilaian rutin tahunan untuk menilai kinerja, sekaligus menentukan kenaikan gaji dan tunjangan tahun berikutnya, penilaian juga dilakukan pada waktu-waktu tertentu, yaitu saat IFG membutuhkan karyawan dengan kompetensi tertentu. Pada kesempatan tersebut, Perseroan akan melihat kinerja dan performa karyawan yang memenuhi persyaratan guna menentukan jenjang karier mereka melalui promosi, rotasi atau mutasi.

Berdasarkan penilaian yang dilakukan selama tahun 2022, IFG telah melaksanakan program pengembangan karier dan promosi terhadap 8 (delapan) orang karyawan atau mencapai 3,3% dari total jumlah karyawan Perusahaan. Selain promosi, Perseroan juga melakukan rotasi terhadap 12 (dua belas) karyawan, dan tidak tercatat adanya karyawan yang demosi.

Upah Minimum Regional

Remunerasi atau imbalan kerja di IFG senantiasa merujuk pada regulasi yang berlaku, di antaranya Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang diubah melalui Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Berkaitan dengan remunerasi, Perusahaan memberikan komponen penghasilan yang terdiri dari gaji pokok, tunjangan-tunjangan, dan bonus/incentif kinerja sesuai dengan tingkatan yang dimiliki sebagaimana tertuang dalam SK Direksi Nomor:034/SK/DIR/CORP/BPUI/IX/2020 tentang Kebijakan Penghasilan Karyawan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia.

Adapun tunjangan yang diberikan kepada karyawan IFG adalah sebagai berikut:

1. Tunjangan Hari Raya
2. Tunjangan Cuti Tahunan
3. Tunjangan Jabatan
4. Tunjangan Operasional

Employee Assessment and Career Development

As a form of feedback and appreciation for employees' efforts to carry out their duties and obligations, IFG conducts employee assessment, regardless of gender. The factors assessed are performance achievement and morals. Assessments are conducted for all employees (100%) annually, or as required by the company. In addition to the annual routine assessment to assess performance, as well as determine the next year's salary increase and benefits, appraisals are also executed at certain times, namely when IFG needs employees with certain competencies. On these occasions, the Company will look at the performance of employees who meet the requirements to determine their career path through promotion, rotation or transfer.

Based on the assessment conducted during 2022, IFG has implemented career development and promotion programs for 8 (eight) employees or reached 3.3% of the total number of employees of the Company. In addition to promotions, the Company also rotated 12 (twelve) employees, and no employee demotions were recorded.

Regional Minimum Wage

Remuneration or employee benefits at IFG always refer to the applicable regulations, including Law Number 13 of 2003 concerning Manpower, which was amended by Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation. With regard to remuneration, the Company provides an income component consisting of basic salary, benefits, and performance bonuses/incentives in accordance with the level one has as stated in the Decree of the Board of Directors Number: 034/SK/DIR/CORP/BPUI/IX/2020 concerning Policy Company Employee Income of (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia.

The benefits provided to IFG employees are as follows:

1. Religious Holiday Allowance
2. Annual Leave Allowance
3. Position Allowance
4. Operational Allowance

5. Tunjangan Induk Perusahaan
6. Tunjangan Keahlian
7. Tunjangan Makan
8. Tunjangan Cuti Besar

Bagi karyawan tetap golongan terendah, sesuai regulasi yang berlaku, Perseroan memberikan upah minimum dengan tetap memperhatikan pemenuhan kebutuhan hidup layak mereka. Besaran upah minimum diberikan dengan menyesuaikan harga kebutuhan pokok, tingkat inflasi, standar kelayakan hidup, dan variabel lainnya.

Selanjutnya, merujuk pada Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 226 Tahun 2000 tentang Perubahan Pasal 1, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 20, dan Pasal 21 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum, pemberian upah di IFG juga berpedoman pada kebijakan tentang Upah Minimum Provinsi (yang sebelumnya disebut dengan UMR Tingkat I) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (yang sebelumnya disebut dengan UMR Tingkat II). Adapun untuk upah minimum tahun 2022, Perseroan telah memenuhi Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor B-M/383/HI.01.00/XI/2021 tentang Penyampaian Data Perekonomian dan Ketenagakerjaan dalam Penetapan Upah Minimum Tahun 2022.

Merujuk berbagai regulasi di atas, sekaligus sejalan dengan komitmen Perseroan untuk memberikan kesejahteraan kepada karyawan, maka IFG memberikan remunerasi kepada karyawan tetap level terendah sesuai dengan upah yang berlaku di Provinsi DKI Jakarta tahun 2022.

Tenaga Kerja Anak dan Kerja Paksa [OJK F.19]

Pekerja anak dan kerja paksa merupakan praktik ketenagakerjaan yang tidak terpuji sehingga harus dihapuskan. Sebagai bentuk dukungan atas penghapusan pekerja anak dan kerja paksa, IFG menetapkan usia minimal karyawan, baik tetap maupun kontrak, telah berusia di atas 18 tahun atau masuk kategori dewasa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hal tersebut sesuai dengan kebijakan rekrutmen Perseroan, yaitu untuk pendidikan kandidat minimal S1 sedangkan usia minimal 18 tahun.

Sementara itu, untuk jam kerja karyawan, IFG menetapkan bahwa jam kerja karyawan adalah 40 jam per minggu. Kebijakan tersebut selaras dengan ketentuan dalam pasal 77, Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu. Dengan ketentuan seperti itu, maka setiap karyawan memiliki waktu istirahat yang cukup. Sementara itu, untuk karyawan yang menjalani lembur karena jenis pekerjaannya, yaitu melebihi 40 (empat puluh) jam dalam 1 (satu) minggu, mereka akan mendapatkan kompensasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga terhindar dari kerja paksa.

Pemberlakuan usia minimal karyawan merupakan bentuk kepatuhan IFG terhadap sejumlah undang-undang, antara lain, Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1999 tentang

5. Parent Company Allowance
6. Expertise Allowance
7. Meal Allowance
8. Major Leave Allowance

For permanent employees of the lowest class, according to applicable regulations, the Company provides a minimum wage while taking into account the fulfillment of their decent living needs. The amount of the minimum wage is given by adjusting the prices of basic necessities, inflation rates, eligibility standards, and other variables.

Furthermore, referring to the Decree of the Minister of Manpower and Transmigration Number 226 of 2000 concerning Amendments to Article 1, Article 3, Article 4, Article 8, Article 11, Article 20, and Article 21 Regulation of the Minister of Manpower Number PER-01/MEN/1999 regarding the Minimum Wage, the provision of wages at IFG is also guided by the policy on the Provincial Minimum Wage (previously referred to as Level I UMR) and Regency/City Minimum Wage (previously referred to as Level II UMR). As for the 2022 minimum wage, the Company has complied with the Circular Letter of the Minister of Manpower of the Republic of Indonesia Number B-M/383/HI.01.00/XI/2021 concerning Submission of Economic and Employment Data in Determining the Minimum Wage for 2022.

Referring to the various regulations above, as well as in line with the Company's commitment to provide welfare to employees, IFG provides remuneration to the lowest level permanent employee in accordance with the prevailing wage in DKI Jakarta Province in 2022.

Child Labor and Forced Labor [OJK F.19]

Child labor and forced labor are unacceptable labor practices that must be eliminated. As a form of support for the elimination of child labor and forced labor, IFG sets the minimum age of employees, both permanent and contract, to be over 18 years old or in the adult category as stipulated in Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection. This is in accordance with the Company's recruitment policy, which is for candidate education of at least S1 (Bachelor's Degree) while the minimum age is 18 years old.

Meanwhile, for employee working hours, IFG stipulates that employee working hours are 40 hours per week. The policy is in line with the provisions in article 77, Law No.13 of 2003 concerning Manpower, which is 8 (eight) hours 1 (one) day and 40 (forty) hours 1 (one) week for 5 (five) working days in 1 (one) week. With such provisions, each employee has sufficient rest time. Meanwhile, for employees who undergo overtime due to the type of work, which exceeds 40 (forty) hours in 1 (one) week, they will receive compensation in accordance with applicable provisions so as to avoid forced labor.

The application of the minimum age of employees is a form of IFG's compliance with a number of laws, among others, Law No.13 of 2003 concerning Manpower, Law of the Republic of Indonesia Number 20 of 1999 concerning the Ratification of ILO Convention

Pengesahan ILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment (Konvensi ILO Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja), dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Pengesahan ILO Convention No. 182 Concerning The Prohibition And Immediate Action for The Elimination of The Worst Forms of Child Labour (Konvensi ILO No. 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak).

Sementara itu, penerapan jam kerja dengan batasan waktu yang jelas sejalan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention No. 105 Concerning The Abolition of Forced Labour (Konvensi ILO Mengenai Penghapusan Kerja Paksa), Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Komitmen IFG untuk tidak mempekerjakan anak serta menetapkan jam kerja yang jelas sehingga tidak terjadi terdapat insiden kerja paksa membawa hasil dengan tidak adanya sanksi atau denda dari regulator terkait kedua isu tersebut. Selain itu, selama tahun pelaporan, Perseroan juga tidak mencatat adanya pengaduan dari masyarakat terkait pekerja anak dan kerja paksa. [OJK F.19]

Lingkungan Kerja yang Layak dan Aman [OJK F.21]

IFG meyakini lingkungan kerja yang layak dan aman sesuai kaidah Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) berbanding lurus dengan tingkat kinerja karyawan. Sebab itu, Perseroan berupaya semaksimal mungkin untuk mewujudkan lingkungan kerja terbaik.

Dalam laporan ini, lingkungan kerja adalah segala sesuatu yang ada di sekitar karyawan yang dapat memengaruhi mereka dalam menjalankan tugas-tugas yang diberikan Perusahaan. Adapun upaya yang dilakukan Perseroan untuk mewujudkan lingkungan kerja terbaik antara lain dengan mengimplementasikan regulasi yang berlaku, baik yang berkaitan dengan keselamatan kerja, kesehatan, maupun penyakit akibat kerja. Dengan berbagai upaya tersebut, IFG berharap bisa mewujudkan tujuan penerapan K3, yaitu tidak ada kecelakaan kerja (zero accident) dan tidak terdapat penyakit akibat kerja.

Bercermin pada pentingnya penciptaan lingkungan kerja yang layak dan aman, maka IFG menempatkan topik atau isu tersebut sebagai prioritas. Bagi Perseroan, insiden kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja dalam bentuk maupun tingkatan sekecil apapun harus dicegah. Selain berpotensi mengurangi produktivitas kerja, insiden tersebut bisa menimbulkan kerugian secara moral dan material, bahkan dalam tingkat tertinggi bisa berujung pada fatalitas/kematian.

Landasan Kebijakan

Dalam upaya menciptakan lingkungan kerja yang layak dan aman sesuai dengan prinsip K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja), IFG mengacu pada sejumlah regulasi yang mengatur tentang kesehatan dan keselamatan kerja, antara lain:

- Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
- Undang-undang nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

No. 138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment, and Law of the Republic of Indonesia No. 1 of 2000 Concerning the Ratification of ILO Convention No. 182 Concerning The Prohibition And Immediate Action for The Elimination of The Worst Forms of Child Labour (ILO Convention No. 182 Concerning the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labor).

Meanwhile, the implementation of working hours with clear time limits is in line with the Law of the Republic of Indonesia Number 19 of 1999 concerning the Ratification of ILO Convention No. 105 Concerning the Abolition of Forced Labor, Law No.13 of 2003 on Manpower, and Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation.

IFG's commitment to not employing children and setting clear working hours so that there are no incidents of forced labor has resulted in no sanctions or fines from regulators related to these two issues. In addition, during the reporting year, the Company also did not record any complaints from the public regarding child labor and forced labor. [OJK F.19]

Proper and Safe Working Environment [OJK F.21]

working environment in accordance with the rules of Occupational Health and Safety (OHS) is directly proportional to the level of employee performance. Therefore, the Company makes every effort to realize the best working environment.

In this report, the work environment is everything around employees that can affect them in carrying out the tasks given by the Company. The efforts made by the Company to realize the best working environment include implementing applicable regulations, both those relating to occupational safety, health, and occupational diseases. With these various efforts, IFG hopes to realize the goal of implementing OHS, namely zero accidents and zero occupational diseases.

Reflecting on the importance of creating a decent and safe working environment, IFG places the topic or issue as a priority. For the Company, incidents of work accidents or occupational diseases in the slightest form or level must be prevented. In addition to potentially reducing work productivity, such incidents can cause moral and material losses, and at the highest level can even lead to fatality.

Policy Foundation

In an effort to create a decent and safe working environment in accordance with the principles of Occupational Health and Safety (OHS), IFG refers to a number of regulations governing occupational health and safety, among others:

- Law No. 1 of 1970 concerning Work Safety
- Law No 23 of 1992 concerning Healthcare.
- Law No 36 of 2009 concerning Healthcare.
- Law No. 13 of 2003 concerning Manpower

- Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1993 tentang Penyakit yang Timbul Akibat Hubungan Kerja.
- Peraturan Pemerintah No.50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen K3.
- Permenaker RI Nomor PER.04/MEN/1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Tata Cara Penunjukan Ahli Keselamatan Kerja.
- Permenaker RI Nomor PER.02/MEN/1992 tentang Tata Cara Penunjukan Kewajiban dan Wewenang Ahli K3.

Berdasarkan regulasi di atas, selanjutnya Perseroan merumuskan berbagai regulasi internal di bidang K3 dan diimplementasikan di sepanjang tahun secara konsisten dan persisten.

Kinerja K3

Upaya untuk mewujudkan lingkungan kerja yang layak dan aman merupakan tanggung jawab bersama antara manajemen dan karyawan. Untuk itu kedua pihak terus bersinergi untuk mewujudkan lingkungan kerja serupa itu. Sejalan dengan itu, berbagai program/ kegiatan telah diambil dan diimplementasikan selama tahun pelaporan, temasuk menyediakan fasilitas apabila terjadi kondisi darurat. Fasilitas yang disediakan antara lain alat deteksi asap, alat pemadam api dengan berbagai tipe, hidran, dan kotak Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K). Selain itu, IFG juga menyediakan sarana yang bisa dimanfaatkan bersama seperti tempat ibadah, ruang parkir, keamanan 24 jam, dan lain-lain. Komitmen dan kesungguhan IFG untuk mewujudkan lingkungan kerja terbaik membawa hasil dengan tidak adanya kecelakaan nihil atau zero accident serta penyakit akibat kerja selama tahun pelaporan.

Berkaitan dengan situasi pandemi COVID-19 yang masih berlangsung pada tahun 2022, meski secara nasional kasusnya terus menunjukkan penurunan, IFG tetap menerapkan sejumlah kebijakan untuk mencegah dan meminimalkan risiko karyawan terinfeksi virus corona. Adapun kebijakan yang diterapkan pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Pemberlakuan kerja WFH (Work from Home) dan WFO (Work from Office);
2. Kebijakan penerapan 5m di perusahaan;
3. Menggunakan absensi menggunakan aplikasi mobile phone;
4. Memberikan bantuan makanan/vitamin bagi yang terkena COVID-19.

Tanggung Jawab terhadap Masyarakat

Keberadaan BUMN tidak semata-mata bertujuan untuk mencari keuntungan, tetapi terdapat nilai-nilai luhur di dalamnya. Nilai-nilai tersebut di antaranya turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat. Sebagai bagian dari BUMN di Tanah Air, IFG berkomitmen untuk mewujudkan nilai-nilai luhur tersebut. Langkah nyata yang dilakukan Perseroan adalah menyelenggarakan berbagai kegiatan yang terangkum dalam Program Tanggung Jawab Lingkungan dan Sosial, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. TJSR adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas

- Presidential Decree No. 22 of 1993 concerning Diseases Arising from Work Relationship.
- Government Regulation No.50 of 2012 concerning the Implementation of OHS Management System.
- Minister of Manpower Regulation No. PER.04/MEN/1987 concerning Occupational Safety and Health Supervisory Committee and Procedures for Appointment of Occupational Safety Experts.
- Minister of Manpower of the Republic of Indonesia Number PER.02/MEN/1992 concerning Procedures for Appointing the Duties and Authorities of OHS Experts.

Based on the above regulations, the Company formulated various internal regulations in the field of OHS and implemented them throughout the year consistently and persistently.

OHS Performance

Efforts to create a decent and safe working environment are a shared responsibility between management and employees. Therefore, both parties continue to work together to realize such a work environment. In line with this, various programs/activities have been taken and implemented during the reporting year, including providing facilities in the event of an emergency. The facilities provided include smoke detection devices, fire extinguishers of various types, hydrants, and First Aid boxes. In addition, IFG also provides facilities that can be utilized together such as places of worship, parking spaces, 24-hour security, and others. IFG's commitment and sincerity to create the best working environment has resulted in zero accidents and occupational diseases during the reporting year.

In connection with the ongoing COVID-19 pandemic situation in 2022, although nationally the cases continue to show a decline, IFG continues to implement a number of policies to prevent and minimize the risk of employees being infected with the coronavirus. The policies implemented in 2022 are as follows:

1. The implementation of WFH (Work from Home) and WFO (Work from Office) work;
2. The implementation of 5m policy in the company;
3. Using mobile phone attendance applications;
4. Providing food/vitamin assistance for those affected by COVID-19.

Responsibility to the Community

The existence of SOEs is not solely for profit, but there are noble values in it. These values include actively providing guidance and assistance to economically weak entrepreneurs, cooperatives, and the community. As part of SOEs in the country, IFG is committed to realizing these noble values. The real step taken by the Company is to organize various activities that are summarized in the Environmental and Social Responsibility Program, as stipulated in Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Company. TJSR is the Company's commitment to participate in sustainable economic development in order to improve the quality of life and the environment that is beneficial, both for the Company itself, the local community, and society in general.

setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Selain merujuk Undang-Undang Perseroan Terbatas, secara spesifik, pelaksanaan TJSL oleh IFG merujuk pada regulasi terbaru, yaitu Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-6/MBU/09/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-05/MBU/04/2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara. Regulasi ini menetapkan implementasi TJSL BUMN dalam dua program, yaitu Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil atau Program Pendanaan UMK, serta Bantuan dan/ atau Kegiatan lainnya –yang diimplementasikan IFG dengan nama Program Non-PUMK.

Pemberlakuan regulasi baru tersebut menggeser paradigma mengenai TJSL yang semula lebih bersifat filantropi menjadi aktivitas yang mempertimbangkan dan berupaya menangani dampak dan risiko bisnis Perseroan dalam rangka menciptakan keberlanjutan bagi lingkungan, masyarakat dan perusahaan. Selaras dengan itu, pelaksanaan Program TJSL BUMN yang dilaksanakan oleh IFG dan Anak Perusahaan kini menerapkan pendekatan CSV (Creating Shared Value) yang menjadikan Program TJSL BUMN sebagai bagian dari strategi perusahaan yang meningkatkan nilai - nilai kompetitif perusahaan dan secara bersamaan memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat dan lingkungan. Pendekatan CSV membangun isu - isu yang perlu menjadi perhatian perusahaan untuk dikembangkan menjadi kegiatan melalui Program TJSL BUMN.

Tujuan dan Sasaran Program TJSL BUMN

Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada pelaksanaan Program TJSL BUMN adalah sebagai berikut:

1. Memberikan kebermanfaatan bagi perusahaan dalam pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, pembangunan lingkungan serta pembangunan hukum dan tata kelola bagi perusahaan;
2. Berkontribusi pada penciptaan nilai tambah bagi perusahaan dengan prinsip terintegrasi, terarah dan terukur dampaknya serta akuntabel;
3. Membina usaha mikro dan usaha kecil agar lebih tangguh dan mandiri serta membantu masyarakat sekitar perusahaan; dan
4. Mendukung misi strategis inisiatif perusahaan BPUI dan penjaminan.

Pilar Utama Program TJSL BUMN

Pelaksanaan Program TJSL didasarkan atas Empat Pilar utama Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang memuat 17 (tujuh belas) butir TPB sebagai berikut:

1. Sosial
Tercapainya pemenuhan hak dasar manusia yang berkualitas secara adil dan setara untuk meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Pilar Sosial meliputi tujuan:
 - a. Mengentaskan Kemiskinan (TPB 1);
 - b. Mengakhiri Kelaparan (TPB 2);
 - c. Kehidupan Sehat dan Sejahtera (TPB 3);
 - d. Pendidikan Berkualitas (TPB 4); dan
 - e. Kesetaraan Gender (TPB 5).

In addition to referring to the Limited Liability Company Law, specifically, the implementation of TJSL by IFG refers to the latest regulation, namely the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia Number PER-6/MBU/09/2022 concerning Amendments to the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number Per-05/MBU/04/2021 concerning Social and Environmental Responsibility Programs of State-Owned Enterprises. This regulation stipulates the implementation of SOE TJSL in two programs, namely Micro and Small Business Funding or MSE Funding Program, as well as other assistance and/or activities - which IFG implements under the name of Non-MSE Program.

The implementation of the new regulation has shifted the paradigm of TJSL from a philanthropic activity to one that considers and seeks to address the impacts and risks of the Company's business in order to create sustainability for the environment, community and company. In line with this, the implementation of the SOE TJSL Program by IFG and its subsidiaries now applies the CSV (Creating Shared Value) approach which makes the SOE TJSL Program part of the company's strategy that increases the company's competitive value and simultaneously provides social and economic benefits to the community and environment. The CSV approach builds issues that need the company's attention to be developed into activities through the SOE TJSL Program.

Goals and Objectives of the SOE TJSL Program

The goals and objectives to be achieved in the implementation of the SOE TJSL Program are as follows:

1. Provide benefits for the company in economic development, social development, environmental development and legal development and governance for the company;
2. Contributing to the creation of added value for the Company with integrated principles, targeted and measurable impact, and accountability;
3. Fostering micro and small businesses to be more resilient and independent and helping communities around the Company; and
4. Supporting the strategic mission of BPUI and guarantee corporate initiatives.

Main Pillars of SOE TJSL Program

The implementation of the TJSL Program is based on the four main pillars of the Sustainable Development Goals (SDGs) which contain 17 (seventeen) SDG points as follows:

1. Social
Achieving the fulfillment of quality basic human rights in a fair and equal manner to improve welfare for all people. The Social Pillar includes the objectives:
 - a. No Poverty (SDG 1);
 - b. Zero Hunger (SDG 2);
 - c. Good Health and Well-Being (SDG 3);
 - d. Quality Education (SDG 4); and
 - e. Gender Equality (SDG 5).



2. Lingkungan

Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan sebagai penyanga seluruh kehidupan. Pilar Lingkungan meliputi tujuan:

- a. Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi Layak (TPB 6);
- b. Pembangunan Kota dan Permukiman yang Layak (TPB 11);
- c. Proses Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung jawab (TPB 12);
- d. Penanganan Perubahan Iklim (TPB 13);
- e. Menjaga Ekosistem Lautan (TPB 14); and
- f. Menjaga Ekosistem Daratan (TPB 15).

3. Ekonomi

Tercapainya pertumbuhan ekonomi berkualitas melalui keberlanjutan peluang kerja dan usaha, inovasi, industri inklusif, infrastruktur memadai, energi bersih yang terjangkau, dan didukung kemitraan. Pilar Ekonomi meliputi tujuan:

- a. Penggunaan Energi Bersih dan Terjangkau (TPB 7);
- b. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi (TPB 8);
- c. Industri, Ekonomi dan Infrastruktur (TPB 9);
- d. Mengurangi Kesenjangan (TPB 10); and
- e. Melakukan Kemitraan untuk Mencapai Tujuan (TPB 17).

4. Hukum dan Tata Kelola

Terwujudnya kepastian hukum dan tata kelola yang efektif, transparan, akuntabel, dan partisipatif untuk menciptakan stabilitas keamanan dan mencapai negara berdasarkan hukum. Pilar Hukum dan Tata Kelola meliputi tujuan Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh (TPB 16).

Rencana Kerja dan Anggaran TJSL BUMN Tahun 2022

IFG melaksanakan Program TJSL BUMN tahun 2022 dengan menerapkan prinsip Terintegrasi, Terarah, Terukur serta Akuntabel, dan akan mewujudkan keberlanjutan 3 (tiga) model kolaborasi, yaitu sinergi kerja sama dengan Yayasan BUMN Untuk Indonesia, sentralisasi Program TJSL BUMN berkoordinasi dengan Kementerian BUMN, dan Pelaksanaan Program TJSL BUMN secara mandiri. Adapun penyaluran dana program akan dilakukan berdasarkan Pilar Utama TPB di mana IFG fokus pada bidang prioritas Pendidikan, Lingkungan dan Pengembangan UMK (sesuai dengan Aspirasi Pemegang Saham/Pemilik Modal untuk Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2022 Surat Menteri nomor S -787/MBU/10/2021 tanggal 8 Oktober 2021). TPB prioritas tahun 2022 yang mencakup pendidikan, lingkungan dan pengembangan UMK selengkapnya adalah sebagai berikut:

1. Sosial

- a. Mengentaskan Kemiskinan (TPB 1);
- b. Kehidupan Sehat dan Sejahtera (TPB 3); and
- c. Pendidikan Berkualitas (TPB 4).

2. Lingkungan

Pembangunan Kota dan Permukiman yang Layak (TPB 11).

3. Ekonomi

- a. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi (TPB 8);
- b. Industri, Inovasi dan Infrastruktur (TPB 9); and
- c. Mengurangi Kesenjangan (TPB 10).

4. Hukum Tata Kelola

Perdamaian, Keadilan & Kelembagaan (TPB 16).

2. Environment

Sustainable management of natural resources and the environment as the sustenance of all lives. The Environment Pillar includes the objectives:

- a. Clean Water and Sanitation (SDG 6);
- b. Sustainable Cities and Communities (SDG 11);
- c. Responsible Consumption and Production (SDG 12);
- d. Climate Action (SDG 13);
- e. Life Below Water (SDG 14); and
- f. Life on Land (SDG 15).

3. Economy

Achieving quality economic growth through the sustainability of employment opportunities and business opportunities, innovation, inclusive industry, adequate infrastructure, affordable clean energy, and supported by partnerships. The Economic Pillar includes the objectives:

- a. Affordable and Clean Energy (SDG 7);
- b. Decent Work and Economic Growth (SDG 8);
- c. Industry, Economy and Infrastructure (SDG 9);
- d. Reduced Inequalities (SDG 10); and
- e. Partnerships for the Goals (SDG 17).

4. Law and Governance

The realization of the rule of law and effective, transparent, accountable and participatory governance to create security stability and achieve a state based on law. The Law and Governance pillar includes the goals of Peace, Justice and Strong Institutions (SDG 16).

SOE TJSL Work Plan and Budget in 2022

IFG implements the SOE TJSL Program in 2022 by applying the principles of Integrated, Targeted, Measured and Accountable, and will realize the sustainability of 3 (three) collaboration models, namely synergy of cooperation with the SOE Foundation for Indonesia, centralization of the SOE TJSL Program in coordination with the Ministry of SOEs, and independent implementation of the SOE TJSL Program. The distribution of program funds will be carried out based on the Main Pillars of SDGs where IFG focuses on the priority areas of Education, Environment and MSE Development (in accordance with the Aspirations of Shareholders/Capital Owners for the Preparation of the Work Plan and Budget of the Company in 2022 Ministerial Letter number S-787/MBU/10/2021 dated October 8, 2021). The prioritized SDGs for 2022 which include education, environment and MSE development are as follows:

1. Social

- a. No Poverty (SDG 1);
- b. Good Health and Well-Being (SDG 3); and
- c. Quality Education (SDG 4).

2. Environment

Sustainable Cities and Communities (SDG 11).

3. Economy

- a. Decent Work and Economic Growth (SDG 8);
- b. Industry, Economy and Infrastructure (SDG 9); and
- c. Reduced Inequalities (SDG 10).

4. Law and Governance

Peace, Justice & Strong Institutions (SDG 16).

Program TJSB BUMN Prioritas Tahun 2022

Dalam RKA Program TJSB BUMN BPUI tahun 2022 terdapat program prioritas TPB sesuai dengan Aspirasi Pemegang Saham sebagai berikut:

1. Prioritas Pendidikan
 - a. Literasi Asuransi dan Penjaminan kepada Insan Muda;
 - b. Program Beasiswa BUMN;
 - c. Financial Literation & Insurance Competition ("FLAC"); dan
 - d. Dukungan Pendidikan Atlet Panahan Nasional Berprestasi.
2. Prioritas Lingkungan
 - a. Desa Nelayan IFG;
 - b. Program IFGreen (Program Penanaman Pohon IFG); dan
 - c. Program WTF (Waste To Fertilizer) Program Pengolahan Limbah Organik Perkantoran Menjadi pupuk.
3. Prioritas Pengembangan UMK
 - a. Pelatihan UMKM Inovasi Produk dan Packaging;
 - b. Pelatihan UMKM Go Digital (Marketing Development, Branding dan Market Matching);
 - c. Program Pengembangan Kapasitas Nelayan dan Masyarakat Pesisir di Kampung Nelayan (Program bersama BPUI dan Anak Perusahaan);
 - d. Korporatisasi UMKM; dan
 - e. Sertifikasi produk dan merek.

Selaras dengan itu, Kementerian BUMN dalam Arahan Pemegang Saham (APS) tahun 2022 telah menetapkan beberapa target kinerja dan program TJSB yang perlu dicapai oleh IFG, yaitu:

1. Melakukan pembaharuan atas TPB Prioritas untuk tahun 2022, baik pada tingkat BUMN, holding maupun kluster;
2. Menyusun Program TJSB BUMN yang dijalankan sebagai pendekatan dari peningkatan nilai Perusahaan; dan
3. Membentuk Komite TJSB atau Komite dengan fungsi yang sama di lingkup BUMN selambat-lambatnya tahun 2022.

Di samping itu, APS tahun 2022 juga menetapkan program dan target terkait program TJSB bagi IFG sebagai berikut:

Priority SOE TJSB Program in 2022

In the 2022 Work Plan and Budget of BPUI for SOE TJSB Program, there are priority SDG programs in accordance with Shareholder Aspirations as follows:

1. Education Priorities
 - a. Insurance and Guarantee Literacy to the Youth;
 - b. SOE Scholarship Program;
 - c. Financial Literation & Insurance Competition ("FLAC"); and
 - d. Educational Support for Outstanding National Archery Athletes.
2. Environment Priorities
 - a. IFG Fishing Village;
 - b. Program IFGreen (IFG's Tree Planting Program); and
 - c. WTF (Waste To Fertilizer) Program, Organic Waste Processing Into Fertilizer Program.
3. MSE Development Priorities
 - a. MSME Training on Product Innovation and Packaging;
 - b. UMKM Go Digital Training (Marketing Development, Branding and Market Matching);
 - c. Capacity Building Program for Fishermen and Coastal Communities in Kampung Nelayan (Joint Program with BPUI and Subsidiaries);
 - d. Corporatization of MSMEs; and
 - e. Product and brand certification.

In line with that, the Ministry of SOEs in the 2022 Shareholder Directive (APS) has set several performance targets and CSR programs that IFG needs to achieve, namely:

1. Updating the SDG Priorities for 2022, both at the SOE, holding and cluster levels;
2. Developing SOE TJSB programs that are carried out as an approach to increasing the Company's value; and
3. Establishing a TJSB Committee or a Committee with the same function within SOEs no later than 2022.

In addition, the Shareholder Directives in 2022 also sets programs and targets related to the TJSB program for IFG as follows:

No.	Program Programs	Target Description	Keterangan Description
1.	Pelaksanaan Program TJSB BUMN Prioritas (Pendidikan, Lingkungan, dan Pengembangan UMK) Implementation of SOE TJSB Priority Programs (Education, Environment, and MSE Development)	Minimal 3 (tiga) program untuk setiap target prioritas At least 3 (three) programs for each priority target	Program pengembangan UMK tidak terbatas kepada UMK yang menjadi Mitra Binaan BUMN melalui Program PUMK (terbuka untuk seluruh UMK) MSE development programs are not limited to MSEs that become SOE's Fostered Partners through the PUMK Program (open to all MSEs).
2.	Program dengan menggunakan pendekatan Creating Shared Value (CSV) Programs using the Creating Shared Value (CSV) approach	Minimal 2 (dua) program At least 2 (two) programs	Program dengan pendekatan CSV adalah program yang menciptakan nilai bersama dengan mengatasi tantangan sosial sebagai bagian dari strategi inti mereka dalam mencapai kapitalisasi pasar yang lebih tinggi dan keunggulan kompetitif yang bertahan lama Programs with CSV approach are programs that create shared value by addressing social challenges as part of their core strategy in achieving higher market capitalization and lasting competitive advantage.

Berkaitan dengan pendanaan, pada tahun 2022, sesuai Risalah Rapat Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Tahun 2022 IFG Nomor RIS-31/DSI. MBU.B/12/2021, IFG menganggarkan Program TJSB BUMN sebesar Rp8,46 miliar dengan rincian sebagai berikut:

1. Program TJSB PUMK sebesar Rp1,3 miliar bersumber dari dana

Regarding funding, in 2022, according to the Minutes of the Meeting to Discuss the Work Plan and Budget for IFG's 2022 Social and Environmental Responsibility Program Number RIS-31/DSI.MBU.B/12/2021, IFG has budgeted the SOE TJSB Program at IDR 8.46 billion with the following details:

1. IDR 1.3 billion for the TJSB Program namely micro and small

pengembalian bergulir (revolving) yang akan disalurkan melalui kolaborasi dengan Bank BRI.

2. Program TJSN Non-PUMK yang dijalankan oleh Unit TJSN atau unit pelibatan dan pengembangan masyarakat atau Community Involvement and Development (CID) yang sumber dananya berasal dari anggaran Perusahaan yang diperhitungkan sebagai biaya, yaitu sebesar Rp7 miliar.
3. Program TJSN Non-PUMK yang dijalankan di luar Unit TJSN atau unit pelibatan dan pengembangan masyarakat (Non-CID) yang sumber dananya berasal dari anggaran Perusahaan yang diperhitungkan sebagai biaya sebesar Rp162 juta.

enterprises funding (PUMK), sourced from revolving return funds that will be channeled through collaboration with Bank BRI.

2. Non-PUMK TJSN programs run by the TJSN Unit or the Community Involvement and Development (CID) unit whose source of funds comes from the Company's budget which is calculated as a cost, amounting to IDR 7 billion.
3. Non-PUMK TJSN programs run outside the TJSN Unit or the Community Involvement and Development (Non-CID) unit whose source of funds comes from the Company's budget which is calculated as a cost of IDR 162 million.

RKA Program TJSN IFG 2022 Berdasarkan Sumber Dana

Work Plan and Budget for IFG's 2022 TJSN Program by Fund Source

No.	Program Programs	RKA 2022 (Rp) 2022 Work Plan and Budget (IDR)
1.	Penyaluran Program TJSN Pendanaan UMK Distribution of TJSN Program for MSE Funding	1.300.000.000
2.	Penyaluran Program TJSN Non-PUMK (CID) Distribution of TJSN Program for Non-MSE Funding (CID)	7.000.000.000
3.	Penyaluran Program TJSN Non-PUMK (Non-CID) Distribution of TJSN Program for Non-MSE Funding (Non-CID)	162.000.000
Jumlah Realisasi Program TJSN BUMN Total Realization Amount of SOE TJSN Program		8.462.000.000

Anggaran TJSN di atas dibagi ke dalam 4 (empat) pilar TPB yaitu sosial, lingkungan, ekonomi, serta hukum dan tata kelola dengan rincian sebagai berikut:

The TJSN budget is divided into 4 (four) SDG pillars, namely social, environment, economy, and law and governance with the following details:

RKA Program TJSN IFG 2022 Berdasarkan Pilar TPB

Work Plan and Budget for IFG's 2022 TJSN Program by SDG Pillars

No.	Program Programs	RKA 2022 (Rp) 2022 Work Plan and Budget (IDR)
1.	Pilar Sosial Social Pillar	3.150.000.000
2.	Pilar Ekonomi Economic Pillar	3.400.000.000
3.	Pilar Lingkungan Environmental Pillar	1.600.000.000
4.	Pilar Hukum dan Tata Kelola Law and Governance Pillar	312.000.000
Jumlah Realisasi Program TJSN BUMN Total Realization Amount of SOE TJSN Program		8.462.000.000

Pelaksanaan TJSN BUMN Tahun 2022 [OJK F.25]

Selama tahun 2022, IFG telah menyelenggarakan sejumlah program TJSN BUMN CID (Community, Involvement and Development), Non-CID, dan PUMK sebesar Rp8.939.981.805 atau 105,65% dari RKA TJSN. Adapun rincian penyaluran program TJSN berdasarkan TPB yang dapat dilihat sebagai berikut:

Implementation of SOE TJSN in 2022 [OJK F.25]

During 2022, IFG has implemented a number of CID (Community, Involvement and Development), Non-CID, and Micro and small enterprises funding fo SOE TJSN programs amounting to IDR 8,939,981,805 or 105.65% of the Work Plan and Budget of TJSN. The details of the distribution of the TJSN program based on the SGDs can be seen as follows:

Realisasi Program TJSN BUMN 2022 Berdasarkan Pilar TPB

Realization of Work Plan and Budget for 2022 SOE TJSN Program by SDG Pillars

SDGs	No.	TPB SDGs	RKA 2022 (Rp) 2022 Work Plan and Budget: (IDR)	Audit 2022 (Rp) 2022 Audit (IDR)	Capaian (%) Achievement (%)
Social Pillar	A.	Pilar Sosial	3.150.000.000	4.434.498.049	140,78%

Realisasi Program TJSB BUMN 2022 Berdasarkan Pilar TPB

Realization of Work Plan and Budget for 2022 SOE TJSB Program by SDG Pillars

SDGs	No.	TPB SDGs	RKA 2022 (Rp) 2022 Work Plan and Budget: (IDR)	Audit 2022 (Rp) 2022 Audit (IDR)	Capaian (%) Achievement (%)
SDG 1 No Poverty	1.	TPB 1 Tanpa Kemiskinan	1.000.000.000	1.090.572.279	109,06%
SDG 2 Zero Hunger	2.	TPB 2 Tanpa Kelaparan	-	-	-
SDG 3 Good Health and Well-Being	3.	TPB 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera	850.000.000	1.659.042.128	195,18%
SDG 4 Quality Education	4.	TPB 4 Pendidikan Berkualitas	1.300.000.000	1.684.883.642	129,61%
SDG 5 Gender Equality	5.	TPB 5 Kesetaraan Gender	-	-	-
Economic Pillar	B.	Pilar Ekonomi	3.400.000.000	3.121.332.448	91,80%
SDG 7 Affordable and Clean Energy	1.	TPB 7 Energi Bersih dan Terjangkau	-	-	-
SDG 8 Decent Work and Economic Growth	2.	TPB 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	2.350.000.000	3.011.332.448	128,14%
SDG 9 Industry, Innovation, and Infrastructure	3.	TPB 9 Industri, Inovasi, dan Infrastruktur	500.000.000	-	-
SDG 10 Reduced Inequalities	4.	TPB 10 Berkurangnya Kesenjangan	550.000.000	110.000.000	0%
SDG 17 Partnerships for the Goals	5.	TPB 17 Kemitraan untuk Mencapai Tujuan	-	-	-
Environmental Pillar	C.	Pilar Lingkungan	1.600.000.000	1.246.551.308	77,91%
SDG 6 Clean Water and Sanitation	1.	TPB 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak	-	-	-
SDG 11 Sustainable Cities and Communities	2.	TPB 11 Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan	900.000.000	717.669.023	79,74%
SDG 12 Responsible Consumption and Production	3.	TPB 12 Konsumsi dan Produksi Bertanggung Jawab	300.000.000	-	-
SDG 13 Climate Action	4.	TPB 13 Penanganan Perubahan Iklim	-	-	-
SDG 14 Life Below Water	5.	TPB 14 Ekosistem Lautan	-	-	-
SDG 15 Life on Land	6.	TPB 15 Ekosistem Daratan	400.000.000	528.882.285	132,22%
Law and Governance Pillar	D.	Pilar Hukum dan Tata Kelola	312.000.000	137.600.000	44,10%
SDG 16 Peace, Justice, and Strong Institutions	1.	TPB 16 Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan	312.000.000	137.600.000	44,10%
Total			8.462.000.000	8.939.981.805	105,65%
Total					

Selanjutnya, hingga akhir tahun 2022, IFG telah merealisasikan dana untuk penyelenggaraan program TJSB sebesar Rp8.939.981.805 atau mencapai 105,65% jika dibandingkan dengan RKA tahun 2022. Realisasi dana program TJSB ini telah disalurkan ke dalam TPB sesuai dengan prioritas TJSB Perusahaan sesuai dengan RKA dan APS tahun 2022.

Pelaksanaan Program TJSB BUMN Prioritas (Program Non-PUMK)

Selama tahun pelaporan, IFG telah merumuskan program-program utama TJSB Non PUMK sesuai dengan RKA TJSB dan APS tahun 2022 ke dalam program prioritas. Pencapaian program TJSB prioritas bertujuan untuk mendukung pencapaian TPB dengan rincian sebagai berikut:

Furthermore, until the end of 2022, IFG has realized funds for the implementation of the TJSB program amounting to IDR 8,939,981,805 or reaching 105.65% when compared to the 2022 Work Plan and Budget. The realization of funds for this TJSB program has been channeled into the SDGs in accordance with the Company's TJSB priorities and complies to the 2022 Work Plan and Budget and Shareholders' Aspirations.

Implementation of Priority SOE TJSB Programs (Non-PUMK Programs)

During the reporting year, IFG has formulated the main Non-PUMK TJSB programs in accordance with the 2022 Work Plan and Budget for TJSB and APS into priority programs. The achievement of priority TJSB programs aims to support the achievement of SDGs with the following details:



No.	Program Programs	RKA 2022 (Rp) 2022 Work Plan and Budget: (IDR)	Audit 2022 (Rp) 2022 Audit (IDR)	Capaian (%) Achievement (%)	Dampak Program Impact of the Program
A.	Prioritas Pendidikan Education Priorities				
1.	Literasi Asuransi dan Keuangan kepada Insan Muda Insurance and Financial Literacy to the Youth	300.000.000	193.140.000	64,38%	<p>Program peningkatan literasi dan penetrasi keuangan dan asuransi kepada generasi muda.</p> <p>Dampak bagi Penerima Manfaat: Tambahan wawasan bagi generasi muda terkait literasi keuangan dan asuransi sejak dini dan peningkatan awareness dan manfaat produk keuangan dan asuransi.</p> <p>Dampak bagi Perusahaan: Memperluas potensi pasar produk anggota holding IFG dari segmen generasi muda, meningkatkan persepsi brand masyarakat terhadap produk anggota holding IFG, mendukung peningkatan indeks literasi asuransi dan indeks inklusi asuransi di Indonesia.</p> <p>Program to increase financial and insurance literacy and penetration to the younger generation.</p> <p>Impact on Beneficiaries: Additional insight for the younger generation regarding financial and insurance literacy from an early age and increased awareness and benefits of financial and insurance products.</p> <p>Impact to the Company: Expanding the market potential of IFG holding members' products from the younger generation segment, increasing public brand perception of IFG holding members' products, supporting the increase in insurance literacy index and insurance inclusion index in Indonesia.</p>

2.	Program Bantuan Tunjangan Pendidikan dan/atau Beasiswa Education Allowance and/or Scholarship Assistance Program	350.000.000	789.703.292	225,63%	<p>Penyerahan bantuan tunjangan pendidikan (formal atau non-formal) dan beasiswa kepada penerima manfaat, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Beasiswa Prestasi kepada 6 (enam) orang pemenang lomba lari kategori pelajar dalam rangkaian Program TJSI IFG Labuan Bajo 2022. 2. Bantuan pendidikan kepada Anak Abdi dalam Bakti BUMN IFG di Solo. 3. Kegiatan "Fun Learning with IFG" bersama 50 (lima puluh) orang anak jalanan. 4. Dukungan kepada 51 (lima puluh satu) Mahasiswa Hukum dari seluruh Indonesia menghadiri BUMN Legal Summit Tahun 2022 dan partisipasi dalam kompetisi karya ilmiah legal review. 5. Bantuan dukasi pangan lokal kepada 1.098 siswa SMA St. Familia Way Nakeng di Manggarai Barat, NTT. <p>Dampak bagi Penerima Manfaat: Memperoleh kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang layak, memperoleh dukungan dalam mencapai cita-cita, dan memperbaiki taraf kehidupan di masa depan.</p> <p>Dampak bagi Perusahaan: Mewujudkan kepedulian perusahaan dalam bidang pendidikan (TPB-4 Pendidikan Berkualitas), meningkatkan persepsi masyarakat terhadap IFG.</p> <p>Handover of educational allowances (formal or non-formal) and scholarships to beneficiaries, among others:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Achievement Scholarships to 6 (six) winners of running races for student category in the IFG's Labuan Bajo 2022 TJSI Program series. 2. Educational assistance to Anak Abdi in IFG's BUMN Bakti in Solo. 3. "Fun Learning with IFG" activity with 50 (fifty) street kids. 4. Support for 51 (fifty one) Law Students from all over Indonesia to attend the SOE Legal Summit 2022 and participation in the legal review scientific work competition. 5. Local food education assistance to 1,098 students of St. Familia Wae Nakeng High School in West Manggarai, East Nusa Tenggara. <p>Impact on Beneficiaries: Getting the opportunity to get a proper education, getting support in achieving their goals, and improving their living standards in the future.</p> <p>Impact to the Company: Realizing the company's concern in the field of education (SDG-4 Quality Education), improving public perception of IFG.</p>



3.	Program Bantuan Sarana dan Prasarana Pendidikan Education Facilities and Infrastructure Assistance Program	300.000.000	372.040.350	124,01%	<ul style="list-style-type: none"> 1. Bantuan sarana dan prasarana pendidikan untuk SDN 01 Malasari, berupa: <ul style="list-style-type: none"> a. renovasi gedung sekolah; b. bantuan 5 (lima) laptop; c. set lemari buku; dan d. peralatan sekolah untuk 200 (dua ratus) anak. 2. Bantuan seragam sekolah kepada siswa-siswi tingkat SD, SMP dan SMA di Banten sebanyak 1.127 set seragam sekolah (kolaborasi IFG dan anggota holding). 3. Program IFG Labuan Bajo: Pelaksanaan renovasi SDN 01 Labuan Bajo, PAUD AL-Ikhlas, dan SMPN 1 Komodo, pembangunan Pojok Literasi di Nurul Falah, dan bantuan sepatu lari untuk anak sekolah. 4. Pembangunan Perpustakaan Desa Sumberejo dan pelatihan kepustakaan. <p>Dampak bagi Penerima Manfaat: Meningkatkan kualitas kegiatan belajar yang ditunjang dengan fasilitas yang memadai.</p> <p>Dampak bagi Perusahaan: Memenuhi komitmen perusahaan dalam mendukung pendidikan yang berkualitas bagi siswa/siswi sekolah sesuai dengan tuntutan digitalisasi, dan meningkatkan persepsi masyarakat terhadap IFG.</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Educational facilities and infrastructure assistance for SDN 01 Malasari, in the form of: <ul style="list-style-type: none"> a. renovation of the school building; b. assistance of 5 (five) laptops; c. sets of bookcases; and d. school equipment for 200 (two hundred) children. 2. School uniform assistance to elementary, junior high and high school students in Banten as many as 1,127 sets of school uniforms (collaboration of IFG and holding members). 3. IFG Labuan Bajo Program: Renovation of SDN 01 Labuan Bajo, PAUD AL-Ikhlas, and SMPN 1 Komodo, construction of Literacy Corner at Nurul Falah, and running shoes for students. 4. Construction of Sumberejo Village Library and library training. <p>Impact on Beneficiaries: Improving the quality of learning activities supported by adequate facilities.</p> <p>Impact to the Company: Fulfilling the company's commitment in supporting quality education for school students in accordance with the demands of digitalization, and improving public perception of IFG.</p>
4.	Program Kolaborasi Pendidikan BUMN SOE Education Collaboration Program	350.000.000	30.000.000	8,57%	<p>Program Kolaborasi BUMN Sertifikasi Guru kepada 68 orang pengajar dari wilayah Maluku dan 337 orang pengajar dari NTT (cost-sharing IFG Group).</p> <p>Dampak bagi Penerima Manfaat: Memperoleh kesempatan sertifikasi dan pembekalan sebelum ujian, Meningkatkan potensi karir dalam bidang pendidikan.</p> <p>Dampak bagi Perusahaan: Mewujudkan komitmen Perusahaan terhadap Pendidikan Berkualitas (TPB 4) melalui peningkatan kualitas pengajar demi terciptanya anak didik yang cerdas dan berkualitas.</p> <p>SOEs' Teacher Certification Collaboration Program to 68 teachers from Maluku region and 337 teachers from East Nusa Tenggara (IFG Group cost-sharing).</p> <p>Impact on Beneficiaries: Obtaining certification opportunities and debriefing before the exam, Increasing career potential in the field of education.</p> <p>Impact to the Company: Realizing the Company's commitment to Quality Education (SDG 4) through improving the quality of teachers for the creation of smart and quality students.</p>

Sub Jumlah		1.300.000.000	1.384.883.642	106,53%	
Subtotal					
B.	Prioritas Lingkungan Environment Priorities				
1.	IFGreen (Konservasi Alam dan Kampanye Lingkungan) IFGreen (Nature Conservation and Environmental Campaign)	400.000.000	173.726.674	43,43%	<p>Penanaman 5.778 pohon di beberapa wilayah, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mandalika, NTB; 2. Pandeglang, Banten; 3. Tuban, Bali; and 4. DKI Jakarta. <p>Dampak bagi Penerima Manfaat: Mengurangi risiko degradasi lingkungan, mengurangi risiko banjir dengan menanam mangrove.</p> <p>Dampak bagi Perusahaan: Terhindar dari dampak turunan terhadap perusahaan dari menurunnya risiko bencana yang disebabkan degradasi alam, serta meningkatkan persepsi masyarakat tentang IFG.</p> <p>Planting 5,778 trees in several areas, as follows:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mandalika, West Nusa Tenggara; 2. Pandeglang, Banten; 3. Tuban, Bali; and 4. DKI Jakarta. <p>Impact on Beneficiaries: Reduce the risk of environmental degradation, reduce the risk of flooding by planting mangroves.</p> <p>Impact to the Company: Avoided derivative impacts on the company from the reduced risk of disasters caused by natural degradation, and improved public perception of IFG.</p>
2.	Program Pengelolaan Sampah Waste Management Program	300.000.000	162.128.464	54,04%	<p>Pelaksanaan Program Olah Sampah di Likupang dan Labuan Bajo dengan bantuan terealisasi di tahun 2022 berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Motor pengangkut sampah sebanyak 2 (dua) unit untuk Likupang dan 2 (dua) unit di Labuan Bajo; 2. Tempat sampah pilah 50 (lima puluh) unit di Likupang dan 50 (lima puluh) unit di Labuan Bajo; 3. Wallsign 50 (lima puluh) unit; 4. FGD dan Kampanye Anti Sampah Plastik, untuk Labuan Bajo; and 5. Kampanye Lingkungan dan Wisata di Likupang (5 (lima) kegiatan). <p>Dampak bagi Penerima Manfaat: Memperoleh tools dan wawasan yang diperlukan untuk dapat memulai pengelolaan sampah sampai mengubah sampah menjadi pendapatan, serta memahami kaitan erat kebersihan lingkungan dan potensi wisata.</p> <p>Dampak bagi Perusahaan: Mewujudkan pemenuhan komitmen perusahaan terkait pengolahan sampah untuk mengurangi dampak sampah terhadap lingkungan, dan meningkatkan persepsi masyarakat atas IFG.</p> <p>Hasil Social Return on Investment: 1,8 (Kajian Universitas Negeri Manado)</p>



					Implementation of the Waste Management Program in Likupang and Labuan Bajo with assistance realized in 2022 in the form of: 1. 2 (two) units of waste transportation motorcycles for Likupang and 2 (two) units in Labuan Bajo; 2. 50 (fifty) units of segregated waste bins in Likupang and 50 (fifty) units in Labuan Bajo; 3. 50 (fifty) units of wallsigns; 4. FGD and Anti-Plastic Waste Campaign, for Labuan Bajo; and 5. Environment and Tourism Campaign in Likupang (5 (five) activities).
					Impact on Beneficiaries: Gained the necessary tools and insights to be able to start waste management to turn waste into income, as well as understand the close link between environmental cleanliness and tourism potential. Impact to the Company: Realizing the fulfillment of company commitments related to waste management to reduce the impact of waste on the environment, and improving public perception of IFG. Social Return on Investment: 1.8 (Study of Universitas Negeri Manado)
3.	Revitalisasi Prasarana dan Sarana Umum di Wilayah Pemukiman dan Perkotaan Revitalization of Public Infrastructure and Facilities in Settlement and Urban Areas	600.000.000	283.203.393	47,20%	Pembangunan 1 (satu) buah jembatan di Serang, Banten dan renovasi 3 (tiga) lokasi tempat ibadah di Cianjur, Jawa Barat, Labuan Bajo, NTT dan DKI Jakarta. Dampak bagi Penerima Manfaat: Memperoleh tools dan wawasan yang diperlukan untuk dapat memulai pengelolaan sampah sampai mengubah sampah menjadi pendapatan serta memahami kaitan erat kebersihan lingkungan dan potensi wisata. Dampak bagi Perusahaan: Mewujudkan pemenuhan atas komitmen perusahaan terhadap TPB-11. Construction of 1 (one) bridge in Serang, Banten and renovation of 3 (three) places of worship in Cianjur, West Java, Labuan Bajo, NTT and DKI Jakarta. Impact on Beneficiaries: Gained the necessary tools and insights to be able to start waste management to turn waste into income and understand the close link between environmental cleanliness and tourism potential. Impact to the Company: Realizing fulfillment of the company's commitment to SDG-11.
4.	Ruang Publik Terbuka Hijau Green Open Public Space	300.000.000	627.492.777	209,16%	Kolaborasi BUMN dalam revitalisasi taman dan ruang publik yang berdampak positif memberikan penghijauan dan akses terhadap RTH untuk publik. SOE collaboration in revitalizing parks and public spaces that have a positive impact on providing greenery and access to green spaces for the public.
Sub Jumlah Subtotal		1.600.000.000	1.246.551.308	77,91%	
C.	Prioritas Pengembangan UMK MSE Development Priorities				
1.	Pelatihan/Pendidikan Kewirausahaan Entrepreneurship Training/Education	350.000.000	360.000.000	102,86%	Program Kolaborasi BUMN Pendidikan Kewirausahaan terlaksana dengan jumlah peserta sebanyak 21.517 dalam 56 (lima puluh enam) sesi. Dampak bagi Penerima Manfaat: Meningkatnya pengetahuan kewirausahaan masyarakat terkait potensi penghasilan utama/tambahan pasca pandemi Covid-19. Dampak bagi Perusahaan: Efek turunan yang positif dari peningkatan perekonomian masyarakat membutuhkan produk IFG yang semakin tinggi.

					The SOEs' Entrepreneurship Education Collaboration Program was implemented with a total of 21,517 participants in 56 (fifty-six) sessions.
2.	Bantuan Peralatan dan Infrastruktur Usaha/Produksi UMKM MSMEs Business/Production Equipment and Infrastructure Assistance	750.000.000	232.072.073	30,94%	<p>Impact on Beneficiaries: Increased community entrepreneurship knowledge related to the main/additional income potential after the Covid-19 pandemic.</p> <p>Impact to the Company: The positive derivative effect of improving the community's economy</p> <p>Bantuan peralatan dan infrastruktur produksi kepada UMKM untuk 30 (tiga puluh) UMKM di Solo, Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) di Sumberejo.</p> <p>Dampak bagi Penerima Manfaat: Meningkatkan efisiensi proses produksi dan hasil produksi yang dihasilkan.</p> <p>Dampak bagi Perusahaan: Efek turunan yang positif dari peningkatan produksi usaha mikro yang dapat menjadi nasabah KUR potensial bagi anggota holding yang bergerak di bidang penjaminan kredit dan pembiayaan UMK.</p> <p>Production equipment and infrastructure assistance for 30 (thirty) MSMEs in Solo, Farmer Group Association (Gapoktan) in Sumberejo.</p> <p>Impact on Beneficiaries: Improve the efficiency of the production process and the resulting production output.</p> <p>Impact to the Company: Positive derivative effects from increased micro-enterprise production that can become potential KUR customers for holding members engaged in credit guarantee and MSE financing.</p>
3.	Pengembangan dan Pembinaan UMKM Binaan dan Umum Development and Guidance of Assisted and General MSMEs	1.000.000.000	1.119.260.375	111,93%	<p>Program Pengembangan UMK Binaan IFG dan umum, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Mengadakan pameran dan bazaar UMKM di: <ol style="list-style-type: none"> Pameran UMK Waterfront Labuan Bajo diikuti 50 (lima puluh) UMKM umum. Pasar Rakyat Murah dan Bazaar UMKM di Manggarai Barat. Program Creative Hub Mandalika. Pameran UMKM Festival Merah Putih diikuti 10 (sepuluh) UMKM binaan. Pelaksanaan Pelatihan dan Pembinaan UMKM melalui kegiatan "Mabar-Preneur" yaitu pelatihan 30 UMK Millenial dalam upaya peningkatan UMKM Naik Kelas dan Kegiatan Program Kurasi dan Inkubasi Mitra Binaan Unggulan. <p>Dampak bagi Penerima Manfaat: Menunjang kegiatan produksi dan usaha UMK agar dapat meningkatkan efisiensi proses produksi dan hasil produksi yang dihasilkan.</p> <p>Dampak bagi Perusahaan: Bentuk afirmasi IFG terhadap UMKM adalah dengan memberikan kredit usaha bagi sektor UMKM dan memberikan pendampingan dan pembinaan, mendukung kenaikan porsi kredit bagi sektor UMKM menjadi 30% dari total kredit pada tahun 2024.</p>

					IFG Assisted MSE Development Program and general, as follows:
					1. Organizing MSME exhibitions and bazaars at:
					a. Labuan Bajo Waterfront MSME Exhibition followed by 50 (fifty) general MSMEs.
					b. Cheap People's Market and MSME Bazaar in West Manggarai.
					c. Mandalika Creative Hub Program.
					d. MSMEs Exhibition at the Merah Putih Festival attended by 10 (ten) fostered MSMEs.
					2. Implementation of MSME Training and Coaching through the "Mabar-Preneur" activity, namely training 30 Millennial MSMEs in an effort to increase MSMEs Upgrading and Curation Program Activities and Incubation of Featured Fostered Partners.
					Impact on Beneficiaries: Supporting the production and business activities of MSMEs in order to increase the efficiency of the production process and the resulting production results.
					Impact to the Company: IFG's form of affirmation towards MSMEs is by providing business credit for the MSME sector and providing assistance and coaching, supporting the increase in the portion of credit for the MSME sector to 30% of total credit by 2024.
Sub Jumlah	2.100.000.000	1.711.332.448	81,49%		
Jumlah	5.000.000.000	4.342.767.398	86,86%		

Sesuai tabel di atas, pada tahun 2022, IFG telah merealisasikan penyaluran dana program TJSR Prioritas sebesar Rp4.342.767.398 atau sebesar 86,86% dari RKA TJSR.

Pelaksanaan Program Pendanaan UMK Tahun 2022

IFG memberikan perhatian terhadap pemberdayaan UMKM karena pelaku usaha kategori ini merupakan pilar terpenting dalam perekonomian Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah UMKM pada tahun 2022 tercatat sebanyak 8,71 juta unit usaha. Sementara itu, data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyebutkan bahwa jumlah UMKM di Indonesia sudah mencapai 99 persen dari keseluruhan unit usaha, dengan kontribusi UMKM terhadap PDB mencapai 60,5 persen dan terhadap penyerapan tenaga kerja sebesar 96,9 persen dari total penyerapan tenaga kerja nasional. Adapun United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) dalam laporan bertajuk ASEAN Investment Report 2022 yang diterbitkan Oktober 2022 mengungkapkan bahwa pelaku UMKM tercatat sebanyak 65,46 juta, berkontribusi sebesar 60,3 persen terhadap PDB, serta mampu menyerap 97 persen tenaga kerja di Indonesia.

Tujuan dan Sasaran Program Pendanaan UMK

Pendanaan UMK bertujuan untuk meningkatkan kemampuan UMK agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana BUMN. Pelaksanaan program Pendanaan UMK diharapkan dapat:

1. Memperluas kesempatan UMK dalam mengakses penyediaan kredit atau permodalan usaha;

In accordance with the table above, in 2022, IFG has realized the distribution of funds for the TJSR Priority program of IDR 4,342,767,398 or 86.86% of the TJSR Work Plan and Budget.

Implementation of MSE Funding Program in 2022

IFG pays attention to the empowerment of MSMEs because this category of business actors is the most important pillar in the Indonesian economy. Based on data from the Ministry of Cooperatives and SMEs, the number of MSMEs in 2022 was recorded at 8.71 million business units. Meanwhile, data from the Coordinating Ministry for Economic Affairs states that the number of MSMEs in Indonesia has reached 99 percent of all business units, with the contribution of MSMEs to GDP reaching 60.5 percent and to employment amounting to 96.9 percent of the total national employment. The United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) in a report entitled ASEAN Investment Report 2022 published in October 2022 revealed that MSME players were recorded at 65.46 million, contributed 60.3 percent to GDP, and were able to absorb 97 percent of the workforce in Indonesia.

Goals and Objectives of MSE Funding Program

MSE funding aims to improve the ability of MSEs to become resilient and independent through the utilization of SOE funds. The implementation of the MSE Funding program is expected to:

1. Expand the opportunities of MSEs in accessing the provision of credit or business capital;

2. Mendukung pengembangan UMK di Indonesia; dan
3. Memperkuat struktur keuangan UMK untuk memaksimalkan kontribusi UMK dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Adapun sasaran yang ingin dicapai Program Pendanaan UMK adalah meningkatkan kemampuan kewirausahaan dan manajerial serta memberikan pinjaman permodalan, peningkatan kemampuan produksi, pemasaran dan lain-lain sehingga UMK yang dibina dapat menjadi usaha yang berkembang menjadi usaha menengah ataupun besar yang nantinya diharapkan bisa melakukan kerja sama dengan IFG maupun anggota holding.

Sebelum menjadi Holding BUMN Asuransi, Penjaminan dan Investasi, IFG sudah melaksanakan program PUMK dengan berkolaborasi bersama anak perusahaannya, yaitu BAV. Adapun tahun 2022, Perseroan menyalurkan 100% dana PUMK melalui kolaborasi dengan Bank BRI sesuai dengan arahan Kementerian BUMN pada Risalah Rapat Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Tahun 2022 IFG Nomor RIS-31/DSI.MBU.B/12/2021. Hal tersebut diperkuat dengan adanya surat arahan dari Menteri BUMN Nomor S-721/MBU/11/2022 Tanggal 10 November 2022 tentang Kerja Sama Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil, di mana Menteri BUMN merekomendasikan BRI kepada BUMN dan Perusahaan dengan Kepemilikan Negara Minoritas sebagai pengelola kerja sama Program PUMK.

Realisasi Pendanaan UMK Tahun 2022

Penyaluran dana PUMK IFG berkolaborasi dengan BRI pada tanggal 29 Desember 2022 sesuai dengan PKS Nomor B.45/MBD/12/2022 dan 110/Perj./BPUI/XII/2022 Tanggal 23 Desember 2022 tentang Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil antara PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia. Penyaluran melalui kolaborasi ini dilakukan berdasarkan prinsip governansi korporat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Realisasi dana penyaluran program PUMK IFG sepanjang tahun 2022 dapat dilihat sebagai berikut:

Realisasi Program PUMK Tahun 2022

Realization of MSE Funding Program in 2022

Program Programs	RKA 2022 (Rp) 2022 Work Plan and Budget: (IDR)	Audit 2021 (Rp) 2021 Audit (IDR)	Audit 2021 (Rp) 2021 Audit (IDR)	Capaian (%) Achievement (%)	Pertumbuhan (%) Growth (%)
Penyaluran Pinjaman Program PUMK Distribution of PUMK Program's Loans	-	1.150.000.000	-	-	-100,00%
Penyaluran Program PUMK Kolaborasi BRI Distribution of PUMK Collaboration Program for BRI	1.300.000.000	-	1.300.000.000	100,00%	-
Jumlah Total	1.300.000.000	1.150.000.000	1.300.000.000	100,00%	13,04%

Per 31 Desember 2022, realisasi penyaluran dana PUMK IFG tercatat sebesar Rp1,30 miliar atau 100% dari RKA penyaluran dana PUMK. Capaian tersebut mengalami peningkatan sebesar 13,04% jika dibandingkan dengan tahun 2021.

2. Support the development of MSEs in Indonesia; and
3. Strengthening the financial structure of MSEs to maximize the contribution of MSEs in Indonesia's economic growth.

The objectives to be achieved by the MSE Funding Program are to improve entrepreneurial and managerial skills as well as providing capital loans, improving production capabilities, marketing and others so that the fostered MSEs can become businesses that develop into medium or large businesses which are later expected to cooperate with IFG and holding members.

Before becoming an Insurance, Guarantee and Investment SOE Holding, IFG had implemented the PUMK program by collaborating with its subsidiary, BAV. As for 2022, the Company distributes 100% of micro and small enterprises funding through collaboration with Bank BRI in accordance with the direction of the Ministry of SOEs in the Minutes of the Meeting to Discuss the Work Plan and Budget for the Social and Environmental Responsibility Program for 2022 IFG Number RIS-31/DSI.MBU.B/12/2021. This is reinforced by a directive letter from the Minister of SOEs Number S-721/MBU/11/2022 dated November 10, 2022 concerning Cooperation in Micro and Small Business Funding Programs, in which the Minister of SOEs recommends BRI to SOEs and Companies with Minority State Ownership as the manager of the PUMK Program cooperation.

Realization of MSE Funding in 2022

IFG's MSE funding were distributed in collaboration with BRI on December 29, 2022 in accordance with PKS Number B.45/MBD/12/2022 and 110/Perj./BPUI/XII/2022 Dated December 23, 2022 concerning the Implementation of the Micro and Small Business Funding Program between PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk and the Company (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia. Distribution through this collaboration is carried out based on corporate governance principles and applicable laws and regulations. The realization of funds for the distribution of the IFG PUMK program throughout 2022 can be seen as follows:

As of December 31, 2022, the realization of the distribution of IFG PUMK funds was recorded at IDR 1.30 billion or 100% of the Work Plan and Budget for the distribution of Micro and Small Enterprises Funding. This achievement has increased by 13.04% when compared to 2021.

Realisasi UMK Naik Kelas

Sesuai dengan Surat Kementerian BUMN Nomor S-348/MBU/DSI/11/2020 tanggal 18 November 2020, Mitra Binaan naik kelas adalah Mitra Binaan yang memenuhi minimal 2 (dua) kriteria berikut:

1. Peningkatan jumlah pegawai;
2. Peningkatan nilai pinjaman;
3. Peningkatan kapasitas produksi;
4. Peningkatan omzet;
5. Pelibatan masyarakat sekitar untuk menghasilkan produk;
6. Pemasaran produk di luar kota/negeri; dan
7. Memperoleh sertifikat nasional/internasional.

Realization of MSEs Upgrading

In accordance with the Letter of the Ministry of SOEs Number S-348/MBU/DSI/11/2020 dated November 18, 2020, upgraded Fostered Partners are Fostered Partners who meet at least 2 (two) of the following criteria:

1. Increase in the number of employees;
2. Increase in loan value;
3. Increase in production capacity;
4. Increase in turnover;
5. Involvement of the surrounding community to produce products;
6. Product marketing outside the city/country; and
7. Obtain national/international certificates.

Pada tahun 2022, IFG memiliki 5 (lima) Mitra Binaan naik kelas sebagai berikut:

In 2022, IFG has 5 (five) upgraded Fostered Partners, which are as follow:

No.	Nama Mitra Binaan Name of Fostered Partners	Nilai Pinjaman (Rp) Loans (IDR)	Jenis Usaha Type of Business	Penjelasan Naik Kelas Explanation of Upgrading
1.	Dodih	50.000.000	Pertanian (Sayuran) Farming (Vegetables)	<ul style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Omzet Omzet bulanan mencapai Rp200.000.000,- per bulan dengan margin 5%, terdapat kenaikan sekitar 15%. 2. Peningkatan Kapasitas Produksi Produksi mencapai 3 ton per bulan di mana sebelumnya hanya mencapai 2-2,5 ton. 3. Pemasaran Produk Dalam seminggu ada 3 kali pengiriman baik untuk pasar lokal maupun ekspor. <ul style="list-style-type: none"> 1. Increase in turnover Monthly turnover reached IDR 200,000,000 per month with a 5% margin, an increase of about 15%. 2. Increase in production capacity Production reached 3 tons per month where previously it only reached 2-2.5 tons. 3. Product Marketing In a week there are 3 shipments for both local and export markets.
2.	Bambang Santoso	180.000.000	Perdagangan (Apotek) Trade (Pharmacy)	<ul style="list-style-type: none"> 1. Penambahan Cabang Baru 2. Peningkatan Jumlah Karyawan <ul style="list-style-type: none"> 1. Addition of New Branches 2. Increase in the number of Employees
3.	Irwanto	198.000.000	Perdagangan (Toko Kelontong) Trade (Grocery Store)	<ul style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Omzet 2. Pelibatan Masyarakat Sekitar <ul style="list-style-type: none"> 1. Increase in turnover 2. Neighborhood Community Engagement
4.	Abdul Hamid	150.000.000	Jasa (Percetakan, Fotocopy) Services (Printing, Photocopying)	<ul style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Omzet 2. Memperoleh Sertifikasi untuk Teknisi Reparasi <ul style="list-style-type: none"> 1. Increase in turnover 2. Obtain Certification for Repair Technicians
5.	Yayuk Susanti	250.000.000	Perdagangan (Elektronik) Trade (Electronic)	<ul style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Omzet 2. Peningkatan Kapasitas Produksi (Menjadi Usaha Terbesar di Kecamatan) <ul style="list-style-type: none"> 1. Increase in turnover 2. Increase in Production Capacity (Becoming the Largest Business in the District)

Pelaksanaan Program Creating Shared Value

Selama tahun 2022, IFG melaksanakan 3 (tiga) program TJSV yang mendukung bisnis inti dan menciptakan Creating Share Value (CSV) bagi Perusahaan. Perbandingan antara target dengan realisasi anggaran serta dampak kegiatan TJSV terkait program CSV disampaikan dalam tabel berikut:

Implementation of Creating Shared Value Program

During 2022, IFG implemented 3 (three) TJSV programs that support the core business and create Creating Share Value (CSV) for the Company. The comparison between the target and budget realization as well as the impact of TJSV activities related to the CSV program is presented in the following table:

No.	Program Programs	RKA 2022 (Rp) 2022 Work Plan and Budget: (IDR)	Audit 2022 (Rp) 2022 Audit (IDR)	Capaian (%) Achievement (%)	Dampak Program Impact of the Program
1.	Insurance Goes to Campus*	450.000.000	193.140.000	42,92%	<p>Sebanyak 200 (dua ratus) orang mahasiswa Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam di Universitas Indonesia mengikuti seminar offline dengan format talkshow dengan tema "Life after Graduation" mengundang narasumber dengan latar belakang Asuransi, Entrepreneur, dan Life Coach.</p> <p>Dampak bagi Penerima Manfaat: Menambah wawasan mahasiswa terkait proteksi asuransi, memberikan informasi terkait kesempatan kerja, work-life balance dan corporate culture di perusahaan asuransi.</p> <p>Dampak bagi Perusahaan: Peningkatan awareness mahasiswa terkait produk asuransi terutama produk anggota holding IFG sehingga memperluas potensi pasar produk anggota holding IFG, meningkatkan minat mahasiswa untuk bekerja di industri asuransi, khususnya di anggota holding IFG, dan penggunaan aplikasi Life by IFG oleh mahasiswa.</p> <p>A total of 200 (two hundred) students of the Mathematics Faculty and Natural Sciences at the University of Indonesia attended an offline seminar with a talk show format, themed "Life after Graduation" inviting speakers with backgrounds in Insurance, Entrepreneur, and Life Coach.</p> <p>Impact on Beneficiaries: Add students' insights related to insurance protection, provide information related to job opportunities, work-life balance and corporate culture in insurance companies.</p> <p>Impact to the Company: Increased student awareness related to insurance products, especially IFG holding member products so as to expand the market potential of IFG holding member products, increase student interest in working in the insurance industry, especially in IFG holding members, and the use of Life by IFG applications by students.</p>
2.	Korporatisasi UMKM MSME Corporatization	700.000.000	731.452.573	104,49%	<p>Melalui payung program Korporatisasi UMKM, pada tahun 2022 IFG bersama BAV melakukan pembinaan 100 (seratus) UMK Binaan IFG dan umum bertajuk "Program Kurasi dan Inkubasi Mitra Binaan Unggulan" yang berlangsung mulai triwulan IV 2022 sampai dengan triwulan III 2023.</p> <p>Dampak bagi Penerima Manfaat: Perluasan pasar UMKM di ranah domestik (onboarding ke berbagai platform komersial terutama e-commerce), perluasan pasar ekspor melalui program pemantapan ekspor, peningkatan kapasitas produksi, dan sertifikasi, kemasan.</p> <p>Dampak bagi Perusahaan: Perluasan pangsa pasar anggota holding IFG yang bergerak di bidang KUR maupun asuransi terkait UMK.</p>



No.	Program Programs	RKA 2022 (Rp) 2022 Work Plan and Budget: (IDR)	Audit 2022 (Rp) 2022 Audit (IDR)	Capaian (%) Achievement (%)	Dampak Program Impact of the Program
					<p>Through the umbrella of the MSME Corporatization program, in 2022 IFG together with BAV fostered 100 (one hundred) IFG-assisted MSEs and the public titled "Curation and Incubation Program for Featured Fostered Partners" which took place from the fourth quarter of 2022 to the third quarter of 2023.</p> <p>Impact on Beneficiaries: Expansion of the MSME market in the domestic sphere (onboarding to various commercial platforms, especially e-commerce), expansion of the export market through export stabilization programs, increasing production capacity, and certification, packaging.</p> <p>Impact to the Company: Expansion of the market share of IFG holding members engaged in People's Business Credit (KUR) and insurance related to MSEs.</p>
3.	Program Kindness to Progress* Kindness To Progress Program*	300.000.000	182.008.582	60,67%	<p>Program Kindness to Progress melibatkan anggota holding yang menginisiasi program penyelarasan nilai pribadi dengan nilai AKHLAK menggunakan konsep belajar bersama masyarakat yang dibalut dalam proyek sosial, untuk membangun semangat Insan IFG untuk memberikan kontribusi terbaik baik di lingkungan pekerjaan maupun masyarakat dan meningkatkan sense of belonging antar karyawan.</p> <p>Dampak bagi Penerima Manfaat: Memperoleh physical capital berupa terbangunnya perpustakaan desa dan perbaikan sarana dan prasarana Lapangan Volley, peningkatan kualitas human capital dalam bentuk edukasi literasi keuangan bagi 25 (dua puluh lima) ibu-ibu PKK dan 27 (dua puluh tujuh) anggota kelompok tani, (penguanan financial capital dengan lahirnya potensi ekonomi dalam bentuk olahan keripil sawi oleh-oleh khas Desa Sumberejo, dan peningkatan kapasitas produksi melalui bantuan 5 (lima) unit alat cultivator kepada kelompok tani, dan 5 (lima) unit alat produksi teh bit oven OVL).</p> <p>Dampak bagi Perusahaan: Pasca program internalisasi nilai rata-rata AKHLAK karyawan partisipan meningkat dari 4,27 menjadi 4,57 (skala 1 (satu) sampai dengan 5 (lima)) terkait persepsi diri dalam penerapan kompetensi AKHLAK, meningkatnya sense of belonging dan loyalitas karyawan melalui aktualisasi diri, dan meningkatkan persepsi masyarakat terhadap IFG.</p> <p>Hasil Social Return on Investment: 1,82 (Kajian Senyum Untuk Negeri)</p>

No.	Program Programs	RKA 2022 (Rp) 2022 Work Plan and Budget: (IDR)	Audit 2022 (Rp) 2022 Audit (IDR)	Capaian (%) Achievement (%)	Dampak Program Impact of the Program
					<p>The Kindness to Progress program involves holding members who initiate a program to align personal values with AKHLAK values using the concept of learning with the community wrapped in social projects, to build the spirit of IFG People to make the best contribution both in the work environment and community and increase the sense of belonging among employees.</p> <p>Impact on Beneficiaries: Obtaining physical capital in the form of constructing village library and repairing Volley Field facilities and infrastructure, improving the quality of human capital in the form of financial literacy education for 25 (twenty-five) Family Welfare Empowerment (PKK) women and 27 (twenty-seven) farmer group members, (strengthening financial capital with the birth of economic potential in the form of processed mustard chips as souvenirs typical of Sumberejo Village, and increasing production capacity through the assistance of 5 (five) units of cultivator equipment to farmer groups, and 5 (five) units of OVL oven beet tea production equipment.</p> <p>Impact to the Company: After the internalization program, the average AKHLAK score of participating employees increased from 4.27 to 4.57 (scale 1 (one) to 5 (five)) related to self-perception in the application of AKHLAK competencies, increased sense of belonging and employee loyalty through self-actualization, and improved public perception of IFG.</p> <p>Social Return on Investment: 1.82 (Senyum Untuk Negeri Study)</p>
	Jumlah Total	5.000.000.000	4.342.767.398	86,86%	

*^a) Biaya yang dimasukkan hanya yang menggunakan anggaran TJSI IFG.
*) Costs included are only those using IFG's TJSI budget.

Implementasi TJSI dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan {TPB} [OJK F.25]

IFG melaksanakan berbagai kegiatan TJSI BUMN yang bersentuhan langsung dengan upaya untuk memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, sesuai dengan POJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan, maka Perseroan telah melakukan pemetaan pelaksanaan TJSI tahun 2022 dengan pencapaian 17 (Tujuh Belas) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) di Indonesia. Dalam hal ini, Perseroan menyusun prioritas TPB atau Sustainable Development Goals (SDGs) dengan menganalisis risiko dan dampak yang ditimbulkan dari kegiatan-kegiatan TJSI tersebut. Pada tahun 2022, implementasi program TJSI telah mendukung 8 TPB, yaitu TPB ke-1, 3, 4, 8, 10, 11, 15 dan ke-16. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan Perseroan, pelaksanaan berbagai program/kegiatan TJSI tersebut membawa manfaat positif bagi masyarakat sebagai penerima manfaat program. [OJK F.23]

Implementation of TJSI and Sustainable Development Goals (SDGs) [OJK F.25]

IFG implements various SOE TJSI activities that are in direct contact with efforts to empower and improve community welfare. Furthermore, in accordance with POJK No. 51/POJK.03/2017 on the Implementation of Sustainable Finance for Financial Services Institutions, Issuers and Companies, the Company has mapped the implementation of TJSI in 2022 with the achievement of 17 (Seventeen) Sustainable Development Goals (SDGs) in Indonesia. In this case, the Company prioritizes the SDGs by analyzing the risks and impacts of the TJSI activities. In 2022, the implementation of the TJSI program has supported 8 SDGs, namely the 1st, 3rd, 4th, 8th, 10th, 11th, 15th and 16th SDGs. Based on the evaluation conducted by the Company, the implementation of various TJSI programs/activities brought positive benefits to the community as the beneficiaries of the program. [OJK F.23]



Pengaduan Masyarakat [OJK F.24]

IFG menyadari bahwa operasional bisnis yang dilakukan berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat dan lingkungan di sekitarnya. Namun demikian, Perseroan telah semaksimal mungkin untuk mencegah terjadinya dampak negatif tersebut. Sebagai bentuk tanggung jawab apabila terjadi dampak negatif, Perseroan telah menyediakan saluran pengaduan melalui telepon, faksimile, email, website/situs, whistleblowing system, atau menyampaikan secara langsung ke kantor operasional IFG.

Keluhan atau pengaduan yang disampaikan tidak terbatas mengenai dampak operasional perusahaan, tapi boleh juga menyampaikan tentang berbagai hal yang dinilai bertentangan dengan etika, integritas, norma-norma dan dugaan pelanggaran peraturan atau tindakan yang mengganggu lingkungan hidup. Walau Perseroan sudah menyediakan saluran pengaduan, namun selama tahun 2022, tidak terdapat pengaduan dari masyarakat yang masuk dan ditujukan kepada IFG. [OJK F.24]

Tanggung Jawab Produk kepada Konsumen

Nasabah/konsumen merupakan salah satu pemangku kepentingan utama bagi perusahaan yang bergerak di bidang asuransi, penjaminan dan asuransi. Keberadaan dan kepercayaan mereka sangat menentukan perkembangan dan keberlangsungan perusahaan ke depan. Namun demikian, dalam posisinya sebagai Holding BUMN Asuransi dan Penjaminan, IFG tidak berhubungan secara langsung dengan nasabah/konsumen. Selain itu, Perseroan juga tidak memiliki produk/jasa yang ditawarkan kepada konsumen. Dalam hal ini, hubungan secara langsung, termasuk penawaran produk/jasa dilakukan oleh anggota holding. Dengan demikian, pengungkapan tentang pentingnya perlakuan setara kepada nasabah/konsumen, inovasi produk/jasa, produk yang sudah dievaluasi keamanannya, dampak produk/jasa, produk/jasa yang ditarik kembali, maupun survei kepuasan nasabah/konsumen, tidak bisa disampaikan dalam laporan ini. Informasi dan data terkait pengungkapan tersebut disampaikan dalam laporan keberlanjutan anggota holding. [OJK F.17, F.23, F.26, F.27, F.28, F.29 dan F.30]

Public Complaints [OJK F.24]

IFG realizes that its business operations have the potential to cause negative impacts on the surrounding community and environment. However, the Company has made every effort to prevent such negative impacts. As a form of responsibility in the event of a negative impact, the Company has provided a complaint channel via telephone, fax, email, website, whistleblowing system, or submitting directly to IFG's operational office.

Complaints submitted are not limited to the impact of company operations, but may also convey various matters that are considered contrary to ethics, integrity, norms and alleged violations of regulations or actions that disturb the environment. Even though the Company has provided a complaint channel, during 2021, there were no complaints from the public that came in and were addressed to IFG. [OJK F.24]

Consumers Product Responsibilities

Customers/consumers are one of the main stakeholders for companies engaged in insurance, guarantee and insurance. Their existence and trust determine the development and sustainability of the company in the future. However, in its position as a Holding SOE of Insurance and Guarantee, IFG does not deal directly with customers/consumers. In addition, the Company also does not have products/services offered to consumers. In this case, direct relationships, including product/service offerings are carried out by the holding members. Thus, disclosures on the importance of equal treatment to customers/consumers, product/service innovations, products that have been evaluated for safety, product/service impacts, recalled products/services, as well as customer/consumer satisfaction surveys, cannot be presented in this report. Information and data related to these disclosures are presented in the sustainability reports of the holding members. [OJK F.17, F.23, F.26, F.27, F.28, F.29 and F.30]

VERIFIKASI TERTULIS DARI PIHAK INDEPENDEN [OJK G.1]

WRITTEN VERIFICATION FROM INDEPENDENT PARTIES [OJK G.1]

Laporan Keberlanjutan ini belum diperiksa oleh Penyedia Jasa Assurance (Assurance Services Provider) yang independen. Namun demikian, Indonesia Financial Group (IFG) menjamin bahwa seluruh informasi yang diungkapkan dalam laporan ini adalah benar, akurat, dan faktual.

This Sustainability Report has not been verified by an independent Assurance Services Provider. However, Indonesia Financial Group (IFG) guarantees that all information disclosed in this report is true, accurate and factual.

LEMBAR UMPAN BALIK [OJK G.2]

FEEDBACK SHEET [OJK G.2]

Terima kasih kepada Bapak/Ibu/Saudara yang telah membaca Laporan Keberlanjutan Indonesia Financial Group (IFG) Tahun 2022. Untuk meningkatkan isi Laporan Keberlanjutan pada tahun-tahun mendatang, kami berharap Bapak/Ibu/Saudara bersedia untuk mengisi Lembar Umpan Balik ini dengan melingkari salah satu jawaban dan mengisi titik-titik yang tersedia, kemudian mengirimkannya kepada kami.

1. Laporan Keberlanjutan ini sudah memberikan informasi yang jelas mengenai kinerja ekonomi, sosial dan lingkungan yang dilakukan oleh Perusahaan:
a. Setuju b. Tidak Setuju c. Tidak tahu
2. Laporan Keberlanjutan ini sudah memberikan informasi yang jelas mengenai pemenuhan tanggung jawab sosial dan lingkungan Perusahaan:
a. Setuju b. Tidak Setuju c. Tidak tahu
3. Materi dan data dalam Laporan Keberlanjutan ini mudah dimengerti dan dipahami.
a. Setuju b. Tidak Setuju c. Tidak tahu
4. Materi dan data dalam Laporan Keberlanjutan ini sudah cukup lengkap.
a. Setuju b. Tidak Setuju c. Tidak tahu
5. Apakah desain, tata letak, grafis dan foto-foto dalam Laporan Keberlanjutan ini sudah bagus?
a. Sudah bagus b. Belum bagus c. Tidak tahu
6. Informasi apa yang paling bermanfaat dari Laporan Keberlanjutan ini?
.....
7. Informasi apa yang dinilai kurang bermanfaat dari Laporan Keberlanjutan ini?
.....
8. Informasi apa yang dinilai masih kurang dari Laporan Keberlanjutan ini dan perlu ditambahkan pada Laporan Keberlanjutan mendatang?
.....

Thank you to those of you who have read the Indonesia Financial Group (IFG) Sustainability Report 2022. To improve the content of the Sustainability Report in the coming years, we hope that you are willing to fill out this Feedback Sheet by circling one of the following answers and filling in the blanks in the space provided. After that, you can send it to us.

1. This Sustainability Report has provided clear information regarding the Company's economic, social and environmental performance:
a. Agree b. Disagree c. Do not know
2. This Sustainability Report has provided clear information regarding the fulfillment of the Company's social and environmental responsibilities:
a. Agree b. Disagree c. Do not know
3. The material and data in this Sustainability Report are easy to understand.
a. Agree b. Disagree c. Do not know
4. The material and data in this Sustainability Report are fairly extensive.
a. Agree b. Disagree c. Do not know
5. Do you think the designs, layouts, graphics and photos in this Sustainability Report good?
a. Good b. Not Good c. Do not know
6. What is the most useful information from this Sustainability Report?
.....
7. What information is considered less useful from this Sustainability Report?
.....
8. What information is missing from this Sustainability Report and needs to be added in next Sustainability Reports?
.....

**Identitas Pengirim:**

Nama :

Email :

Identifikasi menurut kategori pemangku kepentingan (beri tanda / yang sesuai):

- Pelanggan/Konsumen
- Pemegang saham
- Pemerintah dan Otoritas Keuangan
- Pegawai/Karyawan
- Mitra Kerja/Pemasok
- Organisasi Kemasyarakatan/Organisasi Sosial/Lembaga Swadaya Masyarakat
- Media massa
- Lainnya

Mohon Lembar Umpan Balik ini dikirimkan ke:

Corporate Secretary
Indonesia Financial Group (IFG)
Gedung Graha CIMB Niaga, 18th Floor
Jl. Jendral Sudirman Kav. 58 RT 5/RW 3, Senayan, Kebayoran Baru
Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12190
Telp. : (+62 21) 2505080
Surel : cs@ifg.id
Website Perusahaan: www.ifg.id

Sender Identity

Name :

Email :

Stakeholder category (give a check mark / on the option below that describes you)

- Customers/Consumers
- Shareholders
- Government and Financial Authority
- Staff/Employees
- Partners/Suppliers
- Community Organizations/Social Organizations/Non-Governmental Organizations
- Mass Media
- Others

Please send this Feedback Sheet to:

Corporate Secretary
Indonesia Financial Group (IFG)
Gedung Graha CIMB Niaga, 18th Floor
Jl. Jendral Sudirman Kav. 58 RT 5/RW 3, Senayan, Kebayoran Baru
South Jakarta, DKI Jakarta 12190
Phone : (+62 21) 2505080
Email: cs@ifg.id
Company Website : www.ifg.id

TANGGAPAN TERHADAP UMPAN BALIK LAPORAN TAHUN SEBELUMNYA [OJK G.3]

RESPONSE TO PREVIOUS YEAR REPORT FEEDBACK [OJK G.3]

Selama tahun 2022, Indonesia Financial Group (IFG) tidak menerima tanggapan dari para pemangku kepentingan, termasuk regulator, terkait isi Laporan Keberlanjutan tahun 2020. Namun demikian, Perseroan berkomitmen untuk menyempurnakan isi dan format laporan agar sesuai dengan panduan, yaitu POJK No.51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuanga Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik.

During 2022, Indonesia Financial Group (IFG) did not receive any response from stakeholders, including regulators, regarding the contents of the 2020 Sustainability Report. However, the Company is committed to improving the content and format of the report to comply with the guidelines, namely POJK No.51/POJK.03/2017 concerning the Implementation of Sustainable Finance for Financial Services Institutions, Issuers and Public Companies.

VERIFIKASI TERTULIS DARI PIHAK INDEPENDEN

[OJK G.1]

WRITTEN VERIFICATION FROM INDEPENDENT PARTIES [OJK G.1]

No Indeks	Nama Indeks	Hal. Pg.
No Index	Index Name	
Strategi Keberlanjutan Sustainability Strategies		
A.1	Penjelasan Strategi Keberlanjutan Explanation of Sustainability Strategies	
Ikhtisar Kinerja Aspek Keberlanjutan Highlights of Sustainability Aspect Performance		
B.1	Aspek Ekonomi, paling sedikit memuat: Economic Aspects, contains at least:	
B.2	Aspek Lingkungan Hidup Environmental Aspect	
B.3	Aspek Sosial Social Aspect	
Profil Perusahaan Company Profile		
C.1	Visi, Misi, dan Nilai Keberlanjutan Vision, Mission, and Sustainability Values	
C.2	Alamat Perusahaan Company's Address	
C.3	Skala Usaha, paling sedikit memuat: a. total aset atau kapitalisasi aset dan total kewajiban; b. jumlah karyawan menurut jenis kelamin, jabatan, usia, pendidikan, dan status ketenagakerjaan; c. nama pemegang saham dan persentase kepemilikan saham; dan d. wilayah operasional. Scale of Organization, contains at least: a. total assets or capitalization of assets and total liabilities; b. number of employees by gender, position, age, education, and employment status; c. names of shareholders and percentage of share ownership; and d. operational area.	
C.4	Produk, Layanan, dan Kegiatan Usaha yang Dijalankan Products, Services, and Business Activities Carried Out	
C.5	Keanggotaan pada Asosiasi Membership in Associations	
C.6	Perubahan Emiten dan Perusahaan Publik yang Bersifat Signifikan Significant Changes to the Company	
Penjelasan Direksi Explanation of the Board of Directors		
D.1	Penjelasan Direksi Explanation of the Board of Directors	
Tata Kelola Keberlanjutan Sustainability Governance		
E.1	Penanggungjawab Penerapan Keuangan berkelanjutan Person-In-Charge for the Implementation of Sustainable Finance	
E.2	Pengembangan Kompetensi Terkait Keuangan Berkelanjutan Competency Development Related to Sustainable Finance	



No Indeks No Index	Nama Indeks Index Name	Hal. Pg.
E.3	Penilaian Risiko Atas Penerapan Keuangan berkelanjutan Risk Assessment of the Implementation of Sustainable Finance	
E.4	Hubungan dengan Pemangku Kepentingan Relations with Stakeholders	
E.5	Permasalahan terhadap Penerapan Keuangan berkelanjutan Problems with the Implementation of Sustainable Finance	
Kinerja Keberlanjutan Sustainable Performance		
F.1	Kegiatan Membangun Budaya Keberlanjutan Activities to Build a Culture of Sustainability	
Kinerja Ekonomi Economic Performance		
F.2	Perbandingan Target dan Kinerja Produksi, Portofolio, Target Pembiayaan, atau Investasi, Pendapatan dan Laba Rugi Comparison of Target and Production Performance, Portfolio, Financing Target, or Investment, Income and Profit and Loss	
F.3	Perbandingan Target dan Kinerja Portofolio, Target Pembiayaan, atau Investasi Pada Instrumen Keuangan atau Proyek yang Sejalan dengan Penerapan Keuangan Berkelanjutan Comparison of Target and Portfolio Performance, Financing Targets, or Investments in Financial Instruments or Projects that are in line with the Implementation of Sustainable Finance.	
Kinerja Lingkungan Hidup Environmental Performance		
Aspek Umum General Aspect		
F.4	Biaya Lingkungan Hidup Environmental Cost	
Aspek Material Material Aspect		
F.5	Penggunaan Material yang Ramah Lingkungan Use of Environmentally Friendly Materials	
Aspek Energi Energy Aspect		
F.6	Jumlah dan Intensitas Energi yang Digunakan The Amount and Intensity of Energy Used	
F.7	Upaya dan Pencapaian Efisiensi Energi dan Penggunaan Energi Terbarukan Efforts and Achievement of Energy Efficiency and the Use of Renewable Energy Sources	
Aspek Air Water Aspect		
F.8	Penggunaan Air Water Consumption	
Aspek Keanekaragaman Hayati Biodiversity Aspects		
F.9	Dampak dari Wilayah Operasional yang Dekat atau Berada di Daerah Konservasi atau Memiliki Keanekaragaman Hayati Impact of Operational Areas that Are Near or Located in Conservation Areas or Have Biodiversity	
F.10	Usaha Konservasi Keanekaragaman Hayati Biodiversity Conservation Efforts Carried Out	
Aspek Emisi Emission Aspect		
F.11	Jumlah dan Intensitas Emisi yang Dihasilkan Berdasarkan Jenisnya (Cakupan 1, 2 dan 3) The Amount and Intensity of Emissions Produced by Type (Scope 1, 2, and 3)	

No Indeks No Index	Nama Indeks Index Name	Hal. Pg.
F.12	Upaya dan Pencapaian Pengurangan Emisi yang Dilakukan Efforts and Achievement of Emissions Reductions Carried Out	
Aspek Limbah dan Efluen Waste and Effluent Aspects		
F.13	Jumlah Limbah dan Efluen yang Dihasilkan Berdasarkan Jenis The Amount of Waste and Effluent Produced by Type	
F.14	Mekanisme Pengelolaan Limbah dan Efluen The Mechanism of Waste and Effluent Management	
F.15	Tumpahan yang Terjadi (Jika Ada) Spills that Occur (If Any)	
Aspek Pengaduan Terkait Lingkungan Hidup Aspects of Complaints Related to the Environment		
F.16	Jumlah dan Materi Pengaduan Lingkungan Hidup yang Diterima dan Diselesaikan The Number and Material of Environmental Complaints Received and Resolved	
Kinerja Sosial Social Performance		
F.17	Komitmen LJK, Emiten, atau Perusahaan Publik untuk Memberikan Layanan Atas Produk dan/atau Jasa yang Setara Kepada Konsumen FSI, Issuer or Publicly Listed Company Commitment to Providing Services for the Equal Product and/or Services to Customers	
Aspek Ketenagakerjaan Employment Aspects		
F.18	Kesetaraan Kesempatan Bekerja Equal Opportunity to Work	
F.19	Tenaga Kerja Anak dan Tenaga Kerja Paksa Child Labor and Forced Labor	
F.20	Upah Minimum Regional Regional Minimum Wage	
F.21	Lingkungan Bekerja yang Layak Dan Aman Decent And Safe Work Environment	
F.22	Pelatihan dan Pengembangan Kemampuan Pegawai Decent And Safe Work Environment	
Aspek Masyarakat Community Aspect		
F.23	Dampak Operasi Terhadap Masyarakat Sekitar The Impact of Operations on the Surrounding Communities	
F.24	Pengaduan Masyarakat Public Complaints	
F.25	Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) Environmental Social Responsibility (TJSL) Activities	
Tanggung Jawab Pengembangan Produk/Jasa BerkelaJutan Responsibilities Regarding Sustainable Product/Service Development		
F.26	Inovasi dan Pengembangan Produk/Jasa Keuangan berkelanjutan Innovation and Development of Sustainable Financial Products/Services	
F.27	Produk/Jasa yang Sudah Dievaluasi Keamanannya Bagi Pelanggan Products/Services that Have Been Evaluated for Safety for Customers	
F.28	Dampak Produk/Jasa Product/Service Impact	
F.29	Jumlah Produk yang Ditarik Kembali Number of Products Recall	



No Indeks No Index	Nama Indeks Index Name	Hal. Pg.
F.30	Survei Kepuasan Pelanggan terhadap Produk dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan Customer Satisfaction Survey on Sustainable Financial Products and/or Services	
Lain-lain Miscellaneous		
G.1	Verifikasi Tertulis dari Pihak Independen (jika Ada) Written Verification from Independent Parties (if any)	
G.2	Lembar Umpan Balik Feedback Sheet	
G.3	Tanggapan terhadap Umpan Balik Laporan Keberlanjutan Tahun Sebelumnya Response to Previous Year's Sustainability Report Feedback	
G.4	Daftar Pengungkapan Sesuai POJK 51/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik List of Disclosures in accordance with POJK 51/2017 regarding the Implementation of Sustainable Finance for Financial Service Institutions, Issuers, and Public Companies	

